BADAN POM

LAKIP TAHUN 2025



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

#d3a971

KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Samarinda dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan *(sustainable and continuing improvement)* berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda selanjutnya.

Samarinda, 27 Februari 2026
Kepala Balai Besar POM di Samarinda



Adung Kurniawan, ST.
NIP. 19820216 200501 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR/SAMBUTAN			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
DAFTAR GAMBAR			xv
RINGKASAN EKSEKUTIF			xxi
HIGHLIGHT KINERJA			xvii
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Gambaran Umum Organisasi	2
	1.3	Struktur Organisasi	2
	1.4	Isu Strategis	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA		17
	2.1	Uraian Singkat Renstra	17
	2.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	28
	2.3	Perjanjian Kinerja	30
	2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	36
	2.5	Metode Pengukuran	46
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA		51
	3.1	Capaian Kinerja Organisasi	51
	3.2	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	406
	3.3	Pemanfaatan Informasi Kinerja	418
	3.4	Realisasi Anggaran	446
BAB IV	PENUTUP		463
	4.1	Kesimpulan	463
	4.2	Saran	226

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Rincian Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
1.2	Kendaraan Dinas BBPOM di Samarinda	14
1.3	Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan	15
1.4	Area Cakupan Pengawasan Balai Besar POM di Samarinda	16
2.1	Rencana Kinerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025	29
2.2	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025	32
2.3	Revisi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025	34
2.4	Tabel RAPK	37
2.5	Tabel Revisi RAPK	42
2.6	Kategori Capaian IKU	47
2.7	Kategori Capaian IKU Terhadap Target Tahunan	48
2.8	Predikat NKO	49
3.1	Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025	51
3.2	Matriks NKO Tahun 2025	51
3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Terhadap Target Tahun 2025	56
3.4	Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025	62
3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)	64
3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	65
3.7	Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2026	68

DAFTAR TABEL

3.8 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 71

3.9 Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 73

3.10 Capaian Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Terhadap Tahun 2025 78

3.11 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 79

3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 80

3.13 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 82

3.14 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 82

3.15 Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 84

3.16 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025 88

3.17 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 90

3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 90

3.19 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 93

3.20 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 96

3.21 Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 98

3.22 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Terhadap Target Tahun 2025 103

3.23 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji 104

DAFTAR TABEL

sesuai standar Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster4.) dan Target Nasional 104

3.25 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 105

3.26 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 106

3.27 Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 107

3.28 Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025 109

3.29 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 112

3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 112

3.31 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 115

3.32 Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 117

3.33 Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Terhadap Target Tahun 2025 121

3.34 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 122

3.35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 123

3.36 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti 124

3.37 Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti 125

DAFTAR TABEL

3.38 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025 129

3.39 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 131

3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 131

3.41 Matriks Rekomendasi Triwulan 4 133

3.42 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 133

3.43 Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 134

3.44 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025 137

3.45 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 139

3.46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 139

3.47 Matriks Rekomendasi Triwulan 4 141

3.48 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 141

3.49 Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 142

3.50 Capaian Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025 147

3.51 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 148

DAFTAR TABEL

3.52 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 148

3.53 Matriks Rekomendasi Triwulan 4 150

3.54 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 150

3.55 Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 153

3.56 Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025 157

3.57 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 158

3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 158

3.59 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 160

3.60 Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 163

3.61 Capaian Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025 167

3.62 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 169

3.63 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 169

3.64 Matriks Rekomendasi Triwulan 4 170

3.65 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 171

3.66 Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 172

3.67 Capaian Indikator Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang 175

DAFTAR TABEL

diawasi sesuai standar Terhadap Target Tahun 2025

3.68 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 177

3.69 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 177

3.70 Matriks Rekomendasi Triwulan 4 179

3.71 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 179

3.72 Efiensi Anggaran pada Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 180

3.73 Capaian Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Terhadap Target Tahun 2025 183

3.74 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 184

3.75 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 185

3.76 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 186

3.77 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 187

3.78 Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 188

3.79 Capaian Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Panganolahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Terhadap Target Tahun 2025 192

3.80 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Panganolahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 193

3.81 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster4) dan Target Nasional 194

3.82 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 196

DAFTAR TABEL

3. 83	Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	196
3.84	Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	199
3.85	Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan AmanTerhadap Tahun 2025	205
3.86	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)	207
3.87	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	208
3.88	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	210
3.89	Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	211
3.90	Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	212
3.91	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 Terhadap Tahun 2025	214
3.92	Capaian Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025	216
3.93	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)	217
3.94	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	217
.3.95	Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	218
3.96	Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	219
3.97	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 Terhadap Target Tahun 2025	221
3.98	Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Terhadap Target Tahun 2025	222

DAFTAR TABEL

3.99	Interpretasi Efektifitas KIE	223
3.100	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)	225
3.101	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	225
3.102	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	230
3.103	Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	232
3.104	Efiensi Anggaran pada Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	234
3.105	Capaian Indikator Kinerja dan Target Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025	237
3.106	Capaian Indikator Kinerja dan Target Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025	240
3.107	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	243
3.108	Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	245
3.109	Efiensi Anggaran pada Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	246
3.110	Capaian Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman Terhadap Target Tahun 2025	248
3.111	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	251
3.112	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	255
3.113	Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman	255
3.114	Efiensi Anggaran pada Indikator Jumlah desa pangan aman	257
3.115	Capaian Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Terhadap Target Tahun 2025	260
3.116	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster ...) dan Target Nasional	263

DAFTAR TABEL

3.117	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	268
3.118	Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	269
3.119	Efiensi Anggaran pada Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	270
3.120	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 Terhadap Target Tahun 2025	273
3.121	Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Terhadap Target Tahun 2025	276
3.122	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)	278
3.123	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	278
3.124	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	281
3.125	Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	281
3.126	Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	283
3.127	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5 Terhadap Target Tahun 2025	286
3.128	Capaian Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	287
3.129	Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda Terhadap Target Tahun 2025	288
3.130	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)	289
3.131	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	290
3.132	Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025	292
3.133	Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda	293

DAFTAR TABEL

3.134 Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda 297

3.135 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7 Terhadap Target Tahun 2025 300

3.136 Capaian Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 302

3.137 Capaian Pemetaan Kerawanan Kejahatan Tahun 2025 303

3.138 Evaluasi Atas Penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 304

3.139 Rekomendasi Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 304

3.140 Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Terhadap Target Tahun 2025 308

3.141 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 309

3.142 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 310

3.143 Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025 313

3.144 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar 315

3.145 Efisiensi Anggaran pada Indikator Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar 316

3.146 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7 Terhadap Target Tahun 2025 319

3.147 Kategori Indeks Pelayanan Publik 320

3.148 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda Terhadap Target Tahun 2025 321

3.149 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 324

3.150 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 324

3.151 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 330

3.152 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda 333

DAFTAR TABEL

3.153 Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda 335

3.154 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8 Terhadap Target Tahun 2025 338

3.155 Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda Terhadap Target Tahun 2025 340

3.156 Rincian Hasil Evaluasi Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda 340

3.157 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 342

3.158 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 343

3.159 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 346

3.160 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda 349

3.161 Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda 354

3.162 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda Terhadap Target Tahun 2025 359

3.163 Rincian Hasil Evaluasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 359

3.164 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 361

3.165 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 361

3.166 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 364

3.167 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda 368

3.168 Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda 372

3.169 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda Terhadap Target Tahun 2025 380

3.170 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 381

3.171 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 382

3.172 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 385

DAFTAR TABEL

3.173 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda 386

3.174 Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda 390

3.175 Kategori Tingkat Maturitas 394

3.176 Indeks Maturitas Manajemen Risiko 394

3.177 Penilaian Indeks Maturitas Manajemen Risiko 395

3.178 Capaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda Terhadap Target Tahun 2025 396

3.179 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) 398

3.180 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional 398

3.181 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 400

3.182 Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda 401

3.183 Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda 403

3.184 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 406

3.185 Alokasi Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Samarinda Tahun 2025 446

3.186 Alokasi Anggaran per Jenis Belanja BBPOM di Samarinda Tahun 2025 448

3.187 Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output s.d Tahun 2025 448

3.188 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan s.d Tahun 2025 450

3.189 Mapping Program/Kegiatan RO terhadap Capaian Indikator Kinerja 451

3.190 Range Tingkat Efisiensi 455

3.191 Tingkat efisiensi anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2025 455

3.192 Tingkat Efisiensi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2025 456

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Cakupan Pengawasan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	2
1.2	Struktur Organisasi Balai Besar POM di Samarinda	3
1.3	Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
1.4	Profil Pola Transportasi Tahun 2025	16
3.1	Perbandingan NKO Balai Besar POM di Samarinda per Triwulan	55
3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025	62
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025	64
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	65
3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025	78
3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO per Triwulan Tahun 2025	79
3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	80
3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025	88
3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025	89
3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4)	91

DAFTAR GAMBAR

	dan Target Nasional	
3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025	102
3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar per Triwulan Tahun 2025	103
3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	104
3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025	109
3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025	111
3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	113
3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025	121
3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2021-2025	122
3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	123
3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025	129
3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025	130

DAFTAR GAMBAR

3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 5) dan Target Nasional	131
3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025	137
3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025	138
3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	139
3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025	146
3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025	147
3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 5) dan Target Nasional	148
3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025	156
3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025	157
3.31	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	159
3.32	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025	167
3.33	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025	168
3.34	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 5) dan Target Nasional	169
3.35	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025	175
3.36	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar per Triwulan Tahun 2025	176

DAFTAR GAMBAR

3.37	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 5) dan Target Nasional	177
3.38	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025	183
3.39	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025	184
3.40	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	185
3.41	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025	191
3.42	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025	192
3.43	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	193
3.44	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025	205
3.45	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	208
3.46	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025	215
3.47	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025	216
3.48	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	217
3.49	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025	222
3.50	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 5) dan Target Nasional	226
3.51	Efiensi Anggaran pada Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	236
3.52	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4)	240

DAFTAR GAMBAR

	dan Target Nasional	
3.53	Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah desa pangan aman Terhadap Target Tahun 2025	248
3.54	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	251
3.55	Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Terhadap Target Tahun 2025	260
3.56	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	263
3.57	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025	276
3.58	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2021-2025	277
3.59	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 5) dan Target Nasional	279
3.60	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025	288
3.61	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	290
3.62	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025	307
3.63	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar per Triwulan Tahun 2025	308
3.64	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	310
3.65	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025	321
3.66	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2021-2025	323
3.67	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	325

DAFTAR GAMBAR

3.68	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025	340
3.69	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2021-2025	342
3.70	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	343
3.71	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025	358
3.72	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2021-2025	360
3.73	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	362
3.74	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025	380
3.75	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2021-2025	381
3.76	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 5) dan Target Nasional	382
3.77	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025	396
3.78	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional	399

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Samarinda merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik, sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2025 mempunyai makna strategis sebagai momentum pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk mencapai target akhir Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2025-2029. Kinerja yang belum tercapai perlu didorong upaya percepatan dan yang telah tercapai perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan sehingga seluruh target kinerja yang tertuang dalam Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2025-2029 dapat tercapai di akhir Tahun 2025.

KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 sebesar **103.09%**, masuk dalam kategori **Istimewa**. BBPOM di Samarinda memiliki 8 sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja. Pencapaian sasaran kegiatan Tahun 2025 dari 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan hasil 16 (enam belas) indikator kinerja yang ditetapkan dengan kriteria **"Sangat Baik"**, 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan dengan kriteria **"Baik"**, 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan dengan kriteria **"Tidak Dapat Disimpulkan**".

Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda dengan rata-rata capaian sebesar 104,63%.
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan capaian 100%.
3. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Samarinda dengan rata-rata capaian 100,49%.
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan capaian sebesar 100,00%.
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Samarinda dengan capaian sebesar 108,11%.
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja BBPOM di Samarinda dengan capaian sebesar 110,00%.
7. Layanan Publik BBPOM di Samarinda yang Prima, capaian sebesar 104,26%.
8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal, capaian sebesar 99,42%.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Realisasi capaian 28 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

a. 16 (enam belas) Indikator bernotifikasi warna biru dengan kriteria Sangat Baik (dengan capaian 100% < x ≤ 110%) terdiri dari :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi 98,89% atau tercapai 108,97% dari target 90,75%.
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO realisasi 26,67% atau tercapai 102,58% dari target 26,00%.
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 94,88% atau tercapai 104,26% dari target 91,00%.
4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 94,29% atau tercapai 103,62% dari target 91.00%.
5. Persentase keputusan /rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder realisasi 81,69% atau tercapai 101,35% dari target 80,60%.
6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 100,00% atau tercapai 105,26% dari target 95,00%.
7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 98,74% atau tercapai 102,06% dari target 96,75%.
8. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 100,00% atau tercapai 109,89% dari target 91,00 %.
9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan realisasi 98,51% atau tercapai 108,34% dari target 90,93 %.
10. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar realisasi 82,40% atau tercapai 103,00% dari target 80,00%.
11. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja BBPOM di Samarinda realisasi 105,65% atau tercapai 105,65% dari target 100,00%.
12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Samarinda sesuai Standar Kemampuan Laboratorium realisasi 72,70 atau tercapai 102,54% dari target 70,90.
13. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda realisasi 90,15 atau tercapai 101,95% dari target 88,43.
14. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT realisasi 100,00% atau tercapai 108,11% dari target 92,50%.
15. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar realisasi 99,00% atau tercapai 110,00% dari target 90,00%.

26. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Samarinda realisasi 4,90 atau tercapai 104,26% dari target 4,70.

b. 11 (sebelas) Indikator bernotifikasi warna hijau dengan kriteria Baik (dengan capaian 90% < x ≤ 100%) terdiri dari :
   1. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar realisasi 97,14% atau tercapai 97,14% dari target 100%.
   2. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman realisasi 14,29% atau tercapai 100,00% dari target 14,29%.
   3. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 100,00% atau tercapai 100,00% dari target 100,00%.
   4. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan realisasi 10,00 atau tercapai 100,00% dari target 10,00.
   5. Jumlah desa pangan aman realisasi 4,00 atau tercapai 100,00% dari target 4,00.
   6. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas realisasi 1,00 atau tercapai 100,00% dari target 1,00.
   7. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan realisasi 15,96% atau tercapai 100,00% dari target 15,96%.
   8. Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Samarinda realisasi 88,04 atau tercapai 99,27% dari target 88,69.
   9. Nilai AKIP BBPOM di Samarinda realisasi 82,26 atau tercapai 98,40% dari target 83,60
   10. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Samarinda realisasi 5,00 atau tercapai 100,00% dari target 5,00.
   11. Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Samarinda realisasi 3,50 atau tercapai 100,00% dari target 3,50.

c. 1 (satu) Indikator bernotifikasi warna abu abu dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan (dengan capaian > 110%) yaitu :
   Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 97,53% atau tercapai 114,74% dari target 85,00%.

Persentase capaian indikator kinerja BBPOM di Samarinda Tahun 2025 berkisar antara 97,14% sampai dengan 114,74%. Persentase capaian terendah pada Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 97,14% dengan kriteria Baik hal ini dikarenakan adanya sampel KLB yang berupa sampel pangan olahan dengan registrasi BPOM yang terkendala kecukupan jumlah sampel untuk melakukan pengujian parameter uji lengkap sesuai standar, untuk itu telah dilakukan penyampaian hasil telaah terhadap manual IKU KLB kepada pengampu terkait Definisi Operasional parameter uji lengkap sesuai prioritas sampling. Sedangkan persentase capaian indikator yang tertinggi pada indikator kinerja Persentase sarana

produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 114,74% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan upaya reviu target pada bulan Agustus 2025, sesuai Surat Sekretaris Utama No. PR.07.2.08.25.451 Tanggal 14 Agustus 2026 prihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025. Berdasarkan hal tersebut Balai Besar POM di Samarinda mengusulkan menaikan target Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 80% menjadi 85% dan mendapat persetujuan oleh pengampu dan juga Rorenkeu, namun demikian persentase capaian di akhir tahun masih melebihi target. Balai Besar POM di Samarinda akan mengupayakan agar kedepannya seluruh capaian indikator kinerja dapat lebih optimal lagi.

Dalam rangka menjamin pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan, BBPOM di Samarinda menerapkan pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengelolaan risiko dilaksanakan secara terstruktur melalui tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja . Dikembangkan mekanisme pemantauan berbasis indikator kinerja dan indikator risiko untuk mendeteksi potensi deviasi capaian secara dini, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan sebelum berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Melalui penerapan pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan siklus perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, BBPOM di Samarinda berupaya memastikan bahwa seluruh potensi kendala dapat dimitigasi secara efektif, sehingga pencapaian Sasaran Strategis dan target Perjanjian Kinerja tahun mendatang tetap terjaga secara optimal.

KINERJA ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai Sasaran Kegiatan serta membiayai kegiatan lainnya, pada DIPA awal TA. 2025 Balai Besar POM di Samarinda memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 32.324.748.000,- Sehubungan dengan surat Dirjen Anggaran Nomor : S-211/AG/2024 tanggal 11 September 2024, Hal : Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 Hasil Kesepakatan Rapat Pada Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN TA 2025, serta Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025. Serta sehubungan dengan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.02.2.12.24.925 tanggal 9 Desember 2024 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Dalam Rangka Efisiensi Perjalanan Dinas Dan Non Quick Win Tahun 2025 bahwa telah dilakukan pemblokiran anggaran secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu pada DIPA awal Balai Besar POM di Samarinda sebesar Rp 1.860.576.000,-. Sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 30.464.172.000,-.

Pada Triwulan I tahun 2025 dilakukan 2 (dua) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut :

a. Revisi ke-1 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka

Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 dengan besaran blokir sebesar Rp 21.573.573.000,-. Namun dilakukan penyesuaian besaran blokir berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 dengan besaran blokir menjadi Rp 9.516.745.000,-.

b. Revisi ke-2 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 perihal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Dilakukan optimalisasi anggaran belanja modal untuk pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN sebesar Rp 151.880.000,- dan pergeseran anggaran antar KRO 3165.QIA serta 3165.PDD dalam rangka memenuhi kebutuhan reagen sampel pihak ketiga dan kebutuhan pembelian suku cadang alat HPLC yang harus segera diganti sebesar Rp 83.114.000,-.
c. Revisi ke-3 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 perihal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 sebesar Rp 4.904.967.000,-. Namun revisi DIPA baru disetujui dan disahkan pada tanggal 9 April 2024.

Kemudian pada Triwulan II tahun 2025 dilakukan 1 (satu) kali revisi DIPA pada tanggal 12 Juni 2025 dalam rangka pergeseran aanggaran belanja 53 ke 52 dalam KRO 3165.RAB untuk pengadaan suku cadang dan glassware/ bahan penunjang/ reagen/ baku pembanding. Revisi ini disetujui dan disahkan pada tanggal 13 Juni 2025.

Pada Triwulan III tahun 2025 dilakukan 3 (tiga) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

a. Revisi ke-1 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 perihal Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025, dilakukan revisi pengurangan anggaran pada belanja pegawai BBPOM di Samarinda sebesar Rp 612.241.000,-dan penambahan anggaran pada belanja operasional untuk keperluan perkantoran CASN sebesar Rp 2.913.000,-. Revisi disetujui dan disahkan pada tanggal 7 Juli 2025.
b. Revisi ke-2 diajukan pada tanggal 14 Agustus 2025 dalam rangka pergeseran anggaran belanja barang ke belanja pegawai dalam KRO 6384.EBA untuk pemenuhan belanja pegawai dan pergeseran anggaran belanja modal ke belanja barang dalam KRO 3165.RAB untuk pengadaan suku cadang yang termasuk pada paket pengadaan alat laboratorium. Revisi disetujui dan disahkan pada tanggal 21 Agustus 2025.
c. Revisi ke-3 diajukan pada tanggal 24 September 2025 dalam rangka pergeseran anggaran belanja modal ke belanja barang dalam KRO 3165.RAB untuk pengadaan printer nilai di bawah 1 juta yang termasuk pada paket pengadaan alat laboratorium. Revisi disetujui dan disahkan pada tanggal 29 September 2025.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Triwulan IV tahun 2025 dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-24/M/SDK/KW/10/2025 tentang Persetujuan Permohonan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran (Blokir) Badan POM TA 2025 tanggal 21 Oktober 2025 dan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.10.25.634 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Pelaksanaan Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025, dilakukan 1 (satu) kali revisi DIPA dalam rangka pembukaan blokir pada Rincian Output 3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT. Revisi ini disetujui dan disahkan pada tanggal 11 November 2025. Sehingga pagu BBPOM di Samarinda TA. 2025 tahun 2025 menjadi Rp 30.667.300.000,-

.

Setelah beberapa kali dilakukan revisi DIPA hingga pada akhir tahun 2025 pagu anggaran BBPOM di Samarinda sebesar Rp 26.086.320.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 26,069,151,236,- sehingga realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar 99.93%.

Pada tahun 2025 BBPOM di Samarinda melaksanakan 28 (dua puluh delapan) Indikator kinerja untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) Sasaran Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi anggaran **per Sasaran Kegiatan** tahun 2025, diperoleh hasil perhitungan **7 (tujuh**) Sasaran Kegiatan dalam kategori **efisien, 1 (satu)** Sasaran Kegiatan dalam kategori **tidak efisien**. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi anggaran **per Indikator Kinerja** tahun 2025, diperoleh hasil perhitungan 3 (tiga) Indikator Kinerja tidak efisien dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja efisien.

Dalam laporan kinerja ini, perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, yang membandingkan antara capaian realisasi anggaran dengan capaian output kegiatan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa BBPOM di Samarinda sudah menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

HIGHLIGHT

TAHUN 2025

INISIASI PEMBERANTASAN KORUPSI

BBPOM Samarinda berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi melalui berbagai upaya strategis yang bertujuan memperkuat integritas dan transparansi dalam setiap kegiatan organisasi. Salah satu langkah penting yang diambil adalah pembentukan ZonaIntegritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang menjadi dasar untuk menciptakan sistem birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, BBPOM Samarinda juga telah membentuk Unit Pengendali Gratifikasi, tim Whistleblowing System (WBS), tim Benturan Kepentingan dan tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta mengidentifikasi potensi risiko penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SAMARINDA

Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 3 Samarinda 75123
Telp. 0541 - 741630, Fax. 0541 - 741630, 747743 E-mail : bbpom_smd@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
NOMOR HK.02.02.18A.01.25.40 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SAMARINDA

Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 3 Samarinda 75123
Telp. 0541 - 741630, Fax. 0541 - 741630, 747743 E-mail : bbpom_smd@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
NOMOR HK.02.02.18A.01.25.38 TAHUN 2025
TENTANG
TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA

Tak kalah pentingnya, BBPOM Samarinda secara aktif melakukan sosialisasi baik di tingkat internal maupun eksternal untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya menciptaka lingkungan yang bebas dari korupsi. Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong partisipasi semua pihak dalam menjaga integritas dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih bersih, transparan, dan berkualitas.





HIGHLIGHT

TAHUN 2025

INISIASI PEMBERANTASAN KORUPSI

Penanganan Pengaduan Masyarakat

1. ***Mengisi survei integritas melalui QR Code CERMIN BPOM atau website bit.ly/CERMIN_BBPOMSmd***
2. ***Melaporkan pengaduan melalui kanal pengaduan BBPOM di Samarinda***
3. ***Pencantuman anti gratifikasi dan kanal pengaduan di surat tugas dan surat dinas eksternal***
4. ***Sosialisasi kanal pengaduan masyarakat melalui KIE maupun sosial media***
5. ***Monitoring dan Evaluasi***

Layanan Pengaduan Masyarakat :

1. ***QR Code CEK POIN***
2. ***website : https://bit.ly/CekPoin_BBPOMSmd***
3. ***email : beranilapor.smd@gmail.com***
4. ***Whatsapp : 0811-5547-575 5.kotak pengaduan***



HIGHLIGHT
TAHUN 2025

Inovasi Aksi Agent of Change



NCARANG HABER
(Ngumpul Bicara Harmonis Bersama)



RB DAYS
(Rabu is The RB Days)



SEPTEMBER CERIA
(UMKM Berdaya, Produk Kaltim Mendunia)



KATA-KATA HARI INI
(Kata-Kata Motivasi)



POM-CAST
(Dialog Interaktif)



WADAH BEKESAH
Dialog Informatif

0541-741630 Jl. Let. Jend. Soeprapto, No. 3 bbpom_smd@yahoo.com samarinda.pom.go.id

BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

HIGHLIGHT

TAHUN 2025

Inovasi Manajemen Kinerja



TAG AKU

(Tagging Anggaran IKU)



MANJAKU

(Site Evaluasi Kinerja)



BERISIK IN WONDERLAB

(Berbagi Tips dan Trik Laboratorium)



PAK RT

(Pake Alat Realtime)

0541-741630 Jl. Let. Jend. Soeprapto, No. 3 bbpom_smd@yahoo.com samarinda.pom.go.id

HIGHLIGHT
TAHUN 2025

Inovasi Manajemen Kinerja



LAPOR SYS
(Laboratory Reporting Integrated System)



MANTAU
(Manajemen Data Administrasi dan Mutu Laboratorium)



MENU BARU
(Media Monitoring Suhu dan Kelembaban Ruangan)



CAFE MANIS
(Wadah Mehawasi Pitis)

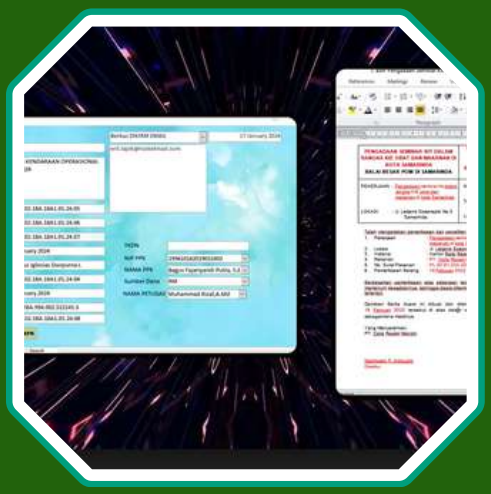
0541-741630 Jl. Let. Jend. Soeprapto, No. 3 bbpom_smd@yahoo.com samarinda.pom.go.id

HIGHLIGHT
TAHUN 2025

Inovasi Manajemen Kinerja



SIDAK MAHAKAM
(Situs Penindakan)



LAKAS BAYAR
(Pengelolaan Berkas Pembayaran Pengadan Barang dan Jasa)



SI ACIL
(Sistem Aplikasi Cek In Lembur)



SI TUKIN
(Aplikasi Surat Tugas dan Kwitansi)

0541-741630 Jl. Let. Jend. Soeprapto, No. 3 bbpom_smd@yahoo.com samarinda.pom.go.id

HIGHLIGHT
TAHUN 2025

Inovasi Manajemen Kinerja



NGOPI CANTIK
(Ngobrol Hepi Capaian Terupdate Indikator Kinerja)



PIN MPH
(PIN Barcode MPH Carang Maha Scan Ha)



ALADIN
(Aplikasi Perjalanan Dinas)



SI MAPAN
(Subsite Manajemen Perubahan)

HIGHLIGHT

TAHUN 2025

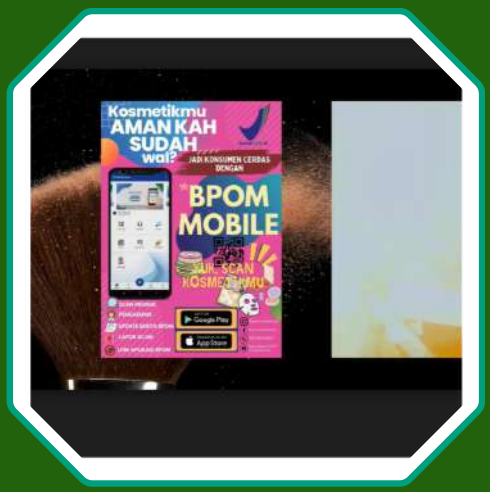
Inovasi Pelayanan Publik



LAYANAN SIKMA
(Survey Indeks Kepuasan Masyarakat)



SI PAMAN
Kampus Gerbang SiPaman



AKSI KOMUTER
(Aksi Edukasi Kosmetik melalui Media Poster)



SI JEBOL
(Sertifikasi Jemput Bola)

HIGHLIGHT

TAHUN 2025

Inovasi Pelayanan Publik



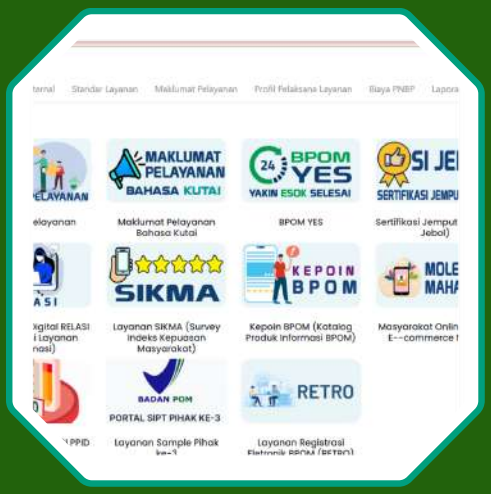
MOLEN MAHAKAM
(Masyarakat Online Lapor E-Commerce Nakal)



BPOM YES
(Yakin Esok Selesai)



B-SHARE
(BBPOM Samarinda Share)



BPOM MOBILE

HIGHLIGHT
TAHUN 2025

Inovasi Pelayanan Publik



KEPOIN BPOM
((Katalog Elektronik Produk Informasi BPOM)



RELASI
(Registrasi Layanan Informasi)



RETRO
(Registrasi Elektronik/ Online BPOM)



BTS
(Boleh Tanya si Jebol)

0541-741630 Jl. Let. Jend. Soeprapto, No. 3 bbpom_smd@yahoo.com samarinda.pom.go.id

HIGHLIGHT

TAHUN 2025

Inovasi Pelayanan Publik



JJS

(Jumat Jumpa Si Jebol)



MINIAKSI

(Mini Aksi Obat dan Makanan)

HIGHLIGHT
TAHUN 2025

Kegiatan Balai Besar POM di Samarinda



Dukung MBG BBPOM di Samarinda menjadi Instruktur Diklat SPPI



Perkuat Koordinasi dan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Tupoksi melaksanakan kerja sama dengan POLDA KALTIM



Ngobrol Pintar Inspiratif Urus Izin Edar tanpa Ribet



Pramuka Bontang Siaga bersama SAKA POM Bontang

HIGHLIGHT
TAHUN 2025

Kegiatan Balai Besar POM di Samarinda



Pelaksanaan Bimtek Komunitas Desa atau kelurahan dan Pelaku Usaha dalam Desa Pangan Aman



Kegiatan Pengandalian AMR dan Pelaporan Farmakovigilans



Pelatihan Internal Laboratorium



Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Arsip Statis

0541-741630 Jl. Let. Jend. Soeprapto, No. 3 bbpom_smd@yahoo.com samarinda.pom.go.id

HIGHLIGHT
TAHUN 2025

Kegiatan Balai Besar POM di Samarinda



Melaksanakan Penindakan Obat dan Makanan Ilegal



AWASI Obat Bahan Alam kepada Pelaku Usaha Depot Jamu



Sosialisasi Reviu Daftar Risiko Semester II Tahun 2025



kegiatan Pembinaan dan Monitoring Kinerja penerima BOK POM

HIGHLIGHT
TAHUN 2025

Kegiatan Balai Besar POM di Samarinda



Kolaborasi AWASI: Sinergi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Samarinda, 08 September 2025 – Balai Besar POM di Samarinda mengangkat Aksi AWASI (Aman, Waspada, Stop Ilegal) melalui diskusi bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

Kolaborasi AWASI Sinergi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan



Penerimaan PPPK Gelombang II



Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda

0541-741630 Jl. Let. Jend. Soeprapto, No. 3 bbpom_smd@yahoo.com samarinda.pom.go.id

HIGHLIGHT
TAHUN 2025

PENGHARGAAN DARI EKSTERNAL



Satuan Kerja dengan IKPA dan Dukungan Digitalisasi Terbaik Periode Semester I 2025



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Prov. Kaltim Tahun 2025



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2025



Unit Penyelnggara Pelayanan Publik BPOM dengan Kategori "Pelayanan Prima"

HIGHLIGHT
TAHUN 2025

PENGHARGAAN DARI EKSTERNAL



UPT BPOM Terbaik Pengelola Kegiatan Sekolah dengan PJAS Aman



Kategori Balai Besar dengan Tindaklanjut Rekomendasi Analisis Terbaik I



Kategori Balai Besar dengan Penggalangan Pemangku Kepentingan Terbaik III



Satker Terbaik Penerima "Mahakam Treasury Awards" Mitra KPPN Samarinda

HIGHLIGHT
TAHUN 2025

PENGHARGAAN DARI EKSTERNAL


KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : KEP-38/KPN.2001/2026

Diberikan kepada:

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA

sebagai

Satuan Kerja dengan Implementasi Digipay Satu Terbaik
Periode Tahun Anggaran 2025

Samarinda, 4 Februari 2026
Kepala KPPN Samarinda

Hariyanto

Satker dengan Implementasi Digipay Satu Terbaik


REKAPITULASI
Nilai Maturitas Manajemen Risiko 2025

BADAN POM

5 Unit Kerja Balai dan Balai Besar POM dengan Nilai Tertinggi

No	Unit Kerja	Self Assessment 2025	Nilai 2024	Nilai 2025	Perubahan Nilai (dibanding 2024)
1	Balai Besar POM di Semarang	4,690	3,500	3,625	0,125
2	Balai Besar POM di Samarinda	3,970	3,438	3,500	0,062
3	Balai Besar POM di Surabaya	4,000	3,500	3,469	(0,031)
4	Balai Besar POM di Denpasar	3,220	2,844	2,969	0,125
5	Balai Besar POM di Mataram	4,000	2,969	2,969	0,000

Kategori Balai Besar dengan Nilai Maturitas Manajemen Risiko Terbaik II

BAB I

PENDAHULUAN

- *Latar Belakang;*
- *Gambaran Umum Organisasi;*
- *Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi;*
- *Isu Strategis; dan*
- *Anallisis Lingkungan Strategis.*

I.1 LATAR BELAKANG

Letak geografis mengakibatkan terdapat banyak pintu masuk bagi berbagai Obat dan Makanan ke Provinsi Kalimantan Timur. Namun hal ini, tidak menjadi hambatan dan justru menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Samarinda untuk meningkatkan kinerjanya dalam hal pengawasan Obat dan Makanan poduksi dalam negeri maupun impor yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan modernisasi berpengaruh pada pola hidup masyarakat, sehingga pengawasan menjadi semakin kompleks. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM RI, peran Balai Besar POM di Samarinda dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dan menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar di wilayah Kalimantan Timur aman, bermutu, berkhasiat dan bermanfaat menjadi sangat penting dan mempunyai posisi strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Demikian juga dengan lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2025-2029, terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, dan peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial Masyarakat, perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi. Menghadapi tantangan tersebut, BBPOM di Samarinda menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

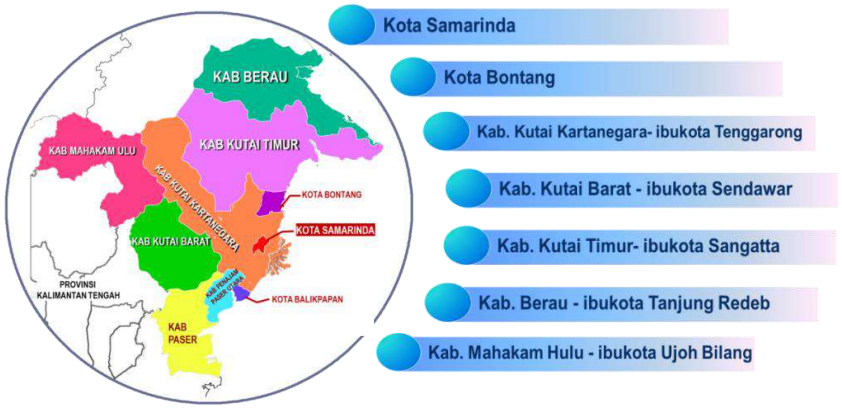
Menjawab ekspektasi masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Samarinda melakukan Intensifikasi dalam pencegahan antara lain melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai kosumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM. Perubahan paradigma ini disikapi BBPOM di Samarinda dengan kebijakan: penguatan kapasitas BBPOM di Samarinda untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan BBPOM di Samarinda ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum

atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Seiring dengan prioritas pembangunan jangka menengah, pengawasan obat dan makanan dirasakan semakin berat mengingat beban, tantangan dan tanggung- jawab yang melekat. Oleh karena itu penerapan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) perlu ditingkatkan efektifitasnya dalam melaksanakan tugas pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh.

I.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda meliputi :



Gambar 1.1 Cakupan Pengawasan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

I.3 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Susunan organisasi Balai Besar POM di Samarinda terdiri atas: a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pada tanggal 29 September 2025, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melantik Bapak Agung Kurniawan, ST sebagai Kepala Balai Besar POM di Samarinda dan telah dilakukan serah terima jabatan pada tanggal 6 Oktober 2025, sehingga struktur oragnisasi Balai Besar POM di Samarinda adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Samarinda

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, dilakukan penyederhanaan birokrasi, setiap unit organisasi terdiri dari 2 level struktur dan tim kerja yang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana. Tim kerja terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit organisasi atau jika dibutuhkan dapat berasal dari lintas Instansi Pemerintah. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk tim kerja dapat dipimpin oleh Ketua Tim. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas :

1. Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim.
2. Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit Organisasi secara berkala.
3. Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

Berdasarkan pasal 3 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM mempunyai fungsi:

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
   d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
   e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
   f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
   i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
   j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
   k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.
2. Pengawasan Sebelum Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.
3. Pengawasan Selama Beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Sedangkan Balai Besar POM di Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu sebagai berikut :

Tugas : Melaksanakan tugas teknis operasional dibidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Fungsi :
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat danMakanan

3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber.
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Disamping tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Samarinda, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumah tanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelengarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

I.4 ISU STRATEGIS

1. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera,berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Implementasi RB oleh Balai Besar POM di Samarinda menuju *good government* and *clean governance* serta pelayanan publik yang berkualitas, berpedoman pada Road Map-RB BPOM tahun 2025-2029. BPOM Juga telah mengimplementasikan dan berkontribusi pada lima RB Tematik, meliputi:

1. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN)

   Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PDN ini yaitu melalui monitoring dan evaluasi realisasi pengadaan barang/jasa yang menggunakan PDN dan akselerasi peningkatan penggunaan PND. Selaitu itu, mendorong penyedia impor untuk mempunyai sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan penyedia PDN untuk memiliki TKDN minimal 40%, sehingga bisa memperoleh sertifikat TKDN.

2. Digitalisasi administrasi pemerintahan (penanganan stunting)

   BPOM mendapatkan mandat untuk melakukan intervensi digitalisasi tata kelola percepatan perbaikan gizi masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. BPOM berkomitmen terhadap penanganan stunting yang merupakan tagging Prioritas Nasional BPOM dan Proyek Prioritas Nasional Penurunan Stunting.

3. Peningkatan investasi

   RB tematik peningkatan investasi dengan sasaran meningkatnya kemudahan berusaha dan daya saing pelaku usaha sektor obat dan makanan. BPOM mendapatkan kategori tertinggi "Sangat Baik" berdasarkan penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait penyederhanaan perizinan berusaha, serta peningkatan iklim investasi.

4. Pengentasan kemiskinan

   RB tematik pengentasan kemiskinan dengan sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat. BPOM berperan melakukan pendampingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan dalam pemenuhan standar produksi yang baik guna meningkatkan daya saing nasional dan internasional. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

5. Pengendalian inflasi.

   RB tematik pengendalian inflasi dengan sasaran meningkatnya kelancaran distribusi obat dan makanan. BPOM melakukan pengawasan fasilitas distribusi obat dan makanan dalam pemenuhan ketentuan cara distribusi yang baik.

2. Revolusi Industri 5.0

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (Society 5.0) yang terjadi saat ini secara tidak langsung telah mengubah perilaku masyarakat sebagai konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan. Perubahan tersebut termasuk bergesernya pola jual-beli produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang kini semakin banyak dilakukan melalui platform digital.

Di wilayah Kalimantan Timur, tren peredaran produk melalui platform digital terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan e-commerce lokal maupun regional. Kondisi ini memunculkan tantangan baru dalam pengawasan, di mana produk-produk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi standar mutu dan keamanan kerap dipasarkan secara daring tanpa memiliki izin edar yang sah.

Balai Besar POM di Samarinda perlu memperkuat sistem intelijen pengawasan berbasis digital dengan melakukan pemantauan siber (cyber patrol) terhadap aktivitas penjualan daring produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu, kerja sama lintas sektor dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Kominfo, dan Dinas Kesehatan daerah menjadi sangat penting guna menindaklanjuti temuan pelanggaran di ruang siber secara efektif dan terkoordinasi..

3. Trend Transaksi Perdagangan secara Online dan Jasa Titip



Di era digital saat ini, transaksi perdagangan masyarakat berubah dengan lebih banyak memanfaatkan internet untuk transaksi jual beli. Kebiasaan berbelanja *online* saat ini semakin terbentuk ketika masyarakat memiliki keterbatasan untuk beraktifitas di luar rumah sejak pandemi Covid-19 melanda hampir tiga tahun lamanya yang membuat kenyaman dalam melakukan transaksi perdagangan secara online hingga kini, sehingga diperlukan peningkatan perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan ilegal pada media tersebut. Makin maraknya peredaran obat dan makanan ilegal melalui *Online* disebabkan karena masih adanya unsur pasokan dan permintaan (*supply–demand*). Dari sisi pasokan (*supply*) dipengaruhi oleh sanksi hukum yang

dijatuhkan kepada pelaku belum memberikan efek jera dan rendahnya putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada para pelanggar hukum tindak pidana bidang obat dan makanan yang mengakibatkan tidak efektifnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan POM. Sedangkan dari sisi permintaan (*demand*) dipengaruhi rendahnya tingkat pengetahuan, serta maraknya iklan dan testimoni yang menyesatkan melalui *online*, dan kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap risiko yang ditimbulkan. Untuk itu, Badan POM memerlukan sinergisasi dan gerak bersama baik dengan pelaku usaha perdagangan *online* maupun jasa ekspedisi untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran obat dan makanan ilegal.

Fenomena Jastip berfokus pada pengawasan Obat Impor dan Modus Jastip, dimana tanggung jawab BPOM berada pada pengawasan obat dan makanan di Indonesia dan Obat impor harus sesuai regulasi. Fenomena jastip obat trennya meningkat untuk mengurangi biaya pengobatan, risiko hukum dan kesehatan dari pembelian illegal, promosi melalui media sosial dan *e-commerce* dan barang kiriman dan bawaan penumpang. Regulasi BPOM terkait jastip ada pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. Langkah yang akan diambil oleh BPOM untuk menanggulangi fenomana jastip yaitu dengan melakukan operasi gabungan dan sinergi pengawasan, penelusuran dan koordinasi dengan Bea dan Cukai, intensifikasi pengawasan oleh UPT BPOM dan pemantauan isu jastip pada bulan Juli 2024.

4. Pengawalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BPOM merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini merupakan tantangan kedepan yang akan dihadapi oleh Balai Besar POM di Samarinda dalam penjaminan mutu dari obat-obatan. Implementasi JKN memberikan dampak terjadi peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Untuk itu kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai Besar POM di Samarinda harus terus diperkuat serta pengembangan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, inspektur, maupun penyidik) serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

5. Regionalisasi Laboratorium

Berdasar Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 tentang Regionalisasi Laboratorium, Laboratorium BBPOM di Samarinda ditunjuk sebagai salah satu laboratorium

regional dengan laboratorium anggota BB/Balai POM di Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan, serta Loka POM di Kota Balikpapan, Sanggau, Tanah Bumbu, Kotawaringin Barat, dan Hulu Sungai Utara. Ditunjuknya BBPOM Samarinda sebagai salah satu laboratorium regional, mewajibkan BBPOM di Samarinda harus mampu melakukan pengujian unggul dengan ruang lingkup pengujian lebih banyak dibandingkan dengan laboratorium anggota.

Perubahan konsep regionalisasi laboratorium dimulai pada pertengahan tahun 2023, antara lain dengan pemindahan peralatan canggih ke laboratorium regional. Pada tahun 2023 dilakukan pemindahan 1 unit alat DUSA dari BBPOM di Banjarmasin dan 2 unit alat LC MS-MS dari BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Palangkaraya, kemudian di tahun 2024 dilakukan pemindahan alat spektroflourometer dan isolator dari BBPOM di Banjarmasin, serta dilakukan peningkatan kompetensi penguji.

Dengan adanya konsep regionalisasi laboratorium diharapkan lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian dalam rangka pengawasan obat dan makanan di seluruh pelosok negeri.

6. Kemandirian Pelaku Usaha (UMKM)

Kemandirian UMKM mengacu pada kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berdiri sendiri secara ekonomi dan operasional. Secara umum, kemandirian UMKM mencakup beberapa aspek utama:

- Kemandirian Ekonomi: UMKM mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional dan memperoleh keuntungan secara mandiri tanpa bergantung secara signifikan pada bantuan atau subsidi pemerintah.
- Kemandirian Operasional: UMKM memiliki sistem manajemen dan operasional yang efisien dan mandiri. Mereka mampu mengelola rantai pasok, produksi, distribusi, dan pemasaran produk atau jasa mereka dengan baik tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak lain.
- Kemandirian Sumber Daya: UMKM dapat mengelola sumber daya manusia, bahan baku, teknologi, dan keuangan mereka sendiri tanpa bergantung terlalu banyak pada pihak luar.

Berdasarkan slogan UMKM yaitu UMKM Naik Kelas Berjaya di Negeri Sendiri maka peningkatan dan keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah di suatu negara atau wilayah tertentu perlu dilakukan. Jika hal ini terjadi maka produk UMKM dapat dipastikan bisa mendunia. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang memberikan prioritas terhadap pengembangan UMKM di Indonesia, pemerintah membangun konsep perizinan berusaha yang ramah terhadap UMKM, dan memberikan berbagai kemudahan kepada UMKM untuk berkembang. BPOM telah menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendukung percepatan pengembangan UMKM obat dan makanan melalui simplifikasi regulasi, bimbingan teknis dan pendampingan industri, serta inisiasi berbagai program yang melibatkan pemangku kepentingan.

7. Penurunan Stunting

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tercantum bahwa pembangunan keamanan pangan dimulai dari tingkat individu, keluarga, hingga masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan keamanan pangan harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keamanan pangan juga berkontribusi dalam pembangunan Indonesia salah satunya untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas adalah *Zero Stunting*, dimana stunting merupakan manisfestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

8. Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) menuju Keadilan dan Kesetaraan.

Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang penting untuk memastikan terciptanya keadilan dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, pemahaman yang keliru di masyarakat masih sering terjadi, seperti menyamakan gender dengan jenis kelamin, atau menganggap bahwa isu gender hanya berkaitan dengan perempuan. Padahal, gender bukanlah perbedaan biologis, melainkan perbedaan peran, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial dan budaya serta dapat berubah seiring waktu.

Berbagai stereotipe yang berkembang di masyarakat seperti anggapan bahwa laki-laki lebih rasional dan kuat sementara perempuan lebih emosional dan lemah merupakan bentuk konstruksi sosial yang bisa menimbulkan ketimpangan. Ketimpangan gender ini dapat berujung pada diskriminasi dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pembangunan, serta pengambilan keputusan, yang semuanya dapat menghambat tercapainya pembangunan yang adil dan inklusif.

Balai Besar POM di Samarinda berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam seluruh aspek perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan. Hal ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan PUG dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), yang bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas gender dalam kebijakan dan program kerja.

Sebagai langkah strategis, BBPOM di Samarinda mendorong tersedianya data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan variabel gender lainnya seperti usia, pendidikan, jabatan, status perkawinan, dan kondisi khusus (misalnya kehamilan, menyusui, penyandang disabilitas, atau dalam masa pemulihan). Data ini dikumpulkan melalui berbagai kegiatan seperti rapat, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, serta kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), baik yang melibatkan pegawai internal maupun mitra

eksternal.

Dengan adanya data terpilah yang akurat dan mutakhir, BBPOM di Samarinda dapat merancang kebijakan dan kegiatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan, serta memastikan bahwa seluruh pihak dapat berpartisipasi secara adil dalam proses pembangunan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Balai Besar POM di Samarinda untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

9. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mendorong pemberdayaan pelaku UMKM, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, pemerintah menetapkan pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana utama yang bertanggung jawab atas pemenuhan gizi nasional. BGN mengemban tugas untuk memastikan pemenuhan gizi bagi setidaknya empat kelompok utama, dengan fokus utama pada peserta didik di berbagai jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Ini mencakup satuan pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, pendidikan khusus, layanan khusus, hingga pesantren.

Pelaksanaan program MBG dilakukan secara terpadu dengan pendekatan lintas sektor. Dalam hal ini, kolaborasi yang erat dibangun antara BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pengawal mutu dan keamanan pangan dalam program ini.

Balai Besar POM di Samarinda siap mendukung penuh implementasi Program MBG di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Komitmen ini diwujudkan melalui pengawalan mutu dan keamanan pangan, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi oleh peserta didik. BBPOM di Samarinda akan memastikan bahwa makanan yang diberikan memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pengawasan yang ketat, edukasi kepada masyarakat, serta dukungan terhadap pelaku usaha pangan lokal, Balai Besar POM di Samarinda turut berperan aktif dalam menjamin keberhasilan dan keberlanjutan Program MBG. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif sebagai fondasi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

10. Peningkatan Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi

Penguatan dalam perencanaan strategis dan strategi pencapaiannya merupakan salah satu komponen

yang dibangun dalam peningkatan maturitas SPIP. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP yaitu Penilaian atas Penetapan Tujuan, Penilaian Struktur dan Proses, dan Penilaian atas Pencapaian Tujuan serta Manajemen Risiko. Tujuan penyelenggaraan SPIP dalam sebuah organisasi adalah pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, keamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

11. Pengawalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang mengamanatkan kepada 9 Menteri, Kepala Badan POM, Gubernur, serta Bupati dan Walikota untuk meningkatkan efektivitas serta penguatan pengawasan Obat dan Makanan. Salah satu implementasi atas amanah Undang-Undang dan peraturan-peraturan diatas adalah melalui alokasi DAK atau Dana Alokasi Khusus dengan tujuan untuk mendanai program khusus/kegiatan yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang dimaksud adalah program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran bersangkutan. Pada tahun 2025, alokasi anggaran DAK Sub Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai tahun ke-5 dengan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mendapatkan anggaran DAK Non Fisik yaitu kota Samarinda, kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat.

I.5. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

I.5.1 INTERNAL

I.5.1.1 SUMBER DAYA MANUSIA

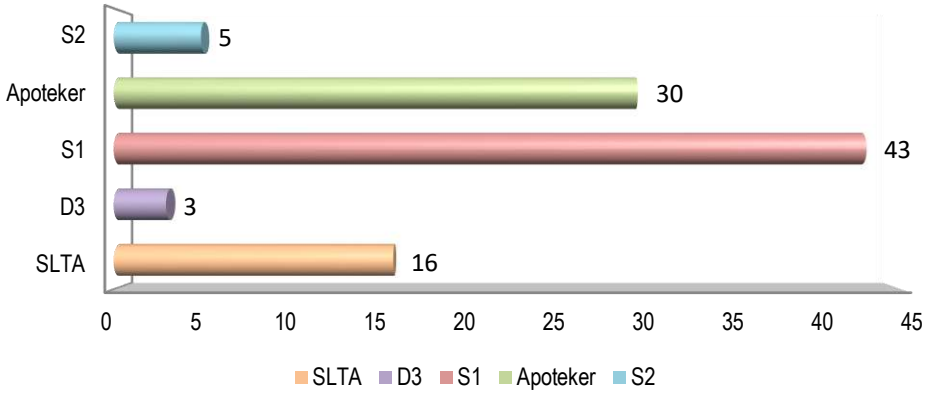
Untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Balai Besar POM di Samarinda memerlukan sumber daya manusia (SDM)/ modal insani yang memadai. SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Samarinda tahun 2025 adalah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) orang.

Tabel 1.1 Rincian Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SDM Balai Besar POM di Samarinda	S2	Apoteker	D-IV / S-1 lain	D-III	SLTA
PNS dan PPPK	5	28	40	3	4
Outsourcing	-	2	3	-	12
Total	**5**	**30**	**43**	**3**	**16**

Adapun SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Samarinda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 1.3

Gambar 1.3 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Kedepannya kualitas dan kuantitas SDM akan terus ditingkatkan melalui proses rekrutmen maupun pendidikan berkelanjutan sesuai kebutuhan organisasi.

I.5.1.2 SARANA DAN PRASARANA

Balai Besar POM di Samarinda terletak di Jl. Letjen Soeprapto No.3 Samarinda.Balai Besar POM di Samarinda berdiri di atas tanah seluas 1.875 m^2, tanah tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Berita Acara Hibah tanggal 11 Juli 2017.

I. LUAS GEDUNG

- Luas gedung Balai Besar POM di Samarinda adalah 3.372 m^2 dan belum memiliki rumah dinas jabatan pimpinan.

II. LISTRIK, AIR DAN TELEPON

- Sumber Energi Listrik :

  Balai Besar POM di Samarinda memiliki fasilitas penerangan dari PLN dengan daya 345 KVA, dan dibantu dengan 3 (tiga) buah generator dengan daya 522.5 KVA, terbagi atas 400 KVA, 100 KVA dan 22,5 KVA.

- Sumber Air Bersih :

  Sumber air yang digunakan sebagai penunjang sarana lingkungan dan untuk menunjang penyelenggaraan laboratorium serta keperluan air bersih berasal dari PDAM. Sarana Komunikasi :

  1) No.Telepon : 0541-741630; 747743
  2) Alamat e-mail : bpom_samarinda@pom.go.id; bbpom_smd@yahoo.com
  3) No HP/Whatsapp : 081348402867

Pada Balai Besar POM di Samarinda juga tersedia *Local Area Network* (LAN) yang terhubung dengan internet Indihome berkapasitas 100 Mbps. Untuk meningkatkan perluasan pemanfaatan

fasilitas jaringan komputer Balai Besar POM di Samarinda memiliki sistem Topologi kombinasi Star dengan menggunakan 2 (dua) buah server yaitu Intel Xeon CPU C3 Memory 8 GB, Hard Disk 2 TB dan mycloud WD 16TB

III. KENDARAAN DINAS

Untuk menunjang aktivitas pelaksanaan kegiatan operasional perkantoran, difasilitasi 9 (sembilan) unit kendaraan roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan roda dua, sesuai tabel 1.1 :

Tabel 1.2 Kendaraan Dinas BBPOM di Samarinda

No	Nama	Tahun Pengadaan	Jenis
1	Kijang LGX Hitam	2004	RODA 4
2	Kijang Innova G Hitam	2006	
3	Suzuki APV	2008	
4	Isuzu NHR (Mobling)	2013	
5	Kijang Innova Luxury V Hitam	2015	
6	Toyota All New Hilux Double Cabin	2016	
7	Isuzu NLR 71TL (mobil penyidikan)	2018	
8	Isuzu Elf NMR 71TSD (Insenerator)	2019	
9	Toyota Innova	2022	
10	Motor Honda Beat	2020	RODA 2
11	Motor Honda Beat	2020	

IV. PERALATAN LABORATORIUM

Menjadi tulang punggung pengawasan obat dan makanan di wilayah Kalimantan Timur, mengharuskan laboratorium pengujian BBPOM di Samarinda untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, terutama di bidang pengujian obat dan makanan.

BBPOM di Samarinda telah mendapatkan sertifikat reakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 pada tanggal 23 Juli 2019 sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-268-IDN. Dengan akreditasi, berarti laboratorium telah menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2017, memiliki kompetensi dan mampu menghasilkan hasil uji yang akurat dan teliti sesuai ruang lingkupnya, sehingga hasil pengujian yang dilakukan dapat dipercaya dan di pertanggungjawabkan. Kemudian dilakukan kembali assessment reakreditasi pada tanggal 12-13 Februari 2024 dan sertifikatnya berlaku pada tanggal 23 Juli 2024 hingga 22 Juli 2029.

Setiap tahun selalu terjadi perkembangan parameter uji pada pengujian sesuai standar. Oleh karena itu laboratorium pun harus selalu meningkatkan kemampuan ujinya agar pengawasan obat dan makanan dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk melakukan kegiatan pengujian, laboratorium harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar sesuai dengan standar

minimum laboratorium. Sehingga masih diperlukan pengadaan peralatan laboratorium untuk dapat meningkatkan pemenuhan standar tersebut dan meningkatkan kemampuan uji laboratorium.

I.5.1.3 ANGGARAN

Jumlah anggaran DIPA yang ditetapkan untuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tahun 2025 seperti tertera pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	15,189,771,000.00	15,187,344,397.00
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	680,000.00	680,000.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	189,774,000.00	189,709,861.00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	19,202,000.00	19,200,700,00
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	806,925,000.00	798,848,421.00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	33,982,000.00	33,981,004.00
7	Layanan Publik UPT yang Prima	69,062,000.00	69,024,346.00
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	9,776,924,000.00	9,770,362,507.00
TOTAL		**26,086,320,000.00**	**26,069,151,236.00**

I.5.2 EKSTERNAL

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, area cakupan pengawasan Balai Besar POM di Samarinda adalah sebagai berikut:

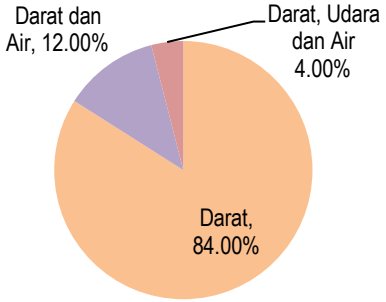
Tabel 1.4 Area Cakupan Pengawasan Balai Besar POM di Samarinda

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas wilayah	
			km²	%
Provinsi Kalimantan Timur				
Kutai Barat	16	194	13.829,69	12,15
Kutai Kartanegara	18	237	26.867,51	23,60
Kutai Timur	18	141	31.585,67	27.74
Berau	13	110	21.917,59	19,25
Samarinda	10	59	716,78	0,63
Bontang	3	15	509,93	0.45
Mahakam Ulu	5	50	18.427,81	16.18
Jumlah	**83**	**806**	**113.854,98**	**100,00**

Mulai tahun 2024, Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara bukan merupakan area cakupan pengawasan Balai Besar POM di Samarinda lagi, kini menjadi area cakupan pengawasan Balai POM di Kota Balikpapan. Dalam pelaksanaan pengawasan, pola transportasi Balai Besar POM di Samarinda ke wilayah kerja dapat ditempuh dengan tiga pola, yaitu:

- Transportasi melalui darat sebanyak (84.00%)
- Transportasi melalui darat dan air sebanyak (12.00%)
- Transportasi melalui darat, udara dan air sebanyak (4.00%)

Gambar 1.4 Profil Pola Transportasi Tahun 2025



Dengan area cakupan pengawasan yang luas, yang sampai saat ini belum sepenuhnya didukung oleh sarana infrastruktur yang memadai. Kondisi jalan-jalan poros yang menghubungkan antara kabupaten/kota masih banyak yang rusak bahkan terputus, inilah yang menyebabkan pola transportasi harus ditempuh juga melalui darat, udara dan air. Sebaran penduduk Kalimantan Timur terpusat di kota-kota besar. Pola penyebaran penduduk yang terpusat di kota besar memudahkan fungsi pengawasan obat dan makanan, namun demikian pengawasan tetap dilaksanakan di wilayah area cakupan pengawasan Balai Besar POM di Samarinda.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- *Rencana Strategis;*
- *Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025;*
- *Perjanjian Kinerja Tahun 2025;*
- *Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025; dan*
- *Metode Pengukuran.*

RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja memberikan gambaran tentang Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh pemberi amanah yang dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada penerima amanah yaitu Kepala Balai Besar POM di Samarinda sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Samarinda.

Sebelum Perjanjian Kinerja ditetapkan, dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) telah disusun sebagai Rancangan Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan Rancangan Renstra yang telah disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dari tahun 2025 – 2029.



VISI BADAN POM

"TERWUJUDNYA SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING DALAM MENDUKUNG MASYARAKAT SEHAT BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045"

MISI BADAN POM

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

TUJUAN BADAN POM

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**. Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuar terhadap UMKM.** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

TUJUAN BADAN POM



4 **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5 **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.



SK 1

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWAS SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

1 PRESENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

(Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan + Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan + Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan + Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan)/ 4

2 PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO

(Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan/ jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM) x 100%

3 PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

(20% Kesesuaian Target Sampel + 20% Kesesuaian Parameter Uji + 20% Ketepatan Pengambilan Kesimpulan + 10% Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel + 10% Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian + 20% Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

4 PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

Sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan yang diuji sesuai parameter pengujian

5 PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

(20% Kesesuaian target sampel PIRT + 20% Kesesuaian Parameter Uji + 20% Ketepatan Pengambilan Kesimpulan + 10% Ketepatan waktu pengambilan sampel + 10% Ketepatan waktu pelaporan + 20% Tindak lanjut Sampel PIRT

6 PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

((**Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha** x 100%) + (**Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor** x 100%))/ 2

SK 1

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWAS SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

7 PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI

Rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam, % Sarprod Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

8 PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

(Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan/ Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa) x 100%

9 PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Rata-rata dari % fasilitas distribusi Obat, % fasilitas distribusi Obat Bahan Alam, % fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan, % fasilitas distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

10 PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

(Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa) x 100%

11 PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

(Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan + Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan + Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan + Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan + Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan)/ 5

12 PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR

(Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label + Persentase ketepatan waktu pelaporan label) / 2

13 PERSENTASE PEMENUHAN TARGET PENGENDALIAN AMR DI WILAYAH UPT

(25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek + 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba + 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba + 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter)

SK 1

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWAS SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

14 MENGUATNYA LAB PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4 untuk Laboratorium Balai Regional (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2

b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

15 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI DALAM PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN

(Jumlah Kab Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman/ Jumlah Kab Kota di Wilayah Kerja UPT) x 100%

SK 2 MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

SK 3 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

1.Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda

Dihitung secara otomatis melalui rumus (0.25 x narasumber)+(0.25 x konten)+(0.25 x pemahaman audiens)+(0.25 x manfaat) dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT

2.Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan dengan kriteria sebagai berikut:

- Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
- Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah;
- Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

3.Jumlah desa pangan aman

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kader keamanan pangan desa yang aktif;
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

4.Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

SK 4 MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Perhitungan target tahunan (B12):
((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%
Perhitungan target B1 - B11:
= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

SK 5 TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

SK 6 TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Rata-rata dari nilai:

- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

SK 7 LAYANAN PUBLIK BALAI BESAR POM DI SAMARINDA YANG PRIMA

Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda

Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); Profesionalitas SDM (25%); Sarana Prasarana (18%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); Konsultasi dan Pengaduan (10%); Inovasi (12%).

SK 8

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

1

NILAI PEMBANGUNAN ZI BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:

Komponen Pengungkit

- Manajemen Perubahan (8%)
- Penataan Tatalaksana (7%)
- Penataan Sistem Manajemen SDM (10%)
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%)
- Penguatan Pengawasan (15%)
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%)

Komponen Hasil

- Birokrasi yang bersih dan akuntabel (22,5%)
- Pelayanan Publik yang prima (17,5%)

2

NILAI AKIP BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

Dihitung dengan penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu: Perencanaan Kinerja (bobot 24), Pengukuran Kinerja (bobot 24), Pelaporan Kinerja (bobot 12), Evaluasi Kinerja Internal (bobot 20) dan Capaian Kinerja (bobot 20)

3

NILAI KINERJA ANGGARAN BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

Penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari hasil penjumlahan (50% Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)) dan (50% Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA))

4

INDEKS MANAJEMEN RISIKO BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko

Pada tahun 2025, telah dilakukan penyusunan Rancangan Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2025-2029. Secara umum terdapat beberapa perubahan jika dibandingkan dengan Renstra sebelumnya rincian sebagai berikut:

1. Terdiri dari 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja pada Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2025-2029.
2. Indikator kinerja yang masih ada di Renstra 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Jumlah desa pangan aman;
   b. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas;
   c. Indeks Pelayanan Publik UPT;
   d. Nilai AKIP UPT BPOM;
   e. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM.
3. Terdapat perubahan nomenklatur pada indikator kinerja berikut:

Semula	Menjadi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
Persentase UMKM yang Memenuhi Standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
Indeks RB UPT	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

4. Terdapat Indikator kinerja baru yaitu:
   a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO;
   c. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar;
e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
f. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
g. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
h. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan;
l. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar;

Sasaran kegiatan dengan indikator kinerja sasaran kegiatan serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Dukungan Manajemen. Hal ini sebagai implementasi dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja dari tahun 2025 – 2029.

Penjabaran dari Rencana Kegiatan Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025-2029 dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan yang ***ingin***/ ***akan*** dicapai dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan yang diusulkan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 telah memperoleh persetujuan anggaran dalam bentuk dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Kertas Kerja Tahun 2025 yang telah disahkan oleh yang berwenang.

II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2025-2029 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025. RKT Tahun 2025 memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja. Sejalan dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 serta berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM, maka Unit Organisasi Eselon I, Eselon II, Satuan Kerja dan UPT perlu segera menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dengan memperhatikan ketentuan untuk penetapan Sasaran, indikator, dan Target Unit Pelaksana Teknis mengacu exercise Rancangan Awal Renstra 2025-2029 hal

ini sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-PR.06.02.2.09.24.724 tanggal 13 September 2024 hal Permintaan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26.00
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	90.00
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100.00
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100.00
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Besar POM di Samarinda sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	58.90

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	97.15
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10.00
		Jumlah desa pangan aman	4.00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam Kosmetik yang baik dan/atau Izin Penerapan CPPOB Pangan Olahan	81.50
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda	95.71
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh Balai Besar POM di Samarinda	14.00
10	Layanan Publik Balai Besar POM di Samarinda yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda	4.70
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Balai Besar POM di Samarinda yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda	90.25
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	83.51
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	90.58
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda	3.70

II.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja Tahun 2025 merupakan **pernyataan komitmen** yang mempresentasikan tekad dan janji untuk **mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan cara transparan dan akuntabel.** Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan komitmen antara Kepala

Balai Besar POM di Samarinda sebagai pengemban mandat/ tugas/ penerima amanah dengan Kepala Badan POM sebagai pemberi mandat/ tugas/ pemberi amanah.

Dalam Perjanjian Kinerja berisi ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan sumberdaya yang ada, memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target tahunan yang **harus** dicapai selama tahun anggaran 2025.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran serta target yang akan dicapai dilaksanakan melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Dukungan Manajemen di Balai Besar POM di Samarinda.

Pengukuran persentase capaian indikator sasaran pada masing-masing indikator sasaran diukur dengan cara membandingkan realisasi tahun 2025 dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Renstra 2025-2029, pada PK awal memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja.

Jika dibandingkan dengan RKT tahun 2025, terdapat perubahan target beberapa indikator kinerja pada PK tahun 2025, indikator kinerja yang mengalami perubahan target adalah sebagai berikut:

1. Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2. Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
7. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentua
8. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentua
9. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
11. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
12. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
13. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

14. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
15. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
16. Nilai AKIP UPT BPOM
17. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
18. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Perubahan target tersebut terjadi karena khusus RKT tahun pertama pelaksanaan Renstra (yang disusun pada tahun terakhir pelaksanaan Renstra periode sebelumya) disusun mengacu pada Rancangan Renstra yang disampaikan melalui Surat Sektretaris Utama terkait Penyusunan RKT tahun n+, sedangkan target PK pada tahun pertama pelaksanaan Renstra mengacu pada Rancangan Renstra yang disampaikan melalui Surat Sektretaris Utama terkait Penyusunan PK tahun n.

Secara rinci target masing-masing indikator kinerja sasaran yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	80.60
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.53
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	58.90
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.43
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10.00
		Jumlah desa pangan aman	4.00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	80.00
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.50
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.69
		Nilai AKIP UPT BPOM	83.60
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.50

Sehubungan dengan Proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM sehingga dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang merujuk pada

Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor : PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025, sehingga seluruh unit kerja melakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) untuk mengakomodir perubahan informasi kinerja pada Rancangan Renstra BPOM 2025-2029 yang memuat beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan 3 Indikator kinerja baru yaitu:
   a. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elekronik yang diawasi sesuai standar;
   b. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT;
   c. Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.
2. Indikator kinerja **Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium** yang semula masuk dalam Sasaran Kegiatan **Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**, kini masuk dalam Sasaran Kegiatan **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**.

   Sehingga saat ini PK dan RAPK BBPOM di Samarinda terdiri dari 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja.
3. Terdapat sekaligus perubahan target RAPK 2025
4.

Pada tanggal 30 September 2025 terdapat pergantian pimpinan BBPOM di Samarinda, sehingga dilakukan revisi PK tahun 2025 .

Secara rinci target masing-masing indikator kinerja sasaran yang menunjang Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Revisi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	80.60
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.93
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.9
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.43
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10.00
		Jumlah desa pangan aman	4.00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.96
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.50

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.69
		Nilai AKIP UPT BPOM	83.60
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.50

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Renstra 2025-2029 dimana Renstra 2025-2029 baru disahkan pada bulan Desember tahun 2025, seiring berjalannya waktu dilakukan beberapa kali pembahasan sejak pertengahan tahun 2024 sampai triwulan III tahun 2025, sehingga terdapat perubahan-perubahan yang mengakibatkan ada perbedaan antara RKT dan PK Tahun 2025.

II.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Samarinda selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi Simetris untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2025 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun (RAPK) 2025.

Berikut RAPK 2025 yang ditetapkan di awal tahun 2025

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target												Anggaran (Rupiah)
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	618,775,000
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26.00	43,000,000
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	168,125,800
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	157,942,600
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	157,942,600
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		30.00	38.00	40.00	45.00	50.00	55.00	65.00	70.00	75.00	80.60	80.60	308,934,000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target												Anggaran (Rupiah)
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	30,759,000
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	30,759,000
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	387,685,500
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	387,685,500
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.53	85.53	85.53	85.53	85.53	85.53	85.53	85.53	85.53	85.53	85.53	85.53	31,610,000
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	680,000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target												Anggaran (Rupiah)
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			55.30	55.30	55.30	56.50	56.50	56.50	57.70	57.70	57.70	58.90	12,900,552,000
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			88.43	88.43	88.43	88.43	88.43	88.43	88.43	88.43	88.43	88.43	278,922,000
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		10.00	10.00	25.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	85.00	90.00	10.00	510,043,000
		16	Jumlah desa pangan aman			5.00	25.00	40.00	50.00	55.00	60.00	70.00	85.00	100.00	4.00	761,608,000
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			5.00	25.00	25.00	50.00	70.00	70.00	90.00	90.00	100.00	1.00	159,823,000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3.25	11.25	31.00	45.25	49.50	54.00	58.25	64.25	70.25	76.25	78.00	80.00	63,804,000

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target												Anggaran (Rupiah)
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		7.50	7.50	27.50	42.50	50.00	57.50	57.50	57.50	77.50	92.50	92.50	806,925,000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	90.00	145,778,000
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.70	61,596,000
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												88.69	4,703,307,300
		23	Nilai AKIP UPT BPOM												83.60	2,011,797,900
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5.00	4,655,714,700
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3.50	1,892,858,100

Hingga tahun 2025 telah dilakukan 3 (tiga) kali revisi target RAPK dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret dilakukan revisi target RAPK berdasarkan hasil monev capaian kinerja sampai dengan bulan Februari 2025 pada indikator kinerja berikut:
   - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder;
   - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
   - Jumlah desa pangan aman;
   - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas;
   - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.
2. Pada bulan Mei dilakukan revisi target RAPK berdasarkan hasil monev capaian kinerja sampai dengan bulan April 2025 pada indikator kinerja berikut:
   - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
   - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas;
   - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
3. Pada bulan Agustus dilakukan revisi target RAPK bersamaan dengan revisi PK merujuk pada Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor : PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 hal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025pada indikator kinerja berikut:
   - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   - Persentase keputusan /rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
   - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
   - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
   - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Berikut RAPK revisi terakhir tahun 2025 yang ditetapkan di bulan September 2025

Tabel 2.4 Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target												Anggaran (Rupiah)
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	90.75	90.75	90.75	90.75	90.75	601,229,000.00
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26.00	9,000,000.00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	149,908,600.00
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	146,326,600.00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	149,908,600.00
		6	Persentase keputusan /rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		30.00	38.00	40.00	45.00	50.00	55.00	80.60	80.60	80.60	80.60	80.60	17,561,000.00
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	33,969,000.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target												Anggaran (Rupiah)
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	33,969,000.00
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	371,390,400.00
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	318,905,400.00
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.53	85.53	85.53	85.53	85.53	85.53	85.53	90.93	90.93	90.93	90.93	90.93	85,706,600.00
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	125,716,000.00
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100.00	69,791,200.00
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			55.30	55.30	55.30	56.50	56.50	56.50	70.73	70.73	70.73	70.9	12,948,996,600.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target												Anggaran (Rupiah)
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												14.29	127,393,000.00
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	680,000.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			88.43	88.43	88.43	88.43	88.43	88.43	88.43	88.43	88.43	88.43	72,225,000.00
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		10.00	10.00	25.00	60.00	70.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00	10.00	21,075,000.00
		19	Jumlah desa pangan aman			5.00	25.00	40.00	50.00	55.00	60.00	70.00	85.00	100.00	4.00	72,556,000.00
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			5.00	25.00	60.00	70.00	70.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1.00	23,918,000.00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3.25	11.25	31.00	45.25	49.50	54.00	58.25	64.25	70.25	76.25	78.00	15.96	19,202,000.00

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target												Anggaran (Rupiah)
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		7.50	7.50	27.50	29.00	53.00	59.00	80.00	80.00	83.00	91.00	92.5	806,925,000.00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	90.00	33,982,000.00
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT												4.70	69,062,000.00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												88.69	3,237,925,750.00
		26	Nilai AKIP UPT BPOM												83.60	1,702,020,000.00
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5.00	3,230,694,000.00
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3.50	1,606,284,250.00

II.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Untuk indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%Capaian = \frac{realisasi}{target}\ x\ 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\%Capaian = \frac{1 + (1 - realisasi)}{target}\ x\ 100\%$$

Disamping itu untuk mendukung pencapaian kinerja sasaran diperlukan pengukuran kinerja kegiatan yang juga menjadi dasar evaluasi dan analisis karena berkaitan dengan indikator input, indikator output/ outcome untuk menghitung efisiensi kegiatan dengan rincian pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dibahas pada evaluasi dan analisis.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun bersangkutan.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Terdapat perubahan kategori capaian IKU yang semula berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan kemudian direvisi melalui :

- Surat Edaran Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/SatuanKerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 2.6 Kategori Capaian IKU

Semula

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	= 100%	
Cukup	70% ≤ x < 1000%	
Kurang	< 70%	

Menjadi

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	≤ 60%	

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra (target terupdate dari Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra). Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori

berikut:

Tabel 2.7 Kategori Capaian IKU Terhadap Target Tahunan

Kategori	Capaian	Notifikasi Warna
Tercapai/ Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	

4. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar nasional/internasional jika ada (*Benchmark* Kinerja). Khusus untuk UPT di lingkungan BPOM, unit pembanding ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT.

Setelah itu dilakukan pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO di lingkungan BPOM terdiri dari:

a. NKO Periodik

   NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b. NKO Tahunan

   NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

   1. Capaian Perjanjian Kinerja
   2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada Laporan Kinerja ini akan dilakukan perhitungan NKO Tahunan. Hasil NKO dikelompokan dengan rincian sesuai tabel berikut dimana terdapat perubahan kategori predikat kinerja NKO yang

semula berdasarkan Surat Edaran Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/SatuanKerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan kemudian direvisi melalui :

- Nota Dinas Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.08.02.2.07.25.360 tanggal 4 Juli 2025 perihal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2025
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Predikat NKO dinyatakan dalam kategori berikut:

Tabel 2.8 Predikat NKO

Semula

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Menjadi

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja Balai Besar POM di Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Kepala Balai Besar POM di Samarinda menunjuk 1 (satu) orang pejabat fungsional sebagai penanggung jawab data. Penunjukan tersebut disahkan dalam Keputusan Kepala BPOM No 225 Tahun 2025 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025.
2. Masing-masing Ketua Tim melakukan pengisian data capaian kinerja secara rutin setiap bulan pada pada link https://sites.google.com/view/manjakubbpomsmd/home sub menu Pengukuran Kinerja dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai.
3. Data kinerja yang telah terverifikasi kemudian di input setiap bulan pada SAKTI web, monev Bappenas, dan SIMETRIS.
4. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi pemanfaatan aplikasi SIMETRIS. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
5. Pimpinan Unit Kerja melakukan validasi data melalui aplikasi SIMETRIS eperformance untuk memastikan data bahwa data yang diinput:
   - Valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
   - Reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
   - Obyektif, yakni bebas dari intervensi/ kepentingan.
6. Evaluasi kinerja dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi serta merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka upaya pencapaian target kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- *Capaian Kinerja Organisasi;*
- *Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya;*
- *Pemanfaatan Informasi Kinerja; dan*
- *Realisasi Anggaran*

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah menetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja sasaran. Pencapaian kesembilan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Samarinda tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)	Kategori	Notifikasi Warna
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104.63	Sangat Baik	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100.00	Baik	
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100.49	Sangat Baik	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100.00	Baik	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	108.11	Sangat Baik	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	110.00	Sangat Baik	
7	Layanan Publik UPT yang Prima	104.26	Sangat Baik	
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	99.42	Baik	

Tabel 3.2
Matriks NKO Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Normalisasi Capaian PK
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisikoo yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	98.89	108.97	108.97

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Normalisasi Capaian PK
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	26.67	102.58	102.58
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	94.88	104.26	104.26
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100.00	97.14	97.14	97.14
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	94.29	103.62	103.62
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	80.60	81.69	101.35	101.35
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	100.00	105.26	105.26
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	97.53	114.74	110.00
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	98.74	102.06	102.06
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	109.89
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.93	98.51	108.34	108.34

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Normalisasi Capaian PK
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	82.40	103.00	103.00
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	105.65	105.65	105.65
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.90	72.70	102.54	102.54
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29	14.29	100.00	100.00
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.43	90.15	101.95	101.95
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10.00	10.00	100.00	100.00
		Jumlah desa pangan aman	4.00	4.00	100.00	100.00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	1.00	100.00	100.00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.96	15.96	100.00	100.00
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.50	100.00	108.11	108.11

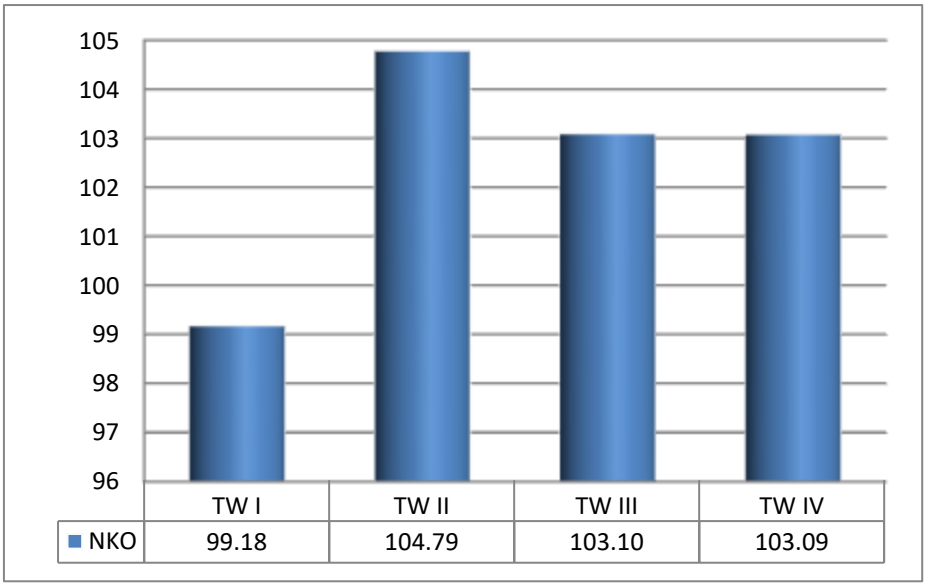
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Normalisasi Capaian PK
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	99.00	110.00	110.00
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.90	104.26	104.26
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.69	88.04	99.27	99.27
		Nilai AKIP UPT BPOM	83.60	82.26	98.40	98.40
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	100.00	100.00
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.50	3.50	100.00	100.00
Total Capaian PK						**2886.65**
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)						**103.09**
Predikat NKO						**Istimewa**



Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja. Pada Tahun 2025 ini dilakukan perhitungan NKO tahunan yang dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan NKO BBPOM di Samarinda pada tahun 2025 diperoleh **NKO sebesar 103.09** dengan predikat kinerja organisasi **"Istimewa"**. Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap 8 (delapan) sasaran kegiatan di atas, 7 (tujuh) sasaran kegiatan dengan kategori capaian **SANGAT BAIK** dan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kategori capaian **BAIK**.

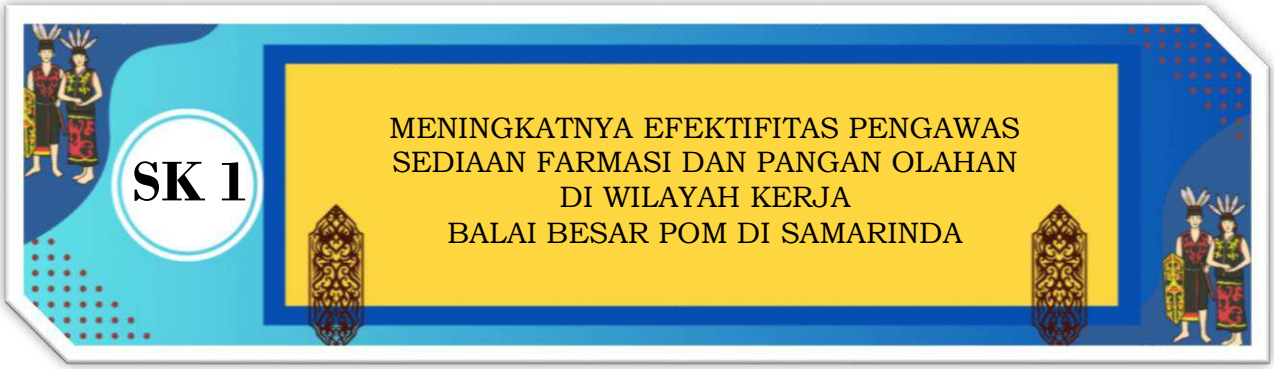
NKO Balai Besar POM di Samarinda bila dibandingkan per triwulan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Perbandingan NKO Balai Besar POM di Samarinda per Triwulan



Berdasarkan data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per triwulan, pada Triwulan I diperoleh NKO dengan predikat kinerja organisasi "Baik". Selanjutnya, terjadi peningkatan kinerja pada Triwulan II hingga Triwulan IV yang seluruhnya berada pada predikat kinerja organisasi "Istimewa". Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan konsistensi peningkatan kinerja setelah Triwulan I hingga akhir tahun.

Penjelasan Capaian Sasaran Kegiatan dan indikator-indikator kinerja Balai Besar POM di Samarinda secara rinci akan dijelaskan pada bagian berikut :



Pencapaian Sasaran Kegiatan ke 1 pada tahun 2025 diukur dengan 15 (lima belas) **Indikator Kinerja.** Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Terhadap Target Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kategeori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	98.89	108.97	Sangat Baik	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	26.67	102.58	Sangat Baik	
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	94.88	104.26	Sangat Baik	
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	97.14	97.14	Baik	
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	94.29	103.62	Sangat Baik	
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	80.60	81.69	101.35	Sangat Baik	

	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	100	105.26	Sangat baik	
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	97.53	114.74	Tidak dapat disimpulkan	
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	98.74	102.06	Sangat baik	
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89	Sangat Baik	
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.93	98.51	108.34	Sangat Baik	S
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	82.04	103.00	Sangat Baik	
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	105.65	100.5.65	Sangat Baik	
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.90	72.70	102.54	Sangat Baik	
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29	14.29	100.00	Baik	
Capaian Sasaran Kegiatan				**104.63**	**Sangat Baik**	

Tabel di atas menggambarkan target, realisasi dan capaian masing-masing indikator kinerja pada sasaran kegiatan pertama tahun 2025. Pada tabel tersebut, capaian realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 108,97% (**sangat baik**), Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 102.58% (**sangat baik**), Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 97,14% (**baik**), Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 103.62% (**sangat baik**), Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 101.35% (**sangat baik**), Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 105.26% (**sangat baik**), Persentase sarana produksi Pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 114.74% (**Tidak dapat disimpulkan**), Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 102.06% (**sangat baik)**, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 109.89% (**sangat baik**), Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 108.34% (**sangat baik**), Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 103.00 (**sangat baik**), Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar kemampuan laboratorium 102.54% (**baik**), indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 102.58% (**sangat baik**), Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 105.65% (**sangat baik**), dan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman 100% (**baik**). Capaian Sasaran kegiatan pertama sebesar 104.63% (**sangat baik**).

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Balai Besar POM di Samarinda dalam Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda telah berhasil dengan sangat baik.

Masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku yaitu sesuai ketentuan dengan mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara perhitungan Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah sebagai berikut :

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

Adapun rincian kriteria perhitungan masing-masing komoditi adalah sebagai berikut :

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d+e
   a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),
      Mencakup kesesuaian dengan:
      1. Target sampel,
      2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
      3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
   b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).
      Mencakup kesesuaian dengan:
      1. Renlak periode/waktu sampling,
      2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
   c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
      Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.
   d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
      Mencakup kesesuaian:
      1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
      2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
   e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5
   a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2
      Keterangan:
      a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
      a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%
   b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

c. Kesesuaian parameter uji

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

c. Kesesuaian parameter uji

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan

(a1 + a2) /2

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian

3. SLA Pelaporan

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut
Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Capaian realisasi Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Persentase sampel obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan : Kesesuaian perencanaan sampling sebesar 291 sampel dari target 291sampel, sesuai renlak per kategori sampel dan per kategori kelas terapi sebanyak 271 sampel dari target 291 sampel, Kesesuaian Pelaksanaan Sampling 291 sampel dari target 291 sampel, Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian telah sesuai target yaitu 434 sampel, Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian telah sesuai target yaitu 291 sampel, Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan telah sesuai target yaitu 29 laporan.

- Persentase sampel obat bahan alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan : Pemenuhan target pengawasan sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling yaitu 213 sampel dari target 212 sampel dan sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling 245 sampel dari 247 sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya , Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan yaitu 211 sampel dari target 213 sampel, Kesesuaian parameter uji telah sesuai target yaitu 213 sampel, akurasi dalam penentuan Kesimpulan telah sesuai target yaitu 213 sampel, tanggapan atas surat tindak lanjut sudah sesuai target yaitu 34 surat.

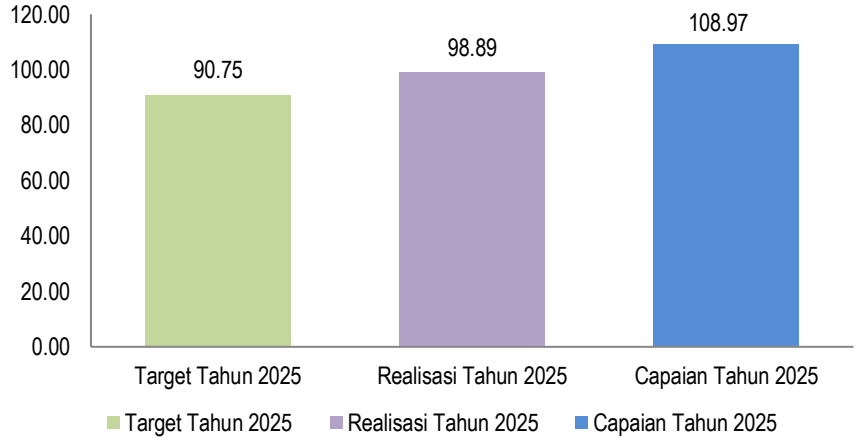
- Persentase sampel suplemen kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, pemenuhan target pengawasan sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling yaitu 52 sampel dari target 52 sampel dan sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling 59 sampel dari 61 sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya, Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan 51 sampel dari 52 sampel, kesesuaian parameter uji

pelaporan telah sesuai target yaitu 52 sampel, akurasi dalam penentuan Kesimpulan 51 sampel dari target 52 sampel, Tanggapan atas surat tindak lanjut telah sesuai target yaitu 6 surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

- Persentase sampel kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti, pemenuhan target pengawasan sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling yaitu 389 sampel dari target 389 sampel dan dan sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling 432 sampel dari 454 sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya, kesesuaian pelaksanaan sampling 386 sampel dari target 389 sampel, kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan 368 sampel dari target 389 sampel , ketepatan dalam penentuan kesimpulan telah sesuai target yaitu 389 sampel, tanggapan atas surat tindak lanjut telah sesuai target yaitu 54 surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025



Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
90.75	98.89	108.97	Sangat baik	

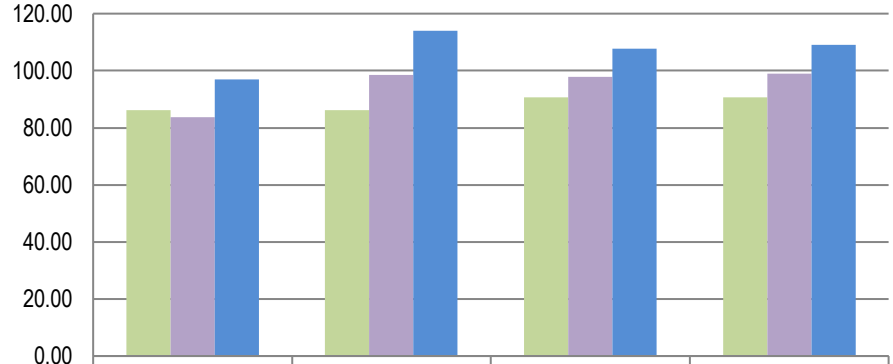
Sesuai gambar di atas, target persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sebesar 90.75% dengan realisasi sebesar 98.89% sehingga capaian sebesar 108.97%. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi melebihi target dan masuk dalam kriteria **sangat baik.** Indikator ini merupakan indikator yang baru untuk periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak terdapat baseline data pada tahun sebelumnya untuk menjadi baseline target awal Renstra di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama Renstra, sehingga pengukuran capaian dari UPT belum dapat tergambarkan. Perhitungan indikator ini tidak lagi memperhitungkan hasil pengawasan penandaan maupun hasil pengujian yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), namun lebih menekankan kepada kesesuaian sampling, pengawasan penandaan dan pengujian dengan pedoman yang berlaku, baik Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium ataupun pedoman atau SOP lainnya yang terkait.

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggambarkan kondisi obat yang beredar di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Definisi dari sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disampling menggunakan metode targeted atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait. Sampel Sediaan Farmasi mencakup sampel yang disampling oleh BBPOM di Samarinda di tahun berjalan. Sampel Sediaan Farmasi yang dimaksud adalah Sediaan Farmasi yang disampling oleh BBPOM di Samarinda sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, walaupun sampel tersebut dilakukan pengujian oleh UPT sendiri maupun UPT lainnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium pada lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 Tahun 2025. Kriteria Sediaan Farmasi Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk produk dengan nomor izin edar yang sudah habis masa berlaku)
2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025



	TW I	TW III	TW III	TW IV
Target	86.25	86.25	90.75	90.75
Realisasi	83.66	98.41	97.84	98.89
Capaian	97.00	114.10	107.81	108.97

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni 2025 terdapat perubahan target PK untuk indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 86.25 menjadi 90.75, dengan mengacu pada realisasi kinerja sampai dengan bulan Mei 2025, dan terlihat di triwulan II capaian telah melampaui 110% kriteria tidak dapat disimpulkan. Selain itu juga terdapat perubahan Manual IKU, perubahan cara perhitungan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan triwulan I dan II.

Dengan adanya perubahan target PK, menggunakan target yang baru dapat terlihat adanya perbaikan capaian, Capaian kinerja berada di atas 100% pada triwulan III dan IV, masing-masing sebesar 107,81%, dan 108,97% dengan kriteria Sangat Baik. Secara umum, kinerja tahun 2025 menunjukkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut yang optimal dan konsisten melampaui target yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
94.75	98.89	104.37	Tercapai/ melampaui	▲

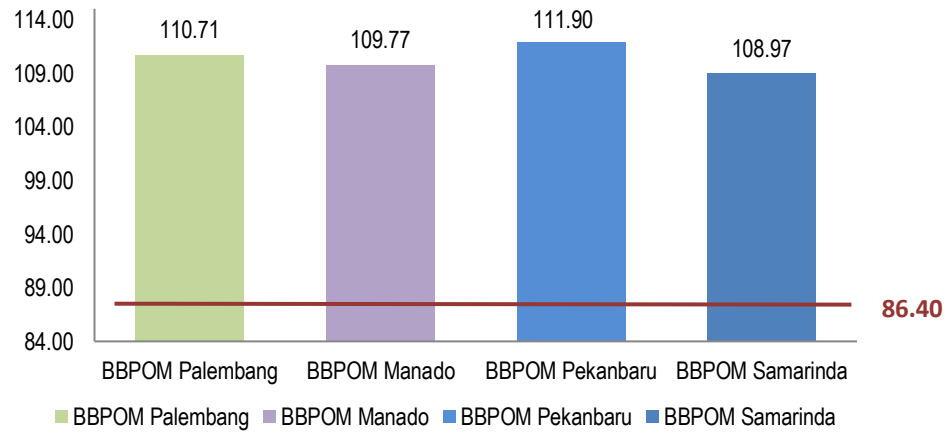
Sesuai gambar di atas, target persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sebesar 94.75% pada akhir periode Renstra 2025-2029 dan realisasi tahun 2025 sebesar 98.89%, realisasi telah melampaui target akhir periode Renstra dengan capaian sebesar 104.37% dan masuk dalam kriteria **Tercapai/melampaui.** Dengan demikian perlu dilakukan reviu target tahun selanjutnya untuk indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan karena realisasi di tahun 2025 telah melampaui target akhir periode Renstra 2025-2029, dan realisasi tahun 2025 digunakan sebagai baseline untuk perhitungan target tahun selanjut nya karena indikator ini merupakan indikator baru untuk periode Renstra 2025-2029 dan tahun 2025 merupakan tahun pertama pada Renstra 2025-2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
86.40	Palembang	90.00	99.64	110.71	Tidak dapat disimpulkan
	Manado	90.00	98.79	109.77	Sangat baik
	Pekanbaru	88.25	98.75	111.90	Tidak dapat disimpulkan
	Samarinda	90.75	98.89	108.97	Sangat baik

Gambar 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025, capaian yang diperoleh BBPOM di Palembang dan

BBPOM di Pekanbaru melampaui 110% dan kategori Tidak dapat disimpulkan , sedangkan capaian BBPOM di Manado dan BBPOM di Samarinda masuk dalam kategori **baik.** Realisasi dari keempat balai seluruhnya telah melampaui target nasional yang telah ditetapkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan capaian Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dimana realisasi telah melampaui dari target yang ditetapkan adalah :

- Pemilihan sampel yang dilakukan berbasis analisis risiko memungkinkan pengawas untuk lebih fokus pada produk yang berpotensi bermasalah, sehingga peluang mendeteksi produk berisiko tinggi meningkat.
- penetapan kuota sampling yang realistis dan prioritas pada kategori sediaan farmasi tertentu membantu pengawasan berjalan lebih efisien dan efektif.
- Optimalisasi Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT) yang meningkatkan efektivitas Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan .
- tersedianya sumber daya dan personel yang memadai sangat menunjang keberhasilan pengawasan. Jumlah dan kompetensi tim inspeksi lapangan yang cukup memastikan pengambilan sampel dapat dilakukan tepat waktu,
- Kolaborasi dan koordinasi yang baik antar pihak terkait sangat mendukung pencapaian target.
- Dukungan manajemen dan kebijakan menjadi faktor penunjang lainnya. Komitmen pimpinan dalam menyediakan anggaran, sarana, dan prosedur yang mendukung pengawasan memastikan proses berjalan sesuai rencana.
- Pengalaman dan keahlian tim sampling menjadi faktor yang tidak kalah penting. Tim yang berpengalaman mampu lebih cepat mengenali produk berisiko tinggi dan menentukan tindakan yang tepat sesuai ketentuan.

Meskipun realisasi telah melampaui dari target yang ditetapkan namun berdasarkan realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai dengan triwulan IV tahun 2025 masih terdapat komponen penilaian yang belum optimal yaitu :

- Persentase sampel obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dimana sesuai renlak per kategori sampel dan per kategori kelas terapi sebanyak 271 sampel dari target 291 sampel,
- Persentase sampel Obat Bahan Alam berisiko yang ditindaklanjuti, dimana Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan 211 sampel dari target 213 sampel
- Persentase sampel suplemen kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan,dimana

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan 51 sampel dari target 52 sampel, akurasi dalam penentuan kesimpulan 51 sampel dari target 52 sampel.

- Persentase sampel kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti, dimana Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan 368 sampel dari target 389 sampel**,** Kesesuaian pelaksanaan sampling 386 sampel dari target 389 sampel.

Dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan IV untuk pencapaian indikator persentase Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti ditemukan beberapa kendala sebagai berikut :

- Terdapat kendala pemenuhan sampel dari sarana tidak berizin dan target ruang lingkup
- Sampel OBA terdapat 1 sampel tidak memenuhi ketentuan sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu karena reagen untuk melakukan pengujian flavonoid total tidak tersdia
- Alat DUSA laboratorium Obat mengalami kerusakan
- Timbangan mikro pada citotoxic kabinet mengalami kerusakan
- Keterlambatan pengiriman sampel dan hasil pengujian sampel BBPOM di Samarinda yang diuji di Balai lain

- Terdapat 1 sampel OBA di bulan November yang tidak memenuhi ketentuan sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu dikarenakan baku dan reagen untuk pengujian parameter flavonoid total tidak tersedia di BBPOM Samarinda
- Terdapat 8 sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu dan terdapat 1 sampel BPOM Balikpapan yang tidak memenuhi ketentuan sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling pada TW IV dikarenakan pengulangan sampel TMS yang memerlukan waktu lebih panjang karena jadwal menguji bersamaan dengan jadwal pelatihan internal kosmetik dan surveilan KAN
- Terdapat 3 sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan dikarenakan adanya 3 sampel kasus yang berasal dari pusat merupakan sampel kosmetik tanpa izin edar yang tidak bisa dilakukan penilaian penandaan

Dalam rangka penyempurnaan kinerja selanjutnya telah dilakukan beberapa perbaikan di triwulan IV tahun 2026 sebagai berikut :

- Melakukan perencanaan sampling obat secara insensif untuk dari sarana tidak berizin dan target ruang lingkup dibulan berikutnya
- melakukan permintaan reagen untuk pengujian parameter flavonoid total ke PPPOMN
- .Perbaikan alat DUSA laboratorium obat
- Perbaikan timbangan mikro di citotoxic cabinet
- Berkomunikasi dengan balai bersangkutan dan konfirmasi atas Tindak Lanjut sampel yang masih terkendala

Selain itu perlu melakukan evaluasi terhadap keterlambatan atau ketidaksesuaian pengujian dan pelaporan sampel.di tahun selanjutnya sebagai upaya perbaikan kedepannya

Permasalahan/kendala yang dihadapi di triwulan IV tahun 2025 dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut yang dilakukan di triwulan IV dan akan dilakukan pada periode selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7
Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2026

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Bulan Oktober 2025								
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.Terdapat kendala pemenuhan sampel dari sarana tidak berizin dan target ruang lingkup 2.Sampel OBA terdapat 1 sampel tidak memenuhi ketentuan sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu karena reagen untuk melakukan pengujian flavonoid total tidak tersdia. 3. Alat DUSA laboratorium Obat mengalami kerusakan 4. Timbangan mikro pada citotoxic kabinet mengalami kerusakan 5. Keterlambatan	1. Melakukan perencanaan sampling obat secara insensif untuk dari sarana tidak berizin dan target ruang lingkup dibulan berikutnya 2. melakukan permintaan reagen untuk pengujian flavonoid total ke PPPOMN 3.Perbaikan alat DUSA laboratorium obat 4. Perbaikan timbangan mikro di citotoxic kabinet 5.Berkomunikasi dengan balai bersangkutan dan konfirmasi atas TL sampel yang masih terkendala	1. Melakukan perencanaan sampling obat secara insensif untuk dari sarana tidak berizin dan target ruang lingkup dibulan berikutnya 2. Membuat surat permintaan reagen untuk pengujian flavonoid total ke PPPOMN 3.Membuat surat perbaikan alat DUSA 4. Membuat surat perbaikan timbangan citotoxyc kabinet 5.membuat nota dinas ke UPT yang bersangkutan untuk penyampaian hasil monev regional	1. Nov 2-3 Okt 4-5 Nov	1. T 2. Y 3 & 4 Y 5. T	2. Pengujian 9 3 & 4 Pengujian 8	2. Kebutuhan reagen/media dan consumable meningkat, tidak sesuai dengan perencanaan awal 3 & 4. Terjadi penumpukan sampel yang belum diuji di laboratorium

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		pengiriman sampel dan hasil pengujian sampel BBPOM di Samarinda yang diuji di Balai lain						
Bulan November 2025								
2		Terdapat 1 sampel OBA di bulan November yang tidak memenuhi ketentuan sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu dikarenakan baku dan reagen untuk pengujian parameter flavonoid total tidak tersedia di BBPOM Samarinda	Permintaan baku dan regen untuk pengujian parameter flavonoid total ke PPPOMN	Membuat surat permintaan baku dan regen untuk pengujian parameter flavonoid total ke PPPOMN	Nov 2025	Y	Pengujian 2	Overtimeline pengerjaan sampel Obat dan Makanan sehubungan dengan adanya peraturan maskimal pengerjaan sampel 20 HK untuk sampel Obat, 15 HK di pengujian sampel OBASK dan Kosmetik, dan 25 HK untuk sampel pangan olahan dan PIRT sehingga target pengerjaan sampel sesuai standar sebesar 100 % tidak tercapai
Bulan Desember 2025								
3		Terdapat 8 sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan sampel yang	Melakukan evaluasi terhadap keterlambatan atau ketidaksesuaian pengujian dan	Mengidentifikasi penyebab keterlambatan atau ketidaksesuaian pengujian dan pelaporan	TW 1 2026	Y	Pengujian 2	Overtimeline pengerjaan sampel Obat dan Makanan sehubungan dengan adanya

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu dan terdapat 1 sampel BPOM Balikpapan yang tidak memenuhi ketentuan sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling pada TW IV dikarenakan pengulangan sampel TMS yang memerlukan waktu lebih panjang karena jadwal menguji bersamaan dengan jadwal pelatihan internal kosmetik dan surveilan KAN	pelaporan sampel.	sampel serta menetapkan tindakan perbaikan dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.				peraturan maskimal pengerjaan sampel 20 HK untuk sampel Obat, 15 HK di pengujian sampel OBASK dan Kosmetik, dan 25 HK untuk sampel pangan olahan dan PIRT sehingga target pengerjaan sampel sesuai standar sebesar 100 % tidak tercapai
		Terdapat 3 sampel kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan dikarenakan adanya 3 sampel kasus yang berasal dari pusat merupakan	Pembelian 3 sampel produk ksometik yang digunakan untuk pemenuhan target pengawasan penandaan	Melakukan pembelian 3 sampel produk ksometik yang digunakan untuk penilaian penandaan	Des 2025	Y	Pemeriksaan 10	Tidak terlaksananya sampling kosmetik yang sesuai dengan pedoman sampling

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		sampel kosmetik tanpa izin edar yang tidak bisa dilakukan penilaian penandaan.						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.8
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QIA.002.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengadaan sampel				
			- Biaya pengiriman sampel	12	KL	12	KL
			- Sampel	948	SPL	949	SPL
			- Perjalanan Dinas Biasa	4	KL	4	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	13	KL	13	KL
		B	Kegiatan Pendukung Sampling				
			- Poster / Leaflet	1	PKT	1	PKT
			- Belanja keperluan sampling	1	PKT	1	PKT
QIA.002.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Kesehatan				
			- Reagen	3	PKT	3	PKT
			- Media Mikro Sampel Balai	2	PKT	2	PKT
			- Pengadaan Reagen/Media/bahan penunjang laboratorium Pengujian	1	PKT	1	PKT
			- ATK dan Komputer Suplies	1	PKT	1	PKT
			- Pengadaan suku cadang	1	PKT	1	PKT
		B	Perbaikan Peralatan Fungsional				
			- Pemeliharaan Inventaris Peralatan Laboratorium	2	KL	2	KL

Di tahun 2025 ini, realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan BBPOM di Samarinda sebesar 98,89 % jauh melampaui dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 90.75 %. Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan, obat kuasi serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, obat kuasi, kosmetika, dan suplemen kesehatan di tahun 2025 telah dilakukan sampling Sediaan Farmasi sebanyak 949 sampel, dengan rincian 291 sampel obat, 213 sampel obat bahan alam dan obat kuasi, 52 sampel suplemen kesehatan, dan 389 sampel kosmetik. Untuk laboratorium obat dilakukan pengujian sampel dengan parameter sesuai ketentuan sebanyak 291 sampel yang merupakan sampel BBPOM di Samarinda dan sampel regional. Laboratorium OBASK melakukan pengujian sampel sesuai dengan Pedoman Sampling sebanyak 245 sampel dari 247 sampel obat bahan alam dan kuasi yang merupakan sampel BBPOM di Samarinda dan sampel BPOM di Balikpapan, pengujian sampel sesuai dengan Pedoman Sampling sebanyak 59 sampel dari 61 sampel suplemen kesehatan yang merupakan sampel BBPOM di Samarinda dan sampel BPOM di Balikpapan. Laboratorium Kosmetik melakukan pengujian sampel sesuai dengan Pedoman Sampling sebanyak 432 sampel dari 454 sampel yang merupakan sampel BBPOM di Samarinda dan sampel BPOM di Balikpapan .

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 dalam rangka menunjang pencapaian target diantaranya :

- Adanya penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 17025:2017 secara konsisten dalam pelaksanaan pengujian laboratorium di BBPOM di Samarinda,
- Identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan di Laboratorium BBPOM di Samarinda baik pelatihan dalam bentuk Bimtek Internal maupun supervisi (transfer of knowledge) oleh penyelia ataupun penguji senior
- Pengadaan sarana penunjang pengujian (reagensia, media mikrobiologi, baku pembanding, suku cadang, bahan habis pakai, kebutuhan ruangan dan listrik, dan lain-lain),
- Pengadaan alat laboratorium tahun anggaran 2025 sesuai dengan persetujuan dari PPPOMN untuk memenuhi peralatan laboratorium
- Pelaksanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling di laboratorium BBPOM di Samarinda
- Monitoring terhadap timeline waktu sampling, waktu pengujian dan waktu pelaporan serta kesesuaian pengujian dengan parameter uji kritis setiap bulannya,
- Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025, serta tersedianya sampel obat sesuai dengan kriteria pedoman sampling tahun 2025,
- Pelaksanakan rapat koordinasi internal terkait rencana pelaksanaan sampling pada awal tahun 2025
- Melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dilakukan secara berkala dan dilaporkan hasil

tindak lanjut kepada direktorat terkait.

- Pelaksanaan uji banding antar laboratorium maupun uji profisiensi untuk komoditi Obat, Obat Tradisional – Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Mikrobiologi sebagai bentuk peningkatan jaminan mutu hasil pengujian di laboratorium,
- Koordinasi terkait hasil uji untuk sampel yang diuji lintas balai anggota Regional
- Samarinda baik melalui whatsapp group,pelaporan sampling dan pengujian Region Samarinda maupun melalui SIPT
- Pelaksanaan penginputan hasil uji melalui aplikasi SIPT
- Pelaksanaan perbaikan peralatan untuk menunjang kelancaran proses pengujian
- Pelaksanaan revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengujian dan memperlancar proses pengujian
- Perencanaan rekalibrasi dan verifikasi peralatan laboratorium guna menjamin validitas hasil pengujian,
- Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi implementasi sistem regionalisasi di Regional Samarinda dan pembahasan rencana pelaksanaan sampling dan pengujian di Regional Samarinda sebelum dan sesudah efisiensi.
- Desk revisi target PK RAPK 2025 dan melakukan penyesuaian target capaian indikator sesuai dengan hasil desk dengan Rorenkeu dan unit pengampu pada kegiatan Bimtek Renstra 2025-2029.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.9
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	601.229.000	600.580.721,50	99,89%	108,97	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini terlihat dari proporsi realisasi anggaran yang sebanding capaian indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada akhir Tahun 2025 sehingga Tingkat Efisiensi disimpulkan Efisien. Telah dilakukan revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan pengujian di laboratorium dan kebutuhan sampling sampel sediaan farmasi sesuai jumlah besaran pemanfaatan blokir yang ada sepanjang

tahun 2025. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian kriteria efisiensi adalah pemanfaatan anggaran untuk kegiatan sampling dan pemeriksaan serta pengujian sampel Obat dan Makanan, pengadaan sampel Obat dan Makanan serta pengadaan reagensia, media, operasional laboratorium, pemeliharaan peralatan, suku cadang dan kebutuhan pengujian lainnya untuk menunjang kelancaran proses pengujian. Pengukuran efisiensi terhadap penggunaan sumber daya tidak sepenuhnya hanya dibandingkan terhadap sumber daya anggaran, pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi perhatian karena berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) lingkup BBPOM di Samarinda, sampai dengan akhir Tahun 2025 ini masih terjadi gap cukup besar untuk pemenuhan SDM di Laboratorium Regional Samarinda tidak hanya dalam jumlah personil pengujian namun dukungan kualitas penguji juga merupakan hal penting yang perlu untuk terus ditingkatkan. Berbagai jenis pelatihan baik internal maupun eksternal terus diupayakan dan direncanakan untuk menunjang hasil capaian kinerja BBPOM di Samarinda.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Proses pelaporan kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan sangat diperlukan dalam menentukan langkah strategis berupa rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator. Rencana aksi yang dilakukan terus menerus dilakukan pemantauan termasuk pemantauan terjadinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan serta penentuan solusi yang efektif dan efisien untuk pencapaian kinerja.

BBPOM di Samarinda selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukkan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Terutama untuk indikator baru pada target renstra 2025-2029 yang perlu dilakukan reviu dan analisis terhadap target seperti indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang pada Tahun 2025 ini. Informasi laporan kinerja pada triwulan II tepatnya sampai dengan bulan Mei 2025 telah dijadikan acuan dalam reviu target PK tahun 2025 pada desk revisi target PK RAPK 2025 dan melakukan penyesuaian target capaian indikator sesuai dengan hasil desk dengan Rorenkeu dan unit pengampu pada kegiatan Bimtek Renstra 2025-2029 dimana realisasi jauh melampaui target yang ditetapkan dan capaian melebihi 100%.

i Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan yang berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, BBPOM di Samarinda telah mengelola beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja indikator ini yang tertuang pada daftar risiko semester 2 tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Kesalahan penentuan Parameter Uji Kritis (PUK).
2. Overtimeline pengerjaan sampel Obat dan Makanan sehubungan dengan adanya peraturan maskimal pengerjaan sampel 20 HK untuk sampel Obat, 15 HK di pengujian sampel OBASK dan Kosmetik, dan 25 HK untuk sampel pangan olahan dan PIRT.
3. Pengujian sampel dalam rangka pemenuhan ruang lingkup tidak dikerjakan sesuai target.
4. Verifikasi metode yang sudah dijadwalkan tidak dikerjakan sesuai target.
5. Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi personel laboratorium tidak dilaksanakan sesuai rencana
6. Pengadaan alat laboratorium tidak sesuai perencanaan.
7. Terjadi penumpukan sampel yang belum diuji di laboratorium yang disebabkan karena kerusakan alat-alat yang digunakan dalam pengujian sehingga menimbulkan penumpukan sampel selama menunggu perbaikan.
8. Kebutuhan reagen, media dan *consumable* meningkat, tidak sesuai dengan perencanaan awal. Terdapat perubahan atau penambahan parameter uji kritis baru dan atau metode uji baru yang diwajibkan dalam prioritas sampling.
9. Kebocoran hasil uji.
10. Terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan hasil pengujian, laporan manual (*paper based*) adalah salah satu hal yang berpotensi besar dalam menyumbang kesalahan dalam pembuatan laporan.
11. Peningkatan resiko keterpaparan penguji terhadap senyawa sitostatika yang bersifat teratogenik, mutagenik, dan karsinogenik yang berbahaya bagi tubuh
12. Kompetensi personel laboratorium menurun, penurunan kompetensi personel laboratorium dapat terjadi karena penerimaan pegawai baru atau pegawai yang mengalami rotasi, sakit dan pindah ke UPT lain.
13. Pencatatan penggunaan alat laboratorium belum dilakukan secara real time, sehingga jika terjadi indikasi kerusakan alat dapat terlambat ditangani
14. Kesalahan perhitungan capaian kinerja.
15. Kesalahan penetapan kesimpulan hasil pengujian.
16. Kesalahan penulisan syarat pada Catatan Pengujian.
17. Retain sampel tidak tertelusur.
18. Kesalahan pemusnahan retain sampel.
19. Keberpihakan personel kelompok pengujian kepada pihak ketiga terkait penentuan kesimpulan hasil uji
20. Data yang digunakan tidak mudah untuk dievaluasi dikarenakan terdapat parameter baru/pengkategorian baru yang tidak terakomodir dalam system
21. Tidak terlaksananya sampling kosmetik yang sesuai dengan pedoman sampling

Aktivitas pengendalian yang telah dilakukan oleh BBPOM di Samarinda dalam mengurangi dampak risiko yang mungkin akan terjadi dan berdampakvterhadap pencapaian target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi penerbitan SPK oleh ketua tim pengujian dan penerbitan SPP oleh ketua tim/ penyelia laboratorium pangan dan mikrobiologi.
2. Pengaturan *timeline* serta monitoring dan evaluasi masing-masing proses mulai dari pembuatan SPK, pembuatan SPP, proses pengujian dan pembuatan laporan, dan verifikasi hasil uji.
3. Melakukan penjadwalan terhadap pengujian sampel dalam rangka pemenuhan standar ruang lingkup serta monitoring dan evalusi terhadap jadwal yang sudah dibuat
4. Membuat jadwal verifikasi metode analiasa pengujian sampel serta monitoring dan evalusi terhadap jadwal yang sudah dibuat
5. Pelatihan internal dalam rangka peningkatan standar kompetensi personel laboratorium
6. Membuat skala prioritas pengadaan alat laboratorium dalam rangka pemenuhan standar alat laboratorium
7. Perbaikan alat-alat laboratorium yang mengalami kerusakan.
8. Penetapan *timeline* masuknya sampel ke pengujian.
9. Membuat Surat Pernyataan Personel dan melakukan penyegaran kepada seluruh pegawai yang terkait tentang pentingnya komitmen menjaga kerahasiaan hasil uji.
10. Pembuatan lembar kendali laporan yang memuat *timeline* koreksi laporan setelah diverifikasi oleh penyelia.
11. Peningkatan kompetensi penguji melalui pelatihan atau pendampingan internal.
12. Pembelian Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan pedoman dari P3OMN, Adanya pendampingan dari P3OMN untuk penanganan sampel sitostatika hingga pembuangan limbahnya, Sosialisasi terkait penanganan sampel hingga limbah sitostatika kepada seluruh pegawai
13. Dibuat inovasi berupa pengisian penggunaan alat yang diisikan secara langsung (real time) oleh user sebelum dan setelah penggunaan alat secara online (menggunakan QR Code).
14. Membuat rumus perhitungan baru yang menggambarkan jumlah total hari kerja pengujian sampel.
15. Membuat *database* persyaratan hasil uji untuk pengendalian kesalahan penetapan kesimpulan hasil pengujian.
16. Membuat *database* persyaratan hasil uji untuk pengendalian kesalahan penulisan syarat pada Catatan Pengujian.
17. Membuat laporan monev terhadap aplikasi SIPANSE untuk pengendalian Retain sampel tidak tertelusur.
18. Membuat laporan monev terhadap aplikasi SIPANSE untuk pengendalian Kesalahan pemusnahan retain sampel.

19. Membuat pakta integritas dan surat pernyataan personel.
20. Membuat ulang aplikasi SITUKIN
21. Membuat database hasil pengawasan produk di tahun sebelumnya

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut, sedangkan Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

Target fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh BBPOM di Samarinda pada tahun 2025 adalah sebanyak 45 sarana dengan target sarana pelayanan kefarmasian yang melaporkan KTD/ESO melalui website e-meso.pom.go.id sebanyak 26% dari jumlah sarana pelayanan yang telah diberikan KIE. Penilaian indicator kinerja ini dilakukan di akhir tahun 2025. Adapun perhitungan nya sebagai berikut :

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

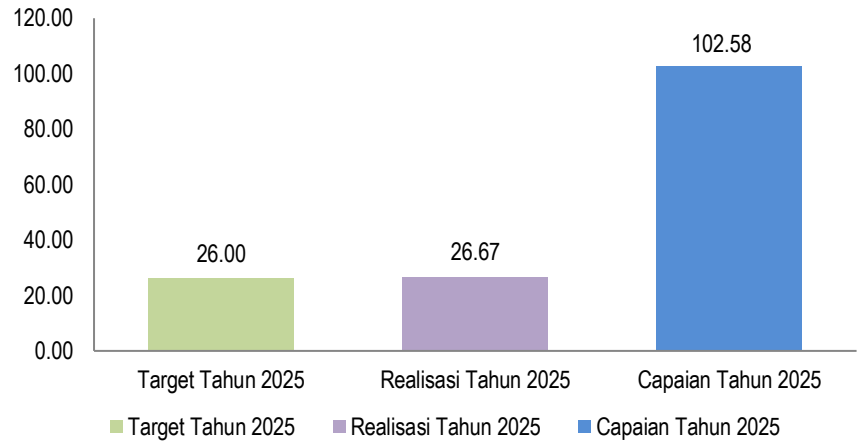
Keterangan:

A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan Diuji meliputi pengujian sampel di laboratorium.

B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025**

Gambar 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025



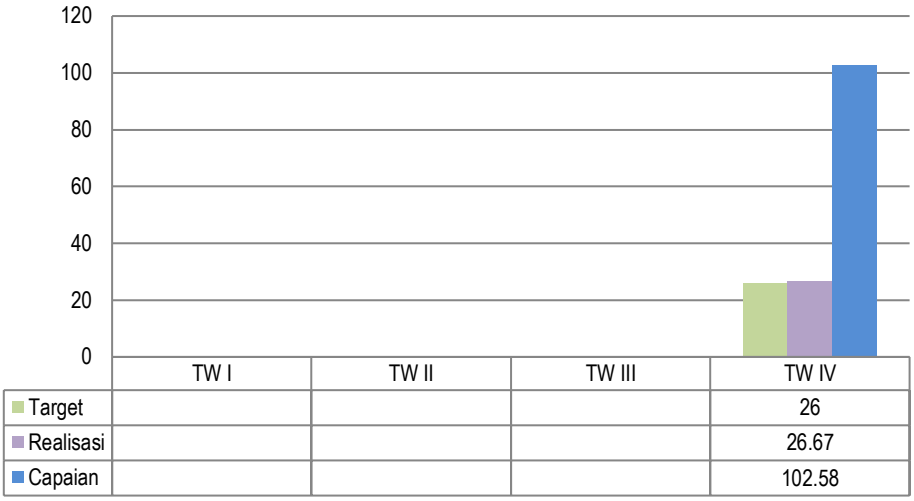
Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Terhadap Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
26.00	26.67	102.58	Sangat baik	

Sesuai gambar di atas, target Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO sebesar 26.00% dengan realisasi sebesar 26.67% sehingga capaian sebesar 102.58%. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi telah mencapai target yang di tetapkan dan masuk dalam kriteria **Sangat Baik.** Hal ini menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO telah dilakukan secara optimal salah satunya adalah pembuatan Whatsapp Grup sebagai sarana koordinasi antara penanggung jawab sarana pelayanan Kesehatan peserta KIE dengan penanggung jawab Balai Besar POM di Samarinda dalam hal pelaporan KTD/ESO.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO per Triwulan Tahun 2025



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target				26
Realisasi				26.67
Capaian				102.58

Indikator Kinerja persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dilakukan pengukuran di akhir tahun 2025 dan merupakan indikator baru pada periode Rentra 2025-2029 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya maupun diperbandingkan dengan realisasi triwulan. Pada tahun 2025, persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO sebesar 26.67%, yang mana telah melapaui target yang telah ditentukan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
30.00	26.67	88.90	Akan tercapai	

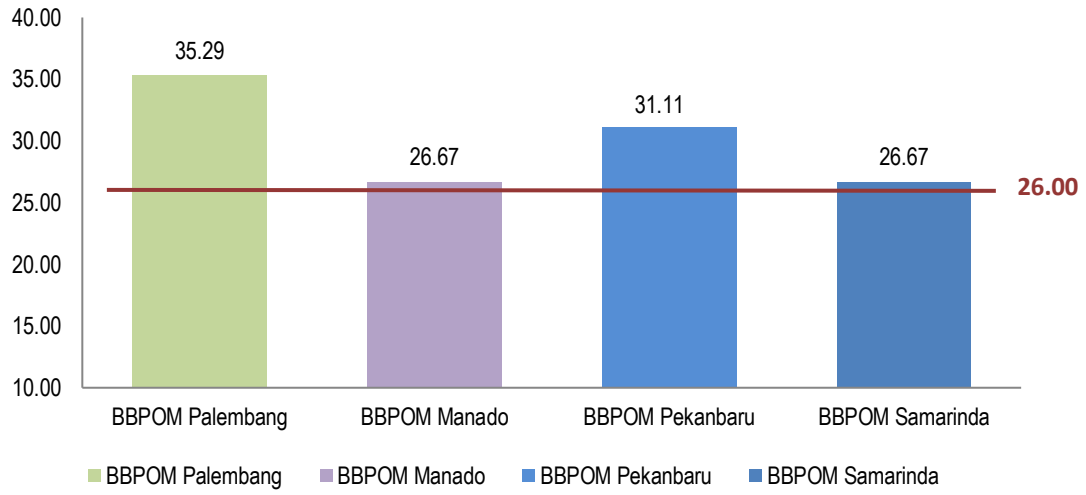
Sesuai gambar di atas, realisasi indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada tahun 2025 belum mencapai target akhir periode Renstra 2025-2029, dengan % capaian sebesar 88.90 % kategori Akan tercapai, sehingga dapat diperkirana target akhir periode Renstra akan tercapai, namun perlu terus dilakukan upaya-upaya peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang ketercapaian indikator kinerja ini agar target pada akhir periode Renstra tahun 2029 nanti dapat tercapai

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster ...) dan Target Nasional

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
26.00	Palembang	26.00	35.29	136.73	Tidak dapat disimpulkan
	Manado	26.00	26.67	102.58	Sangat baik
	Pekanbaru	26.00	31.11	119.65	Tidak dapat disimpulkan
	Samarinda	26.00	26.67	102.58	Sangat baik

Gambar 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO tahun 2025, realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Palembang, diikuti oleh BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Manado. Capaian dari keempat balai yang diperbandingkan untuk BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Manado masuk dalam kategori **Sangat baik**, sedangkan capaian BBPOM di Palembang dan BBPOM di Pekanbaru masuk kategori **Tidak dapat disimpulkan**. Realisasi dari keempat balai seluruhnya telah mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Capaian persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada tahun 2025

sebesar 26.67%. Faktor yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja ini telah dilaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans sebagai peningkatan pemahaman kepada penanggung jawab Farmakovigilans dari sarana pelayanan Kesehatan di wilayah Manado dan sekitarnya termasuk dalam hal pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan Efek Samping Obat (KTD/ESO). Pelaksanaan KIE dilakukan secara daring pada tanggal 30 April 2025 dengan peserta penanggung jawab dari sarana pelayanan Kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah peserta 45 orang dan pembuatan Whatsapp Grup sebagai sarana koordinasi antara penanggung jawab sarana pelayanan Kesehatan peserta KIE dengan penanggung jawab Balai Besar POM di Samarinda dalam hal pelaporan KTD/ESO.

Sampai dengan bulan oktober tahun 2025 baru 10 sarana yang telah melaporkan KTD/ESO sehingga dilakukan upaya koordinasi secara intensif ke fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diberikan KIE agar target indikator kinerja dapat tercapai sesuai target 2025 yang ditetapkan.

fasilitas pelayanan Kesehatan yang melaporkan KTD/ESO melalui e-meso.pom.go.id sejumlah 12 Fasilitas Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO hingga akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. RSUD dr. Abdul Rivai, Berau
2. RSUD Inche Abdoel Moeis, Samarinda
3. RSUD Abdoel Wahab Sjahrani, Samarinda
4. RS Dirgahayu, Samarinda
5. RSUD Aji Muhammad Parikesit, Kutai Kartanegara
6. RS Hermina, Samarinda
7. Puskesmas Bengkuring, Samarinda
8. RSUD Kudungga, Kutai Timur
9. Puskesmas Bontang Utara 2, Bontang
10. RSUD Talisayan, Berau
11. Puskesmas Sidomulyo, Samarinda
12. Puskesmas Linggang Bigung, Kutai Barat

Permasalahan/kendala yang dihadapi di triwulan IV tahun 2025 dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut yang dilakukan di triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Dari target 12 sarana yang melaporkan KTD/ESO terdapat 10 sarana yang telah melaporkan; masih 2 sarana yang belum melaporkan	Koordinasi secara intensif ke fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diberikan KIE	Berkoordinasi secara intensif ke fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diberikan KIE dan pendampingan ke sarana untuk melaporkan KTD/ESO	Desember 2025	Y	Pemeriksaan 35	Tidak semua peserta KIE Farmakovigilance memahami materi sehingga berpotensi kejadian KTD/ESO tidak dilaporkan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.14
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QDC.001.051	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	A	KIE Farmakovigilans di Kota Samarinda - Honor Petugas Sarana Pelayanan Kesehatan	14	OR	14	OR
		B	Kegiatan Keperluan KIE Farmakovigilans - Poster / Leaflet - Gimmick	1 1	PKT PKT	1 1	PKT PKT

Kegiatan dan anggaran yang mendukung indikator kinerja ini di tahun 2025 mengalami Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan strategi yang tepat agar target kinerja tetap tercapai antara lain pelaksanaan KIE Farmakovigilans kepada penanggung jawab Farmakovigilans dari sarana pelayanan Kesehatan secara daring, koordinasi antara penanggung jawab sarana pelayanan Kesehatan peserta KIE dengan penanggung jawab Balai Besar POM di Samarinda dalam hal pelaporan KTD/ESO melalui Whatsapp Grup serta koordinasi langsung yang dilakukan

bersamaan dengan kegiatan pengawasan sarana distribusi rutin baik dalam kota maupun luar kota. Pada tahun 2025 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Definisi Operasional dan cara perhitungan realisasi.
2. Perencanaan kegiatan KIE meliputi waktu pelaksanaan, jumlah peserta, dan sasaran peserta KIE sebagaimana surat yang disampaikan kepada Direktur Pengawasan keamanan , Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif pada tanggal 07 Maret 2025.
3. Usulan perubahan Focal Point Farmakovigilans Balai Besar POM di Samarinda yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan keamanan , Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.
4. Pelaksanaan KIE Farmakovigilans kepada penanggung jawab Farmakovigilans dari sarana pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik di wilayah Samarinda dan sekitarnya pada tanggal 30 April 2025 secara daring. Jumlah peserta yang hadir sejumlah 45 orang dari 45 sarana pelayanan Kesehatan.
5. Pembuatan Whatsapp Grup sebagai sarana koordinasi antara penanggung jawab sarana pelayanan Kesehatan peserta KIE dengan penanggung jawab Balai Besar POM di Samarinda dalam hal pelaporan KTD/ESO.
6. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut regulatori di lapangan berdasarkan hasil kajian keamanan obat beredar, seperti perubahan penandaan dan penarikan obat (recall obat), berdasarkan laporan yang masuk dari PBF pada periode pelaporan TW I sampai dengan TW IV 2025, sebanyak 23 (dua puluh tiga) surat edaran yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin ke sarana pelayanan dan distribusi sediaan farmasi.
7. Pada tanggal 17-18 Desember 2025, dilakukan koordinasi dengan focal point farmakovigilans di Dinas Kesehatan Kota Bontang dan focal point farmakovigilans di fasyankes Kabupaten Kutai Timur dan beberapa Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun kegiatan tersebut disertai dengan sosialisasi dan penyerahan pamflet/ brosur terkait Farmakovigilans untuk dapat ditempel pada area yang dapat diakses oleh pasien, hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan kesadaran pasien dalam melaporkan kejadian KTD/ESO yang dialami ke focal point farmakovigilans dan/atau petugas di fasyankes.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.15
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	9.000.000	8.868.630	98,54%	102,58	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran tahun 2025. Dapat disimpulkan bila anggaran 2025 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S 37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan KIE Farmakovigilans (KTD/ESO). Pagu anggaran yang dialokasikan untuk indikator kinerja persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO sebesar Rp. 43.000.000. Namun dengan adanya blokir anggaran, anggaran yang dapat digunakan menjadi Rp. 9.000.000.

Dengan sumber daya anggaran yang terbatas maka dalam pelaksanaannya dilakukan strategi yang tepat agar target kinerja tetap tercapai dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dan bersinergi dengan kegiatan lainnya antara lain pelaksanaan KIE Farmakovigilans kepada penanggung jawab Farmakovigilans dari sarana pelayanan Kesehatan secara daring, koordinasi antara penanggung jawab sarana pelayanan Kesehatan peserta KIE dengan penanggung jawab Balai Besar POM di Samarinda dalam hal pelaporan KTD/ESO melalui Whatsapp Grup serta koordinasi langsung yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengawasan sarana distribusi rutin baik dalam kota maupun luar kota.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

BBPOM di Samarinda selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan

sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target maupun sebagai perimbangan dalam melakukan upaya perbaikan dan peningkatan untuk pencapaian kinerja. Dengan demikian, pelaporan kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari BBPOM di Samarinda. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target indikator kinerja persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat (ESO), BBPOM di Samarinda telah mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja indikator ini yang tertuang pada daftar risiko semester 2 tahun 2025, yaitu terdapat risiko bahwa Tidak semua peserta KIE Farmakovigilance memahami materi sehingga berpotensi kejadian KTD/ESO tidak dilaporkan. Untuk mengatasi risiko tersebut, telah dilakukan upaya mitigasi melalui aktivitas pengendalian, yaitu Monitoring pelaporan KTD/ESO secara berkala melalui kanal pelaporan yang tersedia, diharapkan sarana pelayanan kesehatan mampu melaksanakan pelaporan KTD/ESO secara tepat dan konsisten, sehingga mendukung tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya. Pangan olahan yang diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah sampel yang pengambilan dan pengujiannya dilakukan sesuai dengan pedoman sampling. Komponen-komponen yang mempengaruhi perhitungan realisasi Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

- Kesesuaian target sampel UPT
- Kesesuaian parameter uji
- Ketepatan pengambilan kesimpulan
- Ketepatan waktu pengambilan sampel
- Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ ketentuan lainnya antara lain:

- Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian

- Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
- Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
- Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
- Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

% Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A = Kesesuaian Target Sampel

Cara perhitungan = (A1 + A2)/ 2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)/ jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji.

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1.

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara perhitungan = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai Pedoman Sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C = Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara perhitungan = (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai Pedoman Sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi

penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D = Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan = (Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E = Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara perhitungan = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai Pedoman Sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F = Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ ketentuan lainnya

Cara perhitungan = (Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat) x 100%

Tidak Memenuhi Syarat = TIE, Rusak, Kedaluwarsa atau TMS Pengujian

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

%B3 = (Total pembilang (B1 + B2 + B3)/ Total penyebut (B1 + B2 + B3)) x 100%

Capaian realisasi sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

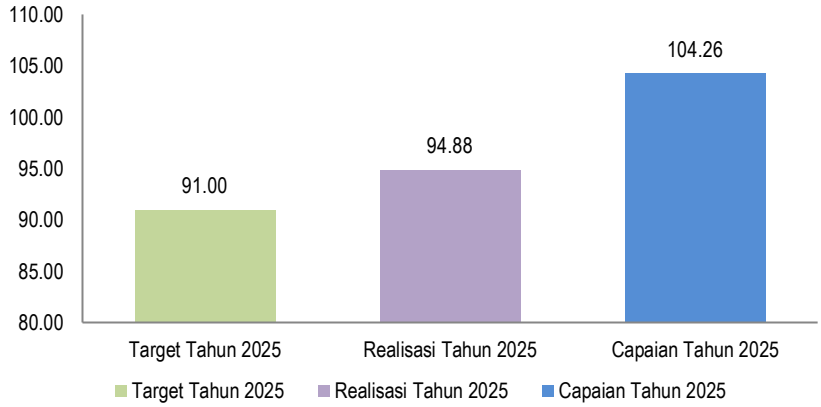
- Kesesuaian target sampel yaitu 406 sampel dari target 404 sampel
- Kesesuaian parameter uji: sesuai target yaitu 406 sampel
- Ketepatan pengambilan kesimpulan: sesuai target yaitu 406 sampel
- Ketepatan waktu pengambilan sampel: 406 sampel dari 406 sampel
- Ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian: 198 sampel dari target 406 sampel
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya: sesuai target yaitu 51 sampel

Pada tahun 2025 ini, sampel pangan olahan yang berasal dari BBPOM di Samarinda sebanyak 406 telah diuji sesuai dengan pedoman sampling. Dari seluruh sampel tersebut, 355 sampel telah selesai diuji dengan hasil memenuhi syarat dan 51 sampel tidak memenuhi syarat. Sedangkan sampel dari Balai POM di Balikpapan, 77

sampel telah selesai diuji dengan hasil 71 sampel memenuhi syarat dan 6 sampel tidak memenuhi syarat. Sampel regional sebagai sampel kajian yang diterima di BBPOM Samarinda sebanyak 134 sampel telah selesai diuji seluruhnya.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025



Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025

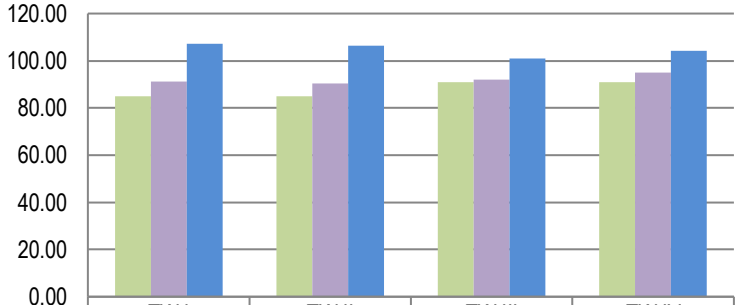
Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
91.00	94.88	104.26	Sangat baik	

Pada tahun 2025, telah dilakukan penyusunan Rancangan Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2025-2029. Terdapat beberapa perubahan dalam Renstra tersebut jika dibandingkan dengan Renstra sebelumnya. Salah satunya adalah Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Indikator Kinerja ini merupakan salah satu dari 16 indikator kinerja baru dalam Renstra 2025-2029. Karena merupakan indikator kinerja baru, maka belum ada data realisasi tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, 2025 merupakan tahun awal Renstra, sehingga belum bisa diperkirakan realisasi yang bisa dicapai oleh Balai Besar POM di Samarinda.

Awalnya, target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditetapkan sebesar 85%. Tetapi berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni dengan mengacu pada realisasi kinerja sampai dengan bulan Mei 2025, maka BBPOM di Samarinda melakukan revisi target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi 91% pada bulan Agustus 2025. Realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 94.88%, sudah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian 104.26%. Pada Renstra 2025-2029, kategori sangat baik diperoleh apabila capaian yang diperoleh berada dalam rentang 100-110%. Berdasarkan hal tersebut, capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk kategori **sangat baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target	85.00	85.00	91.00	91.00
Realisasi	91.11	90.36	91.88	94.88
Capaian	107.19	106.31	100.97	104.26

Pada triwulan I dan II, target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 85%. Namun pada triwulan III dan IV, target dinaikkan menjadi 91%. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni dengan mengacu pada realisasi kinerja sampai dengan bulan Mei 2025, sehingga BBPOM di Samarinda melakukan revisi target Indikator Kinerja ini.

Realisasi pada setiap triwulan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, walaupun mengalami sedikit penurunan di triwulan II. Realisasi pada triwulan II mengalami penurunan sebesar 0.75% dan capaian mengalami penurunan sebesar 0.88%. Salah satu penyebab penurunan capaian adalah karena gangguan listrik pada instrumen AAS laboratorium pangan pada bulan Mei sehingga menghambat pelaksanaan pengujian PK cemaran logam berat. Walaupun kendala tersebut dapat diatasi dengan menggunakan AAS dari laboratorium lain, tetapi tetap memperlambat pengujian logam berat yang merupakan parameter uji wajib pada setiap kategori pangan.

Capaian di setiap triwulan selalu di atas 100% dan masuk kategori sangat baik. Capaian pada triwulan II

mengalami penurunan karena realisasinya juga mengalami penurunan. Sedangkan capaian pada triwulan III lebih rendah dari triwulan II karena adanya revisi target PK sehingga mempengaruhi perhitungan capaian. Tetapi pada triwulan IV capaian kembali meningkat. Namun secara garis besar capaian indikator ini disetiap triwulan nya mencapai target dengan kriteria Sangat Baik.

Indikator Kinerja ini merupakan salah satu dari 16 indikator kinerja baru dalam Renstra 2025-2029. Karena merupakan indikator kinerja baru, maka belum ada data realisasi tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak bisa diperbandingkan realisasi dan capaian nya terhadap terhadap tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
95.00	94.88	99.87	Akan Tercapai	

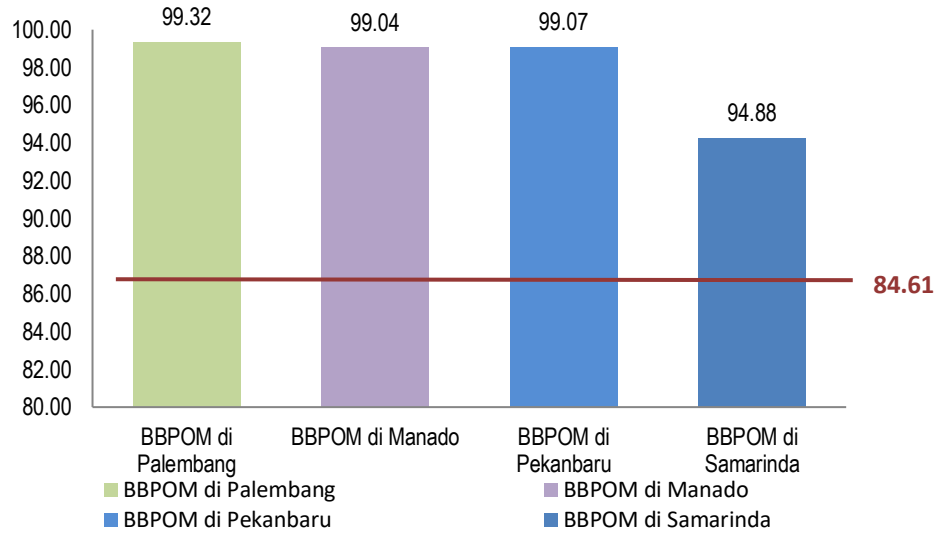
Pada Renstra 2025-2029, target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan selalu meningkat setiap tahun, dari 85% di 2025 dan 95% di tahun 2029. Realisasi yang dicapai pada tahun 2025 ini belum melampaui target akhir tahun periode Renstra dengan capaian 99.87% dan kategori Akan tercapai, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kedepan nya agar target apda akhir periode Renstra dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
84.61	Palembang	90.00	99.32	110.36	Tidak dapat disimpulkan
	Manado	91.00	99.04	108.84	Sangat baik
	Pekanbaru	91.00	99.07	108.87	Sangat baik
	Samarinda	91.00	94.88	104.26	Sangat baik

Gambar 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Realisasi Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada BBPOM yang tergabung dalam Klaster 4, semua berada di atas target nasional (84.61%). Sedangkan berdasarkan capaian, seluruh BBPOM dapat mencapai target dengan capaian di atas 100% dan kategori **sangat baik kecuali** BBPOM di Palembang capaian diatas 110% dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan**. BBPOM di Palembang mempunyai realisasi paling tinggi. Sedangkan realisasi BBPOM di Samarinda merupakan yang terendah, tetapi masih masuk dalam kategori **sangat baik**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pada Rancangan Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2025-2029 terdapat beberapa perubahan dibandingkan dengan Renstra sebelumnya. Salah satunya adalah Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Indikator ini adalah salah satu indikator kinerja baru, sehingga belum ada data realisasi tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025 juga merupakan tahun awal Renstra, sehingga belum bisa diperkirakan realisasi yang bisa dicapai oleh Balai Besar POM di Samarinda.

Definisi operasional manual IKU dan komponen-komponen yang mempengaruhi realisasi dan cara perhitungannya juga mengalami perubahan pada akhir triwulan I tahun 2025. Adanya efisiensi anggaran pada triwulan I dan pembukaan blokir anggaran pada triwulan II, mempengaruhi kegiatan sampling dan pengujian. Sehingga dua kegiatan tersebut baru dapat optimal dillakukan pada triwulan III, sesuai dengan target awal 2025.

BBPOM di Samarinda hanya mengalami penurunan realisasi di triwulan II sedangkan triwulan selanjutnya selalu mengalami kenaikan. Sedangkan penurunan capaian terjadi pada triwulan III tetapi triwulan IV mengalami

peningkatan kembali. Kendala-kendala yang terjadi di triwulan IV tahun 2025 dalam mencapai target indikator Persentase Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

- Gangguan jaringan listrik pada instrumen AAS yang menghambat pengujian cemaran logam.
- Belum tersedianya bahan penunjang PCR (*plate* PCR) yang diperlukan untuk uji unggulan (masih dalam pengiriman)
- *Motherboard* instrumen LCMSMS laboratorium pangan mengalami kerusakan. Walaupun pengujian residu obat tetap dapat dilakukan dengan menggunakan LCMSMS dari laboratorium lain, namun pengujian tetap mengalami hambatan karena terdapat antrian pemakaian instrumen tersebut.
- sampel AMDK dibagi menjadi 2 batch karena balai lain yang beririsan parameter seperti Banjarmasin dan Palagkaraya tidak bisa mengerjakan langsung 139 sampel
- Jumlah sampel AMDK dan *edible ice* yang masuk ke laboratorium tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian karena penggunaan metode analisa baru pada parameter uji APM *Coliform* produk *edible ice* dan parameter uji Angka *Coliform* produk AMDK.

Upaya yang telah dilakukan di triwulan IV untuk mengatasi kendala yang ada sebagai berikut :

- Meminjam bahan penunjang PCR dari BBPOM region lain
- Membuat nota dinas ke UPT yang bersangkutan untuk penyampaian hasil monev regional
- Perbaikan jaringan listrik yang terhubung pada alat AAS namun belum berhasil menyelesaikan kerusakan dari alat tersebut
- Pengujian PK cemaran logam dengan metode selain GFA-AAS dan HVG-AAS
-

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan di periode selanjutnya adalah sebagai berikut :

- Perbaikan pada alat AAS, pengecekan kembali untuk menemukan penyebab pasti masalah kerusakan dari alat tersebut.
- Perbaikan alat laboratorium LCMSMS yang belum bisa dilakukan di triwulan IV karena ketersediaan anggaran yang terbatas sementara biaya untuk perbaikan relatif mahal
- Melaksanakan rapat bersama tim pengujian dengan tim sampling terkait kebutuhan sampel tahun 2026
-

Realisasi persentase pangan olahan yang berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat mencapai target untuk setiap triwulan pada tahun 2025 dengan capaian selalu di atas 100% dan kategori **sangat baik**. Faktor utama yang menunjang indikator kinerja ini dapat mencapai target adalah dilakukannya monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kendala-kendala yang dialami oleh laboratorium dalam pelaksanaan pengujian sehingga dapat dilakukan rencana aksi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

BBPOM di Samarinda juga melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian sampel pangan olahan berisiko oleh BBPOM di Samarinda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Renlak sampling dan pengujian ditetapkan untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Efisiensi anggaran yang diberlakukan pada triwulan I, mempengaruhi kegiatan sampling dan pengujian. Ketika pada triwulan II terdapat relaksasi anggaran dan kembalinya target awal 2025, maka BBPOM di Samarinda segera menyesuaikan dengan merevisi Renlak sampling dan pengujian agar kegiatan sampling dan pengujian dapat berjalan optimal dan realisasinya dapat mencapai target yang telah ditentukan. Selain itu, dilakukan juga percepatan kegiatan sampling sehingga pelaporan sampling dan pengujian dapat sesuai *timeline,* serta tindak lanjut dilakukan sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya terhadap semua sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)

BBPOM di samarinda juga melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kendala-kendala yang dialami dalam proses pelaksanaan pencapaian target persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Setiap bulan, secara konsisten dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian serta realisasinya, pemantauan *timeline* dan pemenuhan parameter uji kritis pengujian.

BBPOM di Samarinda telah melakukan sampling dan pengujian terhadap produk pangan olahan berisiko sebanyak 406 sampel. Dari 406 sampel tersebut 51 sampel yang tidak memenuhi syarat. Hasil pengujian TMS antara lain Angka Kapang Khamir (AKK) 8 sampel, Angka Lempeng Total (ALT) 11 sampel, AKK dan ALT 4 sampel, *Salmonella* 1 sampel, Siklamat 3 sampel, Sulfit 2 sampel, Siklamat dan rasio BTP pemanis 3 sampel, Siklamat ,Rasio BTP Pemanis, *Enterobacteriaceae* dan ALT 1 sampel, *Enterobacteriaceae* dan AKK 1 sampel, *Enterobacteriaceae* 1 sampel, Bromat 3 sampel, *Coliform* dan ALT 1 sampel, Bromat dan *Coliform* 1 sampel, Gelatin *porcine* 1 sampel, tartrazin dan rasio BTP pewarna 1 sampel, cemaran logam Hg 1 sampel, *Coliform* 4 sampel, Bromat dan ALT 1 sampel serta *Staphylococcus aureus* 3 sampel.

Hasil pengujian TMS tersebut telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat hasil pengujian sampel tidak memenuhi syarat kepada Direktorat Pengawasan terkait beserta laporan penanganan Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS). Tindak lanjut sampel pangan olahan yang TMS hasil pengujiannya dilakukan denggan melakukan koordinasi dengan pusat dan lintas UPT sesuai Pedoman Tindak lanjut atau ketentuan lainnya.

Permasalahan/kendala yang dihadapi di triwulan IV tahun 2025 dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut

yang dilakukan di triwulan IV dan akan dilakukan pada periode selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.19
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Bulan Oktober 2025								
1.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Kimia: Terdapat 43 sampel di bulan Oktober tidak memenuhi ketentuan sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling karena instrumen AAS mengalami gangguan karena jaringan listrik yg bermasalah. 2. Mikrobiologi: Pengadaan bahan penunjang PCR (plate PCR) untuk uji unggulan barang belum tiba 3. sampel AMDK dibagi menjadi 2 batch karena balai lain yang beririsan parameter seperti	1. Kimia: Melakukan perbaikan jaringan listrik pada instrumen AAS. 2. Mikrobiologi: Meminjam bahan penunjang PCR dari BBPOM region lain 3.Berkomunikasi dengan balai bersangkutan dan konfirmasi atas TL sampel yang masih terkendala.	1.Kimia: Membuat surat permintaan perbaikan jaringan listrik pada instrumen AAS. 2.Mikrobiologi: Meminjam bahan penunjang PCR ke BBPOM region lain 3.Membuat nota dinas ke UPT yang bersangkutan untuk penyampaian hasil monev regional	November	1. Y 2. Y 3. T	1. Pengujian 8 2. Pengujian 9	1. Terjadi penumpukan sampel yang belum diuji di laboratorium 2. Kebutuhan reagen/media dan consumable meningkat, tidak sesuai dengan perencanaan awal

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Banjarmasin dan Palagkaraya tidak bisa mengerjakan langsung 139 sampel						
Bulan November 2025								
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Instrumen AAS masih mengalami gangguan jaringan listrik 2. Instrumen LCMSMS mengalami kerusakan, sehingga terdapat antrian panjang untuk pengujian menggunakan LCMSMS laboratorium lain	1. Perbaikan jaringan listrik AAS. 2. Perbaikan alat LCMSMS.	1. Membuat surat permintaan dan pengadaan stabilizer. 2. Membuat surat permintaan dan pengadaan motherboard.	Triwulan II 2026	Y	Pengujian 8	1. Terjadi penumpukan sampel yang belum diuji di laboratorium
Bulan Desember 2025								
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.Laboratorium Kimia: Instrumen AAS masih mengalami gangguan jaringan listrik 2. Laboratorium Mikrobiologi: Jumlah sampel yang masuk ke laboratorium untuk sampel AMDK sama Edible ice tidak mencukupi untuk dilakukan pengujian karena penggunaan metode analisa	1. Kimia: Pengujian PK cemaran logam dengan metode selain GFA-AAS dan HVG-AAS 2.a. pemenuhan kebutuhan sampel dari laboratorium kimia dan retain sampel b. Koordinasi dengan tim sampling terkait kebutuhan sampel tahun 2026	1. Melaksanakan PK cemaran logam secara ICPMS 2. a. Melakukan permintaan tambahan sampel pada tim pengelola contoh b. Melaksanakan rapat dengan tim sampling terkait kebutuhan sampel tahun 2026	1. Desember 2025 2. a. Desember 2025 2.b. Januari 2026	1. Y 2. T	1. Pengujian 8	1. Terjadi penumpukan sampel yang belum diuji di laboratorium

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		baru pada parameter uji APM Koliform produk Edible Ice dan parameter uji Angka Koliform produk AMDK						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.20
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target s.d Tahun 2025		Realisasi s.d Tahun 2025	
QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan				
			- Reagen Sampel balai	2	PKT	2	PKT
			- Media Mikro Sampel Balai	2	PKT	2	PKT
			- Keperluan Penunjang Laboratorium	1	PKT	1	PKT
			- Media Sampel balai	1	PKT	1	PKT
			- Pengadaan Reagen/Media/bahan penunjang laboratorium pengujian/ Glassware	1	PKT	1	PKT
			- ATK dan Komputer Suplies	1	PKT	1	PKT
QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel				
			- Sampel	404	SPL	406	SPL
			- Biaya pengiriman sampel	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL
		B	Perencanaan Sampling dan Pengujian Region Samarinda TA. 2026				
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL

Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling di tahun 2025 sebanyak 406 sampel dari target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak 404 sampel. Salah satu komponen yang mempengaruhi capaian realisasi sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dengan perolehan nilai yang belum optimal adalah ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian.

Dari 406 sampel yang disampling dan diuji pada tahun 2025, hanya 198 sampel yang dilaporkan sesuai *timeline*. Pada tahun 2025, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian dihitung mulai dari kegiatan sampling dan harus sudah dilaporkan pada tanggal 15 bulan berikutnya. Perubahan perhitungan *timeline* pengujian yang semula 40 hari kerja menjadi tanggal 15 setiap bulan setelah bulan sampling berpeluang menyebabkan keterlambatan pelaporan terutama untuk sampel dengan jumlah parameter uji lebih dari 5 dan sampel yang tidak memenuhi syarat karena harus dilakukan pengujian ulang.

Untuk mengatasi perubahan *timeline* ini dan pelaksanaan efisiensi anggaran, maka diperlukan strategi yang efektif dan efisien. Pada awal triwulan II, laboratorium pangan BBPOM di Samarinda mulai mengembangkan inovasi terkait percepatan pelaporan elektronik berbasis aplikasi digital, yaitu SPEKTRUM (Sistem Pelaporan Elektronik Laboratorium). Inovasi ini adalah pendukung digitalisasi proses kerja pengujian, khususnya pencatatan dan pelaporan data. Dimulai dari penerimaan sampel sampai pelaporan hasil pengujian sampel PIRT menjadi lebih efisien dan *paperless*. Penerimaan sampel, pembuatan SPP dan LCP menggunakan SPEKTRUM, jauh lebih cepat dari pada cara manual yang selama ini dilakukan. Walaupun masih dalam tahap pengembangan, SPEKTRUM sudah dipakai di laboratorium pangan pada triwulan II tahun 2025 hingga saat ini. SPEKTRUM sangat membantu proses pelaporan hasil pengujian terutama *timeline* pengujian lebih terukur dan dapat dimonitoring dan dievaluasi dengan mudah serta penelusuran pengujian sampel lebih cepat. Pengembangan SPEKTRUM saat ini sudah merambah ke laboratorim lainnya di lingkup BBPOM di Samarinda. Untuk jangka panjang, diharapkan SPEKTRUM ini dapat dipakai oleh laboratorium seluruh UPT dan diintegrasikan dengan SIPT.

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan BBPOM di Samarinda pada tahun 2025 untuk mencapai target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Pengadaan alat laboratorium sesuai rekomendasi dari PPPOMN.
2. Pengadaan reagen, media, suku cadang, alat penunjang, bahan penunjang dan kebutuhan lain yang diperlukan laboratorium untuk menunjang pelaksanaan pengujian.
3. Pelaksanaan pengujian sesuai pedoman sampling, baik dari segi jumlah sampel maupun parameter uji kritis.
4. Penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 17025:2017 secara konsisten.
5. Pelaksanaan audit penerapan ISO 17025:2017 oleh KAN pada tanggal 27-28 November dan audit internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi pada tanggal 28-29 Oktober 2025 untuk menjaga konsistensi penerapan sistem manajemen mutu.
6. Identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan di laboratorium, mengadakan pelatihan internal teknis dan

mengikutsertakan personel penguji dalam pelatihan teknis maupun mutu lainnya untuk meningkatkan kompetensi secara rutin.

7. Pelatihan internal laboratorium Mikrobiologi pada tanggal 4-8 Agustus 2025
8. Pelatihan internal laboratorium Pangan pada tanggal 13-17 Oktober 2025
9. Monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap kegiatan sampling dan pengujian termasuk *timeline*nya..
10. Pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium pada triwulan I dan IV tahun 2025 untuk menjamin validitas hasil pengujian.
11. Bimbingan Teknis Kalibrasi oleh Balai Kalibrasi pada tanggal 30 September-2 Oktober 2025 (daring).
12. Pelaksanaan uji profisiensi di laboratorium kimia maupun mikrobiologi untuk menjamin mutu hasil pengujian.
13. Pelaporan hasil pengujian ke Badan POM melalui aplikasi SIPT.
14. Perbaikan maupun pemeliharaan peralatan laboratorium yang mengalami kerusakan untuk mendukung kelancaran pengujian.
15. Melakukan koordinasi di Region Samarinda untuk memantau pelaksanaan sampling dan pengujian sampel regional.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.21
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	149.908.600	149.869.023,65	99,97%	104,26	100% (Efisien)

Tabel di atas menggambarkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja oleh BBPOM di Samarinda. Realisasi anggaran pada akhir tahun 2025 telah mencapai 99.97% dengan capaian 104.26% dan tingkat efisiensi 100%. Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan pengadaan alat laboratorium, reagen, media, suku cadang, alat penunjang, bahan penunjang dan kebutuhan lain yang diperlukan laboratorium untuk menunjang pelaksanaan pengujian. Pada triwulan I telah diberlakukan efisiensi anggaran, sehingga pengadaan alat laboratorium dan lain-lain mengalami penundaan. Pada triwulan II, terdapat relaksasi anggaran sehingga pengadaan alat laboratorium dan lain-lain yang tertunda dapat dilakukan. Alat-alat yang berhasil dilakukan pengadaannya antara lain *microwave digester*, *incubator*, timbangan analitik, pH meter, HPLC-UV/PDA/RID, HPLC-DAD, *photochemical reactor*, *nitrogen generator*, *toxinometer*, *anaerobic jar*, *water purifier*, *dissolution*

tester, IC-ICPMS, *sample concentrator*, *dry bath*, *centrifuge*, *waterbath shaker*, *hotplate stirrer* dan *vortex mixer*.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Proses pelaporan kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan sangat diperlukan dalam menentukan langkah strategis berupa rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator. Rencana aksi yang dilakukan terus menerus dilakukan pemantauan termasuk pemantauan terjadinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan serta penentuan solusi yang efektif dan efisien untuk pencapaian kinerja. BBPOM di Samarinda selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Setiap triwulan, BBPOM di Samarinda membuat Laporan Kinerja interim yang memuat realisasi seluruh indikator kinerja. Laporan ini berperan penting karena dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan revisi target kinerja bila diperlukan. Seperti pada triwulan III tahun 2025, BBPOM di samarinda melakukan revisi target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 85% menjadi 91%. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni dengan mengacu pada realisasi kinerja sampai dengan bulan Mei 2025.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan yang berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, BBPOM di Samarinda telah mengelola beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja indikator ini yang tertuang pada daftar risiko semester 2 tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

22. Kesalahan penentuan Parameter Uji Kritis (PUK).
23. Overtimeline pengerjaan sampel Obat dan Makanan sehubungan dengan adanya peraturan maskimal pengerjaan sampel 20 HK untuk sampel Obat, 15 HK di pengujian sampel OBASK dan Kosmetik, dan 25 HK untuk sampel pangan olahan dan PIRT.
24. Pengujian sampel dalam rangka pemenuhan ruang lingkup tidak dikerjakan sesuai target.
25. Verifikasi metode yang sudah dijadwalkan tidak dikerjakan sesuai target.
26. Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi personel laboratorium tidak dilaksanakan sesuai rencana
27. Pengadaan alat laboratorium tidak sesuai perencanaan.
28. Terjadi penumpukan sampel yang belum diuji di laboratorium yang disebabkan karena kerusakan alat-alat yang digunakan dalam pengujian sehingga menimbulkan penumpukan sampel selama menunggu perbaikan.
29. Kebutuhan reagen, media dan *consumable* meningkat, tidak sesuai dengan perencanaan awal. Terdapat perubahan atau penambahan parameter uji kritis baru dan atau metode uji baru yang diwajibkan dalam prioritas sampling.

30. Kebocoran hasil uji.
31. Terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan hasil pengujian, laporan manual (*paper based*) adalah salah satu hal yang berpotensi besar dalam menyumbang kesalahan dalam pembuatan laporan.
32. Peningkatan resiko keterpaparan penguji terhadap senyawa sitostatika yang bersifat teratogenik, mutagenik, dan karsinogenik yang berbahaya bagi tubuh
33. Kompetensi personel laboratorium menurun, penurunan kompetensi personel laboratorium dapat terjadi karena penerimaan pegawai baru atau pegawai yang mengalami rotasi, sakit dan pindah ke UPT lain.
34. Pencatatan penggunaan alat laboratorium belum dilakukan secara real time, sehingga jika terjadi indikasi kerusakan alat dapat terlambat ditangani
35. Kesalahan perhitungan capaian kinerja.
36. Kesalahan penetapan kesimpulan hasil pengujian.
37. Kesalahan penulisan syarat pada Catatan Pengujian.
38. Retain sampel tidak tertelusur.
39. Kesalahan pemusnahan retain sampel.
40. Keberpihakan personel kelompok pengujian kepada pihak ketiga terkait penentuan kesimpulan hasil uji
41. Data yang digunakan tidak mudah untuk dievaluasi dikarenakan terdapat parameter baru/ pengkategorian baru yang tidak terakomodir dalam system
42. Masih terdapat ketidaksesuaian jenis pangan dalam proses sampling

Aktivitas pengendalian yang telah dilakukan oleh BBPOM di Samarinda dalam mengurangi dampak risiko yang mungkin akan terjadi dan berdampakvterhadap pencapaian target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

22. Monitoring dan evaluasi penerbitan SPK oleh ketua tim pengujian dan penerbitan SPP oleh ketua tim/ penyelia laboratorium pangan dan mikrobiologi.
23. Pengaturan *timeline* serta monitoring dan evaluasi masing-masing proses mulai dari pembuatan SPK, pembuatan SPP, proses pengujian dan pembuatan laporan, dan verifikasi hasil uji.
24. Melakukan penjadwalan terhadap pengujian sampel dalam rangka pemenuhan standar ruang lingkup serta monitoring dan evalusi terhadap jadwal yang sudah dibuat
25. Membuat jadwal verifikasi metode analiasa pengujian sampel serta monitoring dan evalusi terhadap jadwal yang sudah dibuat
26. Pelatihan internal dalam rangka peningkatan standar kompetensi personel laboratorium
27. Membuat skala prioritas pengadaan alat laboratorium dalam rangka pemenuhan standar alat laboratorium
28. Perbaikan alat-alat laboratorium yang mengalami kerusakan.
29. Penetapan *timeline* masuknya sampel ke pengujian.

30. Membuat Surat Pernyataan Personel dan melakukan penyegaran kepada seluruh pegawai yang terkait tentang pentingnya komitmen menjaga kerahasiaan hasil uji.
31. Pembuatan lembar kendali laporan yang memuat *timeline* koreksi laporan setelah diverifikasi oleh penyelia.
32. Peningkatan kompetensi penguji melalui pelatihan atau pendampingan internal.
33. Pembelian Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan pedoman dari P3OMN, Adanya pendampingan dari P3OMN untuk penanganan sampel sitostatika hingga pembuangan limbahnya, Sosialisasi terkait penanganan sampel hingga limbah sitostatika kepada seluruh pegawai
34. Dibuat inovasi berupa pengisian penggunaan alat yang diisikan secara langsung (real time) oleh user sebelum dan setelah penggunaan alat secara online (menggunakan QR Code).
35. Membuat rumus perhitungan baru yang menggambarkan jumlah total hari kerja pengujian sampel.
36. Membuat *database* persyaratan hasil uji untuk pengendalian kwsalahan penetapan kesimpulan hasil pengujian.
37. Membuat *database* persyaratan hasil uji untuk pengendalian kesalahan penulisan syarat pada Catatan Pengujian.
38. Membuat laporan monev terhadap aplikasi SIPANSE untuk pengendalian Retain sampel tidak tertelusur.
39. Membuat laporan monev terhadap aplikasi SIPANSE untuk pengendalian Kesalahan pemusnahan retain sampel.
40. Membuat pakta integritas dan surat pernyataan personel.
41. Membuat ulang aplikasi SITUKIN
42. Monev kesesuaian sampel pangan dengan kategori pangan

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009

tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan

2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\Sigma\ (30\% \times A1, A2, ..., An) + (35\% \times B1, B2, ..., Bn) + (35\% \times C1, C2, ..., Cn)}{n}$$

Keterangan

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

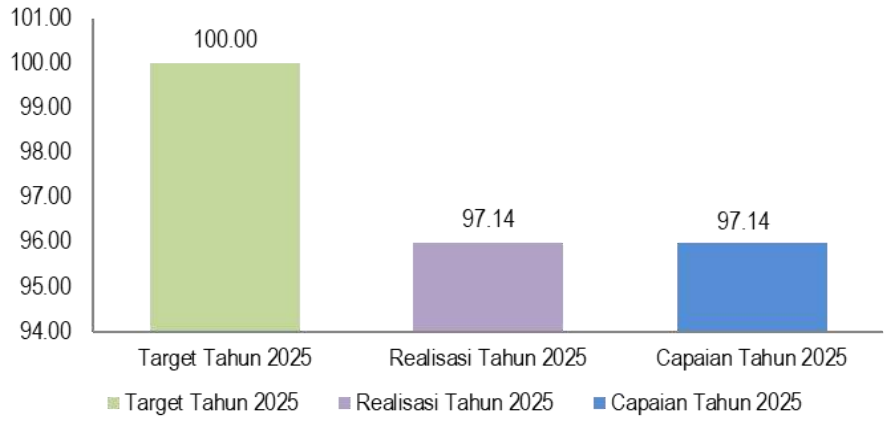
B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025



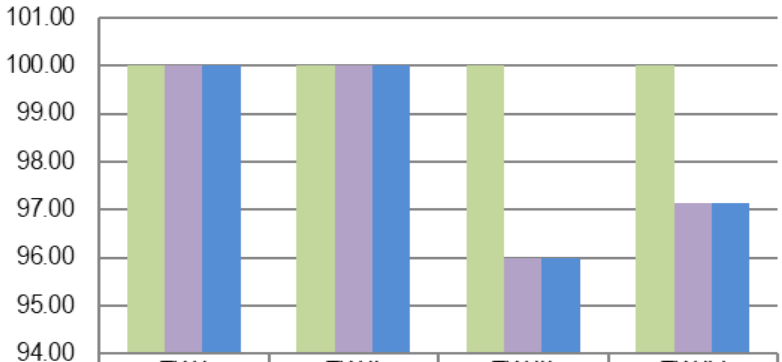
Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
100.00 %	97.14 %	97.14%	Baik	

Sesuai gambar di atas, target persentase KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 100.00% dengan realisasi sebesar 97.14 % sehingga capaian sebesar 97.14 % Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi belum mencapai target yang di tetapkan dan masuk dalam kriteria **baik.**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar per Triwulan Tahun 2025



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target	100.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	100.00	100.00	96.00	97.14
Capaian	100.00	100.00	96.00	97.14

Dari gambar di atas, target persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sebesar 100.00% dengan realisasi sebesar 97.14% sehingga capaian sebesar 97.14%. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi tidak mencapai target dan masuk dalam kriteria "**Baik".**

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
100	97,14	97,14	Akan tercapai	

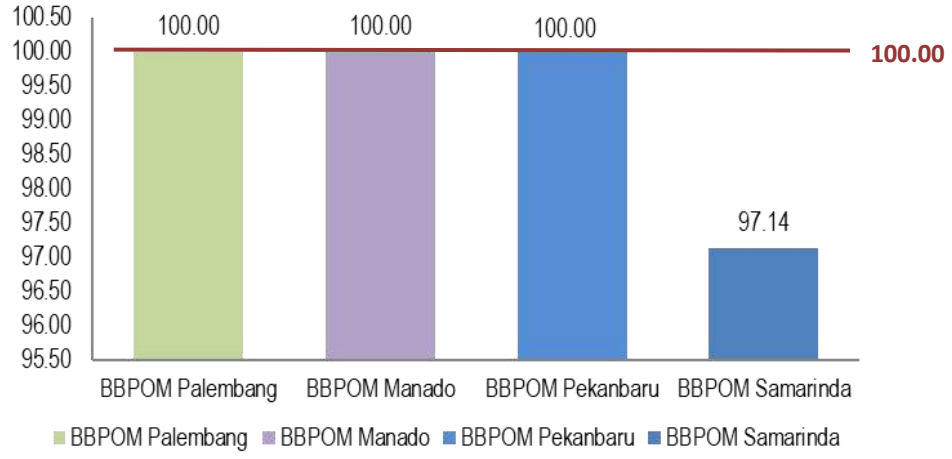
Dari gambar di atas, target jangka menengah persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sebesar 100.00% dengan realisasi sebesar 97.14% pada tahun 2025 sehingga capaian sebesar 97.14%. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi melebihi target dan masuk dalam kriteria "**Akan tercapai".**

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster4.) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
100,00	Palembang	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik
	Manado	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik
	Pekanbaru	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik
	Samarinda	100,00	97,14	97,14	Baik

Gambar 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Dari gambar di atas dapat diketahui pada klaster 4 hanya BBPOM di Samarinda yang tidak mencapai target bahkan juga tidak mencapai target nasional, sedangan untuk BBPOM di Palembang, Manado dan Pekanbaru tercapai sesuai target dan target nasional serta masuk kategori **Sangat Baik**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar tidak mencapai target karena adanya sampel KLB yang berupa sampel pangan olahan dengan registrasi BPOM yang terkendala kecukupan jumlah sampel untuk melakukan pengujian parameter uji lengkap sesuai standar, untuk itu telah dilakukan penyampaian hasil telaah terhadap manual IKU KLB kepada pengampu terkait Definisi Operasional parameter uji lengkap sesuai prioritas sampling. Dengan kondisi yang ada maka perlu dilakukan reviu target Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar tahun 2026.

Tabel 3.25
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar tidak mencapai target karena adanya sampel KLB yang berupa sampel pangan olahan dengan registrasi BPOM yang terkendala kecukupan jumlah sampel untuk melakukan pengujian parameter uji lengkap sesuai standar, untuk itu telah dilakukan penyampaian hasil telaah terhadap manual IKU KLB kepada pengampu terkait Definisi Operasional	Melakukan reviu target Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar tahun 2026	Menyusun usulan revisi target persentase sampel KLB yang diuji sesuai standar tahun 2026	Triwulan 1 tahun 2026	Y	Pengujian 7	Sampel yang diserahkan untuk diuji tidak sesuai untuk dilakukan pengujian sampel KLB

		parameter uji lengkap sesuai prioritas sampling						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.26
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan				
			- Reagen Sampel balai	2	PKT	2	PKT
			- Media Mikro Sampel Balai	2	PKT	2	PKT
			- Keperluan Penunjang Laboratorium	1	PKT	1	PKT
			- Media Sampel balai	1	PKT	1	PKT
			- Pengadaan Reagen/Media/bahan penunjang laboratorium pengujian/ Glassware	1	PKT	1	PKT
			- ATK dan Komputer Suplies	1	PKT	1	PKT

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tahun 2025 dalam rangka mendukung indikator kinerja diantaranya :

1. Peningkatan pelayanan publik yang prima untuk secara cepat menangani informasi baik dari pengaduan masyarakat terkait kasus keracunan pangan maupun laporan KLB keracunan pangan dari dinas setempat,
2. Koordinasi dengan Tim Gerak Cepat penanganan KLB K di Kabupaten/Kota wilayah kerja BBPOM di Samarinda,
3. Koordinasi dengan SPPG pelaksana Makan Bergizi Gratis (MBG) baik terkait jumlah dan lokasi SPPG, KIE terkait keamanan pangan dan koordinasi bersama untuk penanganan KLB Keracunan Pangan pada pelaksanaan MBG di Kalimantan Timur,
4. Pengadaan reagensia, media dan kit untuk melakukan uji cepat maupun uji laboratorium untuk penanganan sampel kasus KLB keracunan pangan.

Kegiatan yang menunjang kinerja indikator ini adalah pada triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan pengujian sebanyak 3 sampel KLB yaitu soto , donat, dan Nasi Putih Sayur Sop Rollade Daging Tahu Goreng (menjadi satu sampel), total keseluruhan sampel KLB yang dilakukan pengujian sebanyak 11 sampel.Telah dilakukan pengujian sesuai standar terhadap sampel KLB yang diterima serta dilakukan pengadaan reagen, media mikrobiologi untuk kebutuhan pengujian laboratorium.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.27
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	146.326.600	146.288.274,15	99,97%	97,14	0 (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dapat disimpulkan tidak efisien. Hal ini terlihat dari proporsi realisasi yang lebih kecil dari terget capaian indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada akhir Tahun 2025.

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mendukung pencapaian kriteria efisiensi adalah pemanfaatan anggaran untuk kegiatan sampling dan pemeriksaan serta pengujian sampel Obat dan Makanan, pengadaan sampel Obat dan Makanan serta pengadaan reagensia, media, operasional laboratorium, pemeliharaan peralatan, suku cadang.

Pengukuran efisiensi terhadap penggunaan sumber daya tidak sepenuhnya hanya dibandingkan terhadap sumber daya anggaran, pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana juga menjadi perhatian. Peningkatan kualitas personil penguji untuk dapat menangani dan melakukan pengujian untuk sampel KLB keracunan pangan juga perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan penanganan kasus KLB yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam penanganannya. Selain SDM, Sarana Prasarana juga perlu ditunjang terutama dalam

hal proses pelaporan untuk sampel kasus KLB yang belum diakomodir di SIPT, sehingga belum efisien dalam pelaksanaannya. Pelaporan masih secara manual dan belum dilakukan secara elektronik, atas hal tersebut BBPOM di Samarinda telah mengeskalasikan ke tingkat pusat untuk mekanisme pelaporan hasil ujinya melalui SIPT.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Proses pelaporan kinerja yang dilakukan secara berkesinambungan sangat diperlukan dalam menentukan langkah strategis berupa rencana aksi yang akan dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator. Rencana aksi yang dilakukan terus menerus dilakukan pemantauan termasuk pemantauan terjadinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan serta penentuan solusi yang efektif dan efisien untuk pencapaian kinerja. BBPOM di Samarinda selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Samarinda terdapat beberapa resiko terkait kegiatan penganan KLB keracunan pangan yang perlu dilakukan mitigasi risiko antara lain:

1. Sampel yang diserahkan untuk diuji tidak sesuai untuk dilakukan pengujian sampel KLB
2. Terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan pengujian
3. Kesalahan penetapan kesimpulan hasil pengujian.
4. Kesalahan penulisan syarat pada Catatan Pengujian
5. Keberpihakan personel kelompok pengujian kepada pihak ketiga terkait penentuan kesimpulan hasil uji

Adapun tujuan dilakukan mitigasi resiko yaitu untuk mengurangi kejadian dan atau dampak risiko dengan beberapa aktivitas diantaranya :

1. Melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan terkait kondisi sampel yang representatif untuk dilakukan pengujian
2. Pembuatan Lembar Kendali Laporan yang memuat timeline koreksi laporan setelah diverifikasi oleh penyelia
3. Membuat *database* persyaratan hasil uji untuk pengendalian kesalahan penetapan kesimpulan hasil pengujian.
4. Membuat *database* persyaratan hasil uji untuk pengendalian kesalahan penulisan syarat pada Catatan Pengujian.
5. Membuat pakta integritas dan surat pernyataan personel.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Yang dimaksud dengan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/ atau Rusak dan/ atau Kedaluwarsa dan/ atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas

sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

% Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20% C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A = Kesesuaian Target Sampel PIRT

Cara perhitungan = (A1 + A2)/ 2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)/ jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji.

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1.

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara perhitungan = (Jumlah sampel sesuai/ jumlah sampel PIRT) x 100%

C = Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara perhitungan = (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai Pedoman Sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan = (Jumlah sampel diambil di TW1/ total sampel PIRT) x 100%

E = Ketepatan Waktu Pelaporan (sebelum tanggal 15 di bulan berikutnya)

Cara perhitungan = (Jumlah sampel tepat waktu/ total sampel PIRT) x 100%

F = Tindak Lanjut sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/ atau Rusak dan/ atau Kedaluwarsa dan/ atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara perhitungan = (Jumlah sampel PIRT yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang TMS) x 100%

Capaian realisasi sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

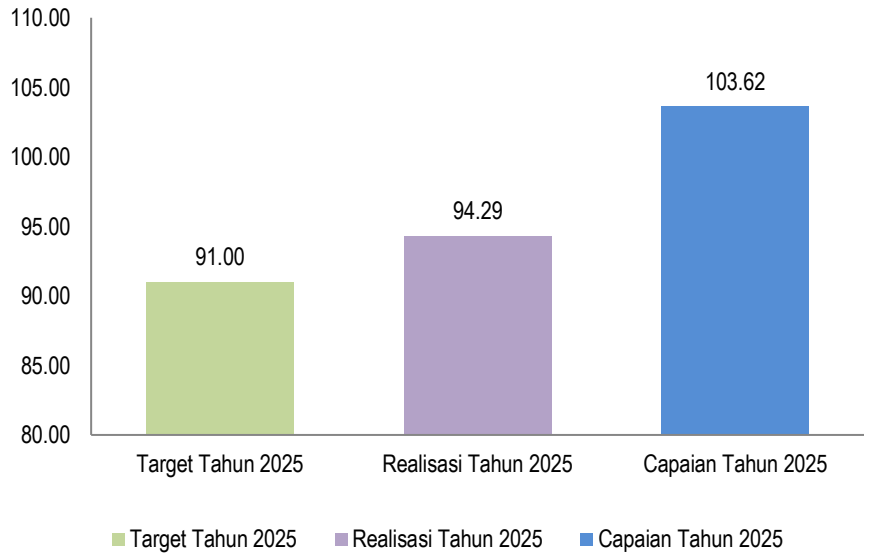
- Kesesuaian target sampel: sesuai target yaitu 35 sampel
- Kesesuaian parameter uji: sesuai target yaitu 35 sampel
- Ketepatan pengambilan kesimpulan: sesuai target yaitu 35 sampel

- Ketepatan waktu pengambilan sampel di triwulan I: 25 sampel dari target 35 sampel
- Ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian: 25 sampel dari target 35 sampel
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya: sesuai target yaitu 1 sampel

Pada tahun 2025 ini, sampel PIRT dari BBPOM di Samarinda sebanyak 35 sampel telah diuji dengan hasil 34 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel tidak memenuhi syarat. Sedangkan sampel dari BPOM di Balikpapan sebanyak 6 sampel telah diuji dengan hasil 5 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel tidak memenuhi syarat.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025



Tabel 3.28
Capaian Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
91.00%	94.29%	103.62	Sangat baik	

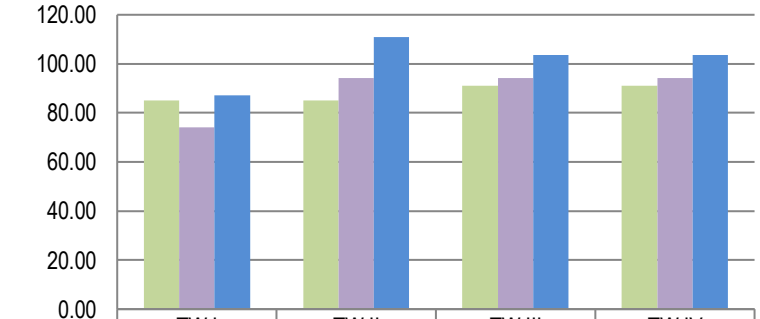
Pada tahun 2025, telah dilakukan penyusunan Rancangan Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2025-2029. Terdapat beberapa perubahan dalam Renstra tersebut jika dibandingkan dengan Renstra sebelumnya. Salah satunya adalah Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Indikator Kinerja ini merupakan salah satu dari 16 indikator kinerja baru dalam Renstra 2025-2029. Karena merupakan indikator kinerja baru, maka belum ada data realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, 2025 merupakan tahun awal Renstra, sehingga belum bisa diperkirakan realisasi yang bisa dicapai oleh Balai Besar POM di Samarinda.

Awalnya, target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditetapkan sebesar 85%. Tetapi berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni dengan mengacu pada realisasi kinerja sampai dengan bulan Mei 2025, maka BBPOM di Samarinda melakukan revisi target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi 91% pada bulan Agustus 2025. Realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 94.29%, sudah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian 103.62%. Pada Renstra 2025-2029, kategori sangat baik diperoleh apabila capaian yang diperoleh berada dalam rentang 100-110%. Berdasarkan hal tersebut, capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan termasuk kategori **sangat baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target	85.00	85.00	91.00	91.00
Realisasi	74.17	94.29	94.29	94.29
Capaian	87.26	110.93	103.62	103.62

Pada triwulan I dan II, target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 85%. Namun pada triwulan III dan IV, target dinaikkan menjadi 91%. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni dengan mengacu pada realisasi kinerja sampai dengan bulan Mei 2025 dimana realisasi telah melampaui target dan capaian melebihi 110%, sehingga BBPOM di Samarinda melakukan revisi target Indikator Kinerja ini.

Realisasi pada setiap triwulan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali di triwulan I hanya sebesar 74.17% sehingga capaian 87.26% dengan kategori cukup (60-90%). Realisasi pada triwulan II, III dan IV stabil

sebesar 94.29% dengan penurunan capaian di triwulan III dan IV karena meningkatnya target dari 85% menjadi 91%. Rendahnya realisasi pada triwulan I disebabkan karena pelaksanaan sampling mengikuti target Renlak dengan penerapan efisiensi anggaran, namun di akhir Maret terdapat relaksasi anggaran sehingga perhitungan capaian kinerja kembali menggunakan data Renlak awal sesuai Pedoman Sampling. Hal ini menyebabkan terdapat *gap* yang besar antara target dan realisasi dan menyebabkan ketepatan waktu pengambilan sampel yang ditetapkan selesai di triwulan I tidak terpenuhi sesuai target , hanya 25 sampel dari 35 sampel dan berdampak juga pada realisasi ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian tidak terpenuhi sesuai target pula, hanya 25 sampel dari 35 sampel .

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
95.00	94.29	99.25	Akan tercapai	

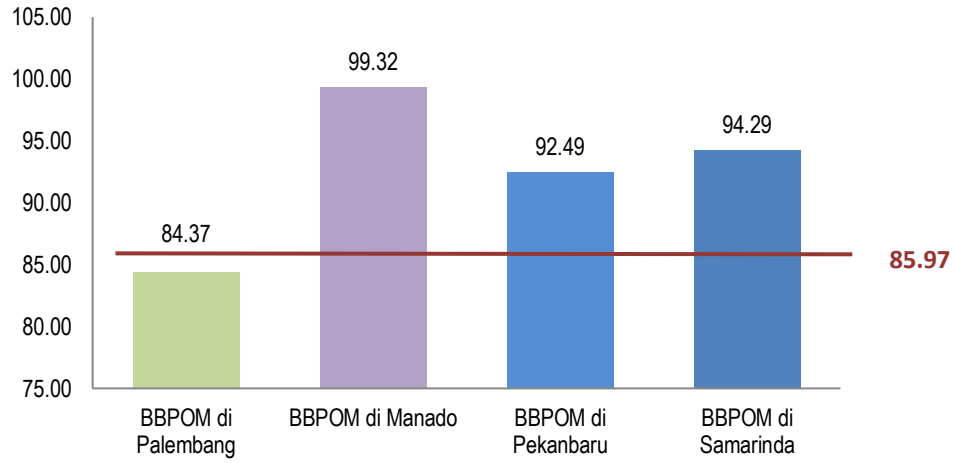
Pada Renstra 2025-2029, target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan selalu meningkat setiap tahun, dari 85% di 2025 dan 95% di tahun 2029. Realisasi pada tahun 2025 ini belum mencapai target akhir periode Renstra dengan capaian hanya 99.25% dan kategori **akan tercapai.**

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.30
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
85.97	Palembang	77	84.37	109.57	Sangat baik
	Manado	91	99.32	109.14	Sangat baik
	Pekanbaru	85	92.49	108.81	Sangat baik
	Samarinda	91	94.29	103.62	Sangat baik

Gambar 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Target realisasi Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan BBPOM di Palembang dan Pekanbaru lebih rendah dari target nasional, sedangkan BBPOM di Manado dan Samarinda lebih tinggi dari target nasional (85.97%). Dalam Klaster 4 ini, realisasi BBPOM di Manado merupakan yang tertinggi dan BBPOM di Palembang merupakan yang terendah. Sedangkan untuk capaiannya, BBPOM di Manado merupakan yang tertinggi dan BBPOM di Samarinda merupakan yang terendah. Capaian semua BBPOM berada di atas 100% sehingga masuk dalam kategori **sangat baik.**

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pada Rancangan Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2025-2029 terdapat beberapa perubahan dibandingkan dengan Renstra sebelumnya. Salah satunya adalah Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Indikator ini adalah salah satu indikator kinerja baru, sehingga belum ada data realisasi tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2025 juga merupakan tahun awal Renstra, sehingga belum bisa diperkirakan realisasi yang bisa dicapai oleh Balai Besar POM di Samarinda.

Definisi operasional manual IKU dan komponen-komponen yang mempengaruhi realisasi dan cara perhitungannya juga mengalami perubahan pada akhir triwulan I tahun 2025. Adanya efisiensi anggaran pada triwulan I dan pembukaan blokir anggaran pada triwulan II, mempengaruhi kegiatan sampling dan pengujian. Sehingga dua kegiatan tersebut baru dapat optimal dillakukan pada triwulan III, sesuai dengan target awal 2025.

Realisasi terendah dari Persentase PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan BBPOM di Samarinda terjadi pada triwulan I, yaitu sebesar 74.17%. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah pelaksanaan sampling pada triwulan I mengikuti target Renlak dengan penerapan efisiensi anggaran, namun pada akhir bulan Maret terdapat relaksasi anggaran sehingga perhitungan capaian kinerja triwulan I kembali menggunakan data Renlak awal 2025 sesuai Pedoman Sampling. Hal ini menyebabkan terdapat *gap* yang besar antara target dan realisasi.

Pada triwulan II, realisasi mengalami kenaikan cukup signifikan menjadi 94.29% dan stabil di angka tersebut sampai triwulan IV. Faktor utama yang menunjang realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai target dan mengalami kenaikan signifikan dibandingkan triwulan I adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian sampel PIRT berisiko oleh BBPOM di Samarinda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Renlak sampling dan pengujian ditetapkan untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Efisiensi anggaran yang diberlakukan pada triwulan I, mempengaruhi kegiatan sampling dan pengujian. Ketika pada triwulan II terdapat relaksasi anggaran dan kembalinya target awal 2025, maka BBPOM di Samarinda segera menyesuaikan dengan merevisi Renlak sampling dan pengujian agar kegiatan sampling dan pengujian dapat berjalan optimal dan realisasinya dapat mencapai target yang telah ditentukan. Selain itu, dilakukan juga percepatan kegiatan sampling sehingga pelaporan sampling dan pengujian dapat sesuai *timeline.*

BBPOM di samarinda juga melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kendala-kendala yang dialami dalam proses pelaksanaan pencapaian target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Setiap bulan, secara konsisten dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian serta realisasinya, pemantauan *timeline* dan pemenuhan parameter uji kritis pengujian.

BBPOM di Samarinda telah melakukan sampling dan pengujian terhadap produk PIRT berisiko sebanyak 35 sampel. Dari 35 sampel tersebut hanya 1 sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS Siklamat). Hasil pengujian tersebut telah dilaporkan melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat hasil pengujian sampel tidak memenuhi syarat kepada Direktorat Pengawasan terkait beserta laporan penanganan Hasil Uji di Luar Spesifikasi (HULS). Tindak lanjut sampel PIRT yang TMS hasil pengujiannya dilakukan sesuai Pedoman Tindak lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Realisasi untuk indiaktor kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

telah selesai dicapai pada triwulan 3 tahun 2025 sehingga di triwulan 4 tidak ada permasalahan dan rencana tindak lanjut yang dilakukan.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.31
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan				
			- Reagen Sampel balai	2	PKT	2	PKT
			- Media Mikro Sampel Balai	2	PKT	2	PKT
			- Keperluan Penunjang Laboratorium	1	PKT	1	PKT
			- Media Sampel balai	1	PKT	1	PKT
			- Pengadaan Reagen/Media/bahan penunjang laboratorium pengujian/ Glassware	1	PKT	1	PKT
			- ATK dan Komputer Suplies	1	PKT	1	PKT
QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel				
			- Sampel	35	SPL	35	SPL

Meskipun realisasi telah melampaui dari target yang ditetapkan namun masih terdapat komponen penilaian yang belum optimal yaitu ketepatan waktu pengambilan sampel (25 sampel dari target 35 sampel) dan ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian (25 sampel dari target 35 sampel). Oleh karena itu masih perlu adanya perbaikan di tahun 2026, untuk pemetaan risiko sarana PIRT secara lebih komprehensif agar sasaran sampling lebih tepat dan efektif dan penyesuaikan rencana sampling dengan tren temuan sampel PIRT Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan hasil pengujian tahun sebelumnya agar kegiatan pengawasan lebih terarah dan berbasis risiko.

Pada tahun 2025, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian dihitung mulai dari kegiatan sampling dan harus sudah dilaporkan pada tanggal 15 bulan berikutnya. Perubahan perhitungan *timeline* pengujian yang semula 30 hari kerja menjadi tanggal 15 setiap bulan setelah bulan sampling berpeluang menyebabkan keterlambatan pelaporan terutama untuk sampel dengan jumlah parameter uji lebih dari 5 dan sampel yang tidak memenuhi syarat karena harus dilakukan pengujian ulang.

Untuk mengatasi perubahan *timeline* ini dan pelaksanaan efisiensi anggaran, maka diperlukan strategi yang efektif dan efisien. Pada awal triwulan II, laboratorium pangan BBPOM di Samarinda mulai mengembangkan

inovasi terkait percepatan pelaporan elektronik berbasis aplikasi digital, yaitu SPEKTRUM (Sistem Pelaporan Elektronik Laboratorium). Inovasi ini adalah pendukung digitalisasi proses kerja pengujian, khususnya pencatatan dan pelaporan data. Dimulai dari penerimaan sampel sampai pelaporan hasil pengujian sampel PIRT menjadi lebih efisien dan *paperless*. Penerimaan sampel, pembuatan SPP dan LCP menggunakan SPEKTRUM, jauh lebih cepat dari pada cara manual yang selama ini dilakukan. Walaupun masih dalam tahap pengembangan, SPEKTRUM sudah dipakai di laboratorium pangan pada triwulan II tahun 2025 hingga saat ini. SPEKTRUM sangat membantu proses pelaporan hasil pengujian terutama *timeline* pengujian lebih terukur dan dapat dimonitoring dan dievaluasi dengan mudah serta penelusuran pengujian sampel lebih cepat. Pengembangan SPEKTRUM saat ini sudah merambah ke laboratorim lainnya di lingkup BBPOM di Samarinda. Untuk jangka panjang, diharapkan SPEKTRUM ini dapat dipakai oleh laboratorium seluruh UPT dan diintegrasikan dengan SIPT.

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan BBPOM di Samarinda pada tahun 2025 untuk mencapai target indikator kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain:

1. Pengadaan alat laboratorium sesuai rekomendasi dari PPPOMN.
2. Pengadaan reagen, media, suku cadang, alat penunjang, bahan penunjang dan kebutuhan lain yang diperlukan laboratorium untuk menunjang pelaksanaan pengujian.
3. Pelaksanaan pengujian sesuai pedoman sampling, baik dari segi jumlah sampel maupun parameter uji kritis.
4. Penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 17025:2017 secara konsisten.
5. Pelaksanaan audit penerapan ISO 17025:2017 oleh KAN pada tanggal 27-28 November dan audit internal Sistem Manajemen POM Terintegrasi pada tanggal 28-29 Oktober 2025 untuk menjaga konsistensi penerapan system manajemen mutu.
6. Identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan di laboratorium, mengadakan pelatihan internal teknis dan mengikutsertakan personel penguji dalam pelatihan teknis maupun mutu lainnya untuk meningkatkan kompetensi secara rutin.
7. Pelatihan internal laboratorium Mikrobiologi pada tanggal 4-8 Agustus 2025
8. Pelatihan internal laboratorium Pangan pada tanggal 13-17 Oktober 202
9. Monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap kegiatan sampling dan pengujian termasuk *timeline*nya..
10. Pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium pada triwulan I dan IV tahun 2025 untuk menjamin validitas hasil pengujian.
11. Bimbingan Teknis Kalibrasi oleh Balai Kalibrasi pada tanggal 30 September-2 Oktober 2025 (daring).
12. Pelaksanaan uji profisiensi di laboratorium kimia maupun mikrobiologi untuk menjamin mutu hasil pengujian.
13. Pelaporan hasil pengujian ke Badan POM melalui SIPT.

14. Perbaikan maupun pemeliharaan peralatan laboratorium yang mengalami kerusakan untuk mendukung kelancaran pengujian.
15. Melakukan koordinasi di Region Samarinda untuk memantau pelaksanaan sampling dan pengujian sampel regional.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.32
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	149.908.600	149.869.023,65	99,97%	103,62	100% (Efisien)

Tabel di atas menggambarkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja oleh BBPOM di Samarinda. Realisasi anggaran pada akhir tahun 2025 telah mencapai 99.97% dengan capaian 103.62% dan tingkat efisiensi 100%. Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan pengadaan alat laboratorium, reagen, media, suku cadang, alat penunjang, bahan penunjang dan kebutuhan lain yang diperlukan laboratorium untuk menunjang pelaksanaan pengujian. Pada triwulan I telah diberlakukan efisiensi anggaran, sehingga pengadaan alat laboratorium dan lain-lain mengalami penundaan. Pada triwulan II, terdapat relaksasi anggaran sehingga pengadaan alat laboratorium dan lain-lain yang tertunda dapat dilakukan. Alat-alat yang berhasil dilakukan pengadaannya antara lain *microwave digester*, *incubator*, timbangan analitik, pH meter, HPLC-UV/PDA/RID, HPLC-DAD, *photochemical reactor*, *nitrogen generator*, *toxinometer*, *anaerobic jar*, *water purifier*, *dissolution tester*, IC-ICPMS, *sample concentrator*, *dry bath*, *centrifuge*, *waterbath shaker*, *hotplate stirrer* dan *vortex mixer*.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Setiap triwulan, BBPOM di Smarinda membuat Laporan Kinerja interim. Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan revisi target. Seperti pada triwulan III tahun 2025, BBPOM di samarinda melakukan revisi target indikator kinerja persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 85% menjadi 91%. Hal ini dilakukan berdasarkan *desk* bersama Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan Juni 2025 serta hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan bulan Mei 2025, sehingga BBPOM di Samarinda melakukan revisi target indikator kinerja ini.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan yang berisiko yang ditindaklanjuti

sesuai ketentuan, BBPOM di Samarinda telah mengelola beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja indikator ini yang tertuang pada daftar risiko semester 2 tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Kesalahan penentuan Parameter Uji Kritis (PUK)
2. Overtimeline pengerjaan sampel Obat dan Makanan sehubungan dengan adanya peraturan maskimal pengerjaan sampel 20 HK untuk sampel Obat, 15 HK di pengujian sampel OBASK dan Kosmetik, dan 25 HK untuk sampel pangan olahan dan PIRT.
3. Pengujian sampel dalam rangka pemenuhan ruang lingkup tidak dikerjakan sesuai target.
4. Verifikasi metode yang sudah dijadwalkan tidak dikerjakan sesuai target.
5. Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi personel laboratorium tidak dilaksanakan sesuai rencana
6. Pengadaan alat laboratorium tidak sesuai perencanaan.
7. Terjadi penumpukan sampel yang belum diuji di laboratorium yang disebabkan karena kerusakan alat-alat yang digunakan dalam pengujian sehingga menimbulkan penumpukan sampel selama menunggu perbaikan.
8. Kebutuhan reagen, media dan *consumable* meningkat, tidak sesuai dengan perencanaan awal.Terdapat perubahan atau penambahan parameter uji kritis baru dan atau metode uji baru yang diwajibkan dalam prioritas sampling.
9. Kebocoran hasil uji
10. Terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan hasil pengujian, laporan manual (*paper based*) adalah salah satu hal yang berpotensi besar dalam menyumbang kesalahan dalam pembuatan laporan.
11. Peningkatan resiko keterpaparan penguji terhadap senyawa sitostatika yang bersifat teratogenik, mutagenik, dan karsinogenik yang berbahaya bagi tubuh
12. Kompetensi personel laboratorium menurun, penurunan kompetensi personel laboratorium dapat terjadi karena penerimaan pegawai baru atau pegawai yang mengalami rotasi, sakit dan pindah ke UPT lain.
13. Pencatatan penggunaan alat laboratorium belum dilakukan secara real time, sehingga jika terjadi indikasi kerusakan alat dapat terlambat ditangani
14. Kesalahan perhitungan capaian kinerja.
15. Kesalahan penetapan kesimpulan hasil pengujian.
16. Kesalahan penulisan syarat pada Catatan Pengujian.
17. Retain sampel tidak tertelusur.Kesalahan pemusnahan retain sampel.
18. Kesalahan pemusnahan retain sampel.
19. Keberpihakan personel kelompok pengujian kepada pihak ketiga terkait penentuan kesimpulan hasil uji
20. Data yang digunakan tidak mudah untuk dievaluasi dikarenakan terdapat parameter baru/ pengkategorian baru yang tidak terakomodir dalam system
21. Masih terdapat ketidaksesuaian jenis pangan dalam proses sampling

Aktivitas pengendalian yang telah dilakukan oleh BBPOM di Samarinda dalam mengurangi dampak risiko yang mungkin akan terjadi dan berdampakvterhadap pencapaian target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi penerbitan SPK oleh ketua tim pengujian dan penerbitan SPP oleh ketua tim/ penyelia laboratorium pangan dan mikrobiologi.
2. Pengaturan *timeline* serta monitoring dan evaluasi masing-masing proses mulai dari pembuatan SPK, pembuatan SPP, proses pengujian dan pembuatan laporan, dan verifikasi hasil uji.
3. Melakukan penjadwalan terhadap pengujian sampel dalam rangka pemenuhan standar ruang lingkup serta monitoring dan evalusi terhadap jadwal yang sudah dibuat
4. Membuat jadwal verifikasi metode analiasa pengujian sampel serta monitoring dan evalusi terhadap jadwal yang sudah dibuat
5. Pelatihan internal dalam rangka peningkatan standar kompetensi personel laboratorium
6. Membuat skala prioritas pengadaan alat laboratorium dalam rangka pemenuhan standar alat laboratorium
7. Perbaikan alat-alat laboratorium yang mengalami kerusakan.
8. Penetapan *timeline* masuknya sampel ke pengujian.
9. Membuat Surat Pernyataan Personel dan melakukan penyegaran kepada seluruh pegawai yang terkait tentang pentingnya komitmen menjaga kerahasiaan hasil uji.
10. Pembuatan lembar kendali laporan yang memuat *timeline* koreksi laporan setelah diverifikasi oleh penyelia.
11. Peningkatan kompetensi penguji melalui pelatihan atau pendampingan internal.
12. Pembelian Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan pedoman dari P3OMN, Adanya pendampingan dari P3OMN untuk penanganan sampel sitostatika hingga pembuangan limbahnya, Sosialisasi terkait penanganan sampel hingga limbah sitostatika kepada seluruh pegawai
13. Dibuat inovasi berupa pengisian penggunaan alat yang diisikan secara langsung (real time) oleh user sebelum dan setelah penggunaan alat secara online (menggunakan QR Code).
14. Membuat rumus perhitungan baru yang menggambarkan jumlah total hari kerja pengujian sampel.
15. Membuat *database* persyaratan hasil uji untuk pengendalian kwsalahan penetapan kesimpulan hasil pengujian.
16. Membuat *database* persyaratan hasil uji untuk pengendalian kesalahan penulisan syarat pada Catatan Pengujian.
17. Membuat laporan monev terhadap aplikasi SIPANSE untuk pengendalian Retain sampel tidak tertelusur.
18. Membuat laporan monev terhadap aplikasi SIPANSE untuk pengendalian Kesalahan pemusnahan retain sampel.

19. Membuat pakta integritas dan surat pernyataan personel.
20. Membuat ulang aplikasi SITUKIN
21. Monev kesesuaian sampel pangan dengan kategori pangan

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

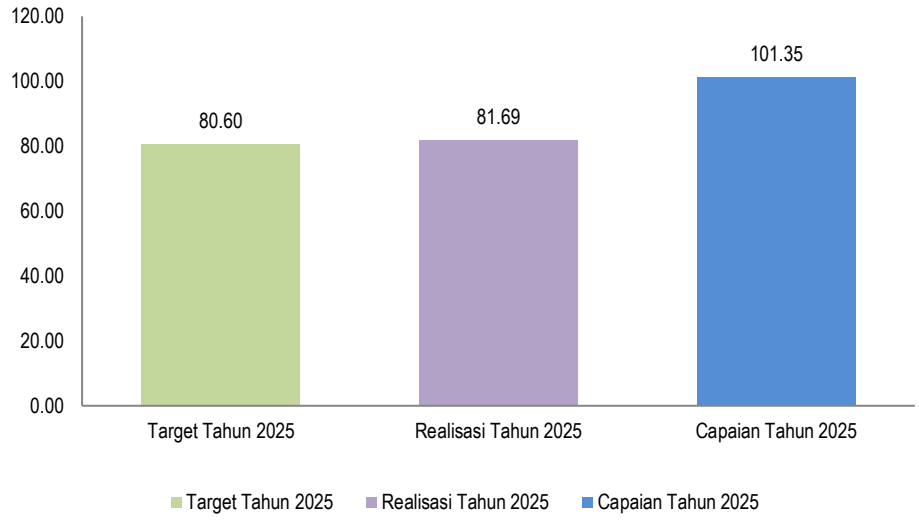
- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah menerbitkan rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 471 surat rekomendasi dan sebanyak 300 surat rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, capaian indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah sebesar 101.35%.

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025**

Gambar 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025



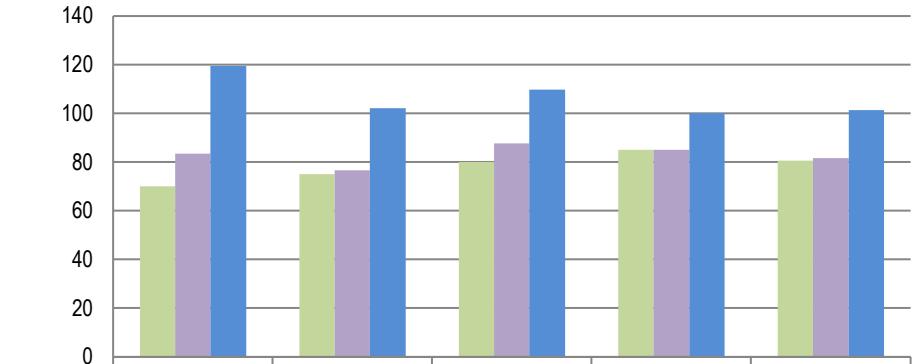
Tabel 3.33
Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
80.60%	81.69%	101.35%	Sangat baik	

Sesuai gambar di atas, target persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada tahun 2025 sebesar 80.60% dengan realisasi sebesar 81.69% sehingga capaian sebesar 101.35%. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi telah melampaui target dan masuk dalam kriteria **sangat baik.**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Gambar 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2021-2025



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	70	75	80	85	80.6
Realisasi	83.57	76.56	87.77	85.09	81.69
Capaian	119.39	102.09	109.71	100.11	101.35

Berdasarkan gambar diatas, realisasi dan capaian dalam 5 tahun terakhir selalu melampaui target yang ditetapkan, dimana capaian tertinggi terjadi di tahun 2021, kemudian diikuti capaian di tahun 2023, 2022 dan terendah di tahun 2024. Capaian di tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya namun dari sisi realisasi menurun meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2025 target tidak lebih besar dari realisasi di tahun 2024 karena dilakukan usulan reviu target tahun 2025 dengan petimbangan baseline data dihitung berdasarkan rata-rata realisasi selama periode tahun 2020–2024, yaitu sebesar 80,56%. Realisasi tahun 2024 sebesar 85,09% tidak digunakan sebagai baseline karena pada tahun tersebut pengawasan terhadap sarana distribusi pangan dan peredaran pangan olahan pada usaha/ritel kecil belum dilaksanakan secara optimal. Dengan target sebesar 80,6% pada tahun 2025, direncanakan akan dilakukan optimalisasi pengawasan terhadap sarana distribusi pangan dan peredaran pangan olahan pada usaha/ritel kecil guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
81.5	81.69	100.23	Tercapai/ melampaui	▲

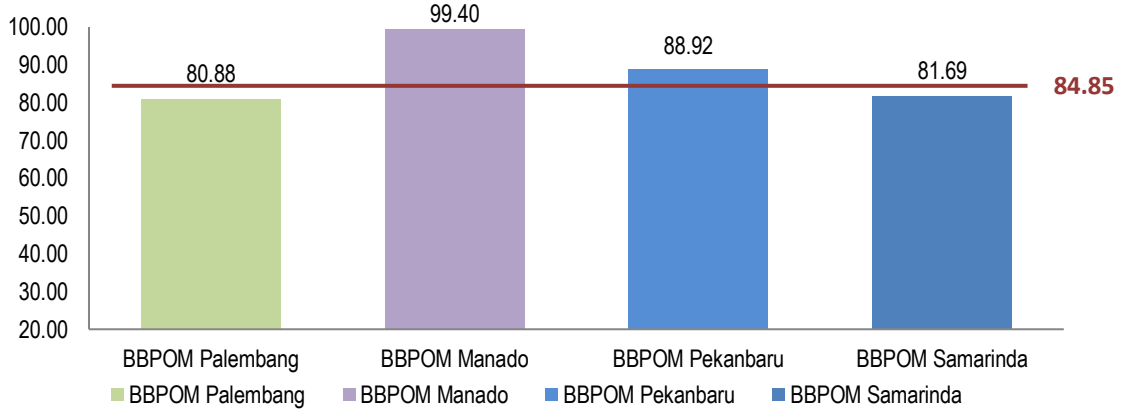
Berdasarkan tabel diatas, terlihat realisasi tahun 2025 telah melampaui target akhir periode Renstra di 2029 dengan nilai 81.69% kategori tercapai, untuk itu perlu dilakukan reviu terhadap target tahun selanjutnya, karena realisasi yang sudah mencapai target akhir periode Renstra tahun 2029 dengan menggunakan baseline realisasi tahun 2025.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
84.85	Palembang	79.00	80.88	102.38	Sangat baik
	Manado	98.00	99.40	101.43	Sangat baik
	Pekanbaru	83.00	88.92	107.13	Sangat baik
	Samarinda	80.60	81.69	101.35	Sangat baik

Gambar 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2025 yang tertinggi adalah BBPOM di Manado, diikuti oleh BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palembang. Capaian dari keempat balai yang diperbandingkan masuk dalam kategori **sangat baik**, namun realisasi BBPOM di Palembang dan BBPOM di Samarinda belum mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah :

- Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengisian CAPA dari rekomendasi hasil pemeriksaan untuk memudahkan dan mempercepat proses umpan balik yang diterima (desk CAPA).
- Monitoring yang lebih intensif terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor.
- Meningkatnya pemahaman pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inpeksi sebagai dampak dari bimbingan teknis yang telah diberikan.
- Meningkatnya respon pelaku usaha atas rekomendasi yang telah diberikan sebagai bentuk kesadaran dalam melakukan perbaikan atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
- Telah terpenuhinya respon dari lintas sektor atas rekomendasi yang telah diberikan dari hasil pemeriksaan sarana produksi/distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan.

Pada triwulan IV tidak ada permasalahan yang ditemui sehingga tidak ada pula rekomendasi yang perlu dilakukan rencana tindak lanjut.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.36
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QIC.001.055	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A	Pemeriksaaan Sarana Produksi Obat dan Makanan				
			- Perjalanan Dinas Biasa	3	KL	3	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	21	KL	21	KL
QIC.004.053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A	Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan Farmakes				
			- Pengadaan ATK/Komputer Suplies	5	KL	5	KL
			- Pencetakan Form	2	KL	2	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	25	KL	25	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	61	KL	61	KL
			- Belanja Keperluan Pemeriksaan	1	PKT	1	PKT
QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A	Koordinasi Bersama Lintas Sektor Daerah untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan				
			- Perjalanan Dinas Biasa	3	KL	3	KL

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah:

- Koordinasi bersama lintas sektor meliputi bupati/walikota, dinas kesehatan, DPMPTSP, dinas perindustrian dan perdagangan, dll.
- Pelaksanaan pengawasan rutin sarana produksi maupun sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan
- Pendampingan/konsultasi terhadap pelaku usaha dalam menindaklanjuti CAPA.
- Sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Samarinda agar memberikan *feedback* atas hasil pemeriksaan sarana.
- Desk CAPA ditempat kepada pelaku usaha bersamaan dengan dilaksanakannya pemeriksaan sarana.
- Mengirimkan apresiasi dan evaluasi kepada lintas sektor (kepala daerah) terhadap hasil pengawasan obat dan makanan di wilayahnya demikian juga kepada sarana dengan pengelolaan sediaan farmasi dan pangan olahan yang baik.

Peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebagai mitra Balai Besar POM di Samarinda dengan membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai implementasi Permendagri 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Kab/kota dan mendorong peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan obat dan makanan melalui pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan, termasuk tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang dilakukan oleh BBPOM di Samarinda.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.37
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	17.561.000	17.560.300	100,00%	101,35%	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran tahun 2025. Dapat disimpulkan bila anggaran 2025 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti. Sumber daya anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yaitu perjalanan dinas petugas dalam pelaksanaan inspeksi sarana produksi sediaan farmasi dan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan dimanfaatkan dengan optimal dan efisien untuk mencapai target indikator kinerja. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan. Selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga pagu anggaran pengawasan kembali pada pagu awal sesuai arahan dan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengawasan sarana , pembinaan kepada stakeholder dan peningkatan kompetensi petugas di tahun 2025.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

BBPOM di Samarinda selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari BBPOM di Samarinda. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti. Salah satunya adalah terjadinya penyesuaian dan perubahan target pada bulan Agustus 2025 dimana sebelumnya indikator ini dihitung secara kumulatif menjadi dihitung secara flat setiap bulannya, yang mempengaruhi perhitungan capaian indikator ini.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dari hasil mitigasi risiko terhadap indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti yang telah dikelola pada daftar risiko semester 2 tahun 2025, terdapat beberapa risiko terkait antara lain :

- Penyampaian surat rekomendasi hasil pemeriksaan kepada stakeholder dan pelaku usaha secara tidak

tepat waktu

- Penyampaian perbaikan hasil rekomendasi oleh pelaku usaha (CAPA) yang melewati timeline yang telah ditentukan

Dari risiko yang telah dimitigasi, telah dilakukan pengendalian yang efektif sehingga indikator ini dapat mencapai target, antara lain dengan melakukan monitoring surat tindaklanjut, monev surat tindaklanjut hasil pemeriksaan dan melakukan desk pendampingan CAPA kepada pelaku usaha.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi yang dimaksud meliputi:

a) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).

b) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan

c) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perhitungan :

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target

tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
3) Kesesuaian format laporan inspeksi
4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

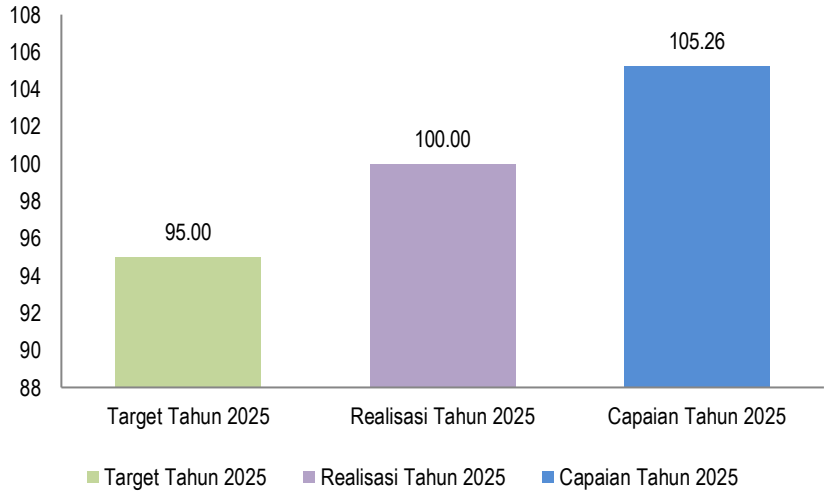
C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi kosmetik sebanyak 4 sarana, dan sarana produksi obat bahan alam sebanyak 6 sarana. Dengan demikian, capaian indikator kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 105.26%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025



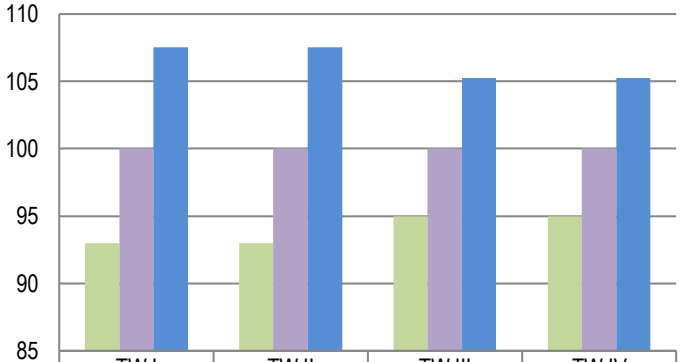
Tabel 3.38
Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
95.00%	100.00%	105.26%	Sangat Baik	

Sesuai gambar di atas, target persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 95.00% dengan realisasi sebesar 100.00% sehingga capaian sebesar 105.26%. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi telah melampaui target dan masuk dalam kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.21
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target	93	93	95	95
Realisasi	100	100	100	100
Capaian	107.53	107.53	105.26	105.26

Pada Rancangan Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2025-2029 terdapat beberapa perubahan dibandingkan dengan Renstra sebelumnya. Salah satunya adalah Indikator Kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Indikator ini adalah salah satu indikator kinerja baru, sehingga belum ada data realisasi tahun-tahun sebelumnya sehingga pebandingan realisasi dilakukan dilakukan terhadap data per triwulan tahun 2025. Tahun 2025 juga merupakan tahun awal Renstra, sehingga belum bisa diperkirakan realisasi yang bisa dicapai oleh Balai Besar POM di Samarinda.

Berdasarkan gambar diatas, capaian indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengalami penurunan dibanding triwulan I dan II disebabkan adanya revisi target pada triwulan III sehingga capaian tampak menurun dengan nilai realisasi yang sama, namun kriteria sama masuk kategori **Sangat Baik**.

Awalnya, target ditetapkan sebesar 93% kemudian berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni dengan mengacu pada realisasi kinerja sampai dengan bulan Mei 2025 dimana capaian sebesar mendekati 110% dan dikhawatirkan akan melebihi 110% di akhir tahun 2025, maka BBPOM di Samarinda melakukan revisi target Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi 95% pada bulan Agustus 2025. Realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 100%, sudah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian 105.26%, bahkan telah melampaui target akhir periode Renstra. Pada Renstra 2025-2029, kategori sangat baik diperoleh apabila capaian yang diperoleh berada dalam rentang 100-110%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
99.00	100.00	101.01	Tercapai/ melampaui	▲

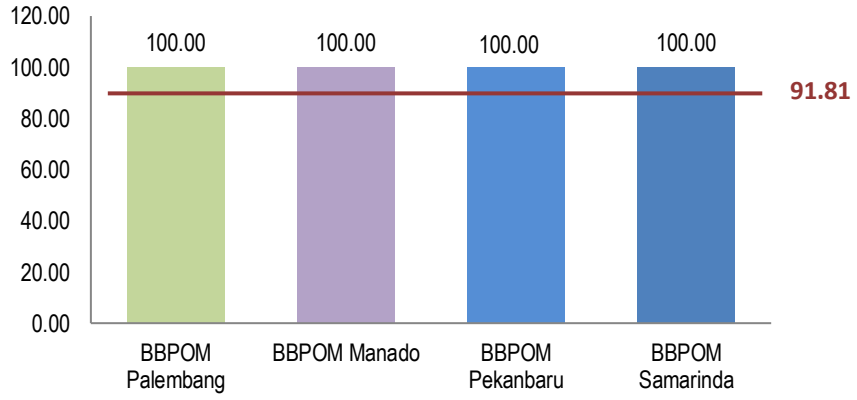
Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah melampaui target akhir periode renstra, dapat diperkirakan target akhir periode renstra akan tercapai. Dikarenakan realisasi tahun 2025 telah melampaui target akhir periode Renstra untuk itu perlu dilakukan reviu terhadap target tahun selanjutnya dengan menggunakan baseline realisasi tahun 2025.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
91.81	Palembang	90.50	100.00	110.50	Tidak dapat disimpulkan
	Manado	94.00	100.00	106.38	Sangat baik
	Pekanbaru	91.00	100.00	109.89	Sangat baik
	Samarinda	95.00	100.00	105.26	Sangat baik

Gambar 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 5) dan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dari ke empat balai yang diperbandingkan yaitu BBPOM di Manado, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Palembang memiliki capaian yang sama. Capaian dari keempat balai yang diperbandingkan masuk dalam kategori **sangat baik**, dan seluruhnya telah mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Tercapainya indikator kinerja ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Penyusunan renlak pemeriksaan sarana berbasis risiko yang simultan antara sarana produksi dan sarana distribusi, menyesuaikan dengan karakteristik kabupaten/kota dan letak geografis wilayah, sehingga pemeriksaan sarana dapat dilakukan dengan lebih efisien.
- Pelaporan hasil pemeriksaan sarana yang dilaksanakan secara tepat waktu melalui SIPT dan monitoring timeline pelaporan hasil pemeriksaan sarana melalui SIPT berikut tindaklanjutnya.
- Penetapan kesimpulan hasil pemeriksaan dan pemberian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sarana yang akurat dan tepat waktu, serta penyampaian rekomendasi kepada pelaku usaha secara tepat waktu.
- Monitoring dan evaluasi terhadap renlak pemeriksaan sarana secara berkala berjalan optimal
- Pelaksanaan pengawasan sarana produksi obat dan makanan telah sesuai dengan renlak yang telah disusun.
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas terhadap peraturan yang berlaku melalui pengembangan kompetensi dan pelatihan teknis terkait maupun melalui sharing knowledge antar petugas untuk meningkatkan akurasi pengambilan kesimpulan maupun penetapan tindaklanjut yang diberikan
- Terjalinnya komunikasi aktif dengan pelaku usaha agar surat rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti (CAPA)
- Memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalan penyusunan / pembuatan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (*CAPA*) hasil inspeksi.
- Sosialisasi penggunaan website pom.go.id dan jdih.pom.go.id untuk akses informasi terkini terkait Obat dan Makanan.

Pada triwulan IV terdapat permasalahan kemampuan petugas dalam melakukan pemeriksaan di sarana produksi kosmetik belum merata, jumlah inspektur kosmetik terbatas (2 orang inspektur kosmetik junior) sehingga diperlukan adanya peningkatan kompetensi petugas dengan mengikuti pelatihan maupun bimtek

terkait pengawasan sarana produksi/distribusi SF

Tabel 3.41
Matriks Rekomendasi Triwulan 4

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	kemampuan petugas dalam melakukan pemeriksaan di sarana produksi kosmetik belum merata, jumlah inspektur kosmetik terbatas (2 orang inspektur kosmetik junior)	mengikuti pelatihan maupun bimtek terkait pengawasan sarana produksi/distribusi SF	mengikuti pelatihan inspektur kosmetik senior yang diselenggarakan oleh PPSDM maupun UPT lain yang bekerjasama dengan PPSDM	TW 1 2026	T	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.42
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QIC.001.055	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A	Pemeriksaaan Sarana Produksi Obat dan Makanan				
			- Perjalanan Dinas Biasa	3	KL	3	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	21	KL	21	KL
		D	Bimbingan Teknis Sertifikasi Izin Edar BPOM dan Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan				
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
		E	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Kepatuhan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Dalam Implementasi CDOB				
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	KL	1	KL

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator ini adalah :

- Melaksanakan pemeriksaan sarana produksi kosmetik sebanyak 4 sarana dan sarana produksi obat bahan alam sebanyak 6 sarana
- Melakukan tindaklanjut hasil pemeriksaan sarana sesuai dengan pedoman yang berlaku secara akurat dan tepat waktu
- Melaporkan hasil pemeriksaan sarana melalui SIPT secara tepat waktu
- Membuat surat rekomendasi hasil pemeriksaan sarana dan menyampaikan surat tersebut kepada sarana secara akurat dan tepat waktu
- Melaksanakan bimbingan teknis sertifikasi izin edar BPOM kepada pelaku usaha produksi sediaan farmasi dan pangan olahan

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.43
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	33.969.000	33.959.650	99,97	105,26	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran tahun 2025. Dapat disimpulkan bila anggaran 2025 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sumber daya anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu perjalanan dinas petugas dalam pelaksanaan inspeksi sarana produksi sediaan farmasi dan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan dimanfaatkan dengan optimal dan efisien untuk mencapai target indikator kinerja. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan

pengawasan. Selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga pagu anggaran pengawasan kembali pada pagu awal sesuai arahan dan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengawasan sarana , pembinaan kepada stakeholder dan peningkatan kompetensi petugas di tahun 2025.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

BBPOM di Samarinda selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari BBPOM di Samarinda. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Salah satunya adalah terjadinya perubahan target pada bulan Agustus 2025 dimana target dinaikkan berdasarkan hasil analisa capaian per bulannya. Dilakukan pula analisa terhadap rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dari hasil mitigasi risiko terhadap indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, terdapat beberapa risiko terkait antara lain :

- Penyampaian perbaikan hasil rekomendasi oleh pelaku usaha (CAPA) yang melewati timeline yang telah ditentukan
- Petugas pengawas BPOM menerima suap atau gratifikasi agar proses izin edar dipercepat, dan petugas pengawas menutup mata terhadap pelanggaran/temuan yang mungkin ada di sarana distribusi dan produksi
- Stakeholder menerima suap dari pelaku usaha UMKM dalam rangka pemenuhan ijin edar BPOM

Dari risiko yang telah dimitigasi, telah dilakukan pengendalian yang efektif sehingga indikator ini dapat mencapai target, antara lain :

- Melakukan desk pendampingan CAPA kepada pelaku usaha
- Pengendalian terhadap gratifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat diantaranya dengan Penandatanganan pakta integritas, implementasi whistle blowing system, kolaborasi petugas dari fungsi lain, dan

- melakukan sosialisasi ke pelaku usaha (secara langsung/ via Medsos) terkait pendampingan dalam rangka registrasi ijin edar di BPOM tidak berbayar/gratis sesuai dengan Standar Pelayanan Publik di BBPOM Samarinda

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi ketepatan waktu tindak lanjut dan kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

Cara Perhitungan :

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

a. Ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;

b. Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

c. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.

d. Kesesuaian *grading*: kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:

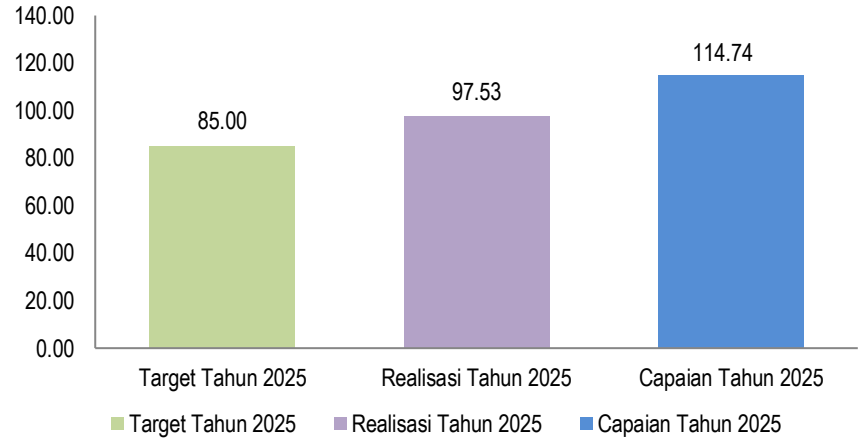
1. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK);

2. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK); dan
3. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK).

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan olahan sebanyak 27 sarana. Dengan demikian, capaian indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 114.74%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025



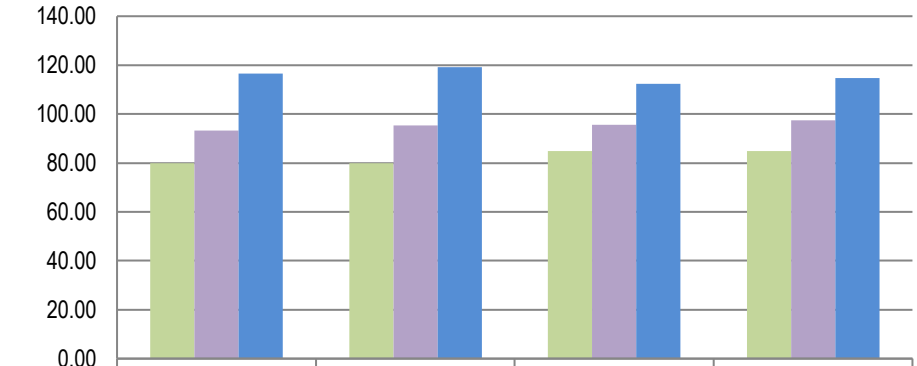
Tabel 3.44
Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
85.00%	97.53%	114.74%	Tidak dapat disimpulkan	

Sesuai gambar di atas, target persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 85.00% dengan realisasi sebesar 97.53% sehingga capaian sebesar 114.74%. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi telah melampaui target dan masuk dalam kriteria **Tidak dapat disimpulkan.**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target	80.00	80.00	85.00	85.00
Realisasi	93.33	95.24	95.56	97.53
Capaian	116.66	119.05	112.42	114.74

Berdasarkan gambar diatas, capaian indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengalami penurunan dibanding triwulan I dan II, namun capaian triwulan I sampai dengan IV melebihi 110% dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan** meskipun telah dilakukan revisi target pada triwulan III. Berdasarkan realisasi dan capaian indikator ini pada tahun 2025, dapat direkomendasikan untuk melakukan reviu target pada tahun berikutnya.

Pada Rancangan Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2025-2029 terdapat beberapa perubahan dibandingkan dengan Renstra sebelumnya. Salah satunya adalah Indikator Kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Indikator ini adalah salah satu indikator kinerja baru, sehingga belum ada data realisasi tahun-tahun sebelumnya sehingga pebandingan realisasi dilakukan dilakukan terhadap data per triwulan tahun 2025. Tahun 2025 juga merupakan tahun awal Renstra, sehingga belum bisa diperkirakan realisasi yang bisa dicapai oleh Balai Besar POM di Samarinda.

Awalnya, target ditetapkan sebesar 93% kemudian berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni dengan mengacu pada realisasi kinerja sampai dengan bulan Mei 2025 dimana capaian melebihi 110% dan dikhawatirkan akan terus melebihi 110% di akhir tahun 2025, maka BBPOM di Samarinda melakukan revisi target Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi 85% pada bulan Agustus 2025. Realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 97.53%, sudah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian 114.74%, bahkan telah melampaui target akhir periode Renstra. Pada Renstra 2025-2029, kategori sangat baik diperoleh apabila capaian yang diperoleh berada dalam rentang 100-110%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.45
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
95.00	97.53	102.66	Tercapai/ Melampaui	▲

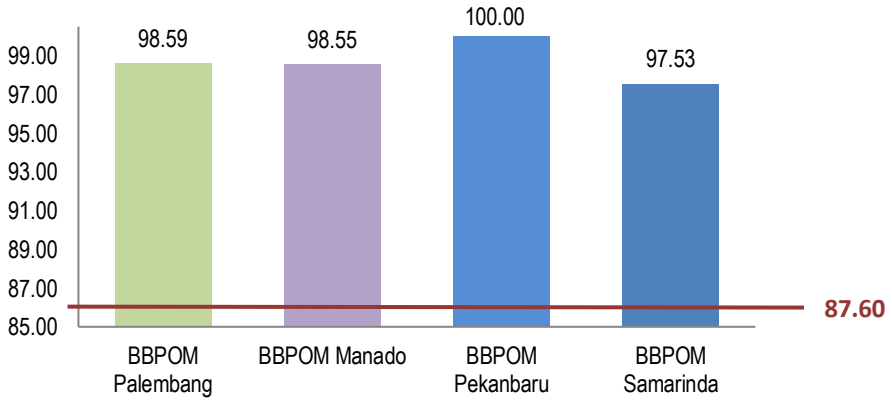
Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah melampaui target akhir periode Renstra, dapat diperkirakan target akhir periode Renstra akan tercapai. Dikarenakan realisasi tahun 2025 telah melampaui target akhir periode Renstra untuk itu perlu dilakukan reviu terhadap target tahun selanjutnya dengan menggunakan baseline realisasi tahun 2025.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.46
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
87.60	Palembang	90.00	98.59	109.54	Sangat baik
	Manado	90.00	98.55	109.50	Sangat baik
	Pekanbaru	91.00	100.00	109.89	Sangat baik
	Samarinda	85.00	97.53	114.74	Tidak dapat disimpulkan

Gambar 3.25
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025, realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Pekanbaru, diikuti oleh BBPOM di Palembang, BBPOM di Manado dan BBPOM di Samarinda. Capaian dari balai yang diperbandingkan masuk dalam kategori **sangat baik** kecuali BBPOM di Samarinda kategori **Tidak dapat disimpulkan**, dan seluruhnya telah mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Tercapainya indikator kinerja ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Penyusunan renlak pemeriksaan sarana berbasis risiko yang simultan antara sarana produksi dan sarana distribusi, menyesuaikan dengan karakteristik kabupaten/kota dan letak geografis wilayah, sehingga pemeriksaan sarana dapat dilakukan dengan lebih efisien.
- Pelaporan hasil pemeriksaan sarana yang dilaksanakan secara tepat waktu melalui SIPT.
- Terpenuhinya % Evaluasi Ketepatan Grading terhadap sarana produksi pangan olahan
- Monitoring dan evaluasi terhadap renlak pemeriksaan sarana secara berkala berjalan optimal
- Pelaksanaan pengawasan sarana produksi obat dan makanan telah sesuai dengan renlak yang telah disusun.
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas terhadap peraturan yang berlaku melalui pengembangan kompetensi dan pelatihan teknis terkait maupun melalui sharing knowledge antar petugas untuk meningkatkan akurasi pengambilan kesimpulan maupun penetapan tindaklanjut yang diberikan
- Terjalinnya komunikasi aktif dengan pelaku usaha agar surat rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti (CAPA)
- Memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalan penyusunan / pembuatan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (*CAPA*) hasil inspeksi.
- Sosialisasi penggunaan website pom.go.id dan jdih.pom.go.id untuk akses informasi terkini terkait Obat dan Makanan.

Capaian indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di akhir tahun 2025 tidak dapat disimpulkan karena melebihi angka 110%, sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan melakukan reviu target indikator kinerja pada perjanjian kinerja tahun berikutnya (2026).

Tabel 3.47
Matriks Rekomendasi Triwulan 4

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	persentase capaian indikator kinerja melebihi 110%	reviu target indikator kinerja pada penetapan PK tahun 2026	melakukan usulan revisi target indikator kinerja pada penetapan PK tahun 2026	Triwulan 1 tahun 2026	Y	TU 11	Monev capaian kinerja berkala tidak dilakukan secara rutin sehingga Kendala dalam pencapaian kinerja tidak dapat dideteksi lebih awal dan dilakukan antisipasi sehingga akan menghambat capaian kinerja

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.48
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QIC.001.055	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A	Pemeriksaaan Sarana Produksi Obat dan Makanan				
			- Perjalanan Dinas Biasa	3	KL	3	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	21	KL	21	KL
		D	Bimbingan Teknis Sertifikasi Izin Edar BPOM dan Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan				
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 untuk pencapaian indikator ini adalah pemeriksaan sebanyak 27 sarana produksi pangan MD maupun PIRT dan bimbingan teknis izin edar BPOM oleh tim sertifikasi. Selain itu, bimbingan teknis izin edar BPOM sendiri telah melahirkan inovasi SIJEBOL (seksi sertifikasi jemput bola) yang telah banyak membantu pelaku usaha obat dan makanan untuk memenuhi ketentuan sarana produksi maupun izin edar BPOM. Inovasi SIJEBOL sendiri telah masuk dalam finalis lomba KIPP pada tahun 2025.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.49
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	33.969.000	33.959.650	99,97	114,74	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran tahun 2025. Dapat disimpulkan bila anggaran 2025 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sumber daya anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu perjalanan dinas petugas dalam pelaksanaan inspeksi sarana produksi sediaan farmasi dan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan. Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan dimanfaatkan dengan optimal dan efisien untuk mencapai target indikator kinerja. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan. Selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga pagu anggaran pengawasan kembali pada pagu awal sesuai arahan dan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengawasan sarana , pembinaan kepada stakeholder dan peningkatan kompetensi petugas di tahun 2025.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

BBPOM di Samarinda selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan

evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari BBPOM di Samarinda. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Salah satunya adalah terjadinya perubahan target pada bulan Agustus 2025 dimana target dinaikkan berdasarkan hasil analisa capaian per bulannya. Dilakukan pula analisa terhadap rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dari hasil mitigasi risiko terhadap indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, terdapat beberapa risiko terkait antara lain :

- Penyampaian perbaikan hasil rekomendasi oleh pelaku usaha (CAPA) yang melewati timeline yang telah ditentukan
- Petugas pengawas BPOM menerima suap atau gratifikasi agar proses izin edar dipercepat, dan petugas pengawas menutup mata terhadap pelanggaran/temuan yang mungkin ada di sarana distribusi dan produksi
- Stakeholder menerima suap dari pelaku usaha UMKM dalam rangka pemenuhan ijin edar BPOM

Dari risiko yang telah dimitigasi, telah dilakukan pengendalian yang efektif sehingga indikator ini dapat mencapai target, antara lain :

- Melakukan desk pendampingan CAPA kepada pelaku usaha
- pengendalian terhadap gratifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat diantaranya dengan Penandatanganan pakta integritas, implementasi whistle blowing system, kolaborasi petugas dari fungsi lain, dan
- Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha (secara langsung/ via Medsos) terkait pendampingan dalam rangka registrasi ijin edar di BPOM tidak berbayar/gratis sesuai dengan Standar Pelayanan Publik di BBPOM Samarinda.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

a) Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;

b) Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;

c) Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;

d) Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenaangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan :

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:
= rata-rata dari % fasilitas distribusi Obat, % fasilitas distribusi Obat Bahan Alam, % fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan, % fasilitas distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjut (b).

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B) x 100%

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindaklanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan = {(A/C) + (B/C)}/2 x 100%

A. Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (timeline), pada periode bulan berjalan.

B. Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh independent supervisor melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.

C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

C. Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

D. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

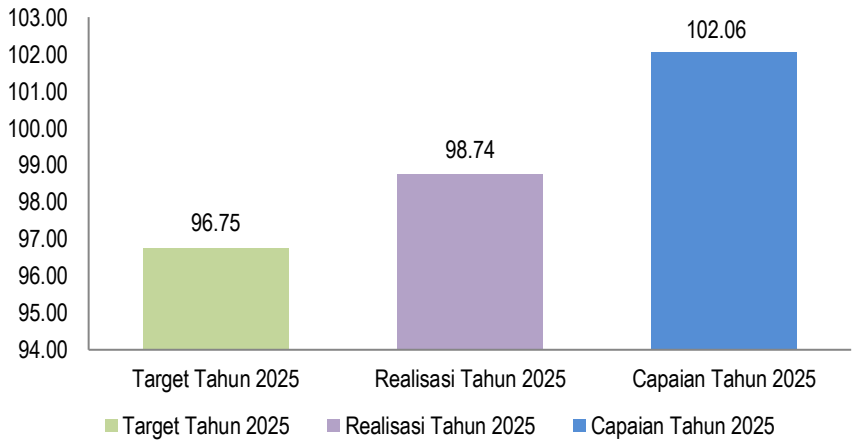
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat sebanyak 282 sarana, sarana distribusi obat bahan alam sebanyak 60 sarana, sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 37 sarana dan sarana distribusi kosmetik sebanyak 220 sarana. Dengan demikian, capaian indikator kinerja persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 102.06%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.26
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025



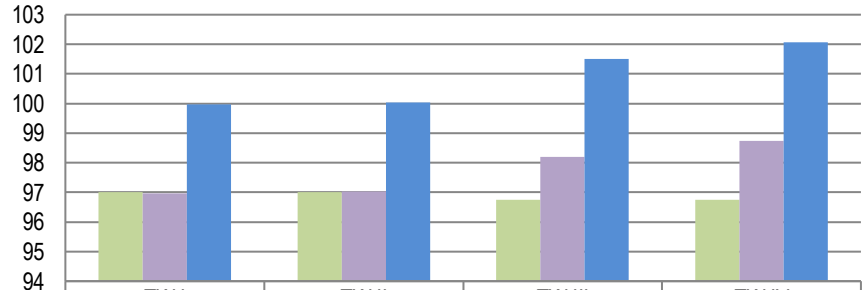
Tabel 3.50
Capaian Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
96.75%	98.74%	102.06	Sangat Baik	

Sesuai gambar di atas, target persentase sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 96.75% dengan realisasi sebesar 98.74% sehingga capaian sebesar 102.06%. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi telah melampaui target dan masuk dalam kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.27
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target	97	97	96.75	96.75
Realisasi	96.96	97.03	98.2	98.74
Capaian	99.96	100.03	101.5	102.06

Berdasarkan gambar diatas, capaian indikator persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Salah satu penyebab peningkatan capaian ini karena adanya revisi target dari 97.00% menjadi 96.75%.

Pada Rancangan Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2025-2029 terdapat beberapa perubahan dibandingkan dengan Renstra sebelumnya. Salah satunya adalah Indikator Kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Indikator ini adalah salah satu indikator kinerja baru, sehingga belum ada data realisasi tahun-tahun sebelumnya sehingga pebandingan realisasi dilakukan dilakukan terhadap data per triwulan tahun 2025. Tahun 2025 juga merupakan tahun awal Renstra, sehingga belum bisa diperkirakan realisasi yang bisa dicapai oleh Balai Besar POM di Samarinda.

Awalnya, target ditetapkan sebesar 97% kemudian berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni dengan mengacu pada realisasi kinerja sampai dengan bulan Mei 2025, maka BBPOM di Samarinda melakukan revisi target Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi 96.75% pada bulan Agustus 2025. Realisasi yang dicapai pada akhir

tahun 2025 sebesar 98.74%, sudah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian 102.06%. Pada Renstra 2025-2029, kategori sangat baik diperoleh apabila capaian yang diperoleh berada dalam rentang 100-110%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.51
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
99.50	98.74	99.24	Akan tercapai	

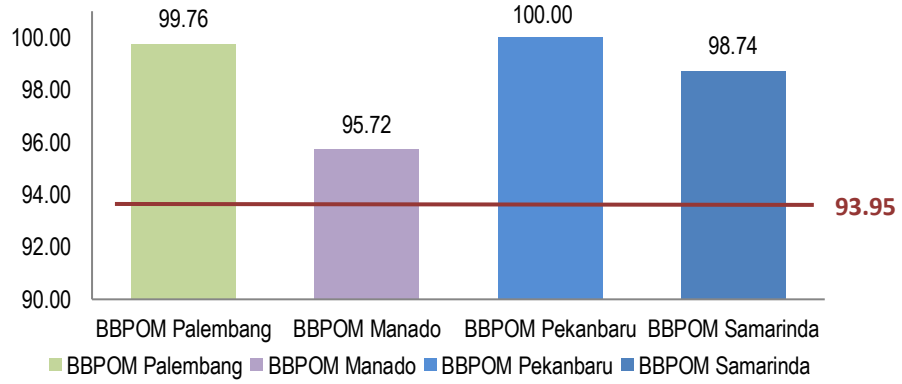
Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 belum melampaui target akhir periode renstra, namun dengan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan yang ditempuh, target akhir periode Renstra akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
93.95	Palembang	94.75	99.76	105.29	Sangat baik
	Manado	89.25	95.72	107.25	Sangat baik
	Pekanbaru	97.25	100.00	102.83	Sangat baik
	Samarinda	96.75	98.74	102.06	Sangat baik

Gambar 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 5) dan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025, realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Pekanbaru, diikuti oleh BBPOM di Palembang, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Manado. Capaian dari keempat balai yang diperbandingkan masuk dalam kategori **sangat baik**, dan seluruhnya telah mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Tercapainya indikator kinerja ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Penyusunan renlak pemeriksaan sarana berbasis risiko yang simultan antara sarana produksi dan sarana distribusi, menyesuaikan dengan karakteristik kabupaten/kota dan letak geografis wilayah, sehingga pemeriksaan sarana dapat dilakukan dengan lebih efisien.
- Pelaporan hasil pemeriksaan sarana yang dilaksanakan secara tepat waktu melalui SIPT.
- Monitoring timeline pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT berikut tindaklanjutnya
- Penetapan kesimpulan hasil pemeriksaan dan pemberian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sarana yang akurat sesuai dengan pedoman dan tepat waktu, serta penyampaian rekomendasi kepada pelaku usaha secara tepat waktu.
- Monitoring dan evaluasi terhadap renlak pemeriksaan sarana secara berkala berjalan optimal
- Pelaksanaan pengawasan fasilitas distribusiSediaan Farmasi telah sesuai dengan renlak yang telah disusun.
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas terhadap peraturan yang berlaku
- Terjalinnya komunikasi aktif dengan pelaku usaha agar surat rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti (CAPA)
- Memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalan penyusunan / pembuatan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (*CAPA*) hasil inspeksi.
- Melakukan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan secara akurat sesuai dengan pedoman
- Memberikan tindaklanjut hasil pemeriksaan dengan tepat sesuai pedoman dan tepat waktu
- Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi obat dan makanan dengan memberikan bimbingan teknis maupun sharing akses peraturan terkini
- Sosialisasi penggunaan website pom.go.id dan jdih.pom.go.id untuk akses informasi terkini terkait Obat dan Makanan.

Pada triwulan IV tahun 2025 terdapat permasalahan masih maraknya pendistribusian obat ke sarana klinik diperkebunan sawit/tambang yang tidak sesuai ketentuan sehingga telah dilakukan upaya perbaikan dengan melakukan koordinasi dengan direktorat distribusi obat dan melakukan bimtek peraturan CDOB terbaru kepada pelaku usaha

Tabel 3.53
Matriks Rekomendasi Triwulan 4

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	masih maraknya pendistribusian obat ke sarana klinik diperkebunan sawit/tambang yang tidak sesuai ketentuan	1. melakukan koordinasi dengan direktorat distribusi obat 2. melakukan bimtek peraturan CDOB terbaru kepada pelaku usaha	1. melakukan koordinasi dengan direktorat distribusi obat 2. melakukan bimtek peraturan CDOB terbaru kepada pelaku usaha	November 2025	T	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.54
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QIC.004.053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A	Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan Farmakes				
			- Pengadaan ATK/Komputer Suplies	5	KL	5	KL
			- Pencetakan Form	2	KL	2	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	16	KL	16	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	61	KL	61	KL
			- Belanja Keperluan Pemeriksaan	1	PKT	1	PKT
		C	Pemeriksaan Bersama Petugas Kabupaten/ Kota				
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL
		D	Pemeriksan sarana distribusi dan produksi obat dan makanan				
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL

QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B	Konsultasi dan Koordinasi ke Badan POM untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja				
			- Perjalanan Dinas Biasa	2	KL	2	KL
		O	Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/ Kota Penerima Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025				
			- Snack	2	KL	2	KL
			- Makan	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	KL	1	KL
		T	In House Trainning Pengayaan Kompetensi Petugas UPT Badan POM Berdasarkan Trend dan Analisis KebutuhanTerkini				
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
		U	Pengendalian Anti Microbial Resistance (AMR) dan Pelaporan farmakovigilans melalui Peningkatan Awareness Penanggungjawab Sarana Pelayanan Farmasi Tahun 2025 di Kab. Berau				
			- Snack	1	KL	1	KL
			- Makan	1	KL	1	KL
			- Honor Output Kegiatan	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2	KL	2	KL
		V	Bimtek Komunitas Dalam Rangka Pengawasan Pangan				
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	KL	1	KL
		W	Pelatihan Teknis Food Inspector Tingkat Muda				
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1	KL	1	KL
		X	Bimtek Kepada Distributor Obat Bahan Alam Dalam Rangka Perkuatan Pengawasan OBA mengandung BKO				
			- Snack	1	KL	1	KL
			- Makan	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	K	1	KL
			- Leaflet OBA	1	PKT	1	PKT
		Y	Peningkatan kapasitas dan efektivitas pengawasan serta penindakan peredaran obat dan makanan di wilayah Kalimantan Timur				
			- Biaya Penyelenggaraan	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Paket	1	KL	1	KL

	Meeting Luar Kota - Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL
Z	September Ceria : UMKM Berdaya, Produk Kaltim Mendunia - Banner - Honor Narasumber - Biaya Penyelenggaraan - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	 1 2 1 1 1	 PKT KL PKT KL KL	 1 2 1 1 1	 PKT KL PKT KL KL
AA	Kegiatan KolaborAksi Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor dan Masyarakat Terkait Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2025 - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	KL	1	KL
AB	Sharing Knowledge terkait Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Kupang Dan Balai POM di Balikpapan - Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
AC	Desk Usulan BOK POM TA 2026 - Snack - Makan - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	 2 1 1	 KL KL KL	 2 1 1	 KL KL KL
AD	Mengikuti Focus Group Discussion Program Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar - Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
AE	Mengikuti Kegiatan Peran Saka Nasional Tahun 2025 dalam Rangka Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan - Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
AF	Sharing Knowledge terkait Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di BBPOM Manado - Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
AG	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Kepatuhan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Dalam Implementasi CDOB - Spanduk - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	 1 1	 PKT KL	 1 1	 PKT KL
AH	Forum Sinergi Pusat dan UPT BPOM dalam Penguatan Sistem Pengawasan Mutu Obat Tahun				

			2025 - Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1	KL	1	KL
		AI	Koordinasi/ Konsultasi - Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator ini pada tahun 2025 antara lain :

- Melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat sebanyak 282 sarana
- Melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat bahan alam sebanyak 60 sarana
- Melakukan pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 37 sarana
- Melakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik sebanyak 220 sarana
- Pencetakan form untuk pelaksanaan pemeriksaan sarana dan pengadaan kebutuhan ATK penunjang pemeriksaan
- Pemeriksaan bersama petugas dari lintas sektor terkait
- Peningkatan kompetensi petugas pengawas berupa inhouse training dan pelatihan food inspector tingkat muda
- Konsultasi dan koordinasi ke Badan POM untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja
- Bimtek Anti Microbial Resistance (AMR) dan pelaporan farmakovigilans penanggungjawab sarana kefarmasian di kabupaten Berau
- Melakukan koordinasi dengan direktorat pengawasan distribusi ONPP
- Bimtek peraturan CDOB terbaru kepada pelaku usaha (PBF dan klinik)
- Bimtek komunitas dalam rangka pengawasan pangan
- Bimtek kepada distributor obat bahan alam dalam rangka perkuatan pengawasan obat bahan alam
- Peningkatan kapasitas dan efektivitas penindakan peredaran obat dan makanan di wilayah Kalimantan Timur

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.55
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	371.390.400	371.347.518,80	99,99	102,06	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran tahun 2025. Dapat disimpulkan bila anggaran 2025 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sumber daya anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu perjalanan dinas petugas dalam pelaksanaan inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi dan pemeriksaan sarana disribusi pangan olahan. Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan dimanfaatkan dengan optimal dan efisien untuk mencapai target indikator kinerja. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan. Selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga pagu anggaran pengawasan kembali pada pagu awal sesuai arahan dan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi , pembinaan kepada stakeholder dan peningkatan kompetensi petugas di tahun 2025.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

BBPOM di Samarinda selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari BBPOM di Samarinda. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Salah satunya adalah terjadinya perubahan target pada bulan Agustus 2025 dimana target dinaikkan berdasarkan hasil analisa capaian per bulannya. Dilakukan pula analisa terhadap rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja, salah satunya dengan mengadakan bimtek kepada pelaku usaha distribusi obat

bahan alam tentang peraturan terkait distribusi obat bahan alam, dan juga bimtek kepada PBF dan klinik tentang peraturan CDOB yang terbaru yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha obat dan makanan dalam memenuhi regulasi dan meningkatkan capaian indikator ini.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dari hasil mitigasi risiko terhadap indikator persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, terdapat beberapa risiko terkait antara lain :

- tidak terperiksanya sarana distribusi di daerah 3T atau daerah perifer
- Adanya kegiatan atau pertemuan internal yang harus diikuti di luar jadwal perencanaan
- Petugas pengawas BPOM menerima suap atau gratifikasi agar proses izin edar dipercepat, dan petugas pengawas menutup mata terhadap pelanggaran/temuan yang mungkin ada di sarana distribusi dan produksi
- Stakeholder menerima suap dari pelaku usaha UMKM dalam rangka pemenuhan ijin edar BPOM

Dari risiko yang telah dimitigasi, telah dilakukan pengendalian yang efektif sehingga indikator ini dapat mencapai target, antara lain :

- Review rencana pelaksanaan pengawasan sarana distribusi di tahun sebelumnya dan penyusuna renlak pemeriksaan sarana di tahun berjalan
- Membuat monitoring dan evaluasi renlak perbulan dengan justifikasi apabila terjadi perubahan
- pengendalian terhadap gratifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat diantaranya dengan Penandatanganan pakta integritas, implementasi whistle blowing system, kolaborasi petugas dari fungsi lain, dan
- melakukan sosialisasi ke pelaku usaha (secara langsung/ via Medsos) terkait pendampingan dalam rangka registrasi ijin edar di BPOM tidak berbayar/gratis sesuai dengan Standar Pelayanan Publik di BBPOM Samarinda

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

- Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
  Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
- Ketepatan waktu pelaporan

- Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Cara Perhitungan :

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan.

= Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa sesuai renlak) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

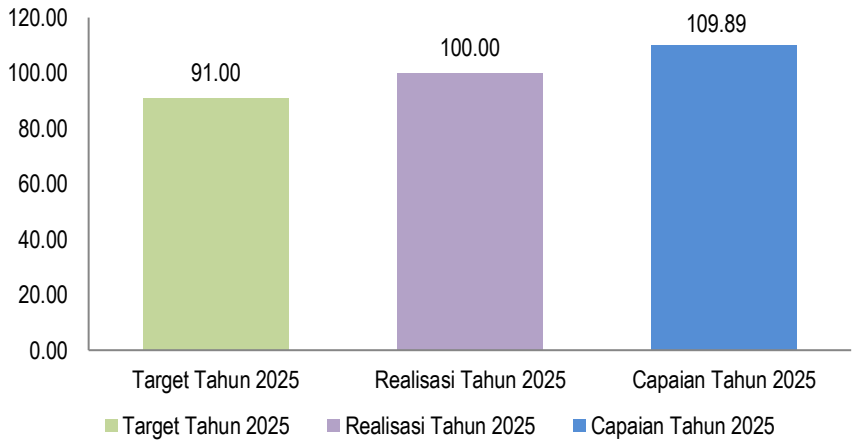
C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan olahan, baik ritel modern maupun ritel tradisional sebanyak 88 sarana, dengan realisasi sebesar 100 % dan capaian sebesar 109.89%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.29
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025



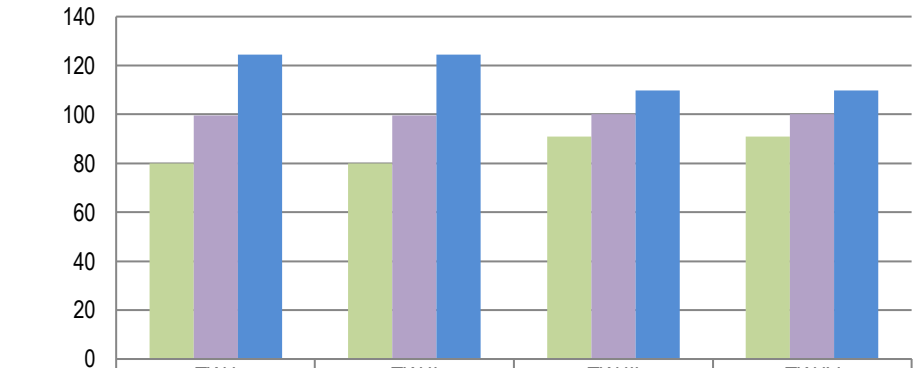
Tabel 3.56
Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
91.00%	100.00%	109.89%	Sangat baik	

Sesuai gambar di atas, target persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 91.00% dengan realisasi sebesar 100.00% sehingga capaian sebesar 109.89%. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi telah melampaui target dan masuk dalam kriteria **sangat baik.**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.30
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target	80	80	91	91
Realisasi	99.62	99.62	100	100
Capaian	124.53	124.53	109.89	109.89

Berdasarkan gambar diatas, capaian indikator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengalami penurunan di triwulan III dan IV dibanding triwulan I dan II karena telah dilakukan penurunan target di triwulan III, dengan mempertimbangkan capaian triwulan I dan II yang telah melebihi 110% dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan.**

Pada Rancangan Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2025-2029 terdapat beberapa perubahan dibandingkan dengan Renstra sebelumnya. Salah satunya adalah Indikator Kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Indikator ini adalah salah satu indikator kinerja baru, sehingga belum ada data realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pebandingan realisasi dilakukan dilakukan terhadap data per triwulan tahun 2025. Tahun 2025 juga merupakan tahun awal Renstra, sehingga belum bisa

diperkirakan realisasi yang bisa dicapai oleh Balai Besar POM di Samarinda.

Awalnya, target ditetapkan sebesar 80% kemudian berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni dengan mengacu pada realisasi kinerja sampai dengan bulan Mei 2025 dimana capaian melebihi 110% dan dikhawatirkan akan terus melebihi 110% di akhir tahun 2025, maka BBPOM di Samarinda melakukan revisi target Persentase sarana distribusii pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menjadi 91% pada bulan Agustus 2025. Realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 100%, sudah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian 109.89%, bahkan telah melampaui target akhir periode Renstra. Pada Renstra 2025-2029, kategori sangat baik diperoleh apabila capaian yang diperoleh berada dalam rentang 100-110%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra

Tabel 3.57
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
95.00	100.00	105.26	Tercapai/ Melampaui	

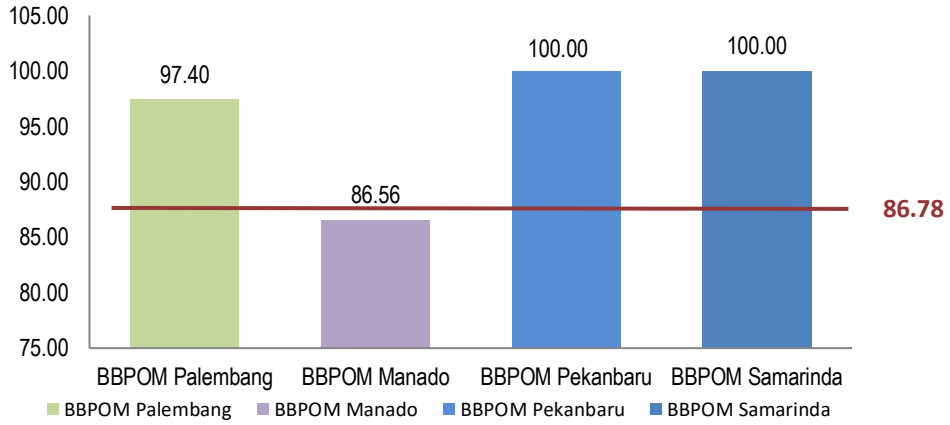
Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah melampaui target akhir periode Renstra, dan dapat diperkirakan target akhir periode renstra akan tercapai. Dikarenakan realisasi tahun 2025 telah melampaui target akhir periode Renstra untuk itu perlu dilakukan reviu terhadap target tahun selanjutnya dengan menggunakan baseline realisasi tahun 2025.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.58
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
86.78	Palembang	90.00	97.40	108.22	Sangat baik
	Manado	80.00	86.56	108.20	Sangat baik
	Pekanbaru	91.00	100.00	109.89	Sangat baik
	Samarinda	91.00	100.00	109.89	Sangat baik

Gambar 3.31
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025, realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Pekanbaru, dan BBPOM di Samarinda, diikuti oleh BBPOM di Palembang dan BBPOM di Manado. Capaian dari keempat balai yang diperbandingkan masuk dalam kategori **sangat baik**, realisasi BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Samarinda, dan BBPOM di Palembang telah melampaui target nasional sedangkan realisasi BBPOM di Manado masih di bawah target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Tercapainya indikator kinerja persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut yaitu :

- Penyusunan renlak pemeriksaan sarana berbasis risiko yang simultan antara sarana produksi dan sarana distribusi, menyesuaikan dengan karakteristik kabupaten/kota dan letak geografis wilayah, sehingga pemeriksaan sarana dapat dilakukan dengan lebih efisien.
- Penetapan kesimpulan hasil pemeriksaan dan pemberian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sarana yang akurat dan tepat waktu, serta penyampaian rekomendasi kepada pelaku usaha secara tepat waktu.
- Monitoring dan evaluasi terhadap renlak pemeriksaan sarana distribusi dilakukan secara berkala
- Monitoring timeline pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT berikut tindaklanjutnya
- Pelaksanaan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dilakukan sesuai dengan renlak yang telah

disusun.

- Melaporkan hasil pemeriksaan sarana secara tepat waktu melalui SIPT dan menetapkan tindaklanjut dengan akurat sesuai pedoman
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas terhadap peraturan yang berlaku
- Terjalinnya komunikasi aktif dengan pelaku usaha agar surat rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti (CAPA)
- memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalan penyusunan / pembuatan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan (*CAPA*) hasil inspeksi.

Pada triwulan IV tidak terdapat permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja sehingga tidak ada pula rencana tindak lanjut yang ditetapkan di triwulan IV

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.59
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QIC.004.053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A	Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan Farmakes - Pengadaan ATK/Komputer Suplies - Pencetakan Form - Perjalanan Dinas Biasa - Perjalanan Dinas Dalam Kota - Belanja Keperluan Pemeriksaan	 5 2 16 61 1	 KL KL KL KL PKT	 5 2 16 61 1	 KL KL KL KL PKT
		C	Pemeriksaan Bersama Petugas Kabupaten/ Kota - Perjalanan Dinas Dalam Kota	 1	 KL	 1	 KL
		D	Pemeriksan sarana distribusi dan produksi obat dan makanan - Perjalanan Dinas Biasa	 1	 KL	 1	 KL
QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B	Konsultasi dan Koordinasi ke Badan POM untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja - Perjalanan Dinas Biasa	 2	 KL	 2	 KL
		O	Pembinaan dan Monitoring Kinerja Kabupaten/ Kota Penerima Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025				

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
			- Snack - Makan - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	 2 1 1	 KL KL KL	 2 1 1	 KL KL KL
		T	In House Trainning Pengayaan Kompetensi Petugas UPT Badan POM Berdasarkan Trend dan Analisis KebutuhanTerkini - Perjalanan Dinas Biasa	 1	 KL	 1	 KL
		U	Pengendalian Anti Microbial Resistance (AMR) dan Pelaporan farmakovigilans melalui Peningkatan Awareness Penanggungjawab Sarana Pelayanan Farmasi Tahun 2025 di Kab. Berau - Snack - Makan - Honor Output Kegiatan - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	 1 1 1 2	 KL KL KL KL	 1 1 1 2	 KL KL KL KL
		V	Bimtek Komunitas Dalam Rangka Pengawasan Pangan - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	 1	 KL	 1	 KL
		W	Pelatihan Teknis Food Inspector Tingkat Muda - Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	 1	 KL	 1	 KL
		X	Bimtek Kepada Distributor Obat Bahan Alam Dalam Rangka Perkuatan Pengawasan OBA mengandung BKO - Snack - Makan - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Leaflet OBA	 1 1 1 1	 KL KL K PKT	 1 1 1 1	 KL KL KL PKT
		Y	Peningkatan kapasitas dan efektivitas pengawasan serta penindakan peredaran obat dan makanan di wilayah Kalimantan Timur - Biaya Penyelenggaraan - Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - Perjalanan Dinas Dalam Kota	 1 1 1	 KL KL KL	 1 1 1	 KL KL KL
		Z	September Ceria : UMKM Berdaya, Produk Kaltim Mendunia - Banner - Honor Narasumber - Biaya Penyelenggaraan - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	 1 2 1 1	 PKT KL PKT KL	 1 2 1 1	 PKT KL PKT KL

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1	KL	1	KL
		AA	Kegiatan KolaborAksi Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Lintas Sektor dan Masyarakat Terkait Peraturan Badan POM No. 16 Tahun 2025 - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	KL	1	KL
		AB	Sharing Knowledge terkait Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Kupang Dan Balai POM di Balikpapan - Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
		AC	Desk Usulan BOK POM TA 2026 - Snack - Makan - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2 1 1	KL KL KL	2 1 1	KL KL KL
		AD	Mengikuti Focus Group Discussion Program Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar - Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
		AE	Mengikuti Kegiatan Peran Saka Nasional Tahun 2025 dalam Rangka Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan - Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
		AF	Sharing Knowledge terkait Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di BBPOM Manado - Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
		AG	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Kepatuhan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Dalam Implementasi CDOB - Spanduk - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1 1	PKT KL	1 1	PKT KL
		AH	Forum Sinergi Pusat dan UPT BPOM dalam Penguatan Sistem Pengawasan Mutu Obat Tahun 2025 - Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1	KL	1	KL
		AI	Koordinasi/ Konsultasi - Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain :

- Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan baik ritel modern maupun ritel tradisional sebanyak 88 sarana
- Pencetakan form pemeriksaan sarana dan pengadaan ATK penunjang pemeriksaan.
- Pemeriksaan bersama petugas lintas sektor terkait di sarana ritel pangan modern/tradisional
- Peningkatan kompetensi petugas pengawas berupa inhouse training dan pelatihan food inspector tingkat muda
- Bimtek Anti Microbial Resistance (AMR) dan pelaporan farmakovigilans penanggungjawab sarana kefarmasian di kabupaten Berau
- Bimtek kemunitas dalam rangka pengawasan pangan
- Bimtek kepada distributor obat bahan alam dalam rangka perkuatan pengawasan obat bahan alam

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.60
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	318.905.400	318.862.518,80	99,99	109,89	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran tahun 2025. Dapat disimpulkan bila anggaran 2025 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Sumber daya anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja Persentase sarans distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu perjalanan dinas petugas dalam pelaksanaan inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi dan pemeriksaan sarana disribusi pangan olahan. Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan dimanfaatkan dengan optimal dan efisien untuk mencapai target indikator kinerja. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran

Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan. Selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga pagu anggaran pengawasan kembali pada pagu awal sesuai arahan dan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi , pembinaan kepada stakeholder dan peningkatan kompetensi petugas di tahun 2025.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

BBPOM di Samarinda selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari BBPOM di Samarinda. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Salah satunya adalah terjadinya perubahan target pada bulan Agustus 2025 dimana target dinaikkan berdasarkan hasil analisa capaian per bulannya. Dilakukan pula analisa terhadap rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dari hasil mitigasi risiko terhadap indikator persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, terdapat beberapa risiko terkait antara lain :

- tidak terperiksanya sarana distribusi di daerah 3T atau daerah perifer
- Adanya kegiatan atau pertemuan internal yang harus diikuti di luar jadwal perencanaan
- Petugas pengawas BPOM menerima suap atau gratifikasi agar proses izin edar dipercepat, dan petugas pengawas menutup mata terhadap pelanggaran/temuan yang mungkin ada di sarana distribusi dan produksi
- Stakeholder menerima suap dari pelaku usaha UMKM dalam rangka pemenuhan ijin edar BPOM

Dari risiko yang telah dimitigasi, telah dilakukan pengendalian yang efektif sehingga indikator ini dapat mencapai target, antara lain :

- Review rencana pelaksanaan pengawasan sarana distribusi di tahun sebelumnya dan penyusuna renlak

pemeriksaan sarana di tahun berjalan

- Membuat monitoring dan evaluasi renlak perbulan dengan justifikasi apabila terjadi perubahan
- pengendalian terhadap gratifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat diantaranya dengan Penandatanganan pakta integritas, implementasi whistle blowing system, kolaborasi petugas dari fungsi lain, dan
- Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha (secara langsung/ via Medsos) terkait pendampingan dalam rangka registrasi ijin edar di BPOM tidak berbayar/gratis sesuai dengan Standar Pelayanan Publik di BBPOM Samarinda

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Pengawasan iklan sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media secara tepat waktu sesuai dengan pedoman.

Cara Perhitungan :

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b)/2

1. **Pemenuhan jumlah target pengawasan**

   = Jumlah iklan yang selesai diawasi / Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak x 100%

2. **Ketepatan waktu pelaporan**

   = Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

Ket: perhitungan proporsi media iklan pada B1-B11 disesuaikan dengan jenis media yang dilakukan pemeriksaan di bulan tersebut.

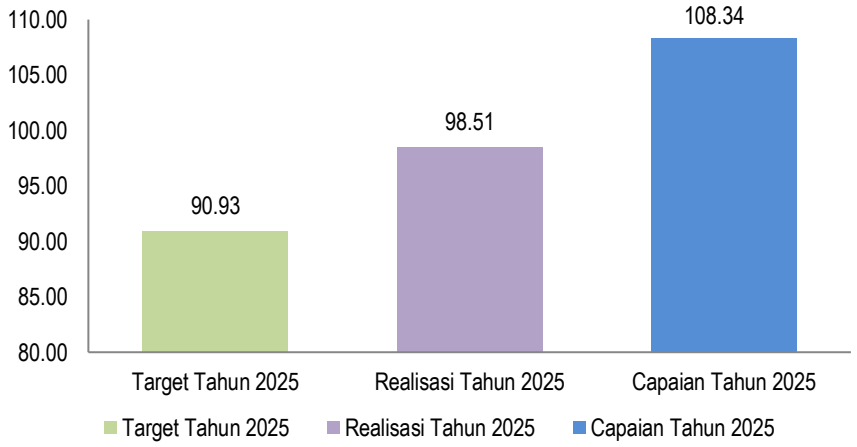
c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pengawasan terhadap 868 iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan realisasi sebesar 98.51% dan capaian sebesar 108.34%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.32
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025



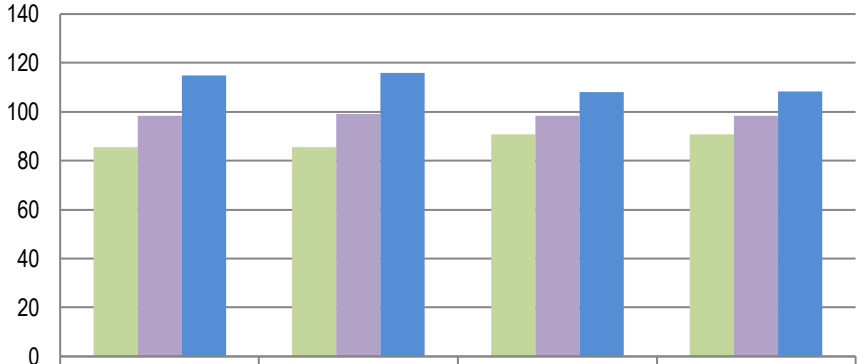
Tabel 3.61
Capaian Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
90.93%	98.51%	108.34%	Sangat baik	

Sesuai gambar di atas, target persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada ahun 2025 sebesar 90.93% dengan realisasi sebesar 98.51% sehingga capaian sebesar 108.34%. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi telah melampaui target dan masuk dalam kriteria **sangat baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.33
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target	85.53	85.53	90.93	90.93
Realisasi	98.33	99.17	98.39	98.51
Capaian	114.97	115.95	108.2	108.34

Berdasarkan gambar diatas, capaian indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan mengalami penurunan di triwulan III dan IV dibanding triwulan I dan II karena telah dilakukan penurunan target di triwulan III, dengan mempertimbangkan capaian triwulan I dan II yang telah melebihi 110% dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan.**

Pada Rancangan Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2025-2029 terdapat beberapa perubahan dibandingkan dengan Renstra sebelumnya. Salah satunya adalah Indikator Kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Indikator ini adalah salah satu indikator kinerja baru, sehingga belum ada data realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pebandingan realisasi dilakukan dilakukan terhadap data per triwulan tahun 2025. Tahun 2025 juga merupakan tahun awal Renstra, sehingga belum bisa diperkirakan realisasi yang bisa dicapai oleh Balai Besar POM di Samarinda.

Awalnya, target ditetapkan sebesar 85.53% kemudian berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni dengan mengacu pada realisasi kinerja sampai dengan bulan Mei 2025 dimana capaian melebihi 110% dan dikhawatirkan akan terus melebihi 110% di akhir tahun 2025, maka BBPOM di Samarinda melakukan revisi target Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan menjadi 90.93% pada bulan Agustus 2025. Realisasi yang dicapai pada akhir tahun 2025 sebesar 98.51%, sudah melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian 108.34%. Pada Renstra 2025-2029, kategori sangat baik diperoleh apabila capaian yang diperoleh berada dalam rentang 100-110%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.62
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
96.80	98.51	101.77	Tercapai/ Melampaui	▲

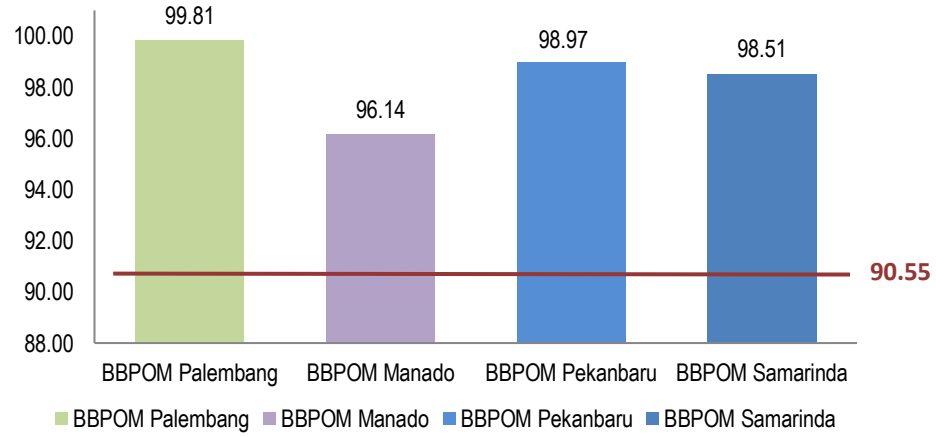
Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah melampaui target akhir periode Renstra, sehingga dapat disimpulkan target akhir periode Renstra akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.63
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
90.55	Palembang	94.00	99.81	106,18	Sangat baik
	Manado	90.20	96.14	106.59	Sangat baik
	Pekanbaru	95.40	98.97	103.74	Sangat baik
	Samarinda	90.93	98.51	108.34	Sangat baik

Gambar 3.34
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 5) dan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025, realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Palembang, diikuti oleh BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Manado. Capaian dari keempat balai yang diperbandingkan masuk dalam kategori **sangat baik**, dan telah mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Tercapainya indikator kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Pelaksanaan pengawasan iklan sesuai dengan renlak yang telah disusun, bahkan melampaui perencanaan yang telah dibuat.
- Pelaporan hasil pengawasan iklan yang dilaksanakan secara tepat waktu melalui SIPT.
- Penetapan pengambilan kesimpulan hasil pengawasan iklan yang akurat.
- Kesesuaian pengawasan iklan terhadap media yang telah ditentukan sesuai dengan renlak yang telah disusun.

Meskipun realisasi telah melampaui jauh dari target yang ditetapkan namun berdasarkan realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sampai dengan triwulan IV tahun 2025 masih terdapat komponen penilaian yang belum optimal yaitu terdapat 1 iklan Obat Tradisional dan 1 iklan Suplemen Kesehatan di bulan November yang tidak memenuhi ketentuan iklan yang dilaporkan tepat waktu dikarenakan keterlambatan pelaporan ke operator pusat

Upaya yang telah dilakukan untuk perbaikan dan mengatasi kendala yang ada dan berpeluang mempengaruhi capaian indikator ini adalah penguatan mekanisme pelaporan internal dengan melakukan pengecekan intensif H-5 dari dateline pelaporan tepat waktu pada aplikasi SIPT agak tidak ada pelaporan iklan yang terlambat.

Tabel 3.64
Matriks Rekomendasi Triwulan 4

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Terdapat 1 iklan Obat Tradisional dan 1 iklan Suplemen Kesehatan di bulan November yang tidak memenuhi ketentuan iklan	Penguatan mekanisme pelaporan internal	melakukan pengecekan intensif H-5 dari dateline pelaporan tepat waktu pada aplikasi SIPT agak tidak ada	Des 2025	Y	Pemeriksaan 3	Target pengawasan iklan tidak tercapai

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		yang dilaporkan tepat waktu dikarenakan keterlambatan pelaporan ke operator pusat		pelaporan iklan yang terlambat				

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.65
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel				
			- Biaya pengiriman sampel	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL
QIA.002.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengadaan sampel				
			- Biaya pengiriman sampel	12	KL	12	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	4	KL	4	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	13	KL	13	KL
QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B	Konsultasi dan Koordinasi ke Badan POM untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja				
			- Perjalanan Dinas Biasa	2	KL	2	KL

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini antara lain :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap iklan sediaan obat sebanyak 104 iklan
2. Melaksanakan pengawasan terhadap iklan sediaan kosmetik sebanyak 333 iklan
3. Melaksanakan pengawasan terhadap iklan sediaan obat bahan alam dan obat kuasi sebanyak 108 iklan
4. Melaksanakan pengawasan terhadap iklan sediaan suplemen kesehatan sebanyak 42 iklan
5. Melaksanakan pengawasan terhadap iklan pangan olahan sebanyak 281 iklan
6. Monitoring dan evaluasi terhadap renlak pengawasan iklan yang telah disusun agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana.
7. Monitoring timeline pelaporan hasil pengawasan iklan melalui SIPT

8. Refreshment peraturan terkait pengawasan iklan kepada petugas, termasuk juga aplikasi terkait pengawasan iklan seperti sireka dan asrot untuk komoditi OBA dan suplemen kesehatan, dan SiApik untuk komoditi obat untuk meningkatkan akurasi pengambilan kesimpulan terhadap iklan yang diawasi
9. Peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas pengawas iklan sehingga pengambilan kesimpulan menjadi lebih akurat

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.66
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.706.600	85.703.039,40	100,00	108,34	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran tahun 2025. Dapat disimpulkan bila anggaran 2025 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.

Sumber daya anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja Persentase sarans distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu perjalanan dinas petugas dalam pelaksanaan inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi dan pemeriksaan sarana disribusi pangan olahan. Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan dimanfaatkan dengan optimal dan efisien untuk mencapai target indikator kinerja. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan. Selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga pagu anggaran pengawasan kembali pada pagu awal sesuai arahan dan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi ,

pembinaan kepada stakeholder dan peningkatan kompetensi petugas di tahun 2025.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

BBPOM di Samarinda selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari BBPOM di Samarinda. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan. Salah satunya adalah terjadinya perubahan target pada bulan Agustus 2025 dimana target dinaikkan berdasarkan hasil analisa capaian per bulannya. Dilakukan pula analisa terhadap rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dari hasil mitigasi risiko terhadap indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, terdapat risiko terkait yaitu target pengawasan iklan tidak tercapai. Risiko ini telah dilakukan pengendalian yang efektif sehingga indikator ini dapat mencapai target yaitu dengan melakukan pembagian target, renlak bulanan dan monitoring evaluasi secara berkala

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai

bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan Dan Formula :

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = **(A+B) / 2**

Keterangan:

A : Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B : Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

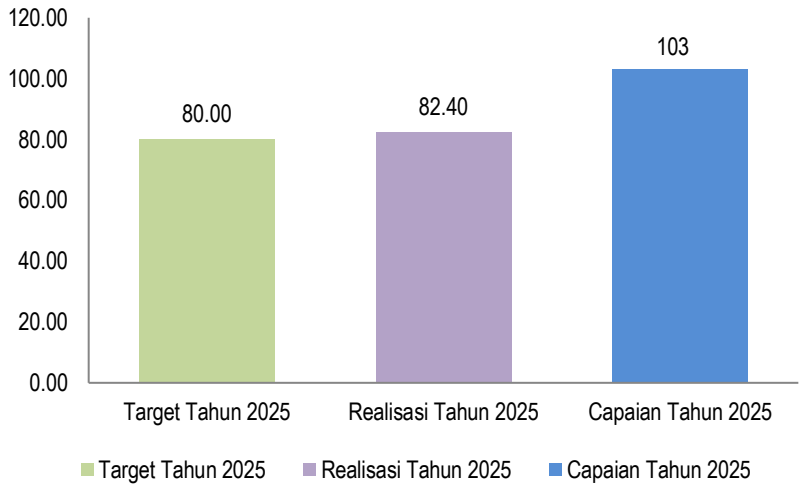
Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pengawasan terhadap 204 label/penandaan rokok dengan realisasi sebesar 82.40% dan capaian sebesar 103.10%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.35
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025



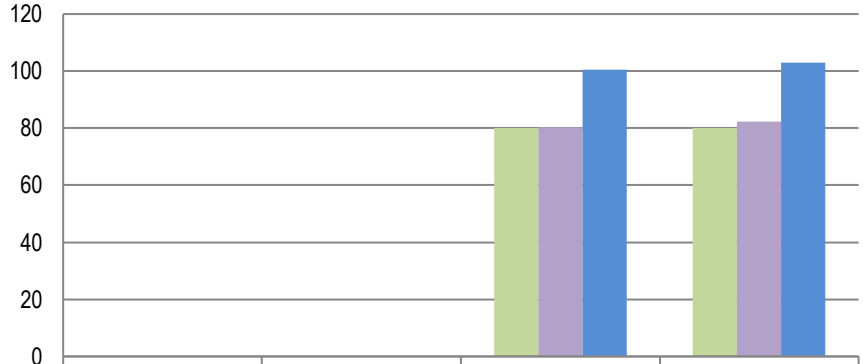
Tabel 3.67
Capaian Indikator Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
80.00%	82.4%	103.0%	Sangat Baik	

Sesuai gambar di atas, target persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada tahun 2025 sebesar 80.00% dengan realisasi sebesar 82.40% sehingga capaian sebesar 103.0%. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi telah melampaui target dan masuk dalam kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.36
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar per Triwulan Tahun 2025



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target	0	0	80	80
Realisasi	0	0	80.39	82.4
Capaian	0	0	100.49	103

Pada Rancangan Renstra BBPOM di Samarinda Tahun 2025-2029 terdapat beberapa perubahan dibandingkan dengan Renstra sebelumnya. Salah satunya adalah Indikator Kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sesuai ketentuan. Indikator ini adalah salah satu indikator kinerja baru, sehingga belum ada data realisasi tahun-tahun sebelumnya dan pebandingan realisasi dilakukan terhadap data triwulan III tahun 2025 karena indiaktor ini baru mulai dilakukan penilaian di bualn Agustus 2025. Tahun 2025 juga merupakan tahun awal Renstra, sehingga belum bisa diperkirakan realisasi yang bisa dicapai oleh Balai Besar POM di Samarinda.

Berdasarkan gambar diatas, indikator ini baru dihitung pada triwulan III dan bila dibandingkan realisasi dan capaian indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan sebelumnya dan masuk dalam kriteria **Sangat Baik.** Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik oleh Balai Besar POM di Samarinda telah berjalan efektif dan konsisten, secara umum kegiatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, meliputi pemenuhan jumlah target pengawasan serta ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Terpadu (SIPT).

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.68
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
84.00	82.40	98.09	Akan Tercapai	▲

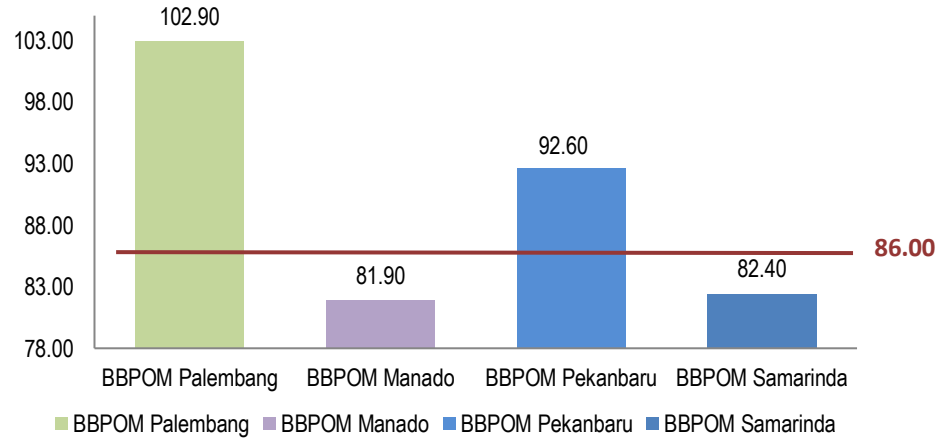
Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada tahun 2025 belum melampaui target akhir periode Renstra, sehingga dapat disimpulkan target akhir periode Renstra akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster ...) dan Target Nasional

Tabel 3.69
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
86.00	Palembang	91.00	102.90	113.08	Tidak dapat disimpulkan
	Manado	91.00	81.90	90.00	Baik
	Pekanbaru	91.00	92.60	101.76	Sangat baik
	Samarinda	80.00	82.40	103.00	Sangat baik

Gambar 3.37
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 5) dan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar tahun 2025, realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Palembang, diikuti oleh BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Samarinda dan BBPOM di Manado. Capaian dari keempat balai yang diperbandingkan BBPOM di Pekanbaru dan BBPOM di Samarinda masuk dalam kategori **sangat baik,** BBPOM di Manado kategori **baik** kecuali capaian BBPOM di Palembang yang tidak dapat disimpulkan karena melebihi 110%. realisasi dari keempat balai yang dibandingkan hanya BBPOM di Pekanbaru dan BBPOM di Palembang telah mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Tercapainya indikator kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Pelaksanaan pengawasan label produk tembakau yang telah memenuhi target yang ditetapkan
- Pelaksanaan kegiatan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik telah berjalan baik dan terarah sesuai ketentuan
- Pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT yang tepat waktu
- Komitmen petugas dalam memastikan bahwa produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang beredar memenuhi standar pelabelan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Meskipun realisasi telah melampaui dari target yang ditetapkan namun berdasarkan realisasi persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sampai dengan triwulan IV tahun 2025 masih terdapat komponen penilaian yang belum optimal yaitu berdasarkan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi sesuai target terdapat kekurangan 1 label yang tidak terselesaikan sesuai target s.d bulan November, hal ini dikarenakan s.d triwulan II baru terealisasi 58 label produk tembakau yang diawasi dari target 102 sehingga bulan Juli-November mengejar penyelesaian target yang belum tercapai.

Hal ini disebabkan karena petugas kurang komitmen dalam melakukan pengawasan penandaan rokok, sehingga pengawasan tidak berjalan sesuai dengan renlak yang ditentukan, kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap renlak pengawasan penandaan rokok sehingga hasil pengawasan kurang terarah dan Target indikator yang terlalu rendah sehingga perlu dilakukan reviu target pada tahun selanjutnya.

Upaya yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan capaian indikator ini selanjutnya adalah percepatan penyelesaian target dan penguatan perencanaan dan monitoring pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik

Tabel 3.70
Matriks Rekomendasi Triwulan 4

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Berdasarkan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi sesuai target terdapat kekurangan 1 label yang tidak selesai sesuai target s.d bulan November, hal ini dikarenakan s.d tw 2 baru 58 realisasi label produk tembakau yang diawasi dari target 102 sehingga Juli-November mengejar penyelesaian target yang belum tercapai	1. Percepatan penyelesaian target 2. Penguatan perencanaan dan monitoring	1. Menyelesaian seluruh target label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di minggu ke-3 Desember 2. Penyusunan target bulanan yang lebih proporsinal dan monitoring progres disertai early warning jika terjadi deviasi dari target	1. Desember 2025 2. TW 1 2026	Y	Pemeriksaan 38	Target pengawasan label produk tembakau tidak tercapai

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.71
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QIA.002.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengadaan sampel				
			- Biaya pengiriman sampel	12	KL	12	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	4	KL	4	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	13	KL	13	KL

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standa antara lain

- Melaksanakan pengawasan terhadap label produk tembakau sebanyak 204 produk.
- Kegiatan peningkatan kompetensi petugas pengawas melalui pembinaan teknis, koordinasi, serta pendampingan yang difasilitasi oleh unit pengampu di BPOM Pusat. Pembinaan ini meningkatkan pemahaman petugas terhadap parameter standar pelabelan, prosedur penilaian, dan ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan
- Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelaporan elektronik (SIPT) secara optimal yang memungkinkan pengawasan dilakukan lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik
- Kegiatan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian target pengawasan label, baik melalui rapat evaluasi internal maupun melalui forum koordinasi dengan BPOM Pusat.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.72
Efiensi Anggaran pada Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	125.716.000	125.679.660.50	99,97	103,00	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran tahun 2025. Dapat disimpulkan bila anggaran 2025 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektroni yang diawasi sesuai standar.

Sumber daya anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja Persentase sarans distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu perjalanan dinas petugas dalam pelaksanaan inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi dan pemeriksaan sarana disribusi pangan olahan. Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan dimanfaatkan dengan optimal dan efisien untuk mencapai target indikator kinerja. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris

Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan. Selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga pagu anggaran pengawasan kembali pada pagu awal sesuai arahan dan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi , pembinaan kepada stakeholder dan peningkatan kompetensi petugas di tahun 2025.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

BBPOM di Samarinda selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari BBPOM di Samarinda. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar. Dilakukan pula analisa terhadap rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dari hasil mitigasi risiko terhadap indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, terdapat risiko terkait yaitu target pengawasan label produk tembakau tidak tercapai. Risiko ini telah dilakukan pengendalian yang efektif sehingga indikator ini dapat mencapai target yaitu dengan melakukan pembagian target, renlak bulanan dan monitoring evaluasi secara berkala

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

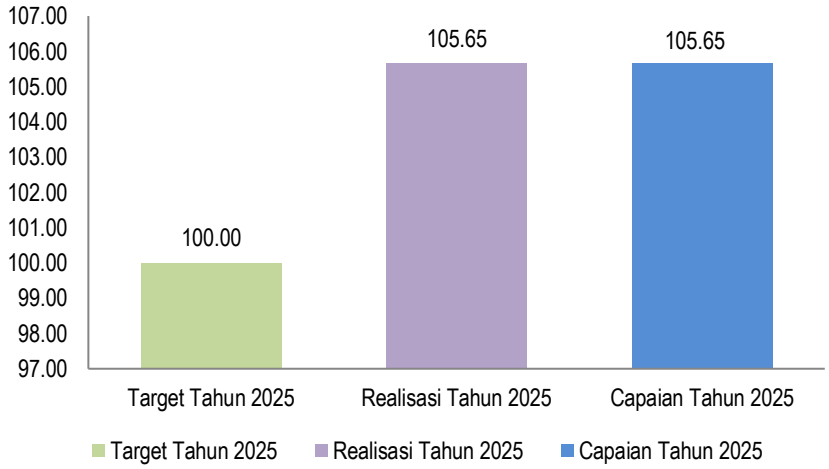
(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

Sampai dengan tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melaksanakan advokasi AMR ke kabupaten Berau, KIE AMR di kota Bontang, Bimtek AMR di kabupaten Berau, Mahulu, dan Kutai Timur, serta telah melakukan publikasi terkait AMR di media sosial Balai Besar POM di Samarinda.

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025**

Gambar 3.38
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025



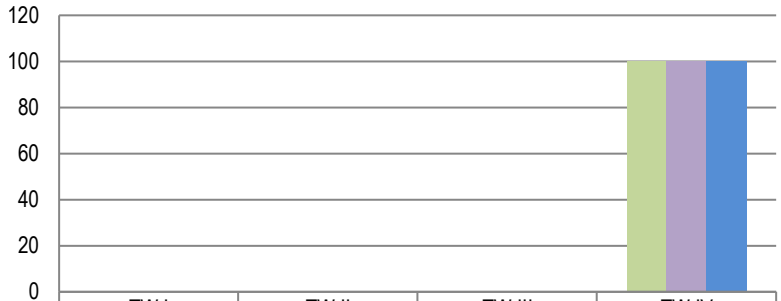
Tabel 3.73
Capaian Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
100.00	105.65	105,65	Sangat baik	

Sesuai gambar di atas, target Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT sebesar 100.00% dengan realisasi sebesar 105.65% sehingga capaian sebesar 105.65%. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi telah mencapai target yang di tetapkan dan masuk dalam kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.39
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target				100
Realisasi				100
Capaian				100

Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT diukur diakhir tahun 2025 Pada tahun 2025, persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO sebesar 105.65%, yang mana telah melapaui target yang telah ditentukan.

Indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator baru yang baru mulai ditetapkan pada bulan Agustus 2025, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.08.02.21.09.25.308 tanggal 30 September 2025 perihal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun 2025. Berdasarkan Manual IKU yang telah disepakati, perhitungan indikator kinerja dilaksanakan 1 tahun sekali pada akhir tahun 2025. Sehingga, indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tidak dapat dibandingkan baik terhadap tahun sebelumnya maupun triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.74
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
100.00	105.65	105.65	Tercapai/ melampaui	▲

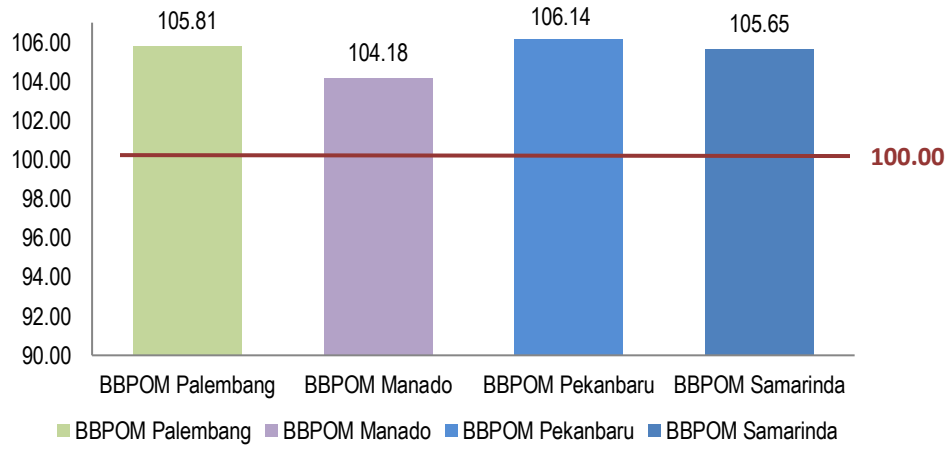
Pada tahun 2025, realisasi indikator kinerja untuk Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT menunjukkan hasil yang sangat positif. Target yang ditetapkan sebesar 100.00% pada akhir periode Renstra, sementara realisasi yang dicapai mencapai 105.65% di tahun 2025, sehingga persentase capaian mencapai 105.65%, telah melampaui target akhir periode Renstra. Berdasarkan pencapaian ini, kategori kinerja dinyatakan tercapai/melampaui, yang ditandai dengan notifikasi berwarna hijau berbentuk segitiga, sehingga dapat diperkirakan target akhir periode Renstra dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster ...) dan Target Nasional

Tabel 3.75
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
100.00	Palembang	100.00	105.81	105.81	Sangat baik
	Manado	100.00	104.18	104.18	Sangat baik
	Pekanbaru	100.00	106.14	106.14	Sangat baik
	Samarinda	100.00	105.65	105,65	Sangat baik

Gambar 3.40
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tahun 2025, realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Pekanbaru diikuti oleh BBPOM di Palembang, BBPOM di Samarinda, dan BBPOM di Manado. Capaian dari keempat balai yang diperbandingkan masuk dalam kategori **Sangat Baik.** Realisasi dari keempat balai seluruhnya telah mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Faktor-faktor yang menunjang capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT melampaui dari target yang ditetapkan adalah :

- Penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Dinas Keamanan Pangan, dalam implementasi strategi pengendalian AMR secara terpadu.
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis ke Tenaga Kesehatan yang dilakukan secara intensif di beberapa kabupaten/kota di provinsi kalimantan Timur.
- Telah dilaksanakan advokasi di beberapa kabupaten/ kota di provinsi kalimantan timur dan terbitnya surat edaran di 3 daerah kab./kota terkait penyerahan antibiotik harus dengan resep dokter
- Peningkatan pembinaan dan pengawasan rutin terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian terkait penggunaan antibiotik yang rasional.
- Optimalisasi pelaporan dan pemantauan penggunaan antibiotik, termasuk pemanfaatan sistem pelaporan elektronik yang meningkatkan ketepatan dan kelengkapan data.
- Peningkatan kapasitas SDM, melalui bimbingan teknis, sosialisasi regulasi, dan edukasi terkait antimicrobial stewardship (AMS).
- Komitmen manajemen UPT dalam menjadikan pengendalian AMR sebagai prioritas program pengawasan tahun berjalan.

Pada triwulan IV ditemukan permasalahan belum terlaksananya join inspection dengan lintas sektor terkait AMR untuk itu dilakukan perbaikan sebagai tindak lanjut di bulan November 2025 . yaitu melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait AMR dan melakukan join inspection dengan lintas sektor terkait AMR.

Tabel 3.76
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	belum terlaksananya join inspection dengan lintas sektor terkait AMR	1. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait AMR 2. melakukan join inspection dengan lintas sektor terkait AMR	1. koordinasi dengan lintas sektor terkait AMR 2. join inspection dengan lintas sektor	Nov 2025	T	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.77
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QIC.004.053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A	Pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan Farmakes				
			- Pengadaan ATK/Komputer Suplies	5	KL	5	KL
			- Pencetakan Form	2	KL	2	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	16	KL	16	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	61	KL	61	KL
			- Belanja Keperluan Pemeriksaan	1	PKT	1	PKT

Kegiatan yang menunjang IKU Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT antara lain :

- Advokasi pengendalian Resistensi Antimikroba ke pemerintahan Kabupaten Berau pada tanggal 29 juli 2025. Output berupa Surat edaran terkait Penjualan antibiotik harus dengan resep di Apotek yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Berau (Ibu Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd)
- Bimtek pengendalian Resistensi Antimikroba di kab. Mahakam Ulu pada Rabu, 23 Juli 2025 yang dihadiri oleh 22 peserta.
- Bimtek pengendalian Resistensi Antimikroba di kab. Berau pada Rabu, 30 Juli 2025 yang dihadiri oleh 102 peserta.
- Bimtek pengendalian Resistensi Antimikroba di Kutai Timur pada Rabu, 19 Agustus 2025 yang dihadiri oleh 80 peserta.
- Publikasi terkait pengendalian Resistensi Antimikroba yang diposting di akun instagram Balai Besar POM di Samarinda pada tanggal 30 September 2025.
- Kegiatan KIE terkait pengendalian Resistensi Antimikroba bersamaan kegiatan Bimtek Cegal Tanggal yang dilaksanakan pada 19 Juni 2025 di Kota Bontang, dihadiri oleh 40 orang pelaku usaha (UMKM) di bidang kosmetik.
- Pada pemeriksaan rutin terhadap sarana pelayanan kefarmasian khususnya apotek di provinsi Kalimantan timur dilakukan pengisian tools pengawasan AMR

Untuk mendukung persentase pemenuhan target pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) di wilayah UPT maka difokuskan pada penguatan pengawasan di apotek serta peningkatan kolaborasi lintas sektor.

Pengawasan terhadap apotek akan ditingkatkan melalui inspeksi berbasis risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pelayanan kefarmasian, khususnya dalam penyerahan antibiotik sesuai resep dokter, pencatatan dan pelaporan penggunaan antibiotik, serta penerapan prinsip penggunaan obat yang rasional sesuai regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, pendekatan pembinaan juga akan diperkuat melalui sosialisasi dan pendampingan teknis kepada apoteker agar implementasi standar pelayanan kefarmasian berjalan optimal. Di sisi lain, penguatan kerja sama lintas sektor menjadi strategi kunci dalam pengendalian AMR. Koordinasi akan diintensifkan dengan Dinas Kesehatan, organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia, serta fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendorong komitmen bersama dalam pengawasan dan edukasi penggunaan antibiotik yang tepat. Sinergi juga akan diarahkan pada integrasi data pengawasan dan pelaporan guna mendukung pemantauan pola penggunaan antibiotik di wilayah kerja secara lebih komprehensif. Melalui kombinasi pengawasan yang lebih terarah di apotek dan kolaborasi lintas sektor yang kuat, diharapkan kepatuhan terhadap ketentuan peredaran dan penggunaan antibiotik meningkat, sehingga capaian indikator pengendalian AMR di wilayah UPT dapat lebih optimal dan berkontribusi nyata dalam menekan risiko resistensi antimikroba.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.78
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	69.791.200	69.783.763,40	99,99	105,65	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran tahun 2025. Dapat disimpulkan bila anggaran 2025 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT.

Sumber daya anggaran dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung indikator kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT yaitu perjalanan dinas petugas dalam pelaksanaan inspeksi sarana distribusi sediaan farmasi dan pemeriksaan sarana disribusi pangan olahan. Selanjutnya, penggunaan anggaran akan diupayakan dimanfaatkan dengan optimal dan efisien untuk mencapai target indikator kinerja. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang diikuti dengan Surat Edaran Sekretaris Utama

Badan POM nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 tentang Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan revisi untuk melakukan pemblokiran anggaran yang berkaitan dengan pengawasan. Selanjutnya terdapat surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 tentang Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dimana UPT dapat melakukan pengajuan relaksasi blokir untuk beberapa RO fungsi pengawasan salah satunya adalah terkait pengawasan sarana dan pembinaan. Sehingga pagu anggaran pengawasan kembali pada pagu awal sesuai arahan dan dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengawasan sarana produksi dan distribusi , pembinaan kepada stakeholder dan peningkatan kompetensi petugas di tahun 2025.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam mengevaluasi capaian indikator pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) di wilayah UPT. Melalui analisis data pengawasan apotek, BBPOM di Samarinda dapat mengidentifikasi tingkat kepatuhan sarana terhadap ketentuan penyerahan antibiotik sesuai resep dan prinsip penggunaan obat rasional. Informasi tersebut menjadi dasar dalam memetakan risiko peredaran antibiotik, menentukan prioritas inspeksi berbasis risiko, serta merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif pada periode berikutnya.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dari hasil mitigasi risiko terhadap indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, terdapat risiko terkait yaitu target bimbingan teknis tidak terlaksana karena tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan AMR. Risiko ini telah dilakukan pengendalian yang efektif sehingga indikator ini dapat mencapai target yaitu dengan melakukan pembagian target, renlak bulanan dan monitoring evaluasi secara berkala

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda merupakan Laboratorium UPT tingkat 4 Badan POM. Terdapat 7 laboratorium regional tingkat 4 yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

Pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar *Good Laboratory Practices* (GLP)

mencakup 4 aspek yaitu :

1. Penilaian ruang lingkup yaitu pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian
2. Penilaian standar kompetensi yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan
3. Penilaian standar peralatan dengan menghitung persentase alat yang dimiliki terhadap standar
4. Pemenuhan verifikasi Metode pengujian

Penilaian pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) ketentuan sebagai berikut:

1. Standar ruang lingkup = 50 %
2. Standar kompetensi = 20%
3. Standar peralatan laboratorium = 20%
4. Standar verifikasi metode pengujian = 10 %

Adapun Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat (46 % x Rata-rata A) + (31 % x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4
(50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2

a. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2

b. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

c. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 = (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

a. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

b. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

c. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2

75 x a) + (15% x b) + (10 % x c)

. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

a. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

b. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

75 x a) + (15% x b) + (10 % x c)

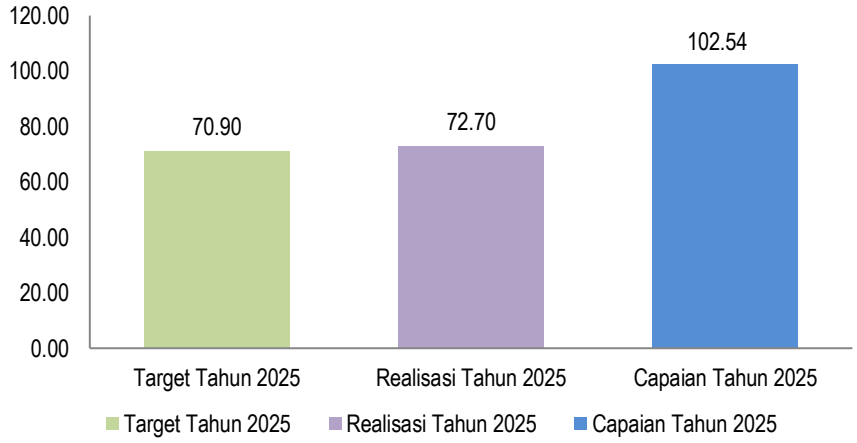
. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.

a. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

b. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.41
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025



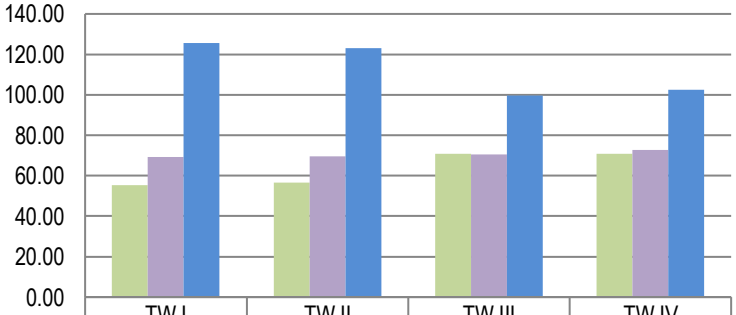
Tabel 3.79
Capaian Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Panganolahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
70,90	72,70	102.54	Sangat Baik	

Sesuai gambar di atas, target persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 sebesar 70.73 % dengan realisasi sebesar 72.7 % sehingga capaian sebesar 102,54 % dengan kategori **sangat baik**. Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Panganolahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium merupakan salah satu indikator yang baru ditetapkan pada periode Renstra 2025-2029.Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025 adalah sebesar 58,90 %. Perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja Tahun 2025 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dengan cara transparan dan akuntabel. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan komitmen antara Kepala Balai Besar POM di Samarinda sebagai pengemban mandat/ tugas/ penerima amanah dengan Kepala Badan POM sebagai pemberi mandat/ tugas/ pemberi amanah. Jika dibandingkan dengan RKT tahun 2025, terdapat perubahan target indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Panganolahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada PK tahun 2025, yaitu dari yang semula 58,90% menjadi 70,90%

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.42
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Panganolahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium per Triwulan Tahun 2025



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target	55.30	56.50	70.73	70.90
Realisasi	69.40	69.60	70.40	72.70
Capaian	125.50	123.19	99.53	102.54

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Samarinda, target Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada tahun 2025 adalah 58,90 yang diturunkan target per triwulan berdasarkan surat Kepala PPPOMN nomor B-PR.10.01.10.01.25.46, tanggal 20 Januari 2025 perihal Permohonan Data Rencana Pemenuhan Target SKL Balai Besar POM Laboratorium Tingkat 4 Tahun 2025 . Dimana BBPOM di Samarinda menetapkan target sebagai berikut : TW 1 (55,3; TW 2 (56.5); TW 3 (57,7) dan TW 4 (58,9). Realisasi Pemenuhan SKL BBPOM di Samarinda dengan tools penilaian pada TW 2 Tahun 2025 adalah 69.60 dengan capaian 123,19 % dari target TW 2 tahun 2025 yaitu 56.5%. Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan BBPOM di Samarinda sesuai standar kemampuan Laboratorium Triwulan 1 dan 2 ini capaian melebihi 110% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan.** Berdasarkan hasil pembahasan pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni 2025 terdapat perubahan target PK untuk indikator kinerja ini dari 58.90 menjadi 90.75, dengan mengacu pada realisasi kinerja sampai dengan bulan Mei 2025, dimana terlihat di triwulan I dan II capaian telah melampaui 110% kriteria tidak dapat disimpulkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.80
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Panganolahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
78.7	72.70	92.38	Akan tercapai	

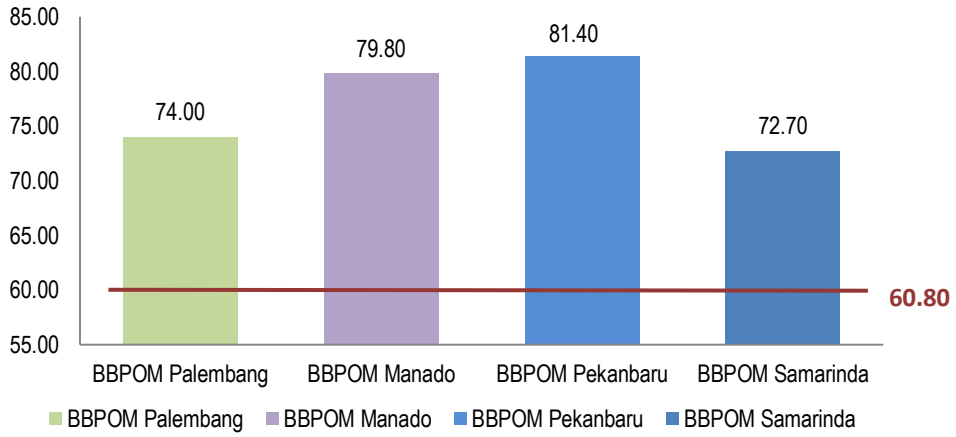
Pada periode pelaporan tahun 2025, realisasi indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Samarinda sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 72,70 masih berada dibawah target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 78,7 diperoleh capaian sebesar 92,38 % dengan kriteria **akan tercapai** sehingga perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan agar target pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.81
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
60.80	Palembang	69.7	74.00	106,17	Sangat Baik
	Manado	77.79	79.80	102.58	Sangat Baik
	Pekanbaru	75,1	81,40	108,39	Sangat Baik
	Samarinda	70,90	72,70	102,54	Sangat Baik

Gambar3.43
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Dari gambar di atas dapat diketahui pada klaster 4 BBPOM di Palembang, Manado, Pekanbaru dan Samarinda telah mencapai target dengan kategori Sangat Baik dan telah melampai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Indikator terkait penguatan laboratorium adalah nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan Badan POM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium Badan POM yang diatur melalui Keputusan Kepala Badan POM. Penerapan SKL juga mengacu pada sistem Regionalisasi Laboratorium yang ditetapkan di dalam

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan tanggal 14 Februari 2025, yang mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke dalam 8 (delapan) regional, terdiri dari Laboratorium Regional dan Laboratorium Anggota. Laboratorium Regional terdiri dari BBPOM di Medan, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Samarinda, BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado dan BBPOM di Jayapura serta Balai Besar/Balai POM lain sebagai Laboratorium Anggota. Pengelompokan ini berdasarkan kedekatan geografis dan kemudahan transportasi untuk pengiriman sampel untuk pengujian unggul, dimana pengujian unggul dipusatkan pada laboratorium koordinator regional. Melalui pengelompokan tersebut diharapkan kapasitas dan kapabilitas pengujian unggul laboratorium BPOM dapat terfokus dan terarah. Pada tahun 2025 terjadi perubahan komponen penilaian Standar Kemampuan Laboratorium, dimana pada tahun 2024 komponen penilaian SKL terdiri dari 3 komponen yaitu Standar Ruang Lingkup (SRL), Kompetensi Personil dan Standar peralatan. Pada tahun 2025 dirubah menjadi 4 komponen yaitu yaitu Standar Ruang Lingkup (SRL), Kompetensi Laboratorium, Standar peralatan dan metode terverifikasi. Penilaian komponen SKL pada tahun 2025 juga berubah, dimana tools tahun 2025 penilaian standar peralatan hanya pada alat utama, dan penilaian kompetensi adalah kompetensi laboratorium, sedangkan pada penilaian tools 2024 penilaian kompetensi adalah kompetensi personil, untuk peralatan adalah alat utama dan penunjang. Realisasi Pemenuhan SKL BBPOM di Samarinda tahun 2025 adalah 72,70 dari target sebesar 70,90 sehingga capaian yang diperoleh adalah 102,54 %.

Faktor yang mendukung keberhasilan percapaian kinerja dari BBPOM di Samarinda adalah dengan melakukan verifikasi metode analisis baik dalam rangka menambah ruang lingkup maupun pemenuhan metode yang harus diverifikasi, adanya peningkatan kompetensi personel untuk peningkatan pemenuhan standar kompetensi laboratorium serta penambahan peralatan dalam rangka memenuhi standar peralatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan di triwulan IV untuk pencapaian indikator kinerja nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium ditemukan kendala pada buan Oktober realisasi nilai pemenuhan GLP belum tercapai target disebabkan target verifikasi metode analisa belum terpenuhi. Upaya perbaikan yang telah dilakukan .pada periode triwulan IV ini adalah mlaksanakan verifikasi metode analisa sesuai target yang belum terpenuhi dan meningkatkan kompetensi penguji laboratorium.

Tabel 3.82
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Realisasi nilai pemenuhan GLP belum tercapai karena target verifikasi metode analisa belum terpenuhi	Memaksimalkan capaian komponen verifikasi metode analisa dan standar kompetensi penguji	Melaksanakan verifikasi metode analisa sesuai target dan meningkatkan kompetensi penguji	Desember 2025	Y	Pengujian 4	Verifikasi metode yang sudah dijadwalkan tidak dikerjakan sesuai target.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.83
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
PDD.001.054	Peningkatan ruang lingkup pengujian	A	Pengujian Laboratorium Sampel Pihak Ketiga				
			• Pengadaan Media Pihak Ketiga	2	PKT	2	PKT
		B	Food Security				
			• Pembelian Reagen/ Test Kit/ Glassware	1	PKT	1	PKT
			• Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
			• Perjalanan Dinas Dalam Kota	3	KL	3	KL
		C	Pengadaan Penunjang Laboratorium				
			• Keperluan Penunjang Laboratorium	8	KL	8	KL
			• Speaker	1	UNIT	1	UNIT
			• Thermohigrometer Digital	8	UNIT	8	UNIT
			• Kursi	2	UNIT	2	UNIT
			• Tangga	1	UNIT	1	UNIT
			• Monitor	1	UNIT	1	UNIT

			● Troli ● Pengadaan ATK/ Komputer suplies	1 9	UNIT KL	1 9	UNIT KL
		D	Pengadaan Reagen Prekursor ● Pembelian Reagen Prekursor	1	PKT	1	PKT
		E	Pengadaan Baku Pembanding ● Pembelian Baku Pembanding	1	PKT	1	PKT
		F	Pengadaan Bahan dan Alat Penunjang Laboratorium ● Pengadaan bahan dan alat penunjang laboratorium pengujian ● Pengadaan Alat dan Bahan Penunjang Laboratorium Mikrobiologi	2 1	PKT PKT	2 1	PKT PKT
		G	Pengadaan Glassware ● Pengadaan Glassware	1	PKT	1	PKT
		H	Pengadaan Suku Cadang ● Pengadaan Suku Cadang	3	PKT	3	PKT
		I	Pengujian Sampel Laboratorium Biologi Molekuler ● Pembelian Reagen Pengujian Laboratorium Biologi Molekuler ● Pengadaan bahan dan alat penunjang Laboratorium Biologi Molekuler	1 1	PKT PKT	1 1	PKT PKT
		J	Pelatihan Uji Banding ● Perjalanan Dinas Biasa ● Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1 0	KL KL	1 1	KL KL
		L	Honor Pengelola PNBP ● Honor Pengelola PNBP	6	KL	6	KL
		M	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa ● Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	KL	1	KL
		N	Kalibrasi Peralatan Laboratorium ● Kalibrasi Peralatan Laboratorium	1	PKT	1	PKT
		P	Pelatihan Pengawalan Keamanan Pangan Presiden, Wakil Presiden, Tamu Negara tahun 2025 ● Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	KL	1	KL
		U	Bimbingan Teknis Pengujian di Samarinda oleh PPPOMN ● Perjalanan Dinas Biasa	2	KL	2	KL
		V	Koordinasi Terkait Pengujian ● Perjalanan Dinas Biasa ● Perjalanan Dinas Dalam Kota ● Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6 45 0	KL KL KL	6 45 1	KL KL KL
PDD.001.056	Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A	Rekalibrasi Alat Laboratorium ● Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
		B	Perbaikan Peralatan Fungsional ● Pemeliharaan inventaris peralatan laboratorium	3	KL	3	KL
		C	Assesmen Laboratorium oleh KAN BSN ● Iuran Tahunan	1	KL	1	KL

			● Snack	2	KL	2	KL
			● Makan	2	KL	2	KL
			● Paket Asesmen	2	PKT	2	PKT
			● Permohonan Perluasan RLA	1	PKT	1	PKT
			● Perjalanan DInas Biasa	1	KL	1	KL
		D	Pemeriksaan Kesehatan				
			● Pemeriksaan Kesehatan Risiko Pekerjaan	1	KL	1	KL
QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel				
			- Biaya pengiriman sampel	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL
QIA.002.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B	Perbaikan Peralatan Fungsional				
			- Pemeliharaan Inventaris Peralatan Laboratorium	2	KL	2	KL
RAB.001.051	Pemenuhan/ Peremajaan Alat Laboratorium	A	Refreshment Alat Laboratorium				
			● Printer	1	UNIT	1	UNIT
			● Pengadaan Glassware/bahan penunjang/reagen/baku pembanding	1	PKT	1	PKT
			● Suku Cadang	1	PKT	1	PKT
			● Water Purifier	1	UNIT	1	UNIT
			● pH/Ion Meter	1	UNIT	1	UNIT
			● Microwave Digester	1	UNIT	1	UNIT
			● Dry Bath Incubator With Cooling	1	UNIT	1	UNIT
			● Sample Concentrator	1	UNIT	1	UNIT
			● Nitrogen Generator Genius XE 35	1	UNIT	1	UNIT
			● Toxinometer	1	UNIT	1	UNIT
			● Vortex Mixer	1	UNIT	1	UNIT
			● Vortex	1	UNIT	1	UNIT
			● IC-ICP-MS	1	UNIT	1	UNIT
			● Waterbath Shaker	1	UNIT	1	UNIT
			● Dissolution Tester	1	UNIT	1	UNIT
			● Inkubator 41	1	UNIT	1	UNIT
			● HPLC with UV, PDA and RID Detektor	1	UNIT	1	UNIT
			● HPLC with PDA Detektor and Fluoresence Detektor	1	UNIT	1	UNIT
			● Anaerobic jar	1	UNIT	1	UNIT
			● Top Loading Balance	12	UNIT	12	UNIT
			● Microwave Digestion	1	UNIT	1	UNIT
			● Hotplate	1	UNIT	1	UNIT
			● Timbangan analitik	2	UNIT	2	UNIT
			● Meja Lab	1	UNIT	1	UNIT
			● Vortex shaker	1	UNIT	1	UNIT
			● AC	4	UNIT	4	UNIT
			● Dehumidifier	3	UNIT	3	UNIT
			● Sentrifuge tube 50mL	2	UNIT	2	UNIT

			• Timbangan • Lemari pendingin • Micropipet 1-10 mL • Rack vessel	1 1 1 2 1 2	UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT	1 1 1 2 1 2	UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian pemenuhan Laboratorium Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar kemampuan Laboratorium BBPOM di Samarinda sebagai berikut:

1 .Perencanaan penambahan ruang lingkup, pengadaan peralatan, peningkatan kompetensi dan penambahan metode terverifikasi.

2. Melakukan komunikasi secara rutin dengan penyelia dan penguji laboratoriun secara rutin dalam mamantau pelaksanaan penambahan ruang lingkup dan MA terverifikasi

3. Terpenuhinya pengadaan sampel yang digunakan untuk ruang lingkup dan verifikasi metode analisis secara terencana dan tepat waktu

4. Tersedianya reagensia, baku, media mikrobiologi dan sarana prasarana yang diperlukan untuk pengujian ruang lingkup dan verifikasi metode analisis.

5. Peningkatan kompetensi melalui bimtek terhadap personil laboratorium pada laboratorium Mikrobiologi, laboratorium pangan, laboratorium OBA SK dan laboratorium kosmetik sehingga dapat meningkatkan pengujian parameter penambahan ruang lingkup dan verifikasi metode analisis.

6. Peningkatan kompetensi personel laboratorium melalui pelatihan internal laboratorium, sehingga dapat meningkatkan pengujian parameter penambahan ruang lingkup dan verifikasi metode analisis.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.84
Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	12.948.996.600	12.947.655.818,40	99,99	102,54	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran masuk kriteria efisien sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2025 telah sepenuhnya optimal/efisien mendukung pencapaian indikator kinerja nilai pemenuhanLaboratorium Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BBPOM di Samarinda. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 1.2947.655.818,40 dari target RP. 12,984,996,600,00 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,99% dan capaian indikator sebesar 102,54 %. Penggunaan anggaran pada indikator ini yang menunjang pencapaian target kinerja adalah pengadaan reagensia dan media mikrobiologi, pengadaan baku pembanding, pengadaan suku cadang, pemeliharaan peralatan utama dan peralatan penunjang laboratorium, pengadaan gas untuk keperluan laboratorium, peningkatan kompetensi personal laboratorium dan pengadaan peralatan laboratorium.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Peran Laboratorium pengujian yang strategis dalam pengawasan obat dan makanan perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan laboratorium baik dari segi ruang lingkup pengujian, kompetensi laboratorium, peralatan pengujian dan metode analisis terverifikasi yang digunakan dalam melaksanakan pengujian laboratorium. Pemenuhan terhadap standar pemenuhan Laboratorium Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini telah secara konsisten dievaluasi setiap triwulan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebagai unit pengampu SKL di lingkungan BPOM RI.

Data Capaian pemenuhan terhadap standar pemenuhan Laboratorium Pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini telah tertuang pada laporan kinerja yang telah dimanfaatkan sebagai:

1. Informasi untuk menyusun strategi-strategi dalam meningkatkan capaian pemenuhan standar ruang lingkup, standar peralatan, standar kompetensi laboratorium dan standar metode analisis terverifikasi laboratorium Balai Besar POM di Samarinda.
2. Perubahan komponen penilaian pada tools tahun 2025, yang terdiri dari 4 komponen yaitu :
    - Standar Ruang Lingkup (SRL)
    - Standar peralatan
    - Standar kompetensi laboratorium
    - Standar Metode Analisi (MA) terverifikasi

    Sedangkan pada tahun 2024 hanya terdiri dari 3 komponen yaitu :
    - Standar Ruang Lingkup (SRL)
    - Standar peralatan
    - Standar kompetensi personal

3. Penilaian SKL pada tahun 2025 terdiri dari standar pemenuhan ruang lingkup (50%), standar peralatan 20 %, standar kompetensi laboratorium 20 % dan standar metode analisis terverifikasi 10 %.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, BBPOM di Samarinda telah mengelola beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja indikator ini yang tertuang pada daftar risiko semester 2 tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Pengujian sampel dalam rangka pemenuhan ruang lingkup tidak dikerjakan sesuai target.
2. Verifikasi metode yang sudah dijadwalkan tidak dikerjakan sesuai target.
3. Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi personel laboratorium tidak dilaksanakan sesuai rencana
4. Pengadaan alat laboratorium tidak sesuai perencanaan.
5. Kebocoran hasil uji.
6. Terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan hasil pengujian, laporan manual (*paper based*) adalah salah satu hal yang berpotensi besar dalam menyumbang kesalahan dalam pembuatan laporan.
7. Peningkatan resiko keterpaparan penguji terhadap senyawa sitostatika yang bersifat teratogenik, mutagenik, dan karsinogenik yang berbahaya bagi tubuh
4. Kompetensi personel laboratorium menurun, penurunan kompetensi personel laboratorium dapat terjadi karena penerimaan pegawai baru atau pegawai yang mengalami rotasi, sakit dan pindah ke UPT lain.
5. Pencatatan penggunaan alat laboratorium belum dilakukan secara real time, sehingga jika terjadi indikasi kerusakan alat dapat terlambat ditangani
6. Dokumen mutu tidak ter-update
7. Tidak tersosialisasinya dokumen mutu yang sudah diperbaiki antar laboratorium
8. Ketidakselarasan informasi di sistem Lapor Sys (Formulir Usulan Update Dokumen, Daftar Isi Dokumen, dan Berita Acara Pemusnahan Dokumen)

Aktivitas pengendalian yang telah dilakukan oleh BBPOM di Samarinda dalam mengurangi dampak risiko yang mungkin akan terjadi dan berdampakvterhadap pencapaian target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penjadwalan terhadap pengujian sampel dalam rangka pemenuhan standar ruang lingkup serta monitoring dan evalusi terhadap jadwal yang sudah dibuat
2. Membuat jadwal verifikasi metode analiasa pengujian sampel serta monitoring dan evalusi terhadap jadwal yang sudah dibuat
3. Pelatihan internal dalam rangka peningkatan standar kompetensi personel laboratorium

4. Membuat skala prioritas pengadaan alat laboratorium dalam rangka pemenuhan standar alat laboratorium
5. Membuat Surat Pernyataan Personel dan melakukan penyegaran kepada seluruh pegawai yang terkait tentang pentingnya komitmen menjaga kerahasiaan hasil uji.
6. Pembuatan lembar kendali laporan yang memuat *timeline* koreksi laporan setelah diverifikasi oleh penyelia.
7. Peningkatan kompetensi penguji melalui pelatihan atau pendampingan internal.
8. Pembelian Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan pedoman dari P3OMN, Adanya pendampingan dari P3OMN untuk penanganan sampel sitostatika hingga pembuangan limbahnya, Sosialisasi terkait penanganan sampel hingga limbah sitostatika kepada seluruh pegawai
9. Dibuat inovasi berupa pengisian penggunaan alat yang diisikan secara langsung (real time) oleh user sebelum dan setelah penggunaan alat secara online (menggunakan QR Code).
10. Membuat Inovasi MANTAU LAB untuk mempermudah update dokumen mutu
11. Meningkatkan efektivitas tim document controller dengan cara membuat google form untuk update dokumen
12. Mengupgrade sistem di Lapor Sys supaya lebih simpel dan terintegrasi

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) merupakan strategi nasional memberikan manfaat secara umum dalam meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem keamanan pangan di daerah, sehingga risiko keracunan dan penyakit bawaan pangan dapat ditekan serta masyarakat lebih terlindungi dari pangan berbahaya. Program ini juga mendorong peningkatan literasi keamanan pangan, pemberdayaan kader dan komunitas, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan pangan secara berkelanjutan. Selain itu, KKPA turut meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing pelaku usaha pangan, sehingga berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah yang lebih sehat dan produktif. Tujuan program KKPA adalah untuk mewujudkan kabupaten/kota yang memiliki sistem keamanan pangan yang efektif, mandiri, dan berkelanjutan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Upaya Pemerintah Daerah dalam bekerjasama melakukan pengawasan pangan di Kabupaten/Kota secara langsung mendukung keberhasilan indikator kinerja BBPOM di Samarinda yaitu “Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman”. Dimana Indikator Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman tersebut telah masuk ke dalam RPJMN Tahun 2025-2029. oleh karena itu peran Aktif UPT Badan POM sangat penting terutama dalam mendampingi Pemerintah Daerah untuk mengisi tools penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Pelaksanaan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota oleh BBPOM di Samarinda dilakukan pada kegiatan/Tahapan Penilaian Mandiri dan pengumpulan data dukung Pemerintah Daerah Kab/Kota (8 Juli sampai dengan 30 September).

Kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Advokasi

BBPOM di Samarinda melakukan advokasi ke 7 Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah pengawasan BBPOM di Samarinda yaitu Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahulu, Kabupaten Berau agar melakukan penilaian mandiri program Kabupaten/Kota Pangan Aman. Dalam kegiatan tersebut disampaikan manfaat dari penilaian mandiri yang dilakukan dan melihat komitmen Pemerintah Daerah untuk kemudian dilakukan tahapan seleksi untuk Kabupaten/Kota yang akan didampingi. Kegiatan dilakukan secara daring dengan mengundang Pemerintah Daerah yang menjadi cakupan intervensi Balai Besar/Balai POM. Advokasi kegiatan Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) bertujuan untuk membangun komitmen dan dukungan kebijakan pemerintah daerah agar program keamanan pangan menjadi prioritas pembangunan daerah melalui penguatan regulasi, pengalokasian anggaran, dan sinergi lintas sektor, sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pangan—mulai dari desa pangan aman, pasar aman, hingga kantin sekolah—dapat berjalan efektif dan berkelanjutan dalam rangka menurunkan risiko pangan tidak memenuhi syarat, mencegah kejadian keracunan pangan, meningkatkan literasi masyarakat, serta mendukung pencapaian indikator kinerja daerah di bidang kesehatan dan perlindungan konsumen.

2. Seleksi

Seleksi Kabupaten/Kota yang akan didampingi Kabupaten/Kota terpilih akan diberikan pendampingan dalam melakukan pengisian tools Kabupaten/Kota Pangan Aman agar data dukung yang diberikan sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Kegiatan berupa rapat internal UPT yang dilakukan secara daring dengan melihat ketersediaan dan kelengkapan data dukung kinerja hasil pengawasan dan pemberdayaan masing-masing Kabupaten/Kota Pangan Aman. Hasil seleksi ini diputuskan Kabupaten/Kota yang terpilih untuk dilakukan pendampingan oleh BBPOM di Samarinda adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Pendampingan

Pendampingan dilakukan dengan memantau pelaksanaan pengisian tools penilaian mandiri agar terisi dengan baik dan benar, menjawab pertanyaan Kabupaten/Kota, dan menilai kesesuaian data dukung yang diisi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu dilakukan monitoring agar seluruh pengisian data dukung selesai sesuai batas waktu pengisian, sehingga persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dapat tercapai. Kegiatan dilakukan secara daring, luring atau hybrid (daring/luring) dengan memantau ketersediaan dan kelengkapan data dukung yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman. Pengisian capaian kegiatan melalui https://bit.ly/PelaporanPenilaiankKKPA2025 paling lambat setiap tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulan. BBPOM di Samarinda melakukan pendampingan terhadap Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur yang

mempunyai keinginan untuk melakukan pengisian data dukung ke Tools yang telah dikirimkan oleh BPOM ke email Kab/Kota sesuai yang telah didaftarkan.

4. Pelaporan

Pelaporan dalam kegiatan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program keamanan pangan di daerah serta menjadi point penilaian atas keberhasilan BBPOM di Samarinda dalam melakukan advokasi di daerah. Laporan atas keseluruhan hasil pendampingan kepada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai dengan https://bit.ly/LaporanAkhirPendampinganKabKota.

5. Pengawalan

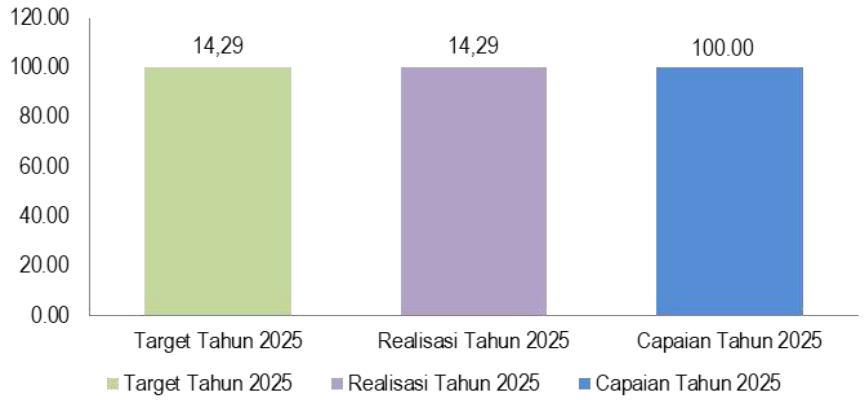
Pengawalan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan yang sudah berjalan tetap dilakukan sesuai dengan standar, kebijakan, dan target yang telah ditetapkan. kegiatan pengawalan dilakukan kepada Kabupaten/Kota yang sudah diintervensi pada tahun sebelumnya. Kabupaten/kota yang sudah masuk tahap verifikasi dokumen/verifikasi lapang oleh tim juri dan memenuhi ketentuan sebagai Kabupaten/Kota Pangan Aman, maka pengawalan tetap dilakukan di tahun setelahnya untuk melihat konsistensi penerapan Kabupaten/Kota Pangan Aman. Kabupaten/kota yang sudah masuk tahap verifikasi dokumen/verifikasi lapang oleh tim juri dan belum memenuhi ketentuan sebagai Kabupaten/Kota Pangan Aman, pengawalan dilakukan dengan mereviu dan memperbaiki pengisian tools untuk dapat diajukan kembali untuk mendapatkan penilaian Kabupaten/kota Pangan Aman.

Kegiatan pendampingan yang dilakukan BBPOM di Samarinda sangat penting dan berkontribusi besar pada pencapaian Indikator Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman telah masuk ke dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Pada Tahun 2025, telah dilaksanakan penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dan berdasarkan *tools* Penilaian oleh Tim Juri dari Kementerian Lembaga Pengampu Tupoksi masing-masing diperoleh hasil penilaian yaitu 73,04 dengan standar nilai minimal sebesar 60.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.44
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025



Tabel 3.85
Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan AmanTerhadap Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
14.29	14.29	100.00	Baik	

Pada Tahun 2025, capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman berhasil mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pendampingan telah memperoleh pengawalan secara optimal melalui rangkaian kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan pendampingan yang terstruktur dan berkesinambungan, meliputi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan daerah, penguatan peran komunitas, serta penerapan strategi pengawasan keamanan pangan berbasis risiko. Selain itu, sinergi yang baik antara Badan POM dengan Pemerintah Daerah dan jejaring terkait turut mempercepat pemenuhan komponen Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Dengan tercapainya target 100%, diharapkan implementasi program Kabupaten/Kota Pangan Aman dapat terus berlanjut dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan perlindungan masyarakat serta memperkuat sistem keamanan pangan di daerah secara berkelanjutan. Selain itu mengingat masih ada poin-poin penilaian yang nilainya masih rendah, kedepannya perlu dilakukan pemantauan secara konsisten mengenai penerapan Kabupaten /Kota Pangan Aman, memperbaiki komitmen, mereviu dan memperbaiki pengisian tools penilaian mandiri bagi Kabupaten/Kota yang nilainya belum sesuai.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Realisasi kinerja dan capaian indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi periode sebelumnya maupun triwulan karena merupakan indikator baru tahun 2025 dan tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Renstra 2025-2029.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, sehingga indikator indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada periode ini berada dalam kerangka kebijakan, arah strategi, serta target yang telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan sektoral terbaru. Sebagai awal periode perencanaan, Tahun 2025 menjadi fase penataan ulang (reset baseline) terhadap target, lokus intervensi, pendekatan pembinaan, serta mekanisme pengukuran kinerja. Dengan demikian, capaian pada tahun ini tidak sepenuhnya menggunakan parameter, ruang lingkup, maupun pendekatan yang identik dengan periode Renstra sebelumnya.

Selain itu, pada Tahun 2025 terdapat dinamika kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian alokasi sumber daya, baik dari sisi jumlah kegiatan, cakupan wilayah intervensi, maupun intensitas pendampingan program.

Analisis kinerja Tahun 2025 lebih tepat difokuskan pada:

1. Tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029;
2. Efektivitas strategi implementasi pada kondisi keterbatasan anggaran; dan
3. Progres capaian secara bertahap sepanjang tahun berjalan.

Dengan demikian, capaian Tahun 2025 diposisikan sebagai baseline awal periode Renstra 2025–2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar perbandingan untuk evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode perencanaan yang sama.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Inpres No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM diinstruksikan salah satunya untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait. Melalui Surat Kawat dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri tentang Pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025, meminta kepada Sekretaris Daerah seluruh Kabupaten/Kota untuk menugaskan pejabat dari organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan pengisian Tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman sesuai jadwal.

Berdasarkan hal di atas maka pada Triwulan 3 Tahun 2025, BBPOM di Samarinda melakukan kegiatan pendampingan Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman karena baru ditetapkan sebagai indikator baru di Triwulan 3. Kegiatan ini di awali dengan melakukan koordinasi lintas sektor kemudian dilanjutkan dengan advokasi kepada seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah, seleksi kabupaten/kota yang akan didampingi, pendampingan pengisian tools penilaian mandiri kabupaten / kota pangan aman (KKPA) dan Pelaporan kegiatan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman karena memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program keamanan pangan di daerah serta menjadi point penilaian atas keberhasilan UPT dalam melakukan advokasi di daerah. Dari semua tahapan kegiatan penilaian mandiri kab/kota, Kabupaten Kutai Kartanegara yang terseleksi untuk didampingi sesuai rencana karena sebagian besar kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi pada tools bisa terpenuhi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.86
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
71,43	14,29	20,00	Perlu Upaya Keras	

Target Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 adalah 14,29. Progres realisasi kegiatan Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 ini merupakan kumulatif pembobotan tahapan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan. Jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) maka diperoleh persen capaian sebesar 20,00% dengan kriteria Perlu Upaya Keras untuk itu diperlukan upaya dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan di tahun depan agar target tahun 2029 tetap dapat tercapai. Salah satu upaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya adalah mendorong pemerintah daerah melalui sekda untuk

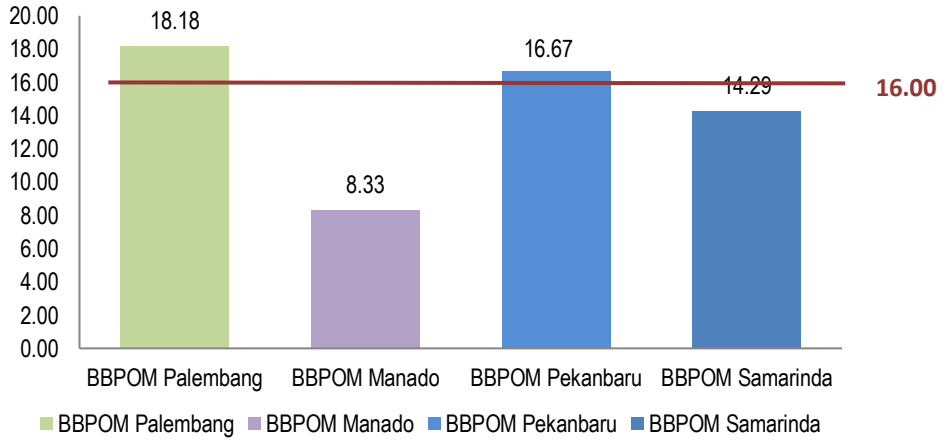
menunjuk koordinator yg mampu mengkoordinir OPD terkait; memimpin rapat internal untuk menyamakan pemahaman terkait program kkpa.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.87
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
16,00	Palembang	18,18	18,18	100%	Baik
	Manado	8,33	8,33	100%	Baik
	Pekanbaru	16,67	16,67	100%	Baik
	Samarinda	14,29	14,29	100%	Baik

Gambar 3.45
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Capaian persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang didampingi pada keempat Balai Besar POM Klaster 4 sebesar 100% dengan kriteria **Baik,** dimana realisasi BBPOM di Samarinda (14,29) ,BBPOM di Palembang (18,18), BBPOM Manado (8,33) dan BBPOM di Pekanbaru (16,67), Jika dibandingkan terhadap target nasional maka hanya BBPOM di Palembang dan BBPOM di Pekanbaru yang telah mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pelaksanaan program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian pernyataan kinerja di tingkat Kabupaten/Kota sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki program-program yang mendukung kota pangan aman, antara lain yaitu memiliki regulasi tentang Pengawasan keamanan pangan, tersedia alokasi dana serta sarana prasarana pelayanan publik untuk setiap instansi terkait, memiliki program pengawasan keamanan pangan dan SK TKPPOM. Untuk mencapai keberhasilan program ini tentunya harus memiliki komitmen yang kuat antara BBPOM di Samarinda dan Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara untuk berkolaborasi dan berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan, antara lain:

a. Koordinasi antara BBPOM di Samarinda dengan lintas sektor terkait yang dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Agustus
b. Advokasi secara daring untuk semua kab/kota lingkup Pengawasan BBPOM di Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025
c. Pendampingan pengisian tools secara intens baik langsung maupun lewat daring terhadap lintas sektor terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas PTSP, Dinas Pangan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pertanian Peternakan, DPMPTSP dan Bappeda sepanjang bulan September 2025.
d. Pelaporan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program keamanan pangan di daerah serta menjadi point penilaian atas keberhasilan UPT dalam melakukan advokasi di daerah.

Meskipun indikator kinerja telah tercapai namun terdapat kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman meliputi kurangnya partisipasi Kabupaten/Kota yang mengikuti kegiatan Kabupaten/Kota Pangan Aman. Untuk itu diperlukan upaya perbaikan ke depan nya sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kabupaten/Kota lain yang akan mengikuti kegiatan Kabupaten/Kota Pangan Aman supaya lebih optimal.
2. Menguatkan pemahaman Kota/Kabupaten mengenai pentingnya kelengkapan data dukung rencana aksi sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan implementasi program Kabupaten/Kota Pangan Aman..
3. Mengoptimalkan peran pendampingan dan monitoring secara berkala untuk memastikan rencana aksi Kabupaten/Kota Pangan Aman berjalan dan terdokumentasi dengan baik.
4. Mendorong komitmen pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung implementasi dan pelaporan programKabupaten/Kota Pangan Aman secara berkelanjutan.

Tabel 3.88
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	Kendala pelaksanaan program Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman meliputi kurangnya partisipasi Kabupaten/Kota yang mengikuti kegiatan Kabupaten/Kota Pangan Aman	1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kabupaten/Kota lain yang akan mengikuti kegiatan Kabupaten/Kota Pangan Aman supaya lebih optimal. 2. Menguatkan pemahaman Kota/Kabupaten mengenai pentingnya kelengkapan data dukung rencana aksi sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan implementasi program Kabupaten/Kota Pangan Aman.. 3. Mengoptimalkan peran pendampingan dan monitoring secara berkala untuk memastikan rencana aksi Kabupaten/Kota Pangan Aman berjalan dan terdokumentasi dengan baik. 4. Mendorong komitmen pemerintah daerah	1. Melakukan penjadwalan dan pemberitahuan kegiatan pengawalan Kabupaten/ Kota Pangan Aman secara lebih awal 2. Menyusun dan mendistribusikan pedoman serta memberikan pendampingan pengisian data dukung rencana aksi program Kabupaten/Kota Pangan Aman kepada pemerintah daerah dan instansi terkait 3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi rencana aksi program Kabupaten/Kota Pangan Aman 4. Memberikan umpan balik kepada Kabupaten/Kota terkait kelengkapan dan kualitas data dukung yang	1. TW 2-2026 2. TW 2-2026 3. TW 3-2026 4. TW-3 2026	Y	Infokom 20	Stakeholder yang terkait tidak berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			dan instansi terkait dalam mendukung implementasi dan pelaporan program Kabupaten/ Kota Pangan Aman secara berkelanjutan.	disampaikan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.				

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.89
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan				
			- Reagen Sampel balai	2	PKT	2	PKT
			- Media Mikro Sampel Balai	2	PKT	2	PKT
			- Keperluan Penunjang Laboratorium	1	PKT	1	PKT
			- Media Sampel balai	1	PKT	1	PKT
			- Pengadaan Reagen/Media/bahan penunjang laboratorium pengujian/ Glassware	1	PKT	1	PKT
			- ATK dan Komputer Suplies	1	PKT	1	PKT

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator sampai dengan tahun 2025 adalah komunikasi yang intens kepada OPD terkait saat melakukan pengisian Tools dan mengupload data dukung. BBPOM di Samarinda sebagai penghubung menyampaikan kendala - kendala yang dialami OPD saat melakukan pengisian Tools kepada PIC kegiatan Kabupaten/ Kota Pangan Aman Dit PMPU BPOM, sehingga kendala tersebut dapat teratasi.

BBPOM Samarinda dalam melakukan pendampingan pengisian Tools juga menyelenggarakan rapat bersama dengan OPD terkait dan melakukan pembahasan bersama setiap point dalam Tools sehingga diperoleh pemahaman yang sama.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.90
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	127.393.000	127.356.804,75	99,97	100,00	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran sampai akhir Tahun 2025 adalah **efisien** dimana realisasi anggaran telah tercapai sebesar 99,97 % dengan tingkat efisiensi 100,00 yaitu dari target anggaran sebesar Rp. 127.393.000 terealisasi sebesar Rp. 127.356.804,75 sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya efisien dalam mendukung pencapaian indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Upaya-upaya yang sudah dilakukan agar pemanfaatan sumber daya efisien dalam mendukung pencapaian target akhir tahun 2025 yaitu Koordinasi antara BBPOM Samarinda dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dilanjutkan dengan Advokasi secara daring untuk semua kab/kota lingkup Pengawasan BBPOM di Samarinda. Tahapan selanjutnya yaitu pendampingan pengisian tools secara langsung dan daring ke Dinas Kesehatan, Dinas PTSP, Dinas Pangan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pertanian Peternakan dan Bappeda.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai alat evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA), baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui laporan ini, dapat diketahui tingkat capaian target, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta kendala yang dihadapi selama periode pelaporan.

Secara lebih rinci, pemanfaatan laporan kinerja ini mencakup hal :

1. Sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program.

Laporan kinerja digunakan untuk menilai sejauh mana kegiatan pendampingan, pembinaan, dan koordinasi telah berkontribusi terhadap pencapaian indikator Kabupaten/Kota Pangan Aman. Hasil evaluasi ini menjadi acuan untuk menentukan daerah yang memerlukan intervensi tambahan atau pendampingan intensif.

2. Sebagai bahan penyusunan rencana tindak lanjut dan kebijakan perbaikan.

Informasi dari laporan digunakan untuk merumuskan strategi perbaikan kinerja pada periode berikut, termasuk penyesuaian target, jadwal kegiatan, dan fokus pembinaan daerah.

3. Sebagai media transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Laporan kinerja menjadi bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kepada pimpinan dan pemangku

kepentingan, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap efektivitas program keamanan pangan nasional.

4. Sebagai dasar koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi program.

Data dan analisis yang termuat dalam laporan dimanfaatkan oleh lintas sektor (Dinas Kesehatan, Dinas Pangan, Dinas PTSP dsb) untuk memperkuat sinergi kegiatan terkait keamanan pangan di daerah.

5. Sebagai sumber data monitoring dan penilaian capaian nasional.

Laporan daerah menjadi bagian dari konsolidasi capaian nasional yang digunakan oleh Badan POM dalam memantau perkembangan implementasi program Kabupaten/Kota Pangan Aman secara keseluruhan.

Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajerial untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efektivitas pendampingan, dan mendorong percepatan pencapaian target Kabupaten/Kota Pangan Aman di seluruh Indonesia.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam pelaksanaan program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA), terdapat sejumlah risiko yang dapat mempengaruhi ketercapaian target kinerja baik dari sisi output maupun outcome. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang terencana agar target dapat tetap tercapai secara optimal.

Risiko yang telah dikendalikan yang dapat menghambat pencapaian kinerja yaitu Stakeholder yang terkait tidak berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan. Untuk mengurangi dampak risiko tersebut, diterapkan langkah mitigasi melalui petugas UPT mendampingi stakeholder terkait dalam melaksanakan kegiatan yang juga menjadi tanggung jawab kabupaten/kota

.

SK 2

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke 2 pada tahun 2025 diukur dengan 1 (satu) **Indikator Kinerja Utama (IKU).** Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 3.91
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 Terhadap Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00	Baik	
Capaian Sasaran Kegiatan				**100.00**	**Baik**	

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terealisasi 100% dari target sebesar 100%, sehingga diperoleh % capaian sebesar 100%.

Indikator kinerja sasaran kegiatan ke-2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

   Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

   Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil

pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).
Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

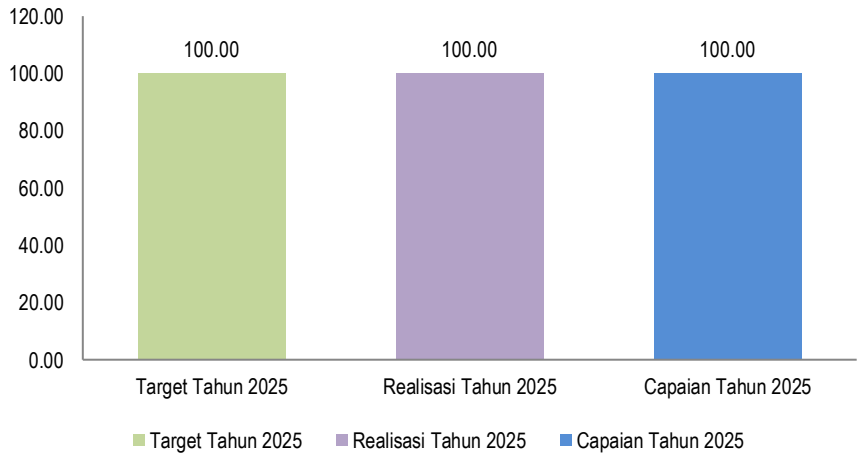
Cara Perhitungan:

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT x 100%

Pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi dilakukan sebagai upaya intervensi langsung kecukupan zat fortifikan kepada sarana produksi di wilayah kerja masing masing UPT. Upaya dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Program Percepatan Penurunan Stunting. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi pangan fortifikasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berkontribusi langsung dalam peningkatan status gizi masyarakat. Balai Besar POM di Samarinda memiliki 1 sarana produksi pangan fortifikasi yaitu PT. Lima Pendowo yang merupakan produsen garam beryodium, dengan target pemeriksaan sebesar 1 sarana (100% cakupan) dan capaian 100%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.46
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025



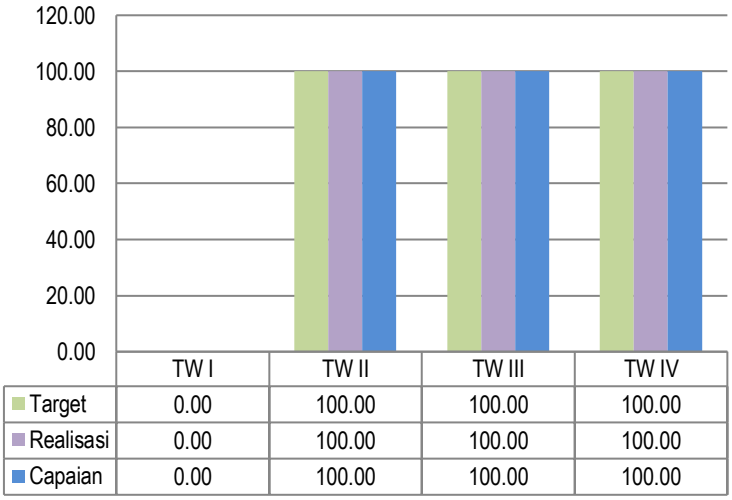
Tabel 3.92
Capaian Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
100.00%	100.00%	100.00%	Baik	

Sesuai gambar di atas, target persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100.00% dengan realisasi sebesar 100.00% sehingga capaian sebesar 100%. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa realisasi telah mencapai target yang di tetapkan dan masuk dalam kriteria **Baik.**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.47
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan per Triwulan Tahun 2025



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target	0.00	100.00	100.00	100.00
Realisasi	0.00	100.00	100.00	100.00
Capaian	0.00	100.00	100.00	100.00

Realiasi kinerja bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, pada triwulan I belum terdapat realisasi karena renlak pengawasan direncanakan pada triwulan II. Dengan target 100% cakupan yaitu 1 sarana produksi pangan fortifikasi, telah dilakukan pemeriksaan ke sarana PT. Lima Pendowo yang merupakan produsen garam beriodium pada awal bulan Juni 2025 sehingga realisasi dan capaian kinerja sebesar 100% pada triwulan II. Selain dilakukan pemeriksaan rutin, telah dilakukan pula sampling terhadap produk garam beiodium dari produsen tersebut dan dilakukan pengujian sesuai ketentuan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.93
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
100.00	100.00	100.00	Tercapai/ melampaui	▲

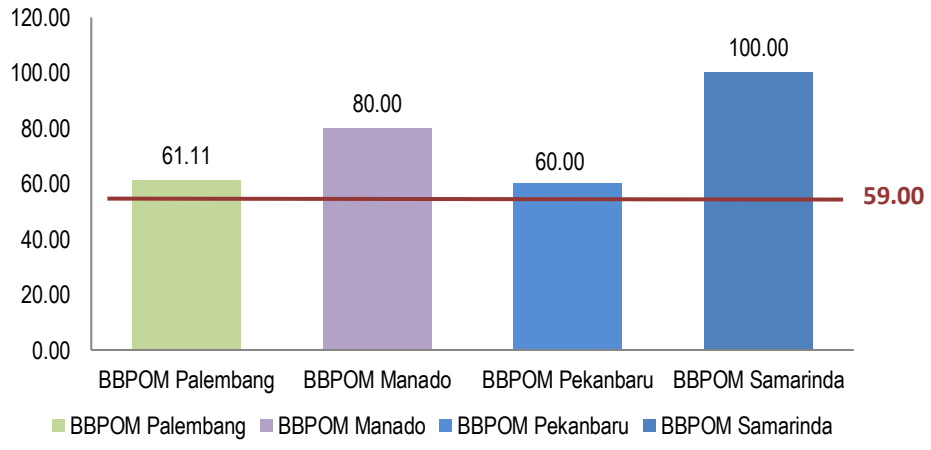
Sesuai gambar di atas, trealisasi indikator persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah mencapai target akhir periode renstra, sehingga dapat disimpulkan target akhir periode renstra akan tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.94
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
59.00	Palembang	61.00	61.11	100.18	Sangat baik
	Manado	80.00	80.00	100.00	Baik
	Pekanbaru	60.00	60.00	100.00	Baik
	Samarinda	100.00	100.00	100.00	Baik

Gambar 3.48
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025, realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Samarinda, diikuti oleh BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang dan BBPOM di Pekanbaru. Capaian dari keempat balai yang diperbandingkan masuk dalam kategori **baik**, kecuali capaian BBPOM di Palembang yang masuk kategori **sangat baik**. Realisasi dari keempat balai seluruhnya telah mencapai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Faktor-faktor yang menunjang capaian persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam kategori sangat baik adalah :

- Terlaksananya pemeriksaan sarana sesuai dengan renlak yang telah dibuat.
- memiliki sistem perencanaan yang baik karena pada pelaksanaannya perlu menyelaraskan rencana pengawasan dengan waktu pengujian, sehingga melibatkan 2 fungsi yang berbeda yaitu fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha produksi pangan fortifikasi dalam pemenuhan aspek CPPOB
- Kapasitas dan kompetensi SDM pengawas yang baik kompetensi petugas yang melaksanakan pemeriksaan juga menjadi hal penting untuk mencapai target indikator kinerja. Hal ini menjadi penilaian aspek kualitas serta aspek waktu dalam pengukuran realisasi indikator kinerja. Pada sisi aspek kualitas, pemeriksaan sarana harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana produksi pangan olahan serta regulasi lainnya yang berlaku. Sedangkan pada sisi aspek waktu, hasil pemeriksaan sarana produksi fortifikasi harus dilaporkan tepat waktu. Terhadap kedua aspek tersebut baik dari sisi aspek kualitas atau pun waktu, petugas dapat memenuhi kedua aspek tersebut.

Pada triwulan IV tidak ada permasalahan yang dihadapi karena target tahun 2025 telah selesai dilakukan pada triwulan II tahun 2025 dan target sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa hanya 1 sarana yang ada I wilayah pengawasan BBPOM di Samarinda.

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.95
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QIC 003.055	Pengawasan Sarana Produksi	A	Pemeriksaan sarana produksi fortifikasi - Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah

- Pemeriksaan sarana produksi fortifikasi yang telah dilakukan di triwulan II terlaksana sesuai target yaitu 1 sarana, dengan realisasi anggaran pada triwulan III.
- Peningkatan kapasitas SDM pengawas terutama dalam hal pengawasan fortifikan yang digunakan saat produksi
- Melakukan pembinaan rutin kepada pelaku usaha pangan fortifikasi agar lebih memenuhi aspek CPPOB
- Penguatan laboratorium pengujian untuk pengujian fortifikan.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.96
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	680.000	680.000	100,00	100,00	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran tahun 2025. Dapat disimpulkan bila anggaran 2025 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

BBPOM di Samarinda selalu melakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja baik berupa tindak lanjut maupun rencana aksi telah tercantum dalam laporan kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Dengan melihat tren data capaian kinerja dan evaluasi terhadap laporan kinerja yang dilakukan secara periodik memberikan masukan dan pertimbangan sebagai dasar untuk melakukan pengajuan revisi target. Dengan demikian, pelaporan kinerja dengan data yang akurat akan menunjang proses pencapaian kinerja dari BBPOM di Samarinda. Dalam hal ini pemanfaatan laporan kinerja menjadi salah satu tools yang akan dimanfaatkan untuk mencapai target indikator kinerja persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Dilakukan pula analisa terhadap rekomendasi yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja.

j. MItigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dari hasil mitigasi risiko terhadap indikator persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, terdapat beberapa risiko terkait antara lain :

- Penyampaian perbaikan hasil rekomendasi oleh pelaku usaha (CAPA) yang melewati timeline yang telah ditentukan
- Petugas pengawas BPOM menerima suap atau gratifikasi agar proses izin edar dipercepat, dan petugas pengawas menutup mata terhadap pelanggaran/temuan yang mungkin ada di sarana distribusi dan produksi

Dari risiko yang telah dimitigasi, telah dilakukan pengendalian yang efektif sehingga indikator ini dapat mencapai target, antara lain :

- Melakukan desk pendampingan CAPA kepada pelaku usaha
- Pengendalian terhadap gratifikasi dan penanganan pengaduan masyarakat diantaranya dengan Penandatanganan pakta integritas, implementasi whistle blowing system, dan kolaborasi petugas dari fungsi lain

SK 3

MENINGKATNYA EFEKTIFITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA BBPOM DI SAMARINDA

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke 3 pada tahun 2025 diukur dengan 4 (empat) **Indikator Kinerja Utama (IKU).** Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 3.97
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 Terhadap Target Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Samarinda	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.43	90.15	101.95	Sangat Baik	
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	100.00	Baik	
	Jumlah desa pangan aman	4	4	100.00	Baik	
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100.00	Baik	
Capaian Sasaran Kegiatan				**100.49**	Sangat Baik	

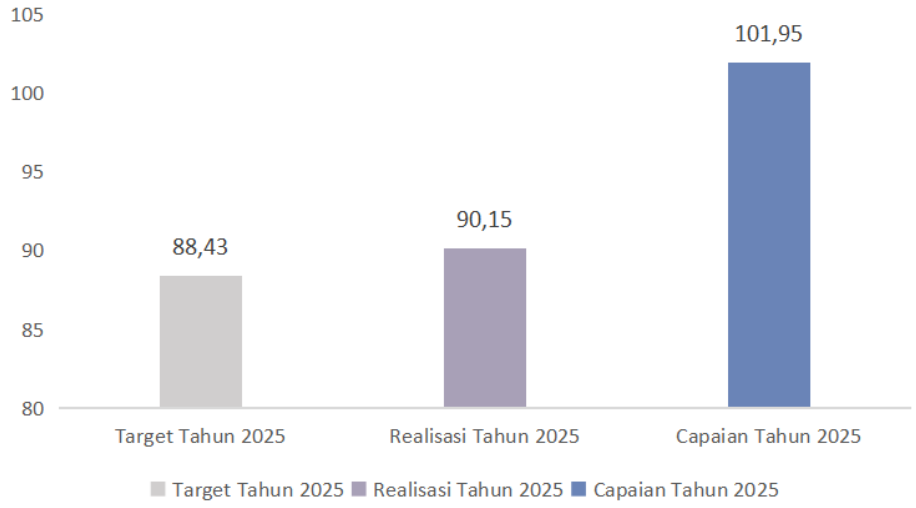
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 ini di Tahun 2025 diperoleh dari 4 indikator yaitu, realisasi capaian tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2025 sebesar 101,95% dengan kriteria **Sangat Baik,** Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2025 sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**, Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**, dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025 sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**. Maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Sasaran Kegiatan 3 ini di Tahun 2025 diperoleh sebesar 100,49% dengan kriteria "**Sangat Baik**". Dengan demikian sasaran

kegiatan ke 3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda telah tercapai dengan Sangat Baik.

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.49
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025



Tabel 3.98
Capaian Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
88.43	90.15	101.95	Sangat Baik	

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE

4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Adapun hasil pengukuran indikator pembentuk indeks efektifitas KIE tersaji sebagai berikut:

- Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Tabel 3.99
Interpretasi Efektifitas KIE

Skor Indeks 100	Interprestasi Efektivitas
< 65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif

Perhitungan Indeks Efektivitas KIE Tahun 2025 merupakan hasil pengukuran kumulatif dari Bulan Januari – Desember 2025 terhadap 213 (dua ratus tiga belas) responden survei KIE Tatap Muka/Langsung dan . 213 (dua ratus tiga belas) responden survei KIE Media. Realisasi sebesar 90,25 dari target yang ditetapkan 88,43 dengan capaian 101,95 % kriteria “Sangat Baik” untuk skor indeks interpretasi efektivitas KIE sebesar 90,15 masuk dalam kategori “Efektif”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah ada sejak periode Renstra 2019-2024, namun pada tahun 2025 terdapat perubahan Defenisi Operasioanl dan perhitungan yang disebabkan oleh beberapa faktor strategis dan kebijakan yang mempengaruhi struktur perencanaan

dan pelaksanaan program pada tahun berjalan sehingga indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun periode sebelumnya.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, sehingga indikator Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada periode ini berada dalam kerangka kebijakan, arah strategi, serta target yang telah disesuaikan dengan kebijakan sektoral terbaru. Sebagai awal periode perencanaan, Tahun 2025 menjadi fase penataan ulang (*reset baseline*) terhadap target serta mekanisme pengukuran kinerja. Dengan demikian, capaian pada tahun ini tidak sepenuhnya menggunakan parameter, ruang lingkup, maupun pendekatan yang identik dengan periode Renstra sebelumnya.

Selain itu, pada Tahun 2025 terdapat dinamika kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian alokasi sumber daya, baik dari sisi jumlah kegiatan, cakupan wilayah intervensi, maupun intensitas kegiatan. Kebijakan efisiensi tersebut mengharuskan dilakukan penyesuaian target kegiatan yang lebih realistis sesuai kemampuan dukungan anggaran.

Perbedaan konteks perencanaan (awal Renstra baru) dan kondisi fiskal (efisiensi anggaran) menyebabkan capaian Tahun 2025 tidak bersifat *apple-to-apple* apabila dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya. Pada periode Renstra sebelumnya, indikator ini dilaksanakan dalam kerangka kebijakan, dukungan anggaran, serta strategi implementasi yang berbeda, sehingga menghasilkan struktur capaian yang tidak sepenuhnya sebanding.

Oleh karena itu, analisis kinerja Tahun 2025 lebih tepat difokuskan pada:

1. Tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029;
2. Efektivitas strategi implementasi pada kondisi keterbatasan anggaran

Dengan demikian, capaian Tahun 2025 diposisikan sebagai baseline awal periode Renstra 2025–2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar perbandingan untuk evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode perencanaan yang sama.

Pada tahun 2025 juga terdapat perubahan terhadap *tools* kuisioner pengukuran tingkat efektifitas KIE dibandingkan dengan kuisioner Tahun 2020-2024 sehingga penetapan target menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. berdasarkan melalui Surat Edaran Sekretaris Utama melalui surat nomor B-OT.03.02.2.03.25.159 tanggal 14 Maret 2025 perihal Penyampaian Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan telah disampaikan sebagai petunjuk terhadap pelaksanaan KIE. Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Badan

Pengawas Obat dan Makanan telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.01.2.03.25.47 Tahun 2025 dan telah dilakukan sosialisasi berdasarkan Surat Undangan Nomor B-OT.03.02. 22.03.25.105 tanggal 18 Maret 2025 dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM perihal Undangan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Meskipun realisasi 2025 lebih rendah dari tahun sebelumnya namun jika dilihat dari capaian terdapat kenaikan dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa kegiatan KIE berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai keamanan obat dan makanan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.100
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
91,97	90,15	98,02	Akan Tercapai	

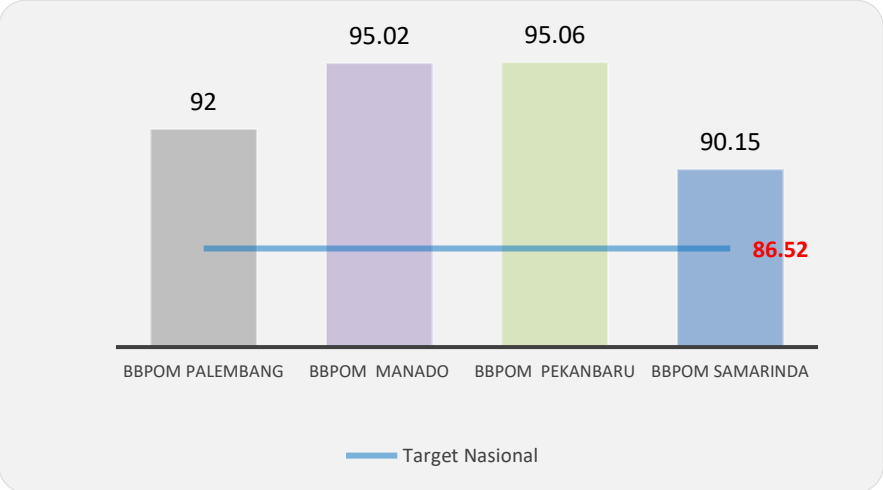
Realisasi tingkat efektivitas KIE tahun 2025 sebesar 90,15 dengan persentase capaian sebesar 101.95%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 91,97 capaiannya masih sebesar 98.02%, sehingga diperlukan adanya perbaikan aspek perencanaan serta upaya-upaya konkrit dalam strategi pencapaian target akhir tahun periode Renstra agar target akhir periode Renstra bisa tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.101
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
86,52	Palembang	89,09	92,00	103,27	Sangat Baik
	Manado	89,24	95,02	106,48	Sangat Baik
	Pekanbaru	87,90	95,06	108,15	Sangat Baik
	Samarinda	88,43	90,15	101,95	Sangat Baik

Gambar 3.50
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 5) dan Target Nasional



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Makanan tahun 2025 di wilayah BBPOM di Palembang, Manado, Pekanbaru dan Samarinda berada diatas target Nasional dan masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Strategi perencanaan dalam pencapaian target pada tahun 2025 mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan untuk meningkatkan Indeks Efektivitas KIE.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Indeks Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 BBPOM di Samarinda diperoleh indeks 90,15 (Efektif). Indeks efektifitas KIE ini merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE baik secara langsung/tatap muka (capaian indeks sebesar 90,14) maupun melalui berbagai media (capaian indeks 90,17) antara lain media cetak, elektronik, media sosial, dll. Kontribusi masing masing indeks pada evaluasi KIE tatap muka/langsung adalah: narasumber dan petugas KIE 95,92; konten atau informasi KIE 94,68; pemahaman audiens KIE 81,1 dan manfaat KIE 88,85. Sedangkan kontribusi masing masing indeks pada evaluasi KIE media adalah: sumber informasi 95,48. konten atau informasi KIE 95,89; pemahaman audiens KIE 78,76 dan manfaat KIE 90,55 Data tersebut menunjukkan bahwa indikator yang paling berkontribusi terhadap indeks efektivitas KIE tatap muka tahun 2025 adalah Narasumber dan petugas (95,92). Narasumber merupakan individu yang berinteraksi secara langsung untuk menyampaikan materi KIE kepada peserta. Nilai tertinggi pada aspek narasumber menunjukkan bahwa kompetensi, kredibilitas, dan kemampuan komunikasi narasumber sangat baik. Peserta menilai narasumber mampu menyampaikan materi secara jelas, menarik, dan interaktif, serta menjawab

pertanyaan dengan lugas. Kualitas SDM pelaksana KIE menjadi kekuatan utama dalam efektivitas kegiatan.

Indikator yang memiliki kontribusi terendah terhadap indeks efektivitas KIE tatap muka hingga tahun 2025 adalah Pemahaman Audiens (81,1). Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar audiens memahami isi materi dengan baik, meskipun masih terdapat variasi tingkat pemahaman antar peserta, terutama pada

kelompok dengan tingkat pendidikan atau literasi kesehatan yang berbeda. Indikator Pemahaman pada konteks efektivitas KIE mengacu pada sejauh mana responden dapat mengingat dan menjelaskan kembali informasi yang disampaikan melalui kegiatan KIE. Berdasarkan Taksonomi Bloom, pada proses belajar peserta akan mampu memahami atau menjelaskan kembali jika dapat mengingat materi yang disampaikan dengan baik. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dapat dikombinasikan dengan pemberian edukasi melalui ragam saluran media agar materi KIE dapat diterima masyarakat secara berkesinambungan. Perlu penguatan metode komunikasi partisipatif agar seluruh peserta aktif dan memahami pesan dengan optimal.

Untuk aspek konten/informasi tercapai indeks dengan nilai 94,68, menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dinilai relevan dan sesuai kebutuhan audiens. Informasi dikemas dengan baik, disertai contoh nyata, dan mendukung peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan. Konten yang kontekstual dan berbasis kasus lokal dapat lebih memperkuat daya serap informasi. Aspek manfaat dengan nilai sebesar 88,85, peserta menilai kegiatan KIE tatap muka memberikan manfaat nyata, baik dalam peningkatan pengetahuan maupun perubahan perilaku konsumsi obat dan makanan yang aman.

Sedangkan untuk hasil evaluasi indeks efektivitas KIE Media menunjukkan bahwa indikator yang paling berkontribusi terhadap indeks efektivitas KIE media tahun 2025 adalah Konten/Informasi (95,89). Hal itu menunjukkan bahwa kualitas konten sudah baik. Informasi yang disajikan dinilai relevan, akurat, menarik, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Audiens merasa pesan yang disampaikan mudah diikuti dan memiliki kredibilitas tinggi. Strategi penulisan dan pemilihan tema KIE sudah efektif, namun perlu terus memperhatikan konteks lokal dan segmentasi target audiens agar semakin relevan.

Indikator yang memiliki kontribusi terendah terhadap indeks efektivitas KIE melalui media tahun 2025 adalah pemahaman (78,76). Indikator ini mencerminkan sejauh mana informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens secara utuh. Angka 78,76 dari skala 100 menandakan tingkat pemahaman audiens masih belum optimal. Pesan KIE telah tersampaikan dengan cukup jelas, namun masih ada sebagian audiens yang mungkin memerlukan penyederhanaan bahasa atau visualisasi yang lebih kuat. Perlu peningkatan pada gaya penyajian (infografis, video, bahasa sederhana) agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami pesan dengan mudah. Hal ini menunjukkan beberapa tantangan,

diantaranya bahasa dan istilah teknis dalam materi KIE yang mungkin belum sepenuhnya sederhana atau familiar bagi semua segmen masyarakat. Selain itu dapat dipengaruhi oleh format penyajian yang kurang memperhatikan keragaman tingkat literasi atau kebutuhan kelompok rentan (misalnya masyarakat pedesaan, lanjut usia, atau difabel). Tingkat pemahaman audiens dalam menangkap pesan pada materi KIE berbeda-beda. Faktor usia, latar belakang pendidikan, ketertarikan pada materi, kondisi fisik/psikologis saat menerima pesan, dapat mempengaruhi kemampuan mengingat dan memahami.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Samarinda untuk peningkatan nilai indikator pembentuk indeks efektifitas KIE ini. Peningkatan pada keempat indeks pembentuk indikator efektivitas KIE dimungkinkan terjadi karena beragam kegiatan KIE yang dilakukan oleh BPOM di Samarinda tidak hanya melibatkan lintas sektor terkait, tetapi juga sinergitas pentahelix pengawasan obat dan makanan dengan melibatkan pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa serta mencakup berbagai pendekatan dengan konteks materi dan target audiens yang beraga.

Adapun kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh BBPOM di Samarinda tahun 2025 seperti:

1. Upaya peningkatan inovasi serta kolaborasi dengan stakeholder misalnya pelaksanaan KIE pada area *Car Free Day* untuk lebih dekat menjangkau masyarakat, KIE kunjungan belajar sekolah ke kantor BBPOM di Samarinda untuk dapat lebih mengenalkan BPOM kepada generasi muda serta sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait lainnya. Pada Bulan September juga dilaksanakan sosialisasi ke SLB Negeri Tenggarng sebagai upaya penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali termasuk kepada kelompok rentan.
2. Upaya peningkatan kapasitas serta kreativitas petugas pelaksana KIE kepada masyarakat melalui pelatihan petugas pelayanan publik dengan materi *Fundamental Public Speaking and Communication* yang diselenggarakan oleh BBPOM di Samarinda, pelatihan ToT Instruktur Diklat SPPI sebagai salah satu upaya mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta berbagai *e-learning* yang diikuti melalui aplikasi IDEAS dari PPSDM BPOM diantaranya *e-learning* terkait digitalisasi yaitu Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital, Budaya, Etika Komunikasi, Literasi serta Keamanan dan Keselamatan Digital. Untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam penyusunan materi KIE media dilaksanakan pelatihan desain grafis menggunakan aplikasi Canva. Pelatihan terkait Pengarustamaan Gender (PUG) juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam mendukung pelaksanaan KIE. Selain itu agenda peningkatan kompetensi juga diikuti antara lain melalui Sosialisasi KIE “Subsite Kata BPOM dan Aplikasi Evaluasi KIE Versi 1.5 serta *Workshop* VIBE (*Visual, Infographic and Beyond Editing*): Menciptakan Konten Visual yang Menarik dan Bermakna.

3. Pelaksanaan KIE melalui media sosial memperhatikan penyesuaian edukasi terhadap agenda setting yang telah ditetapkan oleh Badan POM dan tren konten yang beredar di media sosial.
4. Memperhatikan kecukupan jumlah responden survei sesuai Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Komunikasi Informasi dan Edukasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, pada tahun 2025 tercapai jumlah responden survei KIE melalui tatap muka/langsung sejumlah 213 responden dari target responden survei untuk tahun 2025 sebanyak 213 orang, sedangkan untuk target responden survei KIE media tercapai sejumlah 213 responden dari target responden survei untuk tahun 2025 sebesar 213 responden.

Pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara tatap muka langsung maupun media merupakan salah satu strategi dalam membangun interaksi komunikatif antara BBPOM di Samarinda dan masyarakat. Nilai efektifitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan efektif.

Peningkatan aspek ragam kegiatan, pemahaman, manfaat dan minat sangat diperlukan dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan. Terlebih masih banyak beredarnya hoax di masyarakat terkait Obat dan Makanan yang besar kemungkinan dapat mereduksi pemahaman terkait Obat dan Makanan yang aman. Untuk itu, perlu dilakukan *counter issue* yang tepat dan cepat agar pemahaman masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman dapat terjaga. Penyebaran informasi melalui media sosial perlu perlu terus ditingkatkan untuk tetap menjaga pemahaman masyarakat serta menurunkan kekhawatiran akan beredarnya banyak hoax di masyarakat.

Meskipun demikian masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian Tingkat Efektivitas KIE di Tahun 2025 yaitu :

1. Tidak semua peserta KIE bersedia mengisi survei efektifitas KIE saat kegiatan, dikarenakan keterbatasan waktu, tidak membawa gawai (umumnya untuk peserta siswa) serta sinyal yang kurang mendukung, sedangkan pemberian survei secara manual dinilai kurang efisien.
2. Tingkat pemahaman dan persepsi manfaat peserta terhadap kegiatan KIE masih terbatas, sehingga dampak kegiatan belum maksimal meskipun pelaksanaan telah berjalan dengan baik.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan di Tahun 2025 berdasarkan kendala yang dihadapi dan hasil evaluasi antara lain :

1. Pemberian waktu yang cukup bagi peserta dalam *rundown* kegiatan KIE untuk pengisian survey efektifitas KIE serta dilakukan pendampingan oleh petugas agar seluruh peserta dapat mengisi survey untuk memenuhi target responden.

2. Menerapkan metode KIE yang lebih interaktif, seperti diskusi, kuis, simulasi, dan tanya jawab untuk meningkatkan keterlibatan peserta.
3. Menyusun materi KIE berbasis studi kasus dan praktik langsung, sehingga peserta dapat memahami manfaat secara konkret.
4. Mengoptimalkan KIE melalui media dengan peningkatan produksi konten yang menarik dengan menyesuaikan tren dan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Melaksanakan evaluasi untuk mengukur peningkatan pemahaman dan manfaat yang dirasakan peserta seperti pre-post test.

Tabel 3.102
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pada Tahun 2025, survei efektifitas KIE dibagi menjadi 2 yaitu survei KIE tatap muka dan KIE media dengan jumlah responden yang besar yaitu masing-masing 213 responden.Tidak semua peserta KIE bersedia mengisi survei efektifitas KIE saat kegiatan, dikarenakan keterbatasan waktu, tidak membawa hp (umumnya untuk peserta siswa) serta sinyal yang kurang mendukung, sedangkan pemberian survei secara manual dinilai kurang efisien	Survei KIE baik tatap muka maupun media diberikan kepada seluruh peserta KIE. Pengisian survei diupayakan dilakukan saat kegiatan KIE dan dilakukan pendampingan oleh petugas	Pemberian waktu yang cukup bagi peserta dalam rundown KIE untuk pengisian survey efektifitas KIE dan pendampingan petugas agar seluruh peserta dapat mengisi survey untuk memenuhi target responden	Triwulan IV Tahun 2025	T	-	-
		Tingkat pemahaman dan persepsi manfaat peserta terhadap kegiatan KIE masih terbatas, sehingga dampak kegiatan belum maksimal meskipun pelaksanaan telah berjalan dengan baik	1. Mengoptimalkan metode penyampaian KIE melalui pendekatan interaktif dan partisipatif untuk meningkatkan pemahaman	1. Menerapkan metode KIE yang lebih interaktif, seperti diskusi, kuis, simulasi, dan tanya jawab untuk meningkatkan	1. TW 2-2026 2. TW 2-2026 3. TW 1-2026 4. TW-2 2026	Y	Infokom 4	Tujuan edukasi tidak tercapai.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			peserta. 2. Memperkuat penekanan pada manfaat praktis KIE, terutama penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menyesuaikan media dan bahasa komunikasi agar lebih sederhana, visual, dan mudah dipahami oleh peserta. Untuk KIE melalui media dengan membuat variasi konten informasi yang menarik dan menyesuaikan tren. 4. Melakukan evaluasi pemahaman sebagai dasar perbaikan materi dan metode KIE selanjutnya.	keterlibatan peserta. 2. Menyusun materi KIE berbasis studi kasus dan praktik langsung, sehingga peserta dapat memahami manfaat secara konkret. 3. Mengoptimalkan KIE melalui media dengan peningkatan produksi konten yang menarik dengan menyesuaikan tren dan sesuai kebutuhan masyarakat. 4. Melaksanakan pre-test dan post-test atau evaluasi sederhana lain untuk mengukur peningkatan pemahaman dan manfaat yang dirasakan peserta.				

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.103
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
BDC.001.051	Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A	KIE Obat dan Makanan di Kota Samarinda				
			- Snack	6	KL	6	KL
			- Makan	2	KL	2	KL
			- Spanduk/ Poster	2	PKT	2	PKT
			- Penggandaan/pelaporan	2	KL	2	KL
			- Brosur	2	PKT	2	PKT
			- Honor Output Kegiatan	1	KL	1	KL
			- Peralatan Kegiatan	2	KL	2	KL
			- Dehumidifier	1	UNIT	1	UNIT
			- Transport Lokal Petugas Balai	6	KL	6	KL
			- ATK	10	PKT	10	PKT
		B	KIE Obat dan Makanan di luar Kota Samarinda				
			- Snack	1	KL	1	KL
			- Spanduk	1	PKT	1	PKT
			- Honor Output Kegiatan	2	KL	2	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
		D	Pemetaan Keracunan Obat dan Makanan				
			- Honor Petugas RS di Kaltim	2	KL	2	KL
		G	Koordinasi dalam rangka Praktik Baik Pelayanan Publik Inklusif				
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
		H	Monitoring dan Evaluasi Terpadu				
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	KL	1	KL
		I	Koordinasi Lintas Sektor				
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL
BMB.001.051	Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A	Sosialisasi Melalui Media Cetak dan Elektronik				
			- KIE Media Online/ Media cetak	10	KL	10	KL
		C	Operasional ULPK				
			- Komunikasi	12	KL	12	KL
		D	Koordinasi Linsek				
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	17	KL	17	KL

Kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Samarinda Tahun 2025 antara lain:

1. Kegiatan KIE "Cek Produkmu Bersama BPOM" dalam rangka HUT ke-24 BPOM pada 19 Januari 2025 di Kawasan strategis Kota Samarinda, Kawasan CFD GOR Segiri Samarinda dengan pemberian layanan informasi dan pengaduan produk obat dan makanan serta pengujian produk pangan dengan rapid test secara gratis ditempat dengan menggunakan mobil operasional keliling. Kegiatan penyebaran informasi juga dilaksanakan di area publik strategis yang dikunjungi masyarakat pada hari libur yaitu di area GOR Kadrie Oening pada 3 Mei 2025 dan pada area Bazar Syariah Komplek Islamic Center Samarinda pada 20 Juli 2025.
2. Koordinasi dan kolaborasi dengan kelompok profesi serta pemberdayaan pelaku usaha UMKM yang dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Distributor Obat Bahan Alam dalam Rangka Perkuatan Pengawasan Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat 26 Agustus 2025.
3. Pelaksanaan penyebaran informasi melalui mobil operasional keliling dalam rangka intensifikasi pangan pada bulan Ramadhan Tahun 2025 di 3 (tiga) kabupaten/kota yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang (berkolaborasi dengan Saka POM Bontang) dan Kabupaten Kutai Timur.
4. Pelaksanaan edukasi pencegahan stunting melalui KIE Keamanan Pangan di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda yang termasuk salah satu lokus stunting di Kota Samarinda pada 24 April 2025, materi yang disampaikan antara lain terkait stunting dan keamanan pangan serta informasi nilai gizi.
5. Pelaksanaan KIE BPOM *goes to School* ke SMA Negeri 2 Samarinda serta penyebaran informasi dalam kegiatan kunjungan belajar ke BPPOM di Samarinda antara lain dari SMP Islamic Center Samarinda, SMP Bunga Bangsa Samarinda, SDIT Insan Cendikia Tenggarong, SD Islamic Center Samarinda serta Yayasan Gefima Samarinda.
6. Pelaksanaan KIE kepada kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas di SLB Negeri Tenggarong pada 17 September 2025.
7. Layanan informasi dan keamanan dan mutu obat dan makanan BBPOM di Samarinda tahun 2025 sebanyak 30 layanan baik dalam bentuk layanan informasi dan pengaduan, publikasi media sosial, publikasi melalui media luar ruang dan berupa poster, leaflet ataupun brosur.

Kegiatan lain yang dioptimalkan juga untuk penyebaran informasi tentang Badan POM dan informasi Obat dan Makanan adalah pada kegiatan sebagai narasumber yang diselenggarakan lintas sektor dari berbagai kabupaten/kota.

KIE melalui media sosial dan media elektronik juga dilakukan dengan intensif untuk menunjukkan eksistensi BPOM di masyarakat dan pemangku kepentingan.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.104
Efiensi Anggaran pada Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	72.225.000	72.187.106	99,95	101,95	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2025. Dapat disimpulkan bila anggaran 2025 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan.

Realisasi anggaran tercapai dikarenakan pelaksanaan KIE tatap muka/langsung berupa sosialisasi/penyuluhan/CFD/Pameran yang melibatkan interaksi secara langsung tatap muka dengan masyarakat antara lain KIE dengan menggunakan mobil keliling, KIE Stunting ke kecamatan yang menjadi lokus stunting, KIE dalam rangka kunjungan belajar, KIE menyasar ke kelompok rentan serta KIE yang dilaksanakan berkolaborasi dengan stakeholder.

Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan desain grafis dan multimedia, komunikasi publik, pengarusutamaan gender dll baik yang diikuti secara luring maupun daring turut membantu dalam pencapaian realisasi program.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan pengukuran indeks tingkat efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Samarinda yang tertuang dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan sehingga memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja yang diukur melalui peningkatan Nilai Tingkat efektivitas KIE Tahun 2025, pemanfaatan informasi yang telah dilakukan adalah sebagai:

1. Perbaikan pada dokumen perencanaan dengan penetapan target kinerja yang lebih baik melalui proses usulan revisi atas target indikator kinerja indeks tingkat efektivitas KIE tahun 2025.
2. Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan/peningkatan program pemberdayaan masyarakat serta pengawasan obat dan makanan. Penyesuaian terhadap pelaksanaan program KIE adalah dalam penyusunan strategi pelaksanaan KIE mengacu pada pedoman strategi KIE Obat dan Makanan yang diterbitkan oleh Badan POM dengan mempertimbangkan target audiens dan memperhatikan kebutuhan informasi di masyarakat serta sebagai dasar dalam melakukan pengembangan program yang kreatif dan

inovatif sesuai dengan karakteristik lokal termasuk pemilihan kanal/saluran KIE yang dapat menjangkau cakupan target yang lebih luas yaitu antara lain dengan memanfaatkan media antara lain media cetak, media sosial (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan subsite), media elektronik (TV/radio), media luar ruang (baliho/spanduk) di area strategis serta KIE secara langsung dengan memanfaatkan produk informasi yang dibagikan kepada masyarakat.

3. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk penyesuaian anggaran, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian strategi dalam pencapaian target kinerja terutama berkaitan dengan sinergitas lintas sektor.
4. Peningkatan Kerjasama dengan lintas sektor dengan organisasi masyarakat seperti kader PKK dan Posyandu serta Pramuka.

i. MItigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target indikator kinerja KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Samarinda terdapat beberapa risiko yang telah dikelola yaitu :

- Tujuan edukasi tidak tercapai dari kegiatan konten KIE melalui media online
- Minat terhadap kegiatan KIE kurang pada Pelaksanaan KIE Obat dan Makanan secara langsung (KIE dengan Linsek)
- Implementasi Inovasi B-Share (BBPOM di Samarinda Share) tidak dilakukan secara berkelanjutan

Terkait dengan risiko terebut telah dilakukan mitigasi untuk mengurangi kejadian dan atau dampak risiko dengan beberapa aktivitas pengendalian sebagai berikut:

- Menggunakan bahasa yang sederhana dan visual menarik untuk meningkatkan pemahaman peserta KIE.
- Menampilkan video informasi sebagai media penyampaian dalam kegiatan KIE.
- Pembagian tugas pembuatan konten per bulan ke masing-masing personel dengan tema sesuai agenda setting dari pusat

2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Tahun 2025 merupakan awal periode renstra yang baru dari tahun 2025-2029, sehingga apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai diintervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak,maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:
   1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
   4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

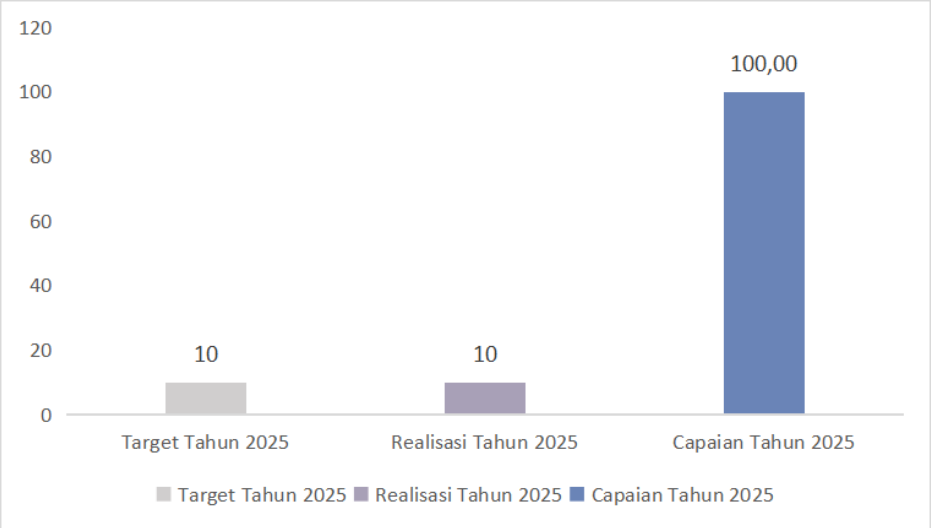
Pada periode Renstra 2025-2029, adanya dinamika kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 disikapi BPOM dengan melakukan perubahan pengukuran indikator kinerja pada tahun 2025 menggunakan skema 2 batch pelaksanaan kegiatan dan pengintegrasian kegiatan. BBPOM di Samarinda sendiri menyikapi hal tersebut dengan melalukan pengajukan perubahan lokus pelaksanaan kegiatan ke Kota Samarinda dari sebelumnya Kabupaten Mahakam Ulu menyesuaikan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan program sekolah ini disinergikan dengan program desa dan pasar dengan tujuan agar pelaksanaan program desa, pasar dan sekolah terpadu di setiap kabupaten/kota sehingga dapat membentuk kabupaten/kota pangan aman.

Dalam rangka efisiensi anggaran, beberapa tahapan kegiatan pada tahun 2025 juga mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain pengurangan tahapan pada kegiatan pemberian paket edukasi, pelaksanaan sampling pangan jajanan anak sekolah (PJAS), serta pengujian laboratorium terhadap sampel PJAS yang bersifat *optional*. Penyesuaian tersebut dilakukan tanpa mengurangi substansi pembinaan dan pengawasan, dengan tetap memastikan bahwa kegiatan edukasi, pendampingan, serta monitoring implementasi keamanan pangan di sekolah berjalan secara optimal.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Tahun 2025 maka diperoleh realisasi sebesar 10 sekolah dari target 10 sekolah dengan % capaian sebesar 100,00 % dengan kriteria Baik.

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025**

Gambar 3.51
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Tahun 2025 maka diperoleh realisasi sebesar 10 sekolah dari target 10 sekolah dengan % capaian sebesar 100,00 % dengan kriteria Baik.

Tabel 3.105
Capaian Indikator Kinerja dan Target Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
10	10	100,00	Baik	

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. Lokasi Penyedia keamanan pangan sekolah dapat diperoleh dari jalur distribusi pangan sekolah yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*.

Waktu akses pangan sekolah adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan pangan jajanan. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan pangan sekolah adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan pangan sekolah, sosialisasi keamanan pangan sekolah, bimtek kader keamanan pangan sekolah, monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan

pembudayaan keamanan pangan serta pengawalan. Tujuan intervensi keamanan pangan sekolah yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Dinamika kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 berdampak pada penyesuaian strategi pelaksanaan program dibandingkan tahun sebelumnya. Pengawalan sekolah dilaksanakan dengan pendekatan N-1, sehingga tidak seluruh sekolah intervensi tahun sebelumnya mendapatkan intensitas pendampingan yang sama seperti tahun 2024. Selain itu, target sekolah perluasan juga mengalami penyesuaian dari semula 70 sekolah menjadi 35 sekolah. Penyesuaian ini dilakukan sebagai langkah rasionalisasi anggaran dengan tetap menjaga kualitas pembinaan dan keberlanjutan program pada sekolah prioritas.

Meskipun terdapat penyesuaian tersebut, seluruh tahapan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tahun 2025 tetap dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Capaian jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan terealisasi sebanyak 10 sekolah baru sesuai target yang ditetapkan, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak mengurangi komitmen dalam mencapai target utama pembudayaan keamanan pangan di sekolah.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Realisasi kinerja dan capaian indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor strategis dan kebijakan yang mempengaruhi struktur perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berjalan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, sehingga indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada periode ini berada dalam kerangka kebijakan, arah strategi, serta target yang telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan sektoral terbaru. Sebagai awal periode perencanaan, Tahun 2025 menjadi fase penataan ulang (*reset baseline*) terhadap target, lokus intervensi, pendekatan pembinaan, serta mekanisme pengukuran kinerja. Dengan demikian, capaian pada tahun ini tidak sepenuhnya menggunakan parameter, ruang lingkup, maupun pendekatan yang identik dengan periode Renstra sebelumnya.

Selain itu, pada Tahun 2025 terdapat dinamika kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian alokasi sumber daya, baik dari sisi jumlah kegiatan, cakupan wilayah intervensi, maupun intensitas pendampingan program. Kebijakan efisiensi tersebut mengharuskan dilakukan prioritisasi lokasi desa,

optimalisasi metode pembinaan, serta penyesuaian target yang lebih realistis sesuai kemampuan dukungan anggaran. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi jumlah sekolah yang dapat diintervensi dan ditetapkan sebagai Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada tahun berjalan.

Perbedaan konteks perencanaan (awal Renstra baru) dan kondisi fiskal (efisiensi anggaran) menyebabkan capaian Tahun 2025 tidak bersifat *apple-to-apple* apabila dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya. Pada periode Renstra sebelumnya, indikator ini dilaksanakan dalam kerangka kebijakan, dukungan anggaran, serta strategi implementasi yang berbeda, sehingga menghasilkan struktur capaian yang tidak sepenuhnya sebanding.

Oleh karena itu, analisis kinerja Tahun 2025 lebih tepat difokuskan pada:

1. Tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029;
2. Efektivitas strategi implementasi pada kondisi keterbatasan anggaran; dan
1. Progres capaian secara bertahap sepanjang tahun berjalan.

Dengan demikian, capaian Tahun 2025 diposisikan sebagai baseline awal periode Renstra 2025–2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar perbandingan untuk evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode perencanaan yang sama.

Target Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025 sebesar 10 sekolah dengan realisasi sebesar 10 sekolah (100%). Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2025 sudah mencapai target dengan kategori **Baik**.

Pencapaian target Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 sebanyak 10 sekolah adalah bagian dari upaya pencapaian target nasional sebanyak 490 sekolah.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) karena target sekolah hingga akhir periode renstra tidak bersifat kumulatif dan dilaksanakan di lokus intervensi yang berbeda dengan jumlah lokus kabupaten/kota yang berbeda setiap tahunnya sehingga tidak dapat disimpulkan

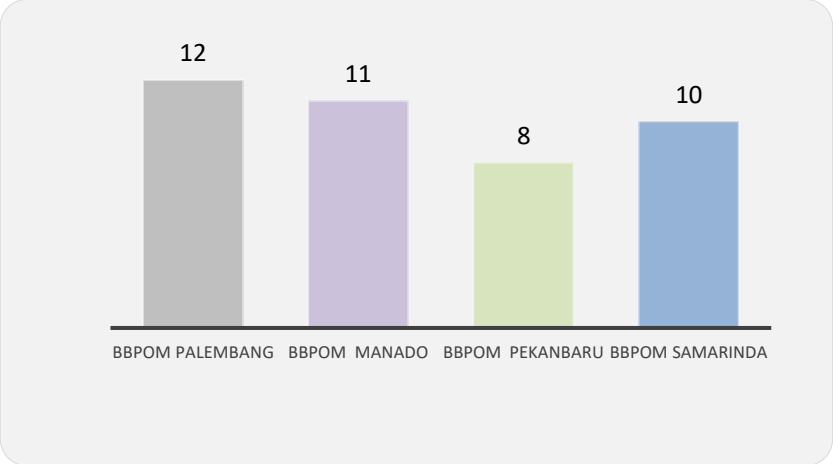
Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Dinas Pendidikan serta pemangku kepentingan terkait dalam mendorong komitmen sekolah terhadap program pembudayaan keamanan pangan. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan sekolah potensial secara lebih komprehensif, peningkatan intensitas advokasi dan pendampingan teknis, serta optimalisasi peran kader keamanan pangan sekolah sebagai agen perubahan. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, intensif, dan berkelanjutan, diharapkan capaian target hingga tahun 2029 dapat terealisasi secara optimal.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.106
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster ...) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
490	Palembang	12	12	100%	Baik
	Manado	11	11	100%	Baik
	Pekanbaru	15	8	53,33%	Kurang
	Samarinda	10	10	100%	Baik

Gambar 3.52
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 yang pada BBPOM di Samarinda, BBPOM di Palembang dan BBPOM di Manado tercapai sesuai target yaitu 100 %, sedangkan BBPOM di Pekanbaru hanya 53,33%. Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target nasional dikarenakan target nasional merupakan target kumulatif dari seluruh UPT BPOM.

Persentase Capaian Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan terhadap target yang ditetapkan masing-masing Balai Besar dalam klaster 4, maka BBPOM di Samarinda memiliki nilai capaian yang sama dengan BBPOM di Palembang dan BBPOM Manado yaitu 100%. Hal ini dikarenakan capaian jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan memenuhi jumlah sekolah sesuai target yang ditetapkan. Balai Besar POM

dalam klaster 4 yang mempunyai target jumlah sekolah yang berbeda-beda BBPOM di Samarinda (10 sekolah), BBPOM di Palembang (12 sekolah), BBPOM di Manado (11 sekolah) namun persen realisasi yang sama. Sedangkan BBPOM di Pekanbaru realisasi 53,33% (target 15 sekolah realisasi 8 sekolah). Target nasional sebesar 490 desa tidak dapat dibandingkan karena target bersifat kumulatif secara nasional.

Setiap tahapan dalam Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan BBPOM di Samarinda tahun 2025 telah selesai 100% sesuai target tahapan program.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dilaksanakan pada tahun 2025 sejak awal tahun dengan mengukur penyelesaian tiap tahapan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 meliputi :

- tahapan advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan Pemerintah dan Lintas sektor di Kota Samarinda
- Sosialisasi Keamanan Pangan secara luring terhadap sekolah full intervensi dan melalui daring terhadap sekolah perluasan cakupan
- tahapan bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah intervensi,
- monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan serta
- pengawalan sekolah yang sudah diintervensi kemanan pangan tahun sebelumnya.

Penetapan Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada tahun 2025 yaitu 10 Sekolah yang diintervensi berada di Kota Samarinda serta pengawalan terhadap 10 sekolah yang telah diintervensi sebelumnya di Tahun 2024 di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Barat.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan di Tahun 2025 telah selesai 100 % yaitu tahapan pre-advokasi, koordinasi dan audiensi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor di Kota Samarinda. Selain itu, juga telah dilakukan penyusunan rencana kerja dan target tahapan Program SAPA Sekolah, Koordinasi internal penetapan dan jumlah target lokus sekolah. Advokasi Lintas Sektor bersama pemerintah Kota Samarinda dilaksanakan di Ruang Rapat Sembuyutan Balai Kota Samarinda pada 29 April 2025. Telah dilaksanakan juga Sosialisasi Keamanan Pangan secara luring melalui ke 10 (sepuluh) sekolah full intervensi yang dilaksanakan secara *back to back* dengan kegiatan Bimbingan Teknik Kader Keamanan Pangan Sekolah pada 15 Mei 2025 bertempat di SMK Negeri 3 Samarinda serta Sosialisasi Keamanan pangan secara daring

melalui zoom meeting ke 33 sekolah yang ada di Kota Samarinda pada 25 Juni 2025. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan kader dilaksanakan melalui melalui media WAG dan secara daring melalui media zoom dan juga kunjungan langsung ke sekolah full intervensi yang ada di Kota Samarinda di sepanjang bulan September 2025. Pengawalan sekolah yang diintervensi di tahun sebelumnya dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting pada 25 November 2025.

Pelaksanaan program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 mengalami simplikasi dan penyederhanaan tahapan jika dibandingkan dengan tahun 2024 karena adanya efisiensi anggaran sehingga dilakukan beberapa penyesuaian terhadap tahapan dan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan unit pengampu di pusat.

Pada Tahun 2025, realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 10 sekolah dari target sebesar 10 sekolah dengan capaian diperoleh sebesar 100,00% dan kriteria Baik. Capaian ini menunjukan pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Keberhasilan ini didukung oleh proses kolaboratif dan berkesinambungan dengan semua pihak yang terlibat, strategi komunikasi dan koordinasi yang intensif, penguatan peran kader keamanan pangan serta pengawalan berkelanjutan terhadap sekolah yang pernah diintervensi sebelumnya.

Pada pelaksanaan kegiatan Intervensi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Triwulan IV Tahun 2025 masih terdapat beberapa beberapa kendala :

- Pelaksanaan kegiatan pengawalan sekolah dalam Program PJAS belum dapat terlaksana sesuai target yang direncanakan karena adanya kegiatan monev terpadu di bulan Oktober untuk mengapresiasi sekolah yg diintervensi dan mengarahkan agar sekolah melakukan pengimbasan dan replikasi
- Keterbatasan partisipasi sekolah yang diundang dalam kegiatan pengawalan serta belum lengkapnya penyampaian data dukung rencana aksi yang telah diimplementasikan oleh beberapa sekolah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang ada adalah dengan melakukan penjadwalan ulang kegiatan pengawalan sekolah

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut kedepannya antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak sekolah serta pemangku kepentingan terkait agar kehadiran sekolah dalam kegiatan pengawalan PJAS lebih optimal.
- Menguatkan pemahaman sekolah mengenai pentingnya kelengkapan data dukung rencana aksi sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan implementasi program PJAS.
- Mengoptimalkan peran pendampingan dan monitoring secara berkala untuk memastikan rencana

aksi PJAS di sekolah berjalan dan terdokumentasi dengan baik.

- Mendorong komitmen pimpinan sekolah dalam mendukung implementasi dan pelaporan program PJAS secara berkelanjutan.

Tabel 3.107
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pelaksanaan kegiatan pengawalan sekolah dalam Program PJAS belum dapat terlaksana sesuai target yang direncanakan karena adanya kegiatan monev terpadu di bulan oktober untuk mengapresiasi sekolah yg diintervensi dan mengarahkan agar sekolah melakukan pengimbasan dan replikasi	Melakukan penjadwalan ulang kegiatan pengawalan sekolah	Melakukan penjadwalan dan melaksanakan kegiatan pengawalan sekolah	November 2025	Y	Infokom 10	Tahapan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target perencanaan
2.		Keterbatasan partisipasi sekolah yang diundang dalam kegiatan pengawalan serta belum lengkapnya penyampaian data dukung rencana aksi yang telah diimplementasikan oleh beberapa sekolah.	1.Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak sekolah serta pemangku kepentingan terkait agar kehadiran sekolah dalam kegiatan pengawalan PJAS lebih optimal. 2. Menguatkan pemahaman sekolah	1.Melakukan penjadwalan dan pemberitahuan kegiatan pengawalan PJAS secara lebih awal disertai konfirmasi kehadiran sekolah. 2. Menyusun dan	1,4TW 4-2026 2,3 TW 2-2026	Y	Infokom 2	Sekolah belum melaksanakan rencana aksi Tim Keamanan Pangan Sekolah (KPS) sesuai perencanaan

			mengenai pentingnya kelengkapan data dukung rencana aksi sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan implementasi program PJAS. 3. Mengoptimalkan peran pendampingan dan monitoring secara berkala untuk memastikan rencana aksi PJAS di sekolah berjalan dan terdokumentasi dengan baik. 4. Mendorong komitmen pimpinan sekolah dalam mendukung implementasi dan pelaporan program PJAS secara berkelanjutan.	mendistribusikan pedoman serta memberikan pendampingan pengisian data dukung rencana aksi PJAS kepada sekolah sasaran. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi rencana aksi PJAS. 4. Memberikan umpan balik kepada sekolah terkait kelengkapan dan kualitas data dukung yang disampaikan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.				

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.108
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun2025		Realisasi Tahun 2025	
QDB.001.051	Koordinasi Lintas Sektor	A	Advokasi/Tahubja/ Koordinasi Linsek				
			- Perjalanan Dinas Biasa	0	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	4	KL	4	KL
QDB.001.052	Intervensi keamanan PJAS	B	Sosialisasi Keamanan Pangan				
			- Snack	0	KL	1	KL
			- Makan	0	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	KL	1	KL
		C	Bimtek Keamanan Pangan				
			- Snack	0	KL	1	KL
			- Makan	0	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	KL	1	KL
		E	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman				
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL

Capaian tahapan kegiatan berhasil dilaksanakan ditunjang oleh beberapa hal yang terkait dengan eksternal dan internal BBPOM di Samarinda. Untuk Aspek Eksternal diantaranya:

1. Koordinasi awal dan komunikasi Aktif dengan Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda serta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sehingga dapat melaksanakan tiap tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan PJAS tahunan.
2. Advokasi lintas sektor bersama pemerintah kota sebagai komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan seluruh tahapan intervensi.
3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada Kader Keamanan Pangan sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTS, dan juga SMA/SMK/MAN.
4. Untuk pelaksanaan tahapan monitoring dan evaluasi kader keamanan pangan sekolah yang ditunjukkan dengan adanya SK Tim Keamanan Pangan Sekolah dan adanya kegiatan intervensi yang dilakukan oleh kader keamanan pangan sekolah ke komunitas sekolah diperlukan komitmen yang tinggi dari sekolah dan kader keamanan sekolah yang telah mengikuti bimbingan teknis sebelumnya
5. Untuk pelaksanaan sertifikasi sekolah telah dikoordinasikan dan dikomunikasikan pelaksanaannya dengan baik terkait dengan indikator-indikator penilaian yang harus dicapai oleh masing-masing sekolah terintervensi.

Sementara dari pihak Internal, upaya yang dilakukan yaitu:

1. Perencanaan yang baik, semenjak awal hingga akhir tahapan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan.
2. Proaktif berkomunikasi aktif dengan pihak stakeholder terutama Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang membawahi sekolah di jenjang SD dan SMP , dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur yang membawahi sekolah di jenjang SMA dan juga Kementerian Agama yang mebawahi sekolah MI/MTS/MA.

Program/Kegiatan intervensi Keamanan Pangan di Sekolah juga dilaksanakan sebagai kegiatan terpadu dengan intervensi terhadap Desa dan Pasar di dKota Samarinda. Hal ini bertujuan untuk tersedianya Pangan

Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi yang merupakan salah satu langkah untuk menuju Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman sebagai gerakan bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan, disamping untuk mengefisiensikan baik dari segi anggaran, maupun dari segi waktu pelaksanaan.
Salah satu sekolah intervensi tahun 2024 yaitu MIN 1 Berau masuk ke tahapan wawancara dan verifikasi lapangan online pada penilaian Lomba Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025 dan mendapat apresiasi sebagai Nominator dalam Lomba Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025.
Balai Besar POM di Samarinda juga mendapat apresiasi sebagai UPT Terbaik Pengelola Kegiatan Sekolah dengan PJAS Aman. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas dedikasi BBPOM Samarinda dalam mendorong sekolah-sekolah membudayakan keamanan pangan, melakukan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan serta membangun kesadaran siswa, guru, dan pengelola kantin untuk menyediakan dan mengonsumsi jajanan yang aman dan bergizi.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.109
Efiensi Anggaran pada Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	21.075.000	21.073.000	99,99	100,00	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran sampai dengan akhir Tahun 2025 kriteria efisien dengan realisasi anggaran sebesar 99,99 % sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya efisien mendukung pencapaian indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

Realisasi ini atas pelaksanaan kegiatan koordinasi awal, preadvokasi dan audiensi, Advokasi lintas sektor yang dilakukan ke stakeholder dan pemerintah Kota Samarinda. Selain itu juga sudah dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan yang telah dilaksanakan di Kota Samarinda secara luring untuk sekolah full intervensi dan secara daring untuk sekolah perluasan cakupan, pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kota Samarinda, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan dan sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman dengan kunjungan langsung ke sekolah di sepanjang bulan September.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan pengukuran jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan dalam tahun 2025 sebagai:

1. Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan salah satu dari 3 (tiga) program prioritas nasional keamanan pangan Badan POM yang dilaksanakan secara massif oleh seluruh

UPT yang ada didaerah. Pencapaian realisasi program di tiap daerah mendukung pencapaian tingkat nasional dimana dengan jumlah sekolah yang telah terintervensi maupun sekolah tersertifikasi PJAS aman merupakan bagian dari upaya BPOM melakukan pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan serta bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029.

2. Laporan kinerja terkait pencapaian tahapan program tahun sebelumnya digunakan sebagai acuan pelaksanaan program pada tahun 2025, dan menjadi masukan sebagai upaya perbaikan dan percepatan penyelesaian setiap tahapan program melalui peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait di daerah terutama dalam pertemuan monitoring dan evaluasi di akhir tahapan program sehingga menjadi dasar acuan bagi pemerintah daerah setempat dalam menentukan rencana aksi program PJAS secara mandiri.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan BBPOM di Samarinda telah mengelola beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja indikator ini yang tertuang pada daftar risiko semester 2 tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- Sekolah belum melaksanakan rencana aksi Tim Keamanan Pangan Sekolah (KPS) sesuai perencanaan
- Tahapan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target perencanaan karena Timeline program kegiatan BPOM dengan program Pemda belum sinkron

Aktivitas pengendalian yang telah dilakukan oleh BBPOM di Samarinda dalam mengurangi dampak risiko yang mungkin akan terjadi dan berdampak terhadap pencapaian target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

- Komunikasi dan koordinasi dalam rangka pengawalan Sekolah dengan PJAS Aman
- Penyampaian rencana kegiatan disampaikan kepada stakeholder segera setelah renlak disusun (Januari pada tahun berjalan)

3. Jumlah desa pangan aman

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda melaksanakan program nasional yaitu Desa Pangan Aman yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, memperkuat ekonomi desa/kelurahan.

Penentuan desa yang akan diintervensi oleh BBPOM di Samarinda berdasarkan target jumlah desa yang ditetapkan oleh pusat yaitu dilaksanakan di Kota Samarinda. Dari total target desa yang diintervensi, BBPOM di Samarinda harus mengintervensi minimal 1 Desa yang masuk kategori Desa *Stunting*.

Adapun tahapan dari Program Desa Pangan ini adalah sebagai berikut :

A. Advokasi Kelembagaan Desa : 25 %
B. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) : 25 %
C. Bimbingan Teknis Komunitas : 20%
D. Monitoring dan Evaluasi : 20%
E. Pengawalan : 10 %

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.53
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah desa pangan aman
Terhadap Target Tahun 2025



Tabel 3.110
Capaian Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman
Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
4	4	100,00	Baik	

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program perecepatan penurunan stunting. Program Desa Pangan Aman ini dapat mendukung pemulihan ekonomi di desa melalui pencapaian target-target pembangunan keberlanjutan di desa. Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan

Aman meliputi tahapan: advokasi, pelatihan kader keamanan pangan desa, bimbingan teknis, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain: desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Progres tahapan pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman sampai dengan Triwulan 4 Tahun 2025 adalah sebesar 100 % yaitu berupa kegiatan Advokasi 25 %, Pelatihan Kader Keamanan Pangan 25%, Bimtek Komunitas 20%, Monitoring dan Evaluasi 20% dan Pegawalan 10 % sehingga total realisasi adalah 100 %. Jika dibandingkan dengan target Triwulan 4 Tahun 2025 maka akan diperoleh capaian sebesar 100 % dengan kriteria **Baik.**

Kegiatan Desa Pangan Aman tahun 2025 dilaksanakan di 4 kelurahan Kota Samarinda yaitu Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Sambutan, Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Lempake. Selain itu kegiatan pengawalan yang mulai dilaksanakan adalah penyebaran informasi keamanan pangan melalui whatsapp group serta mengikutsertakan kader dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) BPOM RI agar pengetahuan kader keamanan pangan tetap terjaga dan meningkat.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Realisasi kinerja dan capaian indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor strategis dan kebijakan yang mempengaruhi struktur perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berjalan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, sehingga indikator *Jumlah Desa Pangan Aman* pada periode ini berada dalam kerangka kebijakan, arah strategi, serta target yang telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan sektoral terbaru. Sebagai awal periode perencanaan, Tahun 2025 menjadi fase penataan ulang (reset baseline) terhadap target, lokus intervensi, pendekatan pembinaan, serta mekanisme pengukuran kinerja. Dengan demikian, capaian pada tahun ini tidak sepenuhnya menggunakan parameter, ruang lingkup, maupun pendekatan yang identik dengan periode Renstra sebelumnya.

Selain itu, pada Tahun 2025 terdapat dinamika kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian alokasi sumber daya, baik dari sisi jumlah kegiatan, cakupan wilayah intervensi, maupun intensitas pendampingan program. Kebijakan efisiensi tersebut mengharuskan dilakukan prioritisasi lokasi

desa, optimalisasi metode pembinaan, serta penyesuaian target yang lebih realistis sesuai kemampuan dukungan anggaran. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi jumlah desa yang dapat diintervensi dan ditetapkan sebagai Desa Pangan Aman pada tahun berjalan.

Perbedaan konteks perencanaan (awal Renstra baru) dan kondisi fiskal (efisiensi anggaran) menyebabkan capaian Tahun 2025 tidak bersifat *apple-to-apple* apabila dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya. Pada periode Renstra sebelumnya, indikator ini dilaksanakan dalam kerangka kebijakan, dukungan anggaran, serta strategi implementasi yang berbeda, sehingga menghasilkan struktur capaian yang tidak sepenuhnya sebanding.

Oleh karena itu, analisis kinerja Tahun 2025 lebih tepat difokuskan pada:

1. Tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029;
2. Efektivitas strategi implementasi pada kondisi keterbatasan anggaran; dan
1. Progres capaian secara bertahap sepanjang tahun berjalan.

Dengan demikian, capaian Tahun 2025 diposisikan sebagai baseline awal periode Renstra 2025–2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar perbandingan untuk evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode perencanaan yang sama.

Target Desa Pangan Aman Tahun 2025 sebesar 4 dengan realisasi sebesar 4 (100%). Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2025 sudah mencapai target dengan kategori Baik.

Pencapaian target desa pangan aman pada tahun 2025 sebanyak 4 desa adalah bagian dari upaya pencapaian target nasional sebanyak 172 desa.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Realisasi Desa Pangan Aman pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) karena target sekolah hingga akhir periode renstra tidak bersifat kumulatif dan dilaksanakan di lokus intervensi yang berbeda dengan jumlah lokus kabupaten/kota yang berbeda setiap tahunnya sehingga tidak dapat disimpulkan.

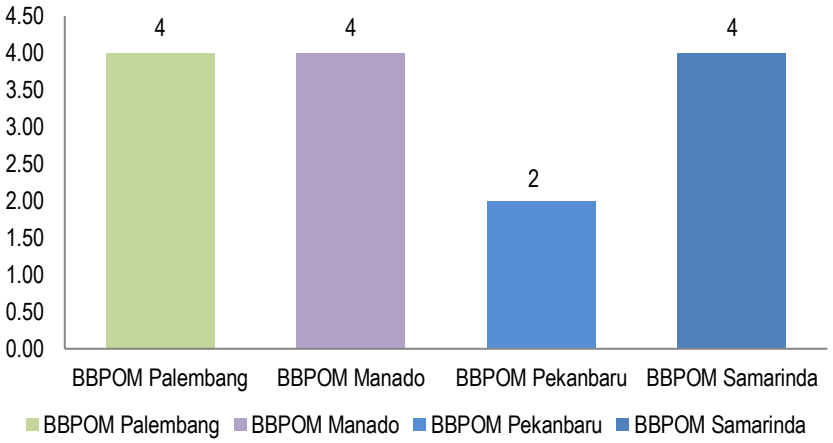
Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam mendorong komitmen Pemda terhadap program Desa Pangan Aman. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan intensitas advokasi dan pendampingan teknis, serta optimalisasi peran kader keamanan pangan sebagai agen perubahan. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, intensif, dan berkelanjutan, diharapkan capaian target hingga tahun 2029 dapat terealisasi secara optimal.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster) dan Target Nasional

Tabel 3.111
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
172	Palembang	4	4	100	Baik
	Manado	4	4	100	Baik
	Pekanbaru	4	2	50	Kurang
	Samarinda	4	4	100	Baik

Gambar 3.54
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Desa Pangan Aman tahun 2025 pada BBPOM di Samarinda, BBPOM di Palembang dan BBPOM di Manado tercapai sesuai target dengan capaian 100 %, sedangkan realisasi BBPOM di Pekanbaru tidak mencapai target dengan capaian 50%. Indikator jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target nasional dikarenakan target nasional merupakan target kumulatif dari seluruh UPT BPOM.

Persentase Capaian Jumlah Desa Pangan Aman terhadap target yang ditetapkan masing-masing Balai Besar dalam klaster 4, BBPOM di Samarinda memiliki nilai capaian yang sama dengan BBPOM di Palembang dan BBPOM di Manado yaitu 100%. Hal ini dikarenakan capaian jumlah desa pangan aman memenuhi jumlah desa sesuai target yang ditetapkan. Balai Besar POM dalam klaster 4 yang mempunyai target jumlah desa yang sama BBPOM di Samarinda (4 desa), BBPOM di Palembang (4 desa), BBPOM di Manado (4 desa). Sedangkan BBPOM di Pekanbaru capaian hanya 50% (target 4 desa realisasi 2 desa). Target nasional sebesar 172 desa tidak dapat dibandingkan karena target bersifat kumulatif secara nasional.

Setiap tahapan dalam Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman BBPOM di Samarinda tahun 2025 telah selesai 100% sesuai target tahapan program.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Target indikator Desa Pangan Aman tahun 2025 adalah 4 desa. Setiap tahapan dalam Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman BBPOM Samarinda tahun 2025 yang meliputi Advokasi, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas Keamanan Pangan Desa, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawalan Desa Pangan Aman yang sudah diintervensi tahun sebelumnya telah selesai 100% sesuai target tahapan program.

Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Advokasi

   Kegiatan ini bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah. Pada awal tahun 2025 telah dilakukan koordinasi, komunikasi internal dan perencaaan kegiatan kepada lintas sektor terkait. Advokasi kegiatan terpadu telah dilaksanakan melalui pertemuan secara luring pada tanggal 29 April 2025 di Kantor Walikota Samarinda.

2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)

   Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan peran aktif masyarakat dalam pengawasan keamanan pangan di tingkat desa, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melaksanakan kegiatan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali kader desa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengenali, mencegah, serta melaporkan potensi risiko pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa dilakukan sebanyak 2 kali. Pelatihan KKPD dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025 di Kekurahan Rawa Makmur dan tanggal 28 Mei 2025 di 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Lempake.

3. Bimbingan Teknis Komunitas

   Bimbingan teknis Komunitas ini memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya keamanan pangan. Melalui kegiatan ini, komunitas desa dibekali pengetahuan dasar terkait cara mengenali produk yang aman dan bermutu, termasuk penerapan metode **Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa)** sebagai langkah sederhana namun efektif dalam memilih produk. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dan membangun budaya masyarakat yang lebih peduli terhadap keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari.

   Melalui Bimtek Komunitas Desa ini, Badan POM berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah desa, kader, dan komunitas setempat dalam mewujudkan desa yang sehat, mandiri, dan sadar keamanan pangan. Keberadaan komunitas desa yang terlatih diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam membangun lingkungan yang aman serta melindungi masyarakat

secara berkelanjutan.

Kegiatan Bimtek Komunitas dilaksanakan di 4 Kelurahan di Samarinda yaitu di Kelurahan Sempaja Utara pada tanggal 30 Juli 2025, Kelurahan Sambutan pada tanggal 5 Agustus 2025, Kelurahan Rawa Makmur pada tanggal 6 Agustus 2025 dan Kelurahan Lempake pada tanggal 7 Agustus 2025.

4. Monitoring dan evaluasi

   Dalam rangka memastikan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Desa Pangan Aman. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penguatan pengawasan pangan berbasis komunitas sekaligus menilai capaian pelaksanaan program di tingkat desa.

   Monev Desa Pangan Aman bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman, keterlibatan, dan komitmen masyarakat desa dalam menerapkan prinsip keamanan pangan di lingkungan sekitar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala, tantangan, serta kebutuhan pendampingan lanjutan agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

   Kegiatan monev terpadu dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025 yang dihadiri oleh semua OPD terkait.

5. Pengawalan

   Dalam rangka memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko pangan yang tidak aman, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melaksanakan kegiatan pengawalan Program Desa Pangan Aman. Kegiatan ini merupakan bentuk pendampingan berkelanjutan kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan desa yang memiliki kesadaran dan kemampuan dalam menjaga keamanan pangan secara mandiri.

Pengawalan Desa Pangan Aman dilakukan melalui pembinaan, edukasi, serta peningkatan kapasitas kader dan komunitas desa. Badan POM memberikan pendampingan agar masyarakat memahami prinsip keamanan pangan, mampu menerapkan perilaku konsumsi yang aman, serta dapat mengenali dan menghindari pangan yang berisiko, seperti pangan kedaluwarsa, rusak, tanpa izin edar, maupun yang diduga mengandung bahan berbahaya.

Kegiatan pengawalan desa yang telah diintervensi dilaksanakan melalui *daring* karena terkait efisiensi anggaran. Kegiatan pengawalan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2025.

Faktor-faktor penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja Jumlah desa pangan aman di Tahun 2025 ini adalah :

1. Intensifnya koordinasi dengan stakeholder terkait perencanaan kegiatan baik Advokasi, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas Keamanan Pangan Desa, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawalan Desa Pangan Aman yang sudah diintervensi tahun sebelumnya sehingga kegiatan berhasil terealisasi.
2. Pemenuhan target Bimtek Komunitas dengan mengoptimalkan pemberdayaan kader keamanan pangan yang ada

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut kedepannya antara lain :

Melaksanakan tahapan program Desa Pangan Aman selanjutnya sesuai dengan rencana pelaksanaan dan target yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan pemberdayaan kader keamanan pangan yang ada.

Keterlibatan Dinas Kesehatan dan OPD terkait lainnya seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas PMPTSP sangat mendukung keberlanjutan dari program desa pangan aman karena sejalan dengan regulasi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dirubah dengan UU No 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada pasal 68 ayat (1) dinyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu";

Pemilihan Komunitas sesuai kriteria terutama komunitas pelaku usaha (Pangan Siap Saji, Retail Pangan, Industri Rumah Tangga Pangan) yang tepat sasaran akan menunjang keberhasilan program desa pangan aman dalam mengimplementasikan keamanan pangan di sarana produksinya

Komitmen Kepala desa/lurah serta Tim Keamanan Pangan Desa dalam melaksanakan rencana aksi keberlanjutan program desa pangan aman pada tahun berikutnya sehingga dapat dilaksanakan secara mandiri

Mendorong OPD dan Pemerintah Desa melakukan replikasi untuk keberlanjutan program desa pangan aman dengan melaksanakan kegiatan secara mandiri dengan mengintegrasikan dengan program pembinaan UMKM serta penyuluhan dan pelatihan di bidang kesehatan, posyandu, program higiene sanitasi makanan, pengawasan post market PIRT, dll.

Upaya untuk Replikasi desa telah dikomunikasikan secara aktif dengan para kader untuk upaya replikasi di desa lainnya dan pada pelaksanaannya kader telah aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Namun dari pihak desa memilik keterbatasan Anggaran Dana Desa dan mindset masyarakat bahwa keamanan pangan hanya fokus digunakan untuk di lingkungan keluarga sendiri, namun belum disadari sebenarnya bisa memberi manfaat mendorong ekonomi masyarakat.

Pada pelaksanaan kegiatan Intervensi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan di Triwulan IV Tahun 2025 masih terdapat beberapa beberapa kendala pelaksanaan program Pengawalan Desa Pangan Aman meliputi keterbatasan partisipasi desa/ kelurahan dalam kegiatan pengawalan desa pangan aman

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut kedepannya antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak desa/kelurahan yang sudah diintervensi serta pemangku kepentingan terkait agar kegiatan pengawalan Desa Pangan Aman lebih optimal.
- Mengoptimalkan peran pendampingan dan monitoring secara berkala untuk memastikan rencana aksi Desa Pangan Aman berjalan dan terdokumentasi dengan baik
- Mendorong komitmen pemangku kepentingan terkait dalam mendukung implementasi dan pelaporan program Desa Pangan Aman secara berkelanjutan. Mendorong komitmen pemangku kepentingan terkait dalam mendukung implementasi dan pelaporan program Desa Pangan Aman secara berkelanjutan.

Tabel 3.112
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Jumlah desa pangan aman	Kendala pelaksanaan program Pengawalan Desa Pangan Aman meliputi keterbatasan partisipasi desa/ kelurahan dalam kegiatan pengawalan desa pangan aman	1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak desa/kelurahan yang sudah diintervensi serta pemangku kepentingan terkait agar kegiatan pengawalan Desa Pangan Aman lebih optimal. 2. Mengoptimalkan peran pendampingan dan monitoring secara berkala untuk memastikan rencana aksi Desa Pangan Aman berjalan dan terdokumentasi dengan baik. 3. Mendorong komitmen pemangku kepentingan terkait dalam mendukung implementasi dan pelaporan program Desa Pangan Aman secara berkelanjutan.	1. Melakukan penjadwalan dan pemberitahuan kegiatan pengawalan Desa Pangan Aman secara lebih awal disertai konfirmasi kehadiran pihak desa/kelurahan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi rencana aksi Desa Pangan Aman 3. Melakukan pendampingan desa/kelurahan yang akan mengikuti lomba Desa Pangan Aman 2026	1. TW 4-2026 2. TW 4-2026 3. TW 2-2026	Y	-Infokom 1 - Infokom 20	- Kader yang ditunjuk tidak berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan - Stakeholder yang terkait tidak berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.113
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Jumlah desa pangan aman

Kode	Kegiatan	Subkegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025

Kode	Kegiatan		Subkegiatan	Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QDB.002.051	Perkuatan kapasitas desa	A	Advokasi Kegiatan Terpadu				
			- Penggandaan/ Pencetakan/ Pelaporan/ Spanduk	10	PKT	10	PKT
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL
QDB.002.052	Pemberdayaan komunitas desa	A	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa				
			- Snack	1	KL	2	KL
			- Makan	1	KL	2	KL
			- Honor Output Kegiatan	0	BLN	3	BLN
		B	Bimtek Komunitas Desa				
			- Snack	1	KL	1	KL
			- Makan	1	KL	1	KL
			- Honor Narasumber di tingkat desa	13	KL	13	KL
			- Honor Narasumber di DK	8	KL	8	KL
QDB.002.054	Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A	Monitoring dan Evaluasi Desa Pangan Aman Tahun 2025				
			- Pengadaan bahan kegiatan	15	PKT	15	PKT
			- Pengadaan Pigura	16	PKT	16	PKT
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL
		C	Advokasi/ Tahubja/ Koordinas Linsek				
			- Perjalanan Dinas Biasa	5	KL	5	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL
		D	Mobling Hari Raya Keagamaan				
			- Pembelian Sampel	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	3	KL	3	KL

Program Desa Pangan Aman pada tahun 2025 telah mencapai target sebesar 100%. Hingga akhir tahun 2025, progres program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan adalah Advokasi, Pelatihan kader keamanan pangan desa, Bimtek Komunitas Keamanan Pangan Desa di Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Sambutan, Kelurahan Sempaja Utara dan Kelurahan Lempake, Monev Terpadu dan Pengawalan desa yang sudah diintervensi tahun sebelumnya.. RO QDB.002 Desa Pangan Aman merupakan salah satu output yang anggarannya dilakukan Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 untuk itu dalam upaya pencapaian kinerja nya berkolaborasi dengan kegiatan dari fungsi penindakan dan fungsi inspeksi. Pelaksanaan Advokasi/Tahubja/ Koordinasi Linsek bersinergi dengan komponen Pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan (wasmalitrik) di fungsi penindakan. Pelaksanaan Bimtek Komunitas Desa bersinergi dengan Bimtek Komunitas dalam rangka Pengawasan Pangan di fungsi inspeksi.

Komunitas yang diintervensi pada program ini yaitu IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.

Program/Kegiatan intervensi Keamanan Pangan di Desa dilaksanakan sebagai kegiatan terpadu dengan intervensi terhadap Sekolah dan Pasar di dua Kota yaitu Kota Samarinda. Hal ini bertujuan untuk

tersedianya Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi yang merupakan salah satu langkah untuk menuju Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman sebagai gerakan bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan, disamping untuk mengefisiensikan baik dari segi anggaran, maupun dari segi waktu pelaksanaan.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.114
Efiensi Anggaran pada Indikator Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah desa pangan aman	72.556.000	72.533.655	99,97	100,00	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran sampai akhir Tahun 2025 adalah **efisien** dimana realisasi anggaran telah tercapai sebesar 99,97 % dengan tingkat efisiensi 100,00 yaitu dari target anggaran sebesar Rp. 72.556.000 terealisasi sebesar Rp. 72.533.655 sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya efisien dalam mendukung pencapaian indikator Jumlah desa pangan aman

Realisasi ini atas pelaksanaan kegiatan koordinasi awal , audiensi , serta advokasi lintas sektor yang dilakukan ke lintas sektor dan pemerintah Kota Samarinda. Selain itu juga sudah dilaksanakan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Komunitas dan Monev Terpadu di 4 kelurahan intervensi yaitu Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Lempake. Pada Triwulan 4 juga sudah dilakukan revisi anggaran dalam rangka penyesuaian terhadap tahapan pelaksaan program Desa Pangan aman serta adanya efisiensi anggaran

Percepatan peningkatan realisasi anggaran tiap tahapan program sehingga tercapai keseimbangan antara realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja didukung karena adanya monitoring dan evaluasi di setiap tahapan program diperlukan untuk dapat menyelesaikan target sesuai timeline yang telah ditetapkan.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan untuk penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja, pemanfaatan informasi yang telah dilakukan adalah:

- Program desa pangan aman merupakan salah satu dari 3 (tiga) program prioritas nasional keamanan pangan Badan POM yang dilaksanakan secara massif oleh seluruh UPT yang ada didaerah. Pencapaian realisasi program di tiap daerah mendukung pencapaian tingkat nasional dimana dengan desa pangan aman yang telah terintervensi merupakan bagian dari upaya BPOM melakukan

pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan serta bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029.

- Laporan kinerja terkait pencapaian tahapan program tahun sebelumnya digunakan sebagai acuan pelaksanaan program pada tahun 2025, dan menjadi masukan sebagai upaya perbaikan dan percepatan penyelesaian setiap tahapan program melalui peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait di daerah terutama dalam pertemuan monitoring dan evaluasi di akhir tahapan program sehingga menjadi dasar acuan bagi pemerintah daerah setempat dalam menentukan rencana aksi program Desa Pangan Aman secara mandiri kedepannya.
- Program Desa Pangan Aman dengan salah satu target diintervensi adalah desa stunting menjadikan kegiatan yang dilaksanakan erat berkaitan dengan upaya penurunan stunting di wilayah Kalimantan Timur, laporan kinerja yang tersaji digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah setempat dalam mempercepat pencapaian target nasional dalam penurunan stunting sebesar 18,8% di Tahun 2025.
- Penyesuaian melalui revisi anggaran sebagai upaya optimalisasi dalam pencapaian Program Desa Pangan Aman

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan BBPOM di Samarinda telah mengelola beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja indikator ini yang tertuang pada daftar risiko semester 2 tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- Kader yang ditunjuk tidak berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan
- Stakeholder yang terkait tidak berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan
- Tahapan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target perencanaan karena Timeline program kegiatan BPOM dengan program Pemda belum sinkron
- Komunitas yang diundang tidak tepat sasaran karena Kurangnya pemahaman dan komitmen Tim KPD dalam menentukan Komunitas

Aktivitas pengendalian yang telah dilakukan oleh BBPOM di Samarinda dalam mengurangi dampak risiko yang mungkin akan terjadi dan berdampak terhadap pencapaian target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

- Petugas Balai mendampingi kader dalam melaksanakan kegiatan yang juga menjadi tanggung jawab kader
- Petugas Balai mendampingi stakeholder terkait dalam melaksanakan kegiatan yang juga menjadi tanggung jawab kabupaten/kota

- Penyampaian rencana kegiatan disampaikan kepada stakeholder segera setelah renlak disusun (Januari pada tahun berjalan)
- Petugas Balai mendampingi Tim KPD saat menentukan Komunitas yang akan diundang

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar.

a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, Pengawasan dan monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.
d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.
f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat.
g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

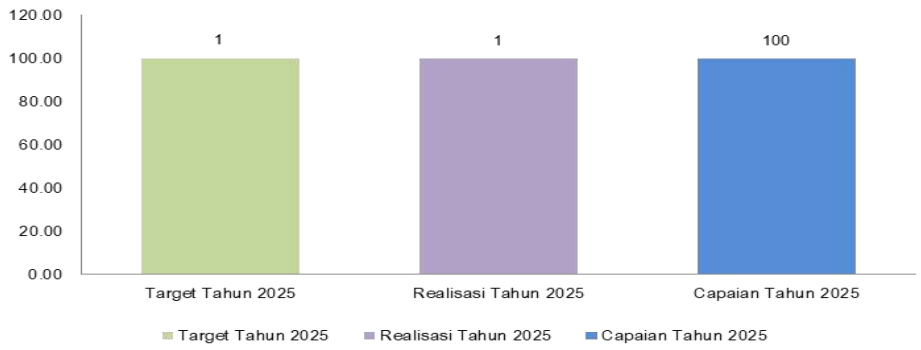
Pada periode Renstra 2025-2029, adanya dinamika kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025 disikapi BPOM dengan melakukan perubahan pengukuran melalui simplifikasi atau pengintegrasian kegiatan. BBPOM di Samarinda menyikapi hal tersebut dengan melalukan pengajukan perubahan lokus pelaksanaan kegiatan ke Kota Samarinda dari sebelumnya Kabupaten Mahakam Ulu menyesuaikan anggaran yang tersedia. Pelaksanaan program pasar ini disinergikan dengan program desa dan sekolah dengan tujuan agar pelaksanaan program desa, pasar dan sekolah terpadu di setiap kab/kota sehingga dapat membentuk kab/kota pangan aman. Penentuan pasar yang diintervensi oleh BBPOM di Samarinda tahun 2025 berdasarkan target jumlah pasar yang ditetapkan oleh pusat dilaksanakan di Kota Samarinda.

Adapun tahapan dari Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Kegiatan Terpadu 25%
2. Bimtek Petugas Pengelola Pasar dan Penyuluhan Komunitas Pasar 25%
3. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar 20%
4. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev 20%
5. Pengawalan 10%

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.55
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Terhadap Target Tahun 2025



Tabel 3.115
Capaian Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
1	1	100	Baik	

Realisasi Kinerja Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 sebesar 1 jumlah pasar dari target sebesar 1 pasar sehingga diperoleh capaian sebesar 100 %. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi sesuai target tahun 2025 yang ditetapkan dengan kriteria **Baik**.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi. Capaian tahapan program pasar aman dari bahan berbahaya di Tahun 2025 sesuai target yang ditetapkan yaitu 100%, dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Realisasi kinerja dan capaian indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor strategis dan kebijakan yang mempengaruhi struktur perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berjalan.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, sehingga indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada periode ini berada dalam kerangka kebijakan, arah strategi, serta target yang telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan sektoral terbaru. Sebagai awal periode perencanaan, Tahun 2025 menjadi fase penataan ulang (reset baseline) terhadap target, lokus intervensi, pendekatan pembinaan, serta mekanisme pengukuran kinerja. Dengan demikian, capaian pada tahun ini tidak sepenuhnya menggunakan parameter, ruang lingkup, maupun pendekatan yang identik dengan periode Renstra sebelumnya.

Selain itu, pada Tahun 2025 terdapat dinamika kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penyesuaian alokasi sumber daya, baik dari sisi jumlah kegiatan, cakupan wilayah intervensi, maupun intensitas pendampingan program. Kebijakan efisiensi tersebut mengharuskan dilakukan prioritisasi lokasi pasar, optimalisasi metode pembinaan, serta penyesuaian target yang lebih realistis sesuai kemampuan dukungan anggaran. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi jumlah pasar yang dapat diintervensi dan

ditetapkan sebagai pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun berjalan.

Perbedaan konteks perencanaan (awal Renstra baru) dan kondisi fiskal (efisiensi anggaran) menyebabkan capaian Tahun 2025 tidak bersifat *apple-to-apple* apabila dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya. Pada periode Renstra sebelumnya, indikator ini dilaksanakan dalam kerangka kebijakan, dukungan anggaran, serta strategi implementasi yang berbeda, sehingga menghasilkan struktur capaian yang tidak sepenuhnya sebanding.

Oleh karena itu, analisis kinerja Tahun 2025 lebih tepat difokuskan pada:

- Tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029;
- Efektivitas strategi implementasi pada kondisi keterbatasan anggaran; dan
- Progres capaian secara bertahap sepanjang tahun berjalan.

Dengan demikian, capaian Tahun 2025 diposisikan sebagai baseline awal periode Renstra 2025–2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar perbandingan untuk evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode perencanaan yang sama.

Target Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 sebesar 1 dengan realisasi sebesar 1 (capaian 100%). Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2025 sudah mencapai target dengan kategori **Baik**.

Pencapaian target pasar pangan aman pada tahun 2025 sebanyak 1 pasar adalah bagian dari upaya pencapaian target Nasional sebanyak 73 pasar.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra) karena target hingga akhir periode renstra tidak bersifat kumulatif dan dilaksanakan di lokus intervensi yang berbeda dengan jumlah lokus kabupaten/kota yang berbeda setiap tahunnya sehingga tidak dapat disimpulkan.

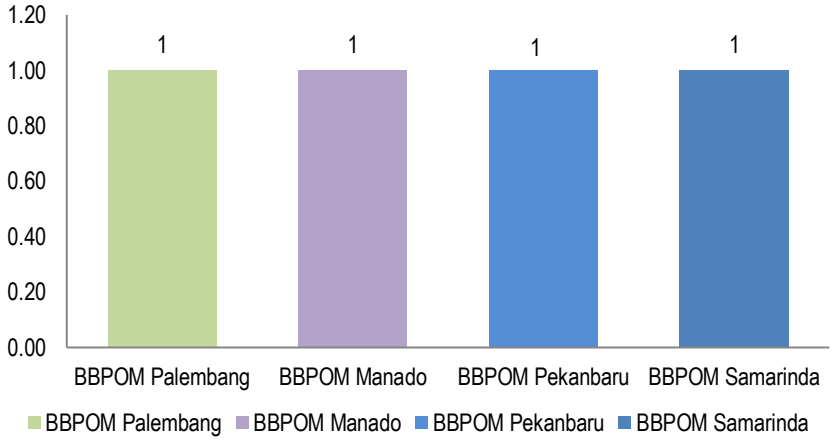
Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam mendorong komitmen Pemda terhadap program pasar pangan aman berbasis komunitas. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan intensitas advokasi dan pendampingan teknis, serta optimalisasi peran kader keamanan pangan sebagai agen perubahan. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, intensif, dan berkelanjutan, diharapkan capaian target hingga tahun 2029 dapat terealisasi secara optimal.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.116
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster ...) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
73	Samarinda	1	1	100	Baik
	Palembang	1	1	100	Baik
	Manado	1	1	100	Baik
	Pekanbaru	1	1	100	Baik

Gambar 3.56
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Realisasi persentase Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dalam Balai Besar POM Klaster 4 telah mencapai target tahun 2025 dengan capaian sebesar 100%, dimana target BBPOM di Samarinda (1 pasar),BBPOM di Palembang (1 pasar), BBPOM Manado (1 pasar) dan BBPOM di Pekanbaru (1 pasar) .

Target nasional sebesar 73 pasar tidak dapat dibandingkan karena target bersifat kumulatif secara nasional. Setiap tahapan dalam Program Prioritas Nasional Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas BBPOM di Samarinda tahun 2025 telah selesai 100% sesuai target tahapan program.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana masyarakat sebagai konsumen memperoleh

makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methani Yellow) dan Rhodamin B di pasar rakyat. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat harus menerapkan keamanan pangan dalam setiap aktifitasnya, aman dari bahan berbahaya, dan harus disiplin dalam menerapkan protokol Kesehatan

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan satu Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan total target pasar yang dintervensi tahun 2025 sebesar 1 pasar dan 2 pasar pengawalan intervensi sebelumnya

Progres tahapan pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Triwulan 4 tahun 2025 adalah 100 % dari tahapan yang direncanakan dalam arti terselesaikan sesuai dengan tahapan progress yang telah ditetapkan.

Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Advokasi

   Kegiatan ini bertujuan menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah. Pada awal tahun 2025 telah dilakukan koordinasi, komunikasi internal dan perencaaan kegiatan kepada lintas sektor terkait. Advokasi kegiatan terpadu telah dilaksanakan melalui pertemuan secara luring pada tanggal 29 April 2025 di Kantor Walikota Samarinda.

2. Bimtek Petugas Pengelola Pasar dan Penyuluhan Komunitas Pasar

   BBPOM di Samarinda melakukan kegiatan Bimbingan Teknis terhadap petugas pengelola pasar dalam rangka pengawasan bahan berbahaya guna mendukung program pasar aman berbasis komunitas. Dalam rangka meningkatkan kesadaran pedagang di pasar tentang Keamanan Pangan, maka perlu dilakukan bimtek terhadap petugas pasar yang nantinya akan melakukan pengawasan dan penyuluhan terhadap pedagang di pasar. Dalam Bimtek Keamanan Pangan Terhadap Petugas Pasar, dijelaskan terkait prinsip sanitasi dan hyiegine dalam penyediaan makanan. Dengan mengenal prinsip sanitasi dan hyiegine, diharapkan makanan yang disajikan dalam keadaan yang layak konsumsi dan terhindar dari cemaran mikroba.

   Dengan demikian, Pengawasan oleh petugas pasar dan kesadaran pedagang akan pentingnya keamanan

pangan maka diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat diminimalisir. Bimtek telah dilaksanakan di Pasar Baqa pada tanggal 22 Mei 2025 dan dengan melibatkan petugas pasar, Dinas Perdagangan dan PD . Pasar yang membawahi pasar intervensi.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan, maka dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran pangan yang diindikasikan mengandung bahan berbahaya di pasar tradisional dapat diminimalisir.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran komunitas pasar tentang pentingnya keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan kampanye kepada komunitas pasar, tidak hanya kepada pedagang tapi juga ke masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan pengetahuan sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya. Meningkatnya kesadaran tentang keamanan pangan akan menurunkan permintaan konsumen terhadap pangan yang mengandung bahan berbahaya.

Telah terlaksana Penyuluhan Keamanan Pangan di Pasar Baqa Samarinda pada tanggal 25 Mei 2025.

3. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar

Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha pangan terhadap pentingnya keamanan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program pemerintah serta memperkuat peran Badan POM dalam mewujudkan pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi bagi masyarakat.

Sosialisasi ini menyasar para pedagang pasar, pengelola kios, distributor bahan pangan, hingga pengurus pasar tradisional. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan materi mengenai prinsip dasar keamanan pangan, potensi bahaya kontaminasi pangan (biologis, kimia, dan fisik), cara penanganan dan penyimpanan pangan yang baik, serta pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Narasumber juga menjelaskan regulasi dan standar keamanan pangan yang berlaku sesuai kebijakan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab, sehingga para pedagang dapat menyampaikan kendala yang dihadapi dalam praktik sehari-hari. Pendekatan partisipatif ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif bahwa keamanan pangan bukan hanya

tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pelaku usaha dan masyarakat.

Melalui sosialisasi ini, komunitas pasar diharapkan mampu menerapkan praktik penanganan pangan yang lebih higienis, memahami pentingnya label dan izin edar, serta berkomitmen untuk tidak menjual produk yang berisiko bagi kesehatan konsumen. Dengan demikian, pasar tradisional dapat menjadi ruang transaksi yang tidak hanya terjangkau dan ramah masyarakat, tetapi juga aman dan terpercaya.

Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar di Pasar Baqa dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2025.

4. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev

Badan POM terus memperkuat upaya perlindungan masyarakat melalui pengawasan keamanan pangan, khususnya pada pangan yang beredar di sarana distribusi dan pasar tradisional yang bertujuan meningkatkan kemandirian komunitas pasar dalam menerapkan praktik keamanan pangan secara berkelanjutan.

Dalam kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan PPABK, Badan POM menerapkan pendekatan edukatif dan pengawasan berbasis partisipasi komunitas. Salah satu metode yang digunakan adalah **Cek KLIK**, yaitu **Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa**, sebagai cara sederhana namun efektif untuk memastikan pangan yang diperdagangkan aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan.

Melalui metode Cek KLIK, petugas bersama komunitas pasar melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kemasan pangan, kebenaran informasi pada label, keberadaan nomor izin edar (BPOM/MD/ML/PIRT sesuai ketentuan), serta masa kedaluwarsa produk. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi pedagang dan pengelola pasar agar lebih teliti dalam memilih produk yang dijual, serta meningkatkan kesadaran konsumen untuk menjadi lebih cerdas dalam berbelanja pangan.

Dengan adanya pengawasan keamanan pangan PPABK secara rutin, Badan POM berkomitmen untuk mewujudkan pasar yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat, serta mendukung terwujudnya pangan aman sebagai bagian dari peningkatan kualitas kesehatan.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) merupakan salah satu langkah strategis Badan POM dalam memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan. Kegiatan ini memberikan manfaat penting dalam memperkuat pengawasan keamanan pangan di pasar, sekaligus meningkatkan peran aktif komunitas pasar dalam menjaga mutu dan keamanan pangan yang beredar.

Melalui monev terpadu, Badan POM dapat memperoleh gambaran nyata terkait tingkat kepatuhan pedagang dan pengelola pasar terhadap prinsip keamanan pangan, termasuk penerapan higiene sanitasi, pengelolaan pangan yang baik, serta penerapan edukasi Cek KLIK kepada masyarakat. Selain itu, monev

terpadu juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan secara lebih cepat, sehingga dapat disusun tindak lanjut yang tepat sasaran, baik dalam bentuk pembinaan, pendampingan, maupun penguatan kapasitas komunitas pasar.

Manfaat lainnya adalah meningkatnya sinergi lintas sektor dan lintas program dalam mendukung pasar yang lebih aman, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Kegiatan ini turut memperkuat kolaborasi antara Badan POM, pemerintah daerah, pengelola pasar, pedagang, dan kader keamanan pangan dalam membangun budaya keamanan pangan berbasis komunitas.

Dengan demikian, monev terpadu PPABK tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi program, tetapi juga menjadi upaya nyata dalam mendorong kemandirian pasar untuk menerapkan keamanan pangan secara konsisten, sehingga masyarakat memperoleh akses pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi.

Kegiatan monev terpadu PPABK dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025 yang dihadiri oleh semua OPD terkait.

5. Pengawalan Pasar

   Kegiatan pengawalan bertujuan untuk melihat konsistensi pasar-pasar dalam penerapan praktek Keamanan Pangan. Hingga Tahun 2025 BBPOM di Samarinda telah melaksanakan Intervensi terhadap 2 Pasar (Pasar Sanggam Adjie Dilayas Kabupaten Berau dan Pasar Baru Olah Bebaya Melak Kabupaten Kutai Barat). Pengawalan kepada pasar yang telah diintervensi dilaksanakan melalui *daring* karena terkait efisiensi anggaran. Kegiatan pengawalan PPABK dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025.

   Pengawalan ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh rangkaian program berjalan sesuai tujuan, serta mampu meningkatkan kesadaran dan kemandirian komunitas pasar dalam menerapkan budaya keamanan pangan.

   Selain itu, pengawalan PPABK juga mendorong sinergi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, guna memperkuat dukungan kebijakan dan peran komunitas dalam menciptakan pasar yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Dengan pengawalan yang konsisten, program PPABK diharapkan mampu menjadi model penguatan keamanan pangan berbasis komunitas yang berkelanjutan, serta memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat sebagai konsumen.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2025 ini adalah :

- Intensifnya koordinasi dengan stakeholder terkait perencanaan kegiatan baik Advokasi, Bimtek kepada petugas pengelola pasar dan penyuluhan kepada komunitas pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar, Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev serta pengawalan pasar pangan aman berbasis komunitas sehingga kegiatan berhasil terealisasi.

- Kompetensi SDM di Fungsi Infokom yang memadai baik pengalaman maupun kompetensi untuk menunjang keberhasil kegiatan.

Meskipun indikator kinerjaa telah tercapai, namun terdapat kendala pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Kompetensi (PPABK) meliputi keterbatasan partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan pengawalan Pasar Pangan Aman Berbasis Kompetensi (PPABK)

Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan capaian kinerja sasaran tersebut kedepannya antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak pasar yang sudah diintervensi serta pemangku kepentingan terkait agar kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Kompetensi (PPABK) lebih optimal
- Mengoptimalkan peran pendampingan dan monitoring secara berkala untuk memastikan rencana aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Kompetensi (PPABK) berjalan dan terdokumentasi dengan baik.
- Mendorong komitmen pemangku kepentingan terkait dalam mendukung implementasi dan pelaporan program Pasar Pangan Aman Berbasis Kompetensi (PPABK) secara berkelanjutan..

Tabel 3.117
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Kendala pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Kompetensi (PPABK) meliputi keterbatasan partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan pengawalan Pasar Pangan Aman Berbasis Kompetensi (PPABK)	1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak pasar yang sudah diintervensi serta pemangku kepentingan terkait agar kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Kompetensi (PPABK) lebih optimal. 2. Mengoptimalkan peran pendampingan dan monitoring secara berkala untuk memastikan rencana aksi Pasar Pangan Aman Berbasis Kompetensi (PPABK) berjalan dan terdokumentasi dengan	1. Melakukan penjadwalan dan pemberitahuan kegiatan pengawalan Pasar Pangan Aman Berbasis Kompetensi (PPABK) secara lebih awal disertai konfirmasi kehadiran pihak pasar. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi rencana aksi Pangan Aman Berbasis Kompetensi (PPABK) 3. Melakukan pendampingan	1. TW 4-2026 2. TW 4-2026 3. TW 2-2026	Y	Infokom 3 Infokom 20	-Pelaporan atau pengawasan terhadap produk pangan minim -Stakeholder yang terkait tidak berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			baik. 3. Mendorong komitmen pemangku kepentingan terkait dalam mendukung implementasi dan pelaporan program Pasar Pangan Aman Berbasis Kompetensi (PPABK) secara berkelanjutan.	pasar yang akan mengikuti lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Kompetensi (PPABK) tahun 2026				

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.118
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QDB.003.051	Perkuatan lintas sektor	A	Survey Pasar Aman				
			3. Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL
		C	Advokasi/Tahubja/Koordinasi Linsek				
			4. Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL
			5. Perjalanan Dinas Biasa	1	KL	1	KL
QDB.003.052	Pengadaan peralatan pendukung	A	Pengadaan Rapid test kit dan bahan KIE				
			- Belanja Reagen Rapid Test Kit	1	PKT	1	PKT
			- Belanja Reagen Rapid Test Kit Mikrobiologi	1	PKT	1	PKT
QDB.003.053	Sosialisasi/ penyuluhan/ pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A	Bimtek kepada Petugas Pengawas Pasar dan Fasilitator Keamanan Pangan				
			6. Makan	0	KL	1	KL
		B	Penyuluhan kepada Komunitas Pasar				
			7. Snack	1	KL	1	KL
			8. Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL
		C	KIE Obat dan Makanan				
			9. Gimmick	1	PKT	1	PKT
QDB.003.054	Pemantauan dan evaluasi	A	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya				
			10. Honor Petugas Pasar yang diintervensi	1	KL	1	KL
			11. Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	KL	1	KL

Capaian tahapan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan beberapa hal yang terkait eksternal dan internal BBPOM di Samarinda. Aspek Eksternal diantaranya:

1. Dukungan dari stakeholder, terutama dari Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang memberikan dukungan dan respon yang positif dan aktif terhadap koordinasi dan komunikasi sehingga capaian target tiap tahapan program dapat terlaksana dengan baik
2. Pengawalan pasar yang telah diintervensi tahun 2024 melalui komunikasi, sinergi dan keberlanjutan program agar sehingga menjamin keamanan pangan yang ada di pasar.

Sementara dari pihak Internal, upaya yang dilakukan yaitu:

1. Perencanaan yang baik, semenjak awal hingga akhir tahapan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan
2. Komunikasi aktif dengan pihak stakeholder terutama Dinas Perindag serta PD Pasar sehingga tahapan program dapat terlaksana dengan baik dan sesuai target progress yang harus dicapai.

Program intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan sebagai kegiatan terpadu dengan intervensi terhadap desa dan sekolah di Kota Samarinda. Hal ini bertujuan untuk Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi yang merupakan salah satu langkah untuk menuju Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman sebagai gerakan bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan disamping untuk untuk mengefisiensikan baik dari segi anggaran, maupun dari segi waktu pelaksanaan.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.119
Efiensi Anggaran pada Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	23.918.000	23.916.100	99,99	100,00	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dengan kriteria **efisien** dimana realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar 99,99% dengan tingkat efisiensi 100,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 202 telah sepenuhnya efisien mendukung pencapaian indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**.** Sejak tahun 2020 pelaksanaan kegiatan intervensi program nasional keamanan pangan yaitu desa pangan aman, pasar aman berbasis komunitas dan juga pangan jajanan anak usia sekolah aman dilaksanakan pada lokus yang sama, hal ini sangat berpengaruh terhadap penggunaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.

Percepatan peningkatan realisasi anggaran tiap tahapan program sehingga tercapai keseimbangan antara realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja didukung karena adanya monitoring dan evaluasi di setiap tahapan program diperlukan untuk dapat menyelesaikan target sesuai timeline yang telah ditetapkan.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan pengukuran pasar aman berbasis komunitas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan sebagai:

1. Program pasar aman berbasis komunitas merupakan salah satu dari 3 (tiga) program prioritas nasional keamanan pangan Badan POM yang dilaksanakan secara massif oleh seluruh UPT yang ada didaerah. Pencapaian realisasi program di tiap daerah mendukung pencapaian tingkat nasional dimana dengan desa pangan aman yang telah terintervensi merupakan bagian dari upaya BPOM melakukan pemberdayaan masyarakat dan komunitas pasar dalam meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan serta bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

2. Laporan kinerja terkait pencapaian tahapan program sebelumnya digunakan sebagai acuan pelaksanaan program pada tahun 2025 sebagai masukan dan upaya perbaikan dan percepatan penyelesaian setiap tahapan program melalui peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait di daerah terutama dalam pertemuan monitoring dan evaluasi di akhir tahapan program sehingga menjadi dasar acuan bagi Pemerintah Daerah setempat dalam menentukan rencana aksi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas secara mandiri kedepannya.

3. Penyesuaian melalui revisi anggaran sebagai upaya optimalisasi dalam pencapaian Program Pasar Aman Berbasis Komunitas

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan BBPOM di Samarinda telah mengelola beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja indikator ini yang tertuang pada daftar risiko semester 2 tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- Pelaporan atau pengawasan terhadap produk pangan minim
- Tahapan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target perencanaan karena Timeline program kegiatan BPOM dengan program Pemda belum sinkron
- Tujuan Inovasi Kampus Gerbang SIPaman tidak tercapai

Aktivitas pengendalian yang telah dilakukan oleh BBPOM di Samarinda dalam mengurangi dampak risiko yang mungkin akan terjadi dan berdampak terhadap pencapaian target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kampanye, edukasi, dan penyuluhan kepada pedagang oleh petugas pasar
- Penyampaian rencana kegiatan disampaikan kepada stakeholder segera setelah renlak disusun (Januari

pada tahun berjalan)

- Sosialisasi Inovasi Kampus Gerbang SiPaman di Kegiatan Penyuluhan Komunitas Pasar.

SK 4

MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke 4 pada tahun 2025 diukur dengan 1 (satu) **Indikator Kinerja Utama (IKU).** Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 3.120
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 Terhadap Target Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Katgeori	Notifikasi Warna
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.96	15,96	100,00	Baik	
Capaian Sasaran Kegiatan				**100,00**	**Baik**	

Tabel di atas menggambarkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan ke 5 tahun 2025 yang diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan . Pada tabel tersebut, capaian realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan 100,00 %. Balai Besar POM di Samarinda memperoleh Capaian Sasaran Strategis (NSS) sebesar 100,00 % dengan kriteria **Baik**

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Balai Besar POM di Samarinda dalam Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda terhadap target tahun 2025 telah tercapai dengan kategori **Baik**.

Indikator kinerja sasaran kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan**

Ruang Lingkup UMKM: UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Untuk UMKM OBA:

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Perhitungan target tahunan (B12):

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB +Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

Perhitungan target B1 - B11:

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

Contoh: UPT A memiliki target 5 UMKM di tahun berjalan, maka cara perhitungan target bulanannya = (% Progress UMKM A + % Progress UMK B + ... + % Progress UMKM E) / 5

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA

Frekuensi Target

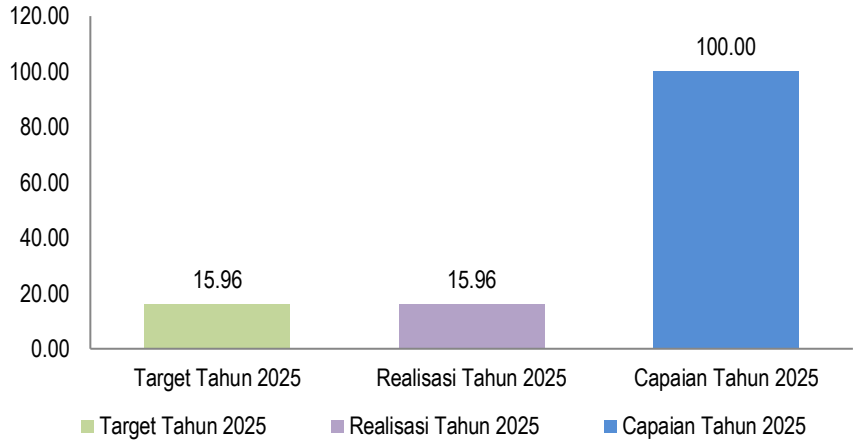
- Diisi mulai dari B01-B12.
- Target bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditas di bulan tersebut.
- B12 merupakan target indikator

Frekuensi Realisasi

- Diisi mulai dari B01-B12
- Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditas di bulan tersebut
- Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.57
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025



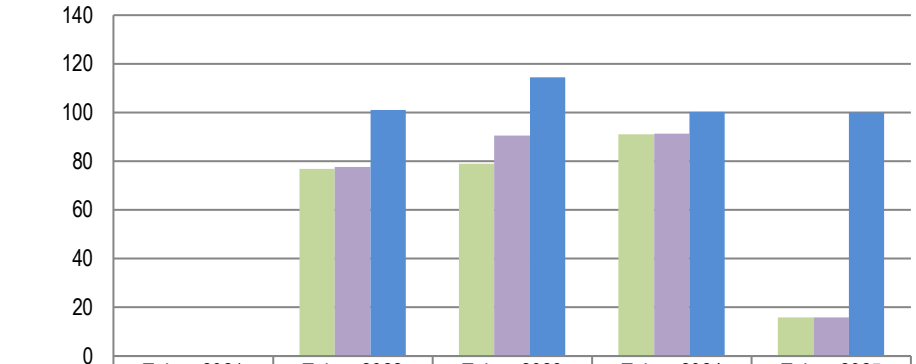
Tabel 3.121
Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
15,96	15,96	100,00	Baik	

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada tahun 2025 sebesar 15,96 % dengan capaian sebesar 100.00 % dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Gambar 3.58
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2021-2025



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	0	77.00	79.00	91.00	15.96
Realisasi	0	77.78	90.48	91.23	15.96
Capaian	0	101.01	114.53	100.25	100.00

Sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, terdapat peningkatan target dan realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. tahun 2022 - 2024, persentase capaian indikator tersebut masuk dalam kategori **Sangat Baik**, dan untuk tahun 2025 masuk kategori **Baik**. Capaian ini tidak terlepas dari upaya pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, termasuk percepatan melalui inovasi Seksi Sertifikasi Jemput Bola (Si Jebol), yang mendorong peningkatan kepatuhan dan pemenuhan standar oleh pelaku UMKM.

Realisasi tahun 2025 indikator kinerja ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena dipengaruhi oleh adanya perubahan metode perhitungan capaian yang diterapkan pada tahun 2025 sehingga menghasilkan nilai persentase yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang mana Jumlah UMKM yang memperoleh IP CPPOB, rekomendasi CPOTB dan SPA CPKB dibagi jumlah target UMKM Pangan Olahan, OBA dan Kosmetik yang didampingi selama periode renstra 2025-2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.122
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
96,81	15,96	16,49	Perlu Upaya Keras	

Tahun 2025 adalah awal dari periode Renstra 2025-2029 Balai Besar POM di Samarinda, dengan capaian 16,49 % yang masih jauh dari target akhir periode Renstra sebesar 96,81 % hal ini disebabkan karena perhitungan realisasi menggunakan pembagi jumlah target UMKM Pangan Olahan, OBA dan Kosmetik yang didampingi selama periode renstra 2025-2029, sehingga masih jauh dari target tahun 2029 dan kategori **Perlu Upaya Keras,** untuk mencapai target akhir periode Renstra perlu upaya yang konsisten terhadap target setiap tahun nya sehingga target di akhir periode Renstra dapat tercapai.

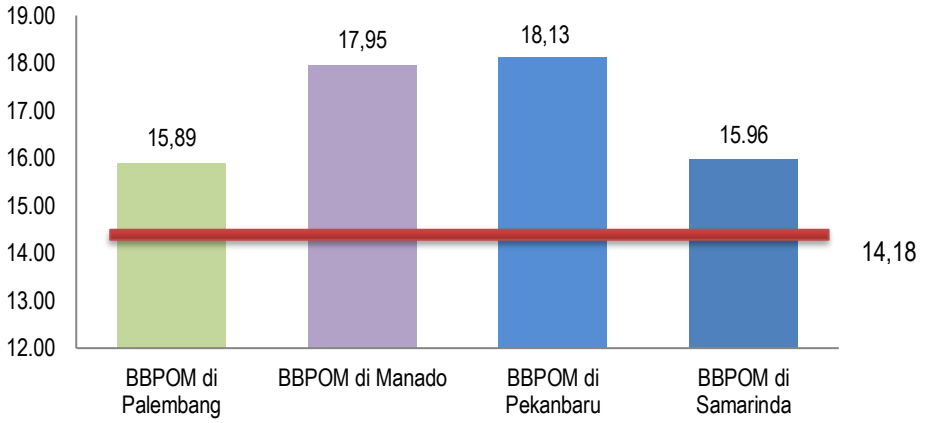
d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.123
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
14,18	BBPOM di Palembang	13,79	15,89	115,23	Tidak dapat disimpulkan
	BBPOM di Manado	17,95	17,95	100,00	Baik
	BBPOM di Pekanbaru	13,99	18,13	129,59	Tidak dapat disimpulkan
	BBPOM di Samarinda	15,96	15,96	100,00	Baik

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan tahun 2025 tertinggi adalah BBPOM di Palembang dan BBPOM di Pekanbaru melebihi 110,00 % dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan**, sedangkan BBPOM di Manado dan BBPOM di Samarinda dengan kategori **Baik.**

Gambar 3.59
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 5) dan Target Nasional



Berdasarkan Gambar di atas, Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan tahun 2025 yang tertinggi adalah BBPOM di Pekanbaru dan yang terendah adalah BBPOM di Palembang. Jika dibandingkan terhadap target nasional maka dapat dilihat BBPOM di Palembang, BBPOM di Manado, BBPOM di Pekanbaru dan BBPOM di Samarinda sudah melampaui target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada tahun 2025, diperoleh capaian progress tahapan sebesar 100 %. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

Pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik dilakukan sesuai timeline pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan berbagai upaya. Diawali dengan penerimaan pendaftaran calon peserta pendampingan pada bulan Februari. Selanjutnya dilakukan Sosialisasi Izin Edar, bimbingan teknis dan pendampingan, meliputi layanan konsultasi denah bangunan produksi, desk konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait pemenuhan dokumen, desk konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan, serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi yaitu https://ereg-rba.pom.go.id/ untuk pangan olahan, https://asrot.pom.go.id/asrot/ untuk obat bahan alam dan https://registrasi.pom.go.id/ untuk kosmetik.

Dengan dilaksanakan bimbingan teknis, pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan pemenuhan dokumen persyaratan dan ketentuan terkait sarana produksi pangan, obat bahan alam dan kosmetik menjadi meningkat. Selain itu bimbingan teknis yang disertai pendampingan intensif sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat segera memenuhi persyaratan secara tepat dan lengkap sehingga proses perolehan izin edar dapat berjalan

lebih cepat dan optimal.

Balai Besar POM di Samarinda melakukan pendampingan secara optimal baik secara langsung dengan melakukan pendampingan di sarana produksi, pelaku usaha berkunjung langsung ke kantor BBPOM di Samarinda atau melalui media zoom meeting untuk penyiapan dokumen. Pendampingan ini bertujuan membantu pelaku UMKM yang mengalami keterbatasan perangkat teknologi agar tetap dapat menyiapkan dokumen secara lengkap hingga melakukan pengajuan melalui sistem sertifikasi dan registrasi.

Balai Besar POM di Samarinda telah bersinergi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota untuk memudahkan pelaku usaha dalam proses terkait NIB, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten/Kota terkait pembuatan NPWP dan/atau pembaruan status NPWP serta membantu permasalahan administratif maupun teknis yang banyak dialami oleh pelaku usaha yang meliputi ketidakpahaman terhadap proses penerbitan atau pembaruan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi versi *Risk Based Approach* (RBA), ketidaktahuan proses penambahan dan/atau perbaikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau NPWP berstatus KSWP tidak valid.

Balai Besar POM di Samarinda telah bersinergi dengan asosiasi profesi untuk membantu pelaku UMKM terkait penanggung jawab teknis yang sesuai ketentuan serta keterbatasan pemahaman terhadap teknologi proses produksi yang tepat..

Komitmen yang tinggi oleh pelaku UMKM yang dalam memenuhi persyaratan meskipun dengan keterbatasan sarana, belum memiliki fasilitas perangkat teknologi seperti komputer atau laptop untuk mendukung penyusunan dokumen. .

Kendala yang dihadapi di triwulan IV ini adalah sebagai berikut :

- Kecenderungan penurunan jumlah UMKM yang secara proaktif mengajukan pendampingan Izin Edar ke Layanan Seksi Sertifikasi Jemput Bola (Si Jebol).
- Sistem di website oss.go.id mengalami perubahan yang menyebabkan beberapa UMKM kesulitan dalam menambah KBLI karena wilayahnya belum diupdate RTRWnya sehingga otomatis tidak bisa melanjutkan pengajuan sertifikasi untuk UMKM yang menjadi target awal pendampingan karena tidak bisa memilih PB-UMKU

Untuk itu telah dilakukan upaya-upaya perbaikan di triwulan IV sebagai berikut :

- Memaksimalkan Sosialisasi Izin Edar dan Tahapan Pendampingan UMKM ke pelaku usaha di wilayah Kalimantan Timur
- Menyiapkan rencana target umkm cadangan agar target pendampingan umkm terpenuhi

Tabel 3.124
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Kecenderungan penurunan jumlah UMKM yang proaktif mengajukan pendampingan Izin Edar ke layanan Si Jebol	Memaksimalkan Sosialisasi Izin Edar dan Tahapan Pendampingan UMKM ke pelaku usaha di wilayah Kalimantan Timur	Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Izin Edar BPOM Kabupaten Kutai Barat pada awal bulan Desember 2025 yang dilanjutkan dengan proses pendampingan secara on the spot	TW 4 2025	Y	Pemeriksaan 27	Pelaku usaha tidak menerima informasi sesuai kebutuhan mereka karena Pelaku usaha tersebar di seluruh kabupaten /kota
2		Sistem di website oss.go.id mengalami perubahan yang menyebabkan beberapa UMKM kesulitan dalam menambah KBLI karena wilayahnya belum diupdate RTRWnya sehingga otomatis tidak bisa melanjutkan pengajuan sertifikasi untuk UMKM yang menjadi target awal pendampingan karena tidak bisa memilih PB-UMKU	Menyiapkan rencana target umkm cadangan agar target pendampingan umkm terpenuhi.	Fasilitator mendampingi UMKM alternatif secara intensif agar capaian pendampingan terpenuhi	Desember 2025	Y	Pemeriksaan 29	Tahapan pendampingan UMKM tidak sesuai target

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.125
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QDG.001.051	Advokasi dan Pendampingan UMKM	A	Pemeriksaan Sarana Produksi dalam rangka Pendampingan UMKM				

			- Komunikasi - Perjalanan Dinas Biasa - Perjalanan Dinas Dalam Kota	5 4 6	KL KL KL	5 4 6	KL KL KL

Target pendampingan UMKM Balai Besar POM di Samarinda adalah 16 UMKM yang terdiri dari 12 UMK Pangan Olahan, 1 UMKM Obat Bahan Alam, dan 3 UMKM Kosmetik. Balai Besar POM di Samarinda membuka pendaftaran pendampingan melalui media sosial dan jejaring lintas sektor sehingga banyak pelaku usaha mendaftar secara mandiri maupun diusulkan oleh lintas sektor. Balai Besar POM di Samarinda juga tidak menutup pendaftaran tersebut sepanjang tahun 2025, sehingga dimungkinkan ada penambahan jumlah UMKM yang didampingi hingga akhir tahun 2025.

Dalam rangka pendampingan UMKM, BBPOM di Samarinda memiliki inovasi Si Jebol (Seksi Sertifikasi Jemput Bola), JJS (Jumat Jumpa Si Jebol) dan BTS (Boleh Tanya Si Jebol) untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan ijin edar produknya. Pada tahun 2025, inovasi Si Jebol berhasil meraih Top 24 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Badan POM. SI Jebol juga masuk menjadi Finalis TOP Inovasi KIPP Tahun 2025 Kelompok Replikasi yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB. Perluasan inovasi SI Jebol juga dilakukan untuk menjamin kebermanfaatan program ini dan dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat yaitu dengan program SI Jebol Goes to Kukar dan Si Jebol Goes to Kelurahan. Selain itu, terdapat pula program Badan POM yaitu NUANSA untuk UMKM Obat Bahan Alam yang naik tahap CPOTB dan AKSELERASI Maturity untuk UMKM kosmetik yang berproses Sertifikasi CPKB. Kegiatan tersebut bersinergi dengan inovasi Balai Besar POM di Samarinda.

Pendampingan intensif dilakukan oleh Balai Besar POM di Samarinda, dengan memanfaatkan teknologi terutama fasilitas Zoom Meeting melalui Program JJS (Jumat Jumpa SI Jebol) untuk pendampingan pelaku usaha dalam menyelesaikan kendala dalam pendaftaran maupun pembuatan dokumen administratif. Intensifikasi program JJS, juga sebagai alternatif karena adanya efisiensi anggaran yang dilakukan Badan POM, sehingga pendampingan secara langsung (*onsite*) jumlahnya terbatas karena dampak efisiensi.

Kolaborasi dengan fungsi pemeriksaan sangat membantu tercapainya capaian kinerja dengan diselenggarakannya "September Ceria: UMKM Berdaya, Produk Kaltim Mendunia" di bulan September, dengan salah satu agenda nya melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait Izin Edar BPOM.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.126
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	19.202.000	19.200.700	99,99	100,00	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya anggaran telah efisien karena capaian indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan di tahun 2025. Dapat disimpulkan bila anggaran 2025 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

Selain itu pencapaian indikator kinerja BBPOM di Samarinda juga didukung oleh sumber daya manusia yangtersedia, personil yang terlibat terus berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui bimbingan teknis, sosialisasi, konsultasi secara langsung pelaku usaha yang datang ke kantor BBPOM di Samarinda, dan didukung pula oleh sarana prasarana yang tersedia seperti tempat layanan publik yang nyaman dan memenuhi standar pelayanan publik, media yang disediakan oleh BBPOM di Samarinda (nomor whatsapp, email, media social) serta hadir dalam Mall Pelayanan Publik kota Samarinda dan kabupaten Kutai Kartanegara.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi dalam laporan kinerja dilakukan beberapa penyesuaian strategi/kebijakan sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan capaian kerja, yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi tindak lanjut yang dilakukan secara rutin sepanjang tahun 2025 juga dilakukan sehingga memberikan dampak terhadap capaian UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.
2. Fasilitator aktif menjalin komunikasi dengan petugas direktorat terkait apabila ada keluhan atau masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dan memerlukan intervensi dari pusat, termasuk memfasilitasi konsultasi melalui zoom dengan evaluator pusat apabila pelaku usaha menemui kendala dalam memenuhi persyaratan dalam proses registrasi.

3. Sosialisasi Inovasi Si Jebol dengan dalam peningkatan layanan pendampingan agar UMKM didampingi sesuai standar dan penambahan unsur peningkatan an pengembangan inovasi seperti BTS, JJS dan Si Jebol berbasis komunitas serta meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dengan lintas sektor terkait pembinaan dan pendampingan UMKM seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, CSR Perusahaan dan Rumah BUMN

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dari BBPOM di Samarinda telah mengelola beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja indikator ini yang tertuang pada daftar risiko semester 2 tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- Produk belum didaftarkan hingga habis masa berlaku sertifikat pengujian karena Pelaku usaha tidak memiliki komitmen dalam penyelesaian segera izin edar
- Pelaku usaha UMK AMDK tidak memiliki peralatan laboratorium ataupun rancangan kegiatan untuk pemenuhan persyaratan pengujian rutin
- Pemberian gratifikasi oleh pelaku usaha karena mengharapkan kemudahan proses atau Pelaku usaha ingin mengenalkan produk mereka
- Pelaku usaha yang mendapat pendampingan tidak tepat
- Pelaku usaha tidak menerima informasi yang dibutuhkan secara komprehensif
- Sarana produksi memerlukan waktu yang lama untuk memenuhi standar karena Kemampuan pelaku usaha terbatas dalam membuat SOP
- Sarana produksi membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan penanggung jawab
- Bimbingan CAPA bagi pelaku usaha belum dilakukan secara efektif dan efisien
- Pelaku usaha tidak menerima informasi sesuai kebutuhan mereka karena Pelaku usaha tersebar di seluruh kabupaten/kota
- Pelaku usaha tidak menerima informasi sesuai kebutuhan mereka karena Sosialisasi Izin Edar belum mencakup seluruh kab/kota
- Tahapan pendampingan UMKM tidak sesuai target karena Kurangnya pemantauan tahapan pemenuhan standar pelaku usaha

Aktivitas pengendalian yang telah dilakukan oleh BBPOM di Samarinda dalam mengurangi dampak risiko yang mungkin akan terjadi dan berdampak terhadap pencapaian target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

- Penandatangan komitmen pelaksanaan pendampingan UMKM

- Menuangkan standar kelengkapan alat laboratorium dan pengujian AMDK pada pendampingan UMKM produksi AMDK
- Pakta integritas pegawai, Penyampaian penolakan gratifikasi pada pembukaan kegiatan, Penyampaian WBS pada kegiatan dan Penyampaian gratifikasi berupa makanan ke panti asuhan
- Penetapan kriteria UMKM yang mendapatkan pendampingan
- Membuat inovasi BTS (Boleh Tanya Si Jebol) sebagai sumber informasi oleh petugas layanan publik
- Melakukan bimbingan pembuatan SOP pada pelaku usaha dan mendorong keterlibatan tenaga teknis kefarmasian untuk terlibat dalam penyelesaikan CAPA
- Menyampaikan kebutuhan TTK untuk UMK kepada Dinas Kesehatan dan organisasi profesi IAI dan PAFI
- Memberikan pembinaan dan bimbingan CAPA melalui media zoom meeting
- Membuat inovasi JJS (Jumat Jumpa Si Jebol) melalui zoom meeting untuk mempermudah layanan
- Melakukan sosialisasi izin edar di kab/kota secara bertahap
- Penetapan fasilitator penanggung jawab per UMKM

SK 5

TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke 5 pada tahun 2025 diukur dari 1 (satu) indikator yang **merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)**, yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda. Dari perhitungan 1 (satu) indikator tersebut, sampai dengan terselesaikannya pelaksanaan kinerja pada tahun 2025 diperoleh realisasi sebesar 100.00% terhadap target Tahun 2025 sebesar 92.50%, maka didapat capaian sebesar 108.11% dengan kriteria Sangat Baik. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.2 :

Tabel 3.127
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5 Terhadap Target Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda	92.50	100.00	108.11	Sangat Baik	
Capaian Sasaran Kegiatan				**108.11**	**Sangat Baik**	

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan oleh petugas dengan kompetensi dan kewenangannya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang khusus (*lex specialis)* yang menjadi kewenangannya untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah Balai Besar POM di Samarinda.

Tahapan Penyidikan antara lain : (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yaitu suatu kegiatan pemberitahuan kepada jaksa penuntut umum secara tertulis bahwa telah dimulainya sebuah penyidikan;

(b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu penyerahan berkas

berkara yang telah disusun untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti kelengkapan aspek materil maupun formil serta termasuk penyerahan perbaikan berkas atas petunjuk yang diberikan oleh Jaksa Peneliti melalui P-18 dan petunjuk perbaikan melalui P-19; (c) P-21 adalah suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisikan bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap dan diajukan ke proses peradilan selanjutnya; dan (d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum), yaitu kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

a. SPDP sebesar 15% = Nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara];
b. Tahap I sebesar 40% = Nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara];
c. P21 sebesar 30% = Nilai C [(c+d) / jumlah perkara]; dan
d. Tahap II sebesar 15% = Nilai D (d / jumlah perkara)

Indikator kinerja sasaran kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda

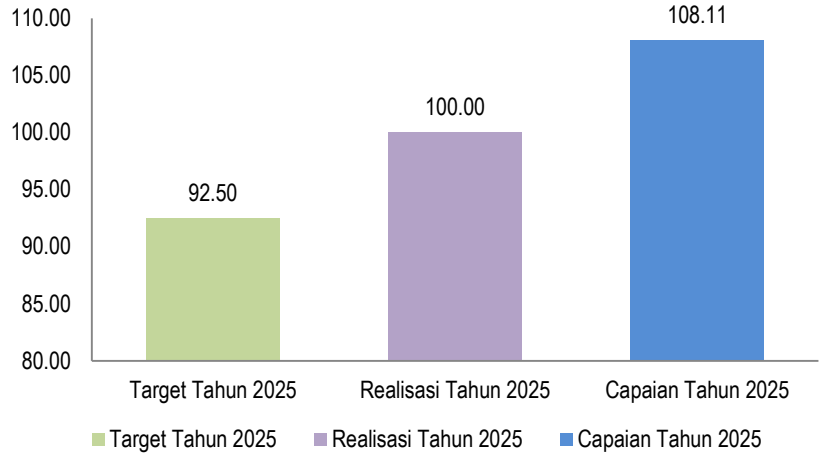
Balai Besar POM di Samarinda sampai pada selesainya kinerja Tahun 2025 telah melakukan penindakan kejahatan obat dan makanan sebanyak 5 (lima) perkara dari target perkara tahun 2025 sebanyak 5 (lima) perkara. Adapun rincian realisasi kinerja penindakan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.128
Capaian Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Tahapan Penyidikan	Jumlah Perkara yang sampai pada tiap tahapan s.d TW III	Perkara Carry Over	Target Perkara Tahun 2025
SPDP	5	-	5
Tahap I	5	-	
P-21	5	-	
Tahap II	5	-	

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.60
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025



Tabel 3.129
Capaian Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
92.50	100.00	108.11	Sangat Baik	

Pada gambar di atas, target Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda tahun 2025 sebesar 92.50% dengan realisasi tahun 2025 sebesar 100.00%, maka diperoleh Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda sebesar 108.11% dengan kategori "**Sangat Baik"**. Keberhasilan ini merupakan hasil yang didapat setelah melaksanakan rekomendasi dan tindak lanjut pada evaluasi rutin atas kendala yang dialami.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan telah ada sejak periode Renstra 2019-2024, namun pada tahun 2025 terdapat perubahan Defenisi Operasioanl pada Manual IKU dimana cara perhitungan Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3, sehingga indikator ini tidak

dapat dibandingkan dengan tahun periode sebelumnya.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, sehingga indikator pada periode ini berada dalam kerangka kebijakan, arah strategi, serta target yang telah disesuaikan dengan kebijakan sektoral terbaru. Sebagai awal periode perencanaan, Tahun 2025 menjadi fase penataan ulang (*reset baseline*) terhadap target serta mekanisme pengukuran kinerja.

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda berhasil menyelesaikan perkara hingga Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan) sebanyak 5 perkara dari target 5 perkara. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 108.11%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan telah dilaksanakan secara optimal dan konsisten dalam memenuhi target yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.130
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
98	100,00	102,04	Tercapai/ melampaui	

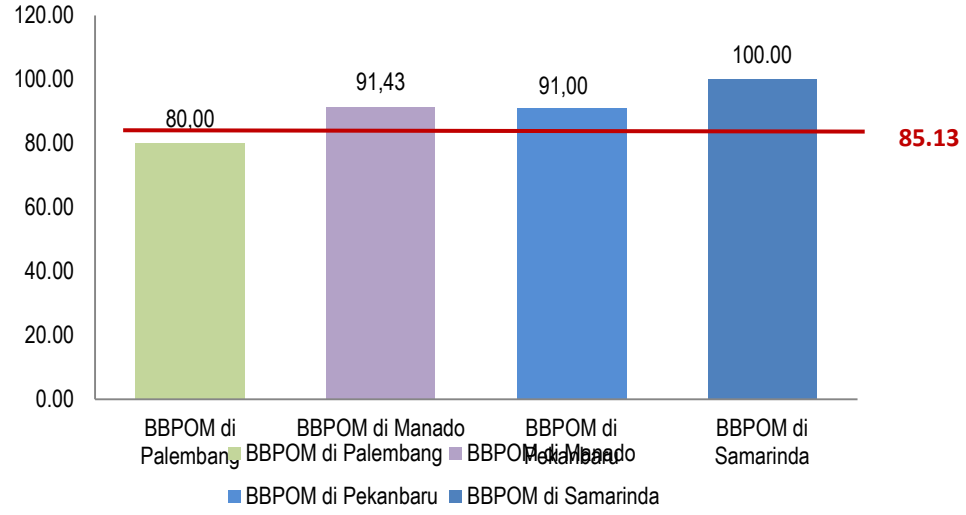
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode renstra), realisasi tahun 2025 telah mencapai target akhri periode Renstra. Target Renstra Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda tahun 2029 sebesar 98% dengan realisasi tahun 2025 sebesar 100.00%, maka diperoleh Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda sebesar 102.04% dengan kategori "**Tercapai/melampaui"**, hal ini menunjukkan bahwa target akhir periode Renstra diasumsikan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.131
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
85,13	BBPOM di Palembang	74,00	80,00	108,11	Sangat Baik
	BBPOM di Manado	93,00	91,43	98,31	Baik
	BBPOM di Pekanbaru	80,00	91,00	113,75	Tidak Dapat Disimpulkan
	BBPOM di Samarinda	92,50	100,00	108,11	Sangat Baik

Gambar 3.61
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan tahun 2025, realisasi BBPOM di Samarinda tertinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Manado, dan BBPOM di Palembang. Sementara itu, BBPOM di Palembang realisasi terendah pada klaster 4. Jika dilihat dari capaian target nasional, maka BBPOM di Samarinda, BBPOM di Pekanbaru dan BBPOM di Manado telah melampaui target nasional sebesar 85,13%, sedangkan BBPOM di Palembang belum dapat melampaui target nasional karenat realisasi hanya sebesar 80 %.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Faktor pendukung keberhasilan capaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan

Farmasi dan Pangan Olahan di UPT di tahun 2025 adalah :

- Pembentukan jejaring informasi yang berkelanjutan tentang kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur;
- Pada tahun 2025, fungsi penindakan secara aktif melakukan pengelolaan risiko di fungsi penindakan dalam rangka menilai dan mengantisipasi risiko yang timbul selama berjalan. Seluruh staf penindakan melakukan identifikasi risiko dan dibuat dalam daftar risiko yang memuat uraian peristiwa dan penyebab risiko. Selanjutnya dilakukan pengendalian risiko yang meliputi tindakan mitigasi hingga memperoleh tingkat risiko mitigasi yang rendah atau dapat dikendalikan yang tidak menghambat dalam capaian persentase keberhasilan di fungsi penindakan. Indikator keberhasilan manajemen risiko adalah dengan tercapainya keberhasilan penindakan pada Tahun 2025; dan
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dalam melaksanakan Koordinasi Criminal Justice System (CJS) terutama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari sejak sebelum operasi penindakan sampai proses penyidikan berlangsung untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam beracara yang dapat berakibat terhambatnya proses penyelesaian perkara serta gugatan balik yang memiliki implementasi hukum.
- Pelaksanaan operasi intelijen dan operasi penindakan dilakukan secara rahasia, terencana, dan terkoordinasi sehingga meminimalisir kebocoran informasi serta mendukung keberhasilan penindakan.
- Penguatan koordinasi dalam kerangka Criminal Justice System (CJS), khususnya dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), turut mendukung kelancaran proses penyelesaian perkara hingga Tahap II.
- Kolaborasi lintas fungsi dan penguatan pengawasan internal telah berkontribusi dalam menjaga integritas, keamanan barang bukti, serta keberhasilan proses penindakan.

Dalam menjalani proses pencapaian sasaran kegiatan terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda terdapat beberapa kendala di Triwulan 4 antara lain :

- Belum mempunyai satu persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam penanganan perkara obat dan makanan
- Aplikasi Dashboard Penindakan yang menjadi sarana untuk melaporkan informasi hasil kegiatan tupoksi penindakan mengalami masalah karena adanya serangan siber, sehingga menyulitkan dalam pelaporan kegiatan penyidikan dan intelijen
- Pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kalimantan Timur masih memerlukan penguatan dukungan dan kerjasama antar fungsi terkait, dengan fungsi pemeriksaan dan fungsi infokom.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan di triwulan IV untuk mengatasi kendala dan meningkatkan pencapaian sasaran kegiatan terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda adalah sebagai berikut :

- peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara obat dan makanan antar aparat penegak hukum dengan Membuat kegiatan bertema forum awasi sebagai bentu criminal justice system dalam kegiatan koordinasi cegah tangkal dan perkuatan sinergi criminal justice system dalam mengatasi kejahatan obat dan dan makanan
- Berkoordinasi dengan pusat terkait pelaporan kegiatan penyidikan dan intelijen yang dilakukan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan selanjutnya untuk meningkatkan pencapaian sasaran kegiatan terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda adalah penyampaian rekomendasi hasil analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kalimantan Timur tahun 2025 kepada fungsi terkait secara terstruktur untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut penindakan

Tabel 3.132
Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Belum mempunyai satu persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam penanganan perkara obat dan makanan	Perlunya peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara obat dan makanan antar aparat penegak hukum	Membuat kegiatan bertema forum awasi sebagai bentu criminal justice system dalam kegiatan koordinasi cegah tangkal dan perkuatan sinergi criminal justice system dalam mengatasi kejahatan obat dan makanan	November 2025	T	-	-
2.		Aplikasi Dashboard Penindakan yang menjadi sarana untuk melaporkan informasi hasil kegiatan tupoksi penindakan mengalami	Berkoordinasi dengan pusat terkait pelaporan kegiatan penyidikan dan intelijen yang dilakukan melalui ADP	Mengantisipasi dengan melakukan pelaporan secara manual melalui aplikasi Srikandi ke Direktorat Intelijen dan Direktorat Penyidikan, sembari menunggu	Desember 2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		masalah karena adanya serangan siber, sehingga menyulitkan dalam pelaporan kegiatan penyidikan dan intelijen		arahan dari pusat				
3.		Pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kalimantan Timur masih memerlukan penguatan dukungan dan kerjasama antar fungsi terkait, khususnya dengan fungsi pemeriksaan dan fungsi infokom.	Perlu dilakukan penyampaian rekomendasi hasil analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kalimantan Timur tahun 2025 kepada fungsi terkait secara terstruktur untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut penindakan.	Melaksanakan FGD penyampaian rekomendasi hasil analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kalimantan Timur tahun 2025 serta penyusunan rencana aksi tindak lanjut oleh masing-masing fungsi terkait.	Maret 2026	T	-	-

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.133
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
QCD.U37.051	Operasi Intelijen	B	Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan				
			- Canva Account	1	PKT	1	PKT
			- Get Contact	8	PKT	8	PKT
			- Pembelian Sampel	2	KL	2	KL
			- Pembelian Perlengkapan Operasi Intelijen	2	KL	2	KL
			- Komunikasi	3	KL	3	KL

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
			- Biaya Akses Informasi	2	KL	5	KL
			- Test Kit	0	KL	1	KL
			- Sewa Kendaraan	32	KL	32	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	6	TR	4	TR
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	4	TR	3	TR
QCD.U37.054	Operasi Penindakan	A	Operasi Penindakan				
			- Sewa Kendaraan	10	KL	10	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	6	TR	4	TR
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	7	TR	5	TR
QCD.U37.055	Pemberkasan	A	Pemberkasan				
			- Penggandaan	5	KL	5	KL
			- Biaya PNBP Penerbitan KTP PPNS	1	PKT	1	PKT
			- Pengadaan ATK	10	KL	10	KL
			- Honor Keterangan Ahli	5	KL	5	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	8	TR	5	TR
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	7	TR	7	TR
		B	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara				
			- Honor Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	19	KL	19	KL
		C	Gelar Perkara				
			- Snack	5	KL	5	KL
			- Makan	5	KL	5	KL
		D	Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum				
			- Bantuan Hukum	5	KL	5	KL
		E	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti				
			- Perjalanan Dinas Biasa	5	TR	5	TR
QCD.U37.056	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A	Pelaksanaan Wasmalitrik melalui Joint Intelligence Operation				
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	TR	1	TR
		B	Pertemuan Penggalangan Stake Holder dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan				
			- Makan	4	KL	4	KL
			- Snack	4	KL	4	KL
			- Poster/Perlengkapan Seminar/Stampel	3	KL	3	KL
			- Atribut/ KTA Saka POM	4	PKT	4	PKT
			- Honorarium Narasumber Eksternal	3	KL	3	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	8	TR	8	TR
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	3	TR	3	TR
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2	TR	2	TR

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
		C	In House Training Penguatan Analisis Data dan Informasi, Penelusuran dan Tindak Lanjut Pengawasan Berbasis Risiko OBA Mengandung BKO				
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	TR	2	TR
		D	Advokasi Terpadu Lintas Sektor				
			- Snack	1	KL	1	KL
			- Honor Output Kegiatan	1	KL	1	KL
			- Honorarium Narasumber Eksternal	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Biasa	0	TR	2	TR
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	TR	1	TR
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	TR	1	TR
		E	Peningkatan kapasitas dan efektivitas pengawasan serta penindakan peredaran obat dan makanan di wilayah Kalimantan Timur				
			- Biaya Penyelenggaraan	0	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	KL	1	KL
			- Honor Narasumber Eksternal	1	KL	1	KL
		F	Pengujian Barang Bukti dalam rangka Perkuatan Pembuktian Tindak Pidana				
			- Reagensia/Media Mikrobiologi	0	KL	1	KL
		G	Perkuatan Saka POM Kota Bontang melalui Peran Saka Nasional dalam Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan				
			- Perlengkapan/ Plakat Peran Saka	1	PKT	1	PKT
			- Biaya Kontribusi Kegiatan	2	PKT	2	PKT
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	TR	1	TR
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1	TR	1	TR
		H	Koordinasi Internal Kelembagaan				
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	TR	1	TR
		I	Sharing Knowledge terkait Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Kupang Dan Balai POM di Balikpapan				

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	TR	1	TR
		J	Forum AWASI				
			- Honorarium Narasumber Eksternal Eselon III / yang disetarakan	1	KL	1	KL
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	TR	1	TR
		K	Forum Komunikasi Inteligen				
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	TR	1	TR
		L	Sharing Knowledge terkait Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Manado				
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	TR	1	TR
		M	Kegiatan Penindakan dan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan				
			- Pembelian Sampel/ Spanduk/ Perlengkapan	1	PKT	1	PKT
			- Makan Siang	1	KL	1	KL
			- Snack	1	KL	1	KL
			- Sewa Perlengkapan	1	PKT	1	PKT
			- Perjalanan Dinas Biasa	1	TR	1	TR
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	TR	1	TR

Salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja adalah pelaksanaan operasi intelijen dan operasi penindakan yang dilakukan secara rahasia, terencana, dan terkoordinasi sehingga dapat meminimalisir potensi kebocoran informasi. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara optimal guna mendukung keberhasilan proses penindakan.

Pada fungsi penindakan tahun 2025 juga telah diterapkan manajemen risiko dalam rangka meningkatkan keberhasilan penindakan. Identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh pegawai pada fungsi penindakan. Daftar risiko memuat uraian peristiwa risiko beserta penyebabnya. Selanjutnya, dilakukan pengendalian risiko melalui tindakan mitigasi yang terukur hingga diperoleh tingkat risiko residual yang rendah atau dapat dikendalikan, sehingga tidak menghambat pencapaian persentase keberhasilan pada fungsi penindakan. Indikator keberhasilan penerapan manajemen risiko tersebut tercermin dari tercapainya target keberhasilan penindakan pada Tahun 2025.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.134
Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda	806.925.000	798.848.421	99,00	108,11	100% (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah dilaksanakan secara efisien, yang ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi anggaran tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran tahun 2025 telah secara optimal mendukung pencapaian indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

Adapun program yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah rincian output Perkara Hukum Badan Usaha – Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan pada BBPOM di Samarinda dengan kegiatan Operasi Intelijen, Operasi Penindakan, Pemberkasan dan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik) .

Tercapainya target perkara di tahun 2025, tidak terlepas dari pengoptimalan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam penunjang utama yakni kegiatan/operasi intelijen dan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dalam melaksanakan Koordinasi Criminal Justice System (CJS) terutama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari sejak sebelum operasi penindakan sampai proses penyidikan berlangsung. Hal ini menyebabkan tingginya output namun dengan realisasi anggaran yang berjalan secara beriringan, sehingga dinilai efisien.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Tahun 2025 dimanfaatkan sebagai instrumen utama dalam mengevaluasi tingkat pencapaian target kinerja, khususnya pada indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi penyelesaian perkara hingga Tahap II telah mencapai 100% (5 perkara dari target 5 perkara). Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penindakan telah berjalan optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Laporan Kinerja juga dimanfaatkan sebagai dasar analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Data menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan persentase realisasi anggaran,

sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara efisien dan mendukung secara penuh pencapaian indikator kinerja.

Selain itu, Laporan Kinerja menjadi rujukan dalam pelaksanaan manajemen risiko. Identifikasi risiko, pengendalian, serta langkah mitigasi yang telah dilakukan dievaluasi melalui dokumen ini untuk memastikan bahwa potensi hambatan, seperti kebocoran informasi, kegagalan operasi, hingga risiko perkara tidak mencapai Tahap II, dapat diminimalisir dan dikendalikan secara efektif.

Dokumen ini juga dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), termasuk dalam penguatan koordinasi Criminal Justice System (CJS), peningkatan kolaborasi lintas fungsi, optimalisasi inovasi pengaduan masyarakat (Molen Mahakam), serta penguatan integritas melalui penerapan pakta integritas dan whistleblowing system.

Dengan demikian, Laporan Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai alat pengendalian manajemen, dasar pengambilan keputusan strategis, serta referensi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja secara berkelanjutan.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Daftar Risiko yang telah dikelola oleh BBPOM di Samarinda terkait ketercapaian indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan barang bukti pada aplikasi sidak mahakam tidak update;
2. Mobil incinerator rusak;
3. Operasi penindakan yang dilakukan tidak optimal memutus jaringan kejahatan obat dan makanan;
4. Tidak ditemukannya BB pada saat operasi penindakan;
5. Kebocoran Perencanaan Operasi penindakan;
6. Kurangnya kesempatan untuk mengadukan penjualan Obat dan makanan ilegal secara daring;
7. Terdapat potensi perkara tidak sampai Tahap 2 (tahap terakhir output perkara);
8. Terjadinya kerusakan pada Barang Bukti;
9. Terjadinya selisih jumlah barang bukti;
10. Potensi terjadinya kehilangan Alat khusus (Alsus) Intelijen;
11. Tersebarnya rahasia waktu dan target kegiatan intelijen/ operasi penindakan pada eksternal kantor;
12. Operasi penindakan gagal;
13. Terhambatnya koordinasi dengan Polda Kalimantan Timur;
14. Pada saat pemeriksaan, timbulnya pertanyaan yang muncul diluar prediksi tergantung situasi dan kondisi;
15. Register Barang Bukti tidak update;

16. Tidak adanya pengaduan masyarakat yang masuk melalui Molen Mahakam;
17. Petugas menerima suap dari pelaku usaha ilegal untuk mengintervensi proses hukum; dan
18. Stakeholder menerima suap dari pelaku usaha ilegal untuk menggagalkan proses penindakan dan/atau mengamankan status hukum pelaku.

Berikut aktifitas pengendalian yang telah dilakukan oleh BBPOM di Samarinda, antara lain :

1. Pencatatan barang bukti pada buku register;
2. Penunjukan driver penanggung jawab mobil incinerator;
3. Membuat Laporan Analisis Kerawanan dan Kejahatan yang komprehensif;
4. Membuat Laporan Intelijen untuk output target operasi penindakan;
5. Melaksanakanan rapat perencanaan operasi penindakan sesaat sebelum dilakukannya pelaksaanaan operasi penindakan;
6. Pengaduan penjualan Obat dan makanan ilegal ke nomor Molen Mahakam;
7. Monitoring perkembangan perkara;
8. Memastikan proses pengangkutan barang bukti dalam keadaan aman;
9. Penambahan jumlah personil pada saat operasi penindakan dengan jobdesk khusus untuk melakukan penghitungan barang bukti, Menuangkan hasil hitung ulang barang bukti dalam berita acara;
10. Melakukan kontrol dan peningkatan keamanan terhadap Alat khusus (Alsus) Intelijen;
11. Pembuatan Surat Tugas dan Surat Perintah dilakukan oleh petugas khusus yang sudah ditunjuk dan dengan password rahasia, Entri Nomor Surat Tugas atau Surat Perintah dengan desepsi;
12. Saat momentum operasi sudah tepat, komunikasi kepada Kepala Balai untuk mendahulukan operasi penindakan;
13. Menjalin komunikasi secara informal (WA dan lain sebagainya) kepada pihak Polda Kalimantan Timur terkait bantuan upaya paksa;
14. Menyiapkan template pertanyaan pada BAP yang mengandung 5W+1H;
15. Membuat reminder secara berkala;
16. Publikasi Inovasi Molen Mahakam melalui media sosial BBPOM di Samarinda dan juga melalui berbagai acara KIE/penggalangan stakeholder yang diselenggarakan oleh BBPOM di Samarinda;
17. Penandatanganan pakta integritas, implementasi whistle blowing system, kolaborasi petugas dari fungsi lain;
18. Permintaan bantuan ke dua bagian instansi yang berbeda, contoh : kepada Korwas PPNS dan kepada Subdirektorat Indagsi dengan tujuan pengawasan silang antar bagian.

SK 6

TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke 6 pada tahun 2025 diukur dari 1 (satu) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, yaitu persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Samarinda. Dari perhitungan 1 (satu) indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar 110% dengan kriteria Sangat Baik. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.135

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7 Terhadap Target Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Katgeori	Notifikasi Warna
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00%	99.00%	110.00%	Sangat Baik	
Capaian Sasaran Kegiatan				**110.00%**	**Sangat Baik**	

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan

Profiling) UPT BPOM;

2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
   a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun); dan
   b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Cara untuk menghitung persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

1. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%);
2. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%): dan
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%).

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Tahun 2025 diukur berdasarkan komponen ketepatan waktu pelaporan siber, kualitas analisis, dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal. Masing-masing nilai komposit menunjukkan ketepatan waktu pelaporan siber sebesar 100,00%, nilai kualitas analisis sebesar 96,00%, dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal sebesar 100,00%. Komponen tersebut kemudian dikonversi sesuai bobot masing-masing, yaitu ketepatan waktu pelaporan siber (bobot 50%) memperoleh nilai 50,00; kualitas analisis (bobot 25%) memperoleh nilai 24,00; dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal (bobot 25%) memperoleh nilai 25,00.

Target Tahun 2025 yang ditetapkan pada sasaran kegiatan ini adalah sebesar 90.00%. Berdasarkan hasil konversi tersebut, nilai realisasi indikator kinerja untuk sasaran kegiatan ke-7 adalah sebesar 99,00%, sehingga

capaian sasaran kegiatan ke-7 pada Tahun 2025 sebesar 110.00% dengan kriteria **Sangat Baik**. Adapun rincian realisasi kinerja penindakan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.136

Capaian Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja %
Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber **Bobot 50%**	Nilai Kualitas Analisis **Bobot 25%**	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal **Bobot 25%**	
100.00	96.00	100.00	50.00	24.00	25.00	99.00

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber

Pelaporan analisis penelusuran siber dilakukan melalui patroli siber terhadap tautan yang menayangkan penjualan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan baik tanpa izin edar, tanpa keahlian dan kewenangan, dan mengandung bahan kimia obat/bahan berbahaya pada berbagai platform e-commerce dan media sosial yang ada. Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melaporkan sebanyak 700 tautan rekomendasi take down dan 100% jumlah tautan memenuhi kriteria penurunan konten. Laporan patroli siber ini ditindaklanjuti oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan dengan mengajukan surat rekomendasi takedown kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Indonesian E-Commerce Association (idEA) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Selain itu pelaporan analisis penelusuran siber juga dilakukan melalui laporan profiling siber yang merupakan penyusunan profil sarana yang melakukan pelanggaran/kejahatan obat dan makanan di ranah siber yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pendalaman kegiatan dan/atau operasi intelijen untuk proses pengungkapan kejahatan. Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan profiling siber sebanyak 49 sarana yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di Kalimantan Timur. Pelaporan kedua komponen pelaporan analisis penelusuran siber pada tahun 2025 ini secara keseluruhan telah dilakukan secara tepat waktu setiap bulannya paling lambat tanggal 25, dengan nilai kinerja 100%, sesuai dengan acuan pada Surat Edaran Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 dari Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan

Analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan dilakukan menggunakan basis data kerawanan yang diinput secara periodik dan konsisten setiap bulannya. Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda melaporkan data kerawanan kejahatan yang berasal dari 8 jenis sumber informasi, yaitu akses/informan, hasil investigasi awal, hasil pengawasan/pemeriksaan, hasil pengujian sampel/laboratorium, informasi lintas sektor, keterangan ahli, patroli siber, dan pengaduan masyarakat. Pada periode ini dilaporkan bahwa sebesar 100.00% data yang disampaikan telah disetujui, dengan rincian sesuai tabel berikut :

Tabel 3.137

Capaian Pemetaan Kerawanan Kejahatan Tahun 2025

Data Masuk	Data Disetujui	Data Ditolak		Data yang Dihold	Persentase Data Disetujui
		Perlu Perbaikan	Tidak Perlu Perbaikan		
227	227	0	0	0	100%

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda menyampaikan 2 (dua) Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan rincian:

1. Kosmetik Racikan: Potret Kerawanan dan Strategi Pengendalian di Kalimantan Timur, pada semester 1; dan
2. Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kalimantan Timur Tahun 2025, pada semester 2

Evaluasi atas penyusunan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilaksanakan oleh pimpinan UPT sebagai bentuk pengendalian mutu internal, dengan mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penilaian dilakukan terhadap pemenuhan unsur kualitas analisis, yang meliputi:

1. Validitas, yaitu pembuktian dari sumber data/pustaka/literatur yang digunakan dalam analisis terjamin ketepatan, kebenaran, dan keterkiniannya. (skala 1-5);
2. Objektivitas, analisis disusun menggunakan metodologi yang jelas, berdasarkan pada data/kondisi faktual, bersifat netral/bebas dari bias, dan tidak dipengaruhi oleh opini pribadi. (skala 1-5);
3. Aktual, tema isu/permasalahan yang diangkat pada analisis merupakan hal yang relevan dibahas saat ini dan berkaitan dengan komoditi Obat dan Makanan (skala 1-5);
4. Sistematika penulisan, analisis yang dihasilkan memiliki urutan yang sistematis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah (minimal terdapat komponen judul, latar belakang, tujuan, metode, hasil, pembahasan,

kesimpulan dan usulan tindak lanjut dan daftar pustaka) (skala 1-5); dan

5. Kemanfaatan, yaitu metode penelitian, hasil, dan kesimpulan dalam dokumen analisis telah sesuai dan menjawab tujuan dari analisis yang dilakukan, serta terdapat usulan tindak lanjut yang sesuai. (skala 1-5).

Nilai tertinggi dari kedua analisis kerawanan tersebut ditetapkan sebagai nilai kinerja UPT pada periode pelaporan. Hasil penilaian pimpinan UPT terhadap dokumen analisis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.138

Evaluasi Atas Penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Judul Analisis	Hasil Penilaian (Skala 1-5)					Nilai Akhir
	Validitas	Objektivitas	Aktual	Sistematika Penulisan	Kemanfaatan	
Kosmetik Racikan: Potret Kerawanan dan Strategi Pengendalian di Kalimantan Timur	5	5	4	5	5	24
Policy Brief: Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kalimantan Timur Tahun 2025	5	4	5	5	5	24

Kedua analisis yang telah dilaksanakan memberikan dasar perumusan rekomendasi sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.139

Rekomendasi Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

No	Judul Analisis	Rekomendasi
1	Kosmetik Racikan: Potret Kerawanan dan Strategi Pengendalian di Kalimantan Timur	Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah: 1. Perluasan edukasi di wilayah rawan kosmetik ilegal seperti Samarinda dan Bontang dengan target sasaran lebih spesifik, seperti salon kecantikan, penjual daring dan usaha rumahan. 2. Strategi pengendalian dapat dilakukan melalui: a. Penguatan penggalangan pemangku kepentingan diarahkan pada: - Edukasi pelaku usaha, melibatkan kepolisian dan pemerintah daerah, dengan menghadirkan *uniform effect* untuk efek jera hukum.

		- Edukasi konsumen dilakukan melalui literasi publik melalui media sosial, materi praktis pengecekan izin edar, hingga testimoni korban untuk membangun kewaspadaan. - Pemasangan poster *Inovasi Komuter* pada sarana distribusi untuk mendukung pelaku usaha dan konsumen melakukan pencegahan mandiri terhadap kosmetik ilegal. b. Penguatan pengawasan dilakukan dengan: - Mendorong keterlibatan aktif masyarakat melalui saluran pelaporan MOLEN Mahakam, sehingga informasi praktek produksi dan peredaran kosmetik racikan ilegal dapat terdeteksi lebih dini dan mendukung penindakan yang lebih cepat, tepat dan efektif; - Pendampingan pelaku usaha melalui inovasi *Si Jebol* mendorong peralihan jalur usaha ke legal dengan fasilitas perizinan, kontrak produksi atau pemohon notifikasi kosmetik. c. Penguatan kegiatan penindakan dengan: - Pengawasan intensif harus difokuskan di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Samarinda dan Bontang. - Pengujian barang bukti dalam memenuhi unsur pidana, dapat diperluas pada parameter cemaran mikrobiologi (ALT dan AKK)
2	Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kalimantan Timur Tahun 2025	Rekomendasi langkah penguatan intervensi cegah tangkal sebagai berikut: 1. BBPOM di Samarinda a. Penetapan SOP koordinasi antar fungsi dalam tindak lanjut hasil kegiatan intelijen maupun hasil pengawasan rutin; b. Membentuk MoU/ PKS formal dengan KSOP di kab/kota untuk memperkuat dasar hukum kolaborasi. 2. Fungsi Penindakan a. Penguatan sumber data kerawanan kejahatan untuk mendukung akurasi pemetaan kerawanan kejahatan; b. Pendalaman jalur distribusi tertutup, penguatan kegiatan intelijen dan pengawasan terhadap kegiatan produksi ilegal lokal, termasuk melalui koordinasi profiling dengan Badan POM; c. Penetapan SOP koordinasi antar fungsi dalam tindak lanjut hasil kegiatan intelijen; d. Penguatan koordinasi dan tindak lanjut pemasukan produk ilegal melalui pelabuhan bersama KSOP; e. Koordinasi dengan penanggung jawab akun media sosial lokal (Facebook) yang terindikasi sebagai sarana peredaran ilegal.

		3. Fungsi Pemeriksaan a. Penguatan data dan informasi sumber dan distribusi temuan peredaran produk ilegal pada pemeriksaan rutin sebagai dasar pemutakhiran dan akurasi data kerawanan kejahatan; b. Penetapan SOP koordinasi antar fungsi dalam tindak lanjut hasil pengawasan rutin. 4. Fungsi Infokom a. Pelaksanaan KIE tatap muka bagi pelaku usaha distribusi sesuai peta kerawanan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan partisipasi dan kepatuhan, serta melibatkan Aparat Penegak Hukum sebagai narasumber menggunakan seragam dinas (uniform); b. Pelaksanaan KIE tatap muka bagi masyarakat sesuai peta kerawanan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran risiko, dengan menghadirkan korban penggunaan produk ilegal sebagai narasumber; c. Pelaksanaan KIE masif melalui media sosial dan kolaborasi pada kegiatan rutin Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota terkait produk, bahaya dan konsekuensi hukum peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal.

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda memperoleh target sebanyak 9 rekomendasi yang disampaikan Direktorat Cegah Tangkal yang telah ditindaklanjuti secara keseluruhan dan memperoleh nilai kinerja 100%. Selain itu Balai Besar POM di Samarinda secara mandiri telah aktif melaksanakan kegiatan kegiatan penggalangan sebanyak 21 kegiatan dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di Kalimantan Timur untuk perkuatan cegah tangkal kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Pada Semester I Tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda melaksanakan kegiatan penggalangan sebanyak 8 kegiatan penggalangan dengan 3 kegiatan utama yaitu "Aksi Mohak, AWASI Bersama Molen Mahakam" yang dilaksanakan secara *daring* pada 18 Maret 2025, "Sosialisasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, Aksi Mohak, AWASI Bersama Molen Mahakam, Saka POM Kota Bontang" yang dilaksanakan pada 18 Mei 2025 dan kegiatan "Goes to Masyarakat Kota Bontang: Aksi Bersatu AWASI Produk Kosmetika – Aksi Nyata Melawan Produk Ilegal" yang dilaksanakan pada 19 Juni 2025.

Pada Semester II Tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melaksanakan kegiatan penggalangan sebanyak 13 kegiatan penggalangan dengan 2 kegiatan utama yaitu "Kegiatan Pramuka Bontang Siaga Bersama Saka POM – Aksi Bersatu AWASI Obat dan Makanan Ilegal" yang dilaksanakan pada 26 Juli 2025 dan

'Kegiatan Forum AWASI (Aman, Waspada, Stop Ilegal): Koordinasi Cegah Tangkal dan Perkuatan Sinergi CJS dalam Mengatasi Kejahatan Obat dan Makanan" yang dilaksanakan pada 13 November 2025.

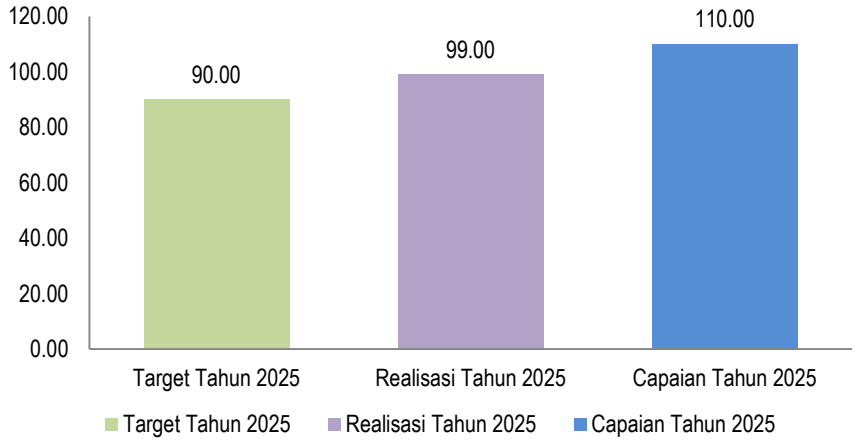
Kegiatan ini dilakukan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan terhadap obat, makanan, dan kosmetik yang aman serta legal, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat, sekaligus mendorong peran aktif Pramuka sebagai agen edukasi dalam gerakan AWASI (Aman, Waspada, Stop Ilegal); dan
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar-lembaga dalam pengawasan, penegakan hukum, serta pelaporan produk obat dan makanan ilegal melalui penguatan pemahaman hukum, dukungan teknis, dan perluasan jejaring kerja sama lintas sektor.

Laporan penggalangan telah dilengkapi dengan pengukuran respon positif sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat Dan Makanan dan SOP Makro POM-05.01/CFM.01/SOP.01 tentang Cegah Tangkal Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.62
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025



Tabel 3.140
Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Terhadap Target Tahun 2025

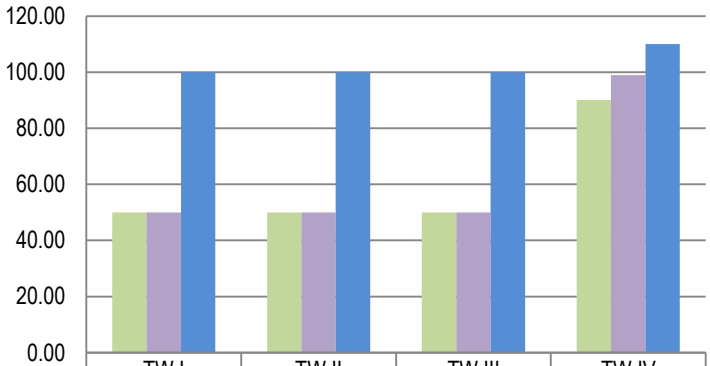
Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
90.00	99.00	110.00	Sangat Baik	

Pada data di atas, target persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar tahun 2025 sebesar 90% dengan realisasi tahun 2025 sebesar 99%, maka diperoleh capaian persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 110% dengan kategori **" Sangat Baik**".

Dengan capaian sebesar 110%, indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi deteksi dan analisis kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda telah berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan pengawasan obat dan makanan berbasis risiko.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja per Triwulan Tahun 2025

Gambar 3.63
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar per Triwulan Tahun 2025



	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target	50.00	50.00	50.00	90.00
Realisasi	50.00	50.00	50.00	99.00
Capaian	100.00	100.00	100.00	110.00

Realisasi kinerja dan capaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi periode sebelumnya karena merupakan indikator baru tahun 2025 dan tahun 2025 merupakan tahun pertama pada

periode Renstra 2025-2029.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, sehingga indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada periode ini berada dalam kerangka kebijakan, arah strategi, serta target yang telah disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan sektoral terbaru. Dengan demikian, capaian Tahun 2025 diposisikan sebagai baseline awal periode Renstra 2025–2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar perbandingan untuk evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya dalam periode perencanaan yang sama.

Berdasarkan capaian per triwulan Tahun 2025, realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar menunjukkan kinerja yang konsisten dan stabil. Pada setiap triwulan, pelaporan kegiatan patroli siber dan penjejakan digital (profiling siber) telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Konsistensi ketepatan waktu pelaporan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV menunjukkan adanya pengendalian internal yang berjalan efektif, termasuk monitoring berkala serta evaluasi sebelum batas akhir pelaporan. Hal ini berdampak pada terjaganya kualitas analisis serta mendukung percepatan proses deteksi dini terhadap potensi kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda.

Dengan capaian yang stabil pada setiap triwulan, indikator ini berhasil ditutup pada akhir tahun dengan realisasi sebesar 99% dan capaian sebesar 110% dari target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.141
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
94	99	105.32	Tercapai/ melampaui	

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra), capaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Target Renstra Tahun 2025 sebesar 94% berhasil direalisasikan sebesar 99%, sehingga capaian kinerja mencapai 110% dengan kategori

Tercapai/terlampaui, hal ini menunjukkan bahwa target akhir periode Renstra diasumsikan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

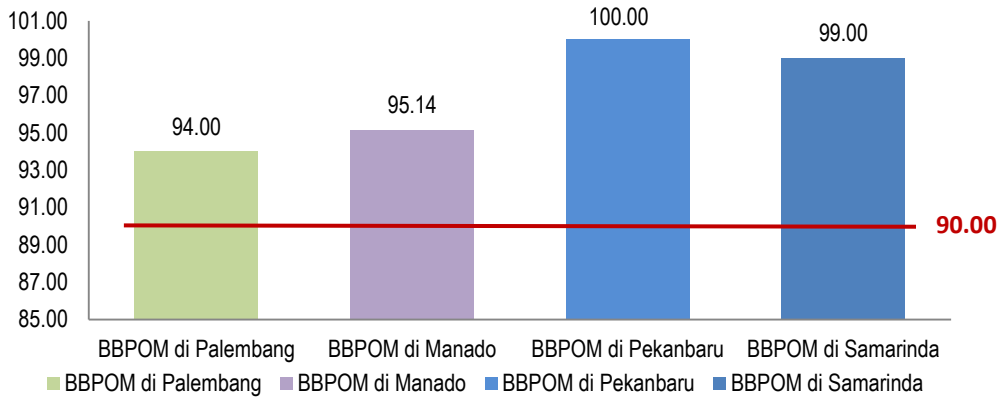
Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan melalui patroli siber, penjejakan digital, analisis kerawanan kewilayahan, serta tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal telah berjalan selaras dengan arah kebijakan strategis BPOM. Keberhasilan ini juga mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal serta penguatan koordinasi lintas fungsi dalam mendukung pencapaian target jangka menengah organisasi.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster ...) dan Target Nasional

Tabel 3.142
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
90	BBPOM di Palembang	90	94	104,44	Sangat Baik
	BBPOM di Manado	90	95,14	105,71	Sangat Baik
	BBPOM di Pekanbaru	90	100	111,11	Tidak Dapat Disimpulkan
	BBPOM dii Samarinda	90	99	110	Sangat Baik

Gambar 3.64
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Berdasarkan perbandingan dengan UPT lain dalam Klaster 4 serta terhadap target nasional sebesar 90%, realisasi kinerja BBPOM di Samarinda Tahun 2025 sebesar 99% dengan capaian 110% berada pada kategori **Sangat Baik** dan melampaui target nasional.

Apabila dibandingkan dengan BBPOM di Palembang (104,44%) dan BBPOM di Manado (105,71%), capaian BBPOM di Samarinda berada pada posisi yang kompetitif. Sementara itu, capaian BBPOM di Pekanbaru sebesar 111,11% capaian melebihi 110% Tidak dapat disimpulkan, namun secara umum seluruh UPT dalam klaster telah melampaui target nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Samarinda mampu menjaga konsistensi kualitas pelaporan dan analisis kerawanan kejahatan, ketepatan waktu penyampaian laporan siber, serta efektivitas tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal sebagai satu kesatuan komponen dalam mendukung penguatan sistem deteksi dan penanggulangan kejahatan obat dan makanan secara nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar di Balai Besar POM di Samarinda tidak terlepas dari kinerja setiap personel dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Keterlibatan aktif Agent of Change dalam pelaksanaan program pencegahan kejahatan obat dan makanan;
2. Pembagian tugas yang jelas dan terstruktur sehingga setiap personel memahami tanggung jawabnya, mengoptimalkan kinerja individu, dan mempercepat penyelesaian tugas tim;
3. Komitmen kuat seluruh tim dalam menjaga standar kualitas pelaporan, baik dari aspek ketepatan waktu, kelengkapan, maupun kedalaman analisis;
4. Kedisiplinan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan
5. Evaluasi berkala sebelum batas akhir pelaporan guna memastikan mutu laporan serta melakukan perbaikan dini atas potensi kekurangan.
6. Optimalisasi patroli siber, penguatan koordinasi lintas fungsi, serta pemanfaatan Molen Mahakam sebagai sumber informasi awal turut memperkuat kualitas analisis dan ketepatan waktu pelaporan.

Selain faktor internal, peningkatan kinerja juga didukung oleh pemanfaatan peluang eksternal dalam upaya cegah tangkal, yaitu:

1. Penguatan sinergi strategis dengan Pemerintah Kota melalui koordinasi lintas sektor, dan dukungan terhadap edukasi sehingga memperluas jangkauan cegah tangkal dan meningkatkan efektivitas respons terhadap potensi peredaran produk ilegal;

2. Optimalisasi peran Saka POM Bontang sebagai mitra strategis dalam edukasi publik, kampanye keamanan obat dan makanan, serta penyebarluasan informasi pengawasan guna memperkuat pendekatan preventif secara berkelanjutan;
3. Optimalisasi forum komunikasi dengan Criminal Justice System (CJS) yang melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya dalam pertukaran informasi, pemetaan kerawanan, serta percepatan tindak lanjut sehingga meningkatkan efektivitas pelaksanaan cegah tangkal; dan
4. Penguatan koordinasi dengan stakeholder lintas sektor lainnya untuk membangun sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi peredaran obat dan makanan ilegal.

Dalam menjalani proses pencapaian sasaran Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda terdapat beberapa kendala di Triwulan IV antara lain :

- Aplikasi Inawebcrawler tidak aktif sehingga memperbesar kemungkinan pelaporan data takedown double
- Diperlukan cegah tangkal pemasukan produk ilegal melalui perairan/barang bawaan/ pengiriman
- Aplikasi Dashboard Penindakan yang menjadi sarana untuk melaporkan informasi hasil kegiatan tupoksi penindakan mengalami masalah karena adanya serangan siber, sehingga menyulitkan dalam pelaporan kegiatan penyidikan dan intelijen
- Pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kalimantan Timur masih memerlukan penguatan dukungan dan kerjasama antar fungsi terkait, dengan fungsi pemeriksaan dan fungsi infokom.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan di triwulan IV untuk mengatasi kendala dan meningkatkan pencapaian sasaran kegiatan terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda adalah sebagai berikut :

- Membuat backup database untuk menghindari kemungkinan pelaporan data takedown terdouble
- Membuat suatu forum diskusi dengan stakeholder terkait, agar mengetahui kendala yang terjadi dan memecahkan masalah bersama-sama bertema forum awasi sebagai bentu criminal justice system dalam kegiatan koordinasi cegah tangkal dan perkuatan sinergi criminal justice system dalam mengatasi kejahatan obat dan makanan
- Berkoordinasi dengan pusat terkait pelaporan kegiatan penyidikan dan intelijen yang dilakukan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan selanjutnya untuk meningkatkan pencapaian sasaran kegiatan

terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda adalah penyampaian rekomendasi hasil analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kalimantan Timur tahun 2025 kepada fungsi terkait secara terstruktur untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut penindakan.

Tabel 3.143
Matriks Rekomendasi Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	1.Aplikasi Inawebcrawler tidak aktif sehingga memperbesar kemungkinan pelaporan data takedown double 2..Diperlukan cegah tangkal pemasukan produk ilegal melalui perairan/barang bawaan/ pengiriman	1. Membuat backup database untuk menghindari kemungkinan pelaporan data takedown terdouble 2. Membuat suatu forum diskusi dengan stakeholder terkait, agar mengetahui kendala yang terjadi dan memecahkan masalah bersama-sama	1. Membuat database pelaporan siber manual untuk pengecekan data takedown terlapor 2. Membuat kegiatan bertema forum awasi sebagai bentu criminal justice system dalam kegiatan koordinasi cegah tangkal dan perkuatan sinergi criminal justice system dalam mengatasi kejahatan obat dan makanan	November 2025	T	-	-
2		Aplikasi Dashboard Penindakan	Berkoordinasi dengan pusat terkait	Mengantisipasi dengan melakukan pelaporan secara	Desember 2025	T	-	-

		yang menjadi sarana untuk melaporkan informasi hasil kegiatan tupoksi penindakan mengalami masalah karena adanya serangan siber, sehingga menyulitkan dalam pelaporan kegiatan pemetaan kerawanan kejahatan, cegah tangkal serta profiling	pelaporan kegiatan kegiatan pemetaan kerawanan kejahatan, cegah tangkal serta profiling yang dilakukan melalui ADP	manual melalui aplikasi Srikandi ke Direktorat Siber dan Direktorat Cegah Tangkal, sembari menunggu arahan dari pusat				
3		Pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kalimantan Timur masih memerlukan penguatan dukungan dan kerjasama antar fungsi terkait,	. Perlu dilakukan penyampaian rekomendasi hasil analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Kalimantan Timur tahun 2025 kepada fungsi terkait secara	Melaksanakan FGD penyampaian rekomendasi hasil analisis serta penyusunan rencana aksi tindak lanjut oleh masing-masing fungsi terkait.	Maret 2026	T	-	-

		khususnya dengan fungsi pemeriksaan dan fungsi infokom.	terstruktur untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut penindakan.					

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.144
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
AEA.001.052	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	B	Pengumpulan Bahan Keterangan Dalam Rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan				
			- Perjalanan Dinas Biasa	2	TR	2	TR
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	2	TR	2	TR
AEA.001.053	Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	I	Advokasi Terpadu Lintas Sektor				
			- Makan	1	KL	1	KL

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja tidak terlepas dari implementasi Program AWASI (Aman, WAspada, Stop Ilegal) yang dikemas dalam kegiatan cegah tangkal secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan tatap muka kepada pelaku usaha dan masyarakat, optimalisasi peran Saka POM, serta kolaborasi antar fungsi dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan bimbingan teknis terbukti memperkuat pemahaman serta kepatuhan terhadap ketentuan pengawasan obat dan makanan.

Upaya cegah tangkal juga diperluas melalui publikasi informasi AWASI pada media sosial resmi Balai Besar POM di Samarinda yang mencakup komoditas obat, kosmetik, dan obat bahan alam (OBA), termasuk pemanfaatan kanal YouTube untuk PomCast AWASI sebagai media edukasi publik. Sinergi AWASI bersama aparat penegak hukum (CJS) dan pemangku kepentingan lainnya turut memperluas jangkauan pengawasan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta membuka peluang deteksi dini terhadap potensi peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal.

Selain itu, integrasi Program AWASI dengan inovasi MOLEN MAHAKAM (Molen Mahakam) sebagai sarana pelaporan masyarakat berbasis digital menjadi pengungkit strategis dalam memperkuat ekosistem pengawasan

partisipatif. Sebagai kanal pelaporan daring yang mudah diakses, MOLEN MAHAKAM berfungsi sebagai *early warning system* dalam menghimpun informasi awal terkait dugaan peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal. Informasi tersebut kemudian dianalisis, diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko, serta dimanfaatkan sebagai penguatan intelijen pengawasan sebelum ditindaklanjuti secara terstruktur melalui mekanisme pengawasan yang berlaku. Melalui mekanisme ini, partisipasi publik tidak hanya meningkatkan jangkauan deteksi dini, tetapi juga mempercepat respons, memperkuat efektivitas cegah tangkal, serta mendukung pengambilan keputusan pengawasan yang adaptif, terarah, dan berkelanjutan.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.145

Efisiensi Anggaran pada Indikator Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	33.982.000	33.981.004	100,00	110,00	100% (Efisien)

Berdasarkan data realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp33.981.004 dari pagu Rp33.982.000 atau 100,00%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 110,00%, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien dan optimal.

Meskipun realisasi anggaran mencapai 100%, capaian indikator yang melampaui target menunjukkan bahwa kegiatan patroli siber, penjejakan digital, pengumpulan data kerawanan kejahatan, serta pelaksanaan cegah tangkal telah memberikan output yang maksimal sesuai perencanaan. Efisiensi ini tercermin dari optimalisasi sumber daya manusia, pembagian tugas yang jelas, serta pemanfaatan inovasi MOLEN Mahakam sebagai kanal pelaporan masyarakat.

Dengan demikian, prinsip efektivitas dan value for money telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Tahun 2025 dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi atas pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda.

Dokumen ini digunakan sebagai dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan patroli siber, penjejakan digital, analisis kerawanan kewilayahan, serta tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal. Selain itu, laporan ini menjadi referensi dalam penyusunan rencana kerja dan penetapan strategi pengawasan pada tahun berikutnya, khususnya dalam penentuan prioritas berbasis risiko.

Laporan Kinerja juga dimanfaatkan sebagai sarana penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja kepada pimpinan serta pemangku kepentingan, sekaligus sebagai alat pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa setiap potensi kendala dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara sistematis.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mendukung ketercapaian indikator tersebut, telah dilakukan identifikasi risiko serta pengendalian sebagai berikut:

1. Daftar Risiko terkait indikator kinerja adalah sebagai berikut :
   a. Data dalam penyusunan pemetaan kerawanan kejahatan di Kalimantan Timur tidak lengkap;
   b. Operasi penindakan yang dilakukan tidak optimal memutus jaringan kejahatan obat dan makanan;
   c. Kurangnya kesempatan untuk mengadukan penjualan Obat dan makanan ilegal secara daring;
   d. Tidak adanya pengaduan masyarakat yang masuk melalui Molen Mahakam;Laporan tidak selesai tepat waktu.
2. Berikut aktivitas pengendalian yang telah dilakukan, antara lain :
   a. Perkuatan koordinasi lintas fungsi dan penyediaan tools untuk input data kerawanan;
   b. Membuat Laporan Analisis Kerawanan dan Kejahatan yang komprehensif;
   c. Pengaduan penjualan Obat dan makanan ilegal ke nomor Molen Mahakam;
   d. Publikasi Inovasi Molen Mahakam melalui media sosial BBPOM di Samarinda dan juga melalui berbagai acara KIE/penggalangan stakeholder yang diselenggarakan oleh BBPOM di Samarinda;
   e. Penjadwalan timeline internal lebih awal dan PIC per komoditi.

Melalui langkah pengendalian tersebut, termasuk pemanfaatan tools input data kerawanan yang saat ini telah disediakan oleh pusat guna mendukung kelengkapan, integrasi, dan standardisasi data, potensi risiko seperti keterbatasan data, kurang optimalnya pemutusan jaringan kejahatan, minimnya pengaduan masyarakat, serta

keterlambatan pelaporan dapat diminimalkan sehingga tidak berdampak signifikan terhadap capaian indikator.

SK 7

LAYANAN PUBLIK BALAI BESAR POM DI SAMARINDA YANG PRIMA

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke 7 pada tahun 2025 diukur dengan 1 (satu) **Indikator Kinerja Utama (IKU).** Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 3.146
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 7 Terhadap Target Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Layanan Publik Balai Besar POM di Samarinda yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda	4,70	4,90	104,26	Sangat Baik	
Capaian Sasaran Kegiatan				**104,26**	**Sangat Baik**	

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 terhadap target tahun 2025 diperoleh dari 1 indikator, yaitu Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda. Pada Tahun 2025, telah dilaksanakan penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda dan berdasarkan Berita Acara Penilaian oleh Tim Penilai Kinerja UPP diperoleh hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 yaitu 4,9 kategori A (Pelayanan Prima) dari target 4,70 dan capaian 104,26% dengan kategori **Sangat Baik**.

Indikator kinerja sasaran kegiatan yang ke-7 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda**

   Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik. Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik secara periodik. Salah satunya melalui penilaian kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang mengacu kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang secara teknis kembali diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP.

Aspek yang harus dipenuhi oleh UPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi.

Penilaian Indeks Pelayanan Publik berdasarkan pada 6 (enam) aspek meliputi Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); Profesionalitas SDM (25%); Sarana Prasarana (18%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan Inovasi (12%). Pelaksanaan penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan BPOM ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM.

Adapun kategori penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.147
Kategori Indeks Pelayanan Publik

Rentang Nilai	Kategori	Makna
0 - 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.65
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025



Tabel 3.148
Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
4,70	4,90	104,26	Sangat Baik	

Penilaian Indeks Pelayanan Publik pada level Balai berdasarkan data yang diolah oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penilaian PEKPPP di Lingkungan BPOM 2025 dilakukan dengan metode pengisian kuesioner melalui aplikasi evortala.pom.go.id yang disesuaikan dengan instrumen pada Pedoman Menteri PAN RB Nomor 5 tahun 2023 Tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP, serta dilakukan wawancara dan verifikasi data secara daring.

Terdapat 3 (tiga) jenis kuesioner yang digunakan dalam Penilaian PEKPPP,

antara lain:

a) Formulir F-01. Diperuntukkan dan diisi oleh unit penyelenggara pelayanan yang menjadi lokus penilaian, untuk memperoleh data perspektif.

b) Formulir F-02. Diisi oleh evaluator atau penilai berdasarkan data dukung yang dilampirkan unit penyelenggara pelayanan publik dan hasil wawancara dan verifikasi

data untuk memperoleh nilai yang objektif.

c) Formulir F-03. Diisi oleh minimal 10 pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.

Dari ketiga formulir tersebut dilakukan pembobotan Formulir F02 dan Formulir F03 untuk mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik, dengan persentase F02: F03 yaitu 75%: 25%.

Berdasarkan surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor OT.03.04.22.09.25.287 tanggal 12 September 2025 terkait Exit Meeting Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 telah diumumkan pencapaian indeks pelayanan publik setiap UPT. Balai Besar POM di Samarinda mendapatkan nilai indeks pelayanan publik sebesar 4,90 kategori A Pelayanan Prima dari target tahun 2025 sebesar 4,70 (104,26%). Hasil ini menunjukkan peningkatan dari nilai IPP tahun 2024 sebesar 4.87 dan tahun 2023 dengan perolehan IPP sebesar 4.54. Disebutkan dalam berita acara di antara 6 (enam) aspek penilaian untuk aspek profesionalisme SDM, sarana prasarana dan inovasi semua indikator pada ketiga aspek tersebut telah terpenuhi. Sedangkan untuk aspek kebijakan pelayanan, sistem informasi pelayanan publik serta konsultasi dan pengaduan masih terdapat rekomendasi perbaikan kedepannya.

BBPOM di Samarinda juga konsisten dalam pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) setiap bulan terhadap seluruh responden yang telah menerima layanan 100% yang digunakan untuk mengisi nilai komponen hasil pada Lembar Kerja Evaluasi PMPZI pada masing masing Unit Kerja.

Survei dilakukan secara berkala setiap tahunnya sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan konsistensi penerapan budaya anti korupsi. Hasil dari pelaksanan Survei SPKP/SPAK ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM.

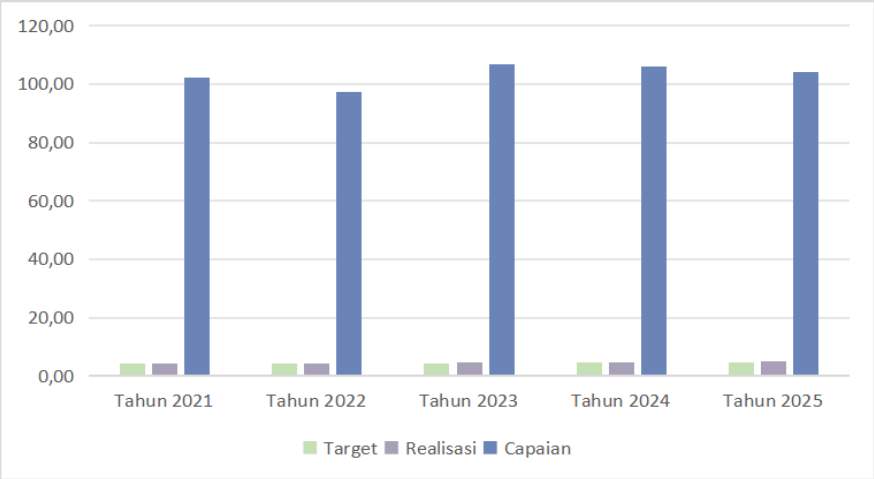
Survei dilakukan menggunakan tautan link survei yang diberikan oleh inspektorat utama pada https://tinyurl.com/YanblikBBPOMSamarinda. Kriteria responden suvei adalah pelanggan yang mengakses layanan publik BBPOM di Samarinda baik Layanan Informasi,Konsultasi dan Pengaduan Konsumen, Layanan Pengujian dan Layanan Sertifikasi. Jika jumlah responden tidak mencapai sejumlah 30 responden maka semua responden dimasukkan dalam perhitungan nilai indeks IPP dan IPAK.

Adapun hasil pelaksanaan survei SPKP / SPAK dari Januari – Desember 2025 mendapatkan indeks SPKP sebesar 3.86 dan indeks SPAK sebesar 3.95. Nilai diatas menunjukkan Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan dengan predikat **Sangat Baik** dan Indeks Persepsi Anti Korupsi di BBPOM di Manado mendapatkan predikat **A (Bersih dari Korupsi)**. Nilai indeks diatas ikut berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian indeks pelayanan publik BBPOM di Samarinda.

Selain itu, BBPOM di Samarinda juga melaksanakan secara rutin Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara mandiri setiap bulannya melalui tautan link yang sama dengan SPKP dan SPAK melalui link sapaapip.pom.go.id. Pelaksanaan survei secara rutin ini merupakan bentuk komitmen dalam membangun sistem umpan balik (feedback mechanism) yang berkelanjutan, transparan, dan partisipatif.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Gambar 3.66
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2021-2025



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	4,35	4,45	4,25	4,60	4,70
Realisasi	4,44	4,33	4,54	4,87	4,90
Capaian	102,07	97,30	106,82	105,87	104,26

Nilai Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2024 diperoleh sebesar 4,9 dari target 4,7 sehingga capaian sebesar 104,26%. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup BBPOM di Samarinda pada perioede tahun 2021 hingga 2025, penurunan pada Tahun 2022 terjadi karena pelayanan setelah terjadinya pandemi Covid - 19 terjadi pergeseran dan peningkatan ekspektasi dan pemahaman masyarakat terkait BPOM dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Indeks pelayanan publik tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periode Renstra 2025-2029. Adapun target Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Samarinda merupakan target tahunan dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang secara teknis kembali diatur pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP. Penilaian indikator ini dilakukan secara periodik yaitu satu tahun sekali. Perubahan peraturan perundangan, tuntutan dan ekspektasi serta dinamika masyarakat di tahun mendatang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat sehingga diperlukan strategi-strategi dalam mencapai target di tahun-tahun selanjutnya hingga akhir periode renstra 2025-2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.149
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
4,9	4,9	100,00%	Tercapai/Melampaui	

Realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Samarinda tahun 2025 sebesar 4,90 dengan persentase capaian sebesar 104,26%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 4,90 capaiannya sebesar 100,0% kategori Tercapai/Melampaui. Oleh karena itu perlu dilakukan reviu terhadap target tahun selanjutnya dikarenakan relaisasi tahun 2025 telah mencapai target akhir periode Renstra.

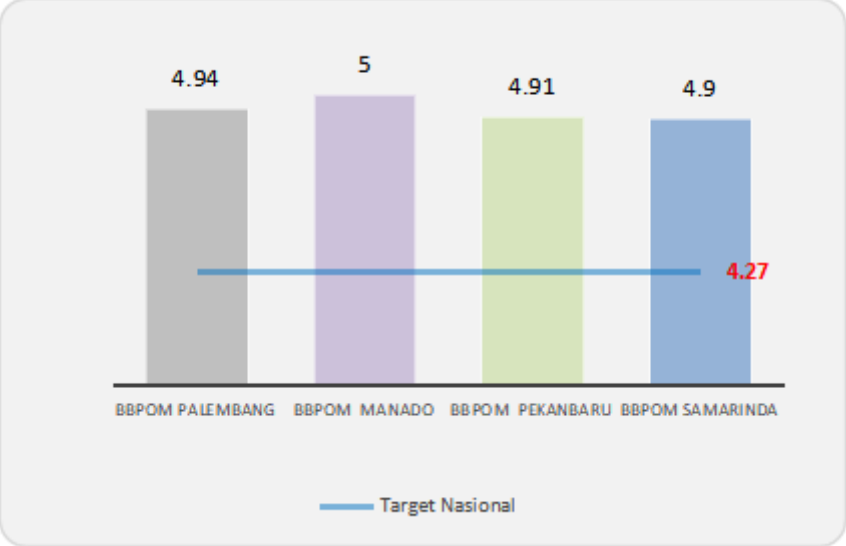
Meskipun demikian, capaian tersebut perlu dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan guna memastikan konsistensi mutu layanan serta adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan (*continuous improvement)*. Dengan strategi yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, diharapkan capaian Indeks Pelayanan Publik tidak hanya dapat dipertahankan hingga akhir periode Renstra 2029, tetapi juga mampu terus meningkat sebagai wujud komitmen BBPOM di Samarinda dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.150
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
4,27	Palembang	4,7	4,94	105,11	Sangat Baik
	Manado	4,7	5.00	106,38	Sangat Baik
	Pekanbaru	4,7	4,91	104,47	Sangat Baik
	Samarinda	4,7	4,90	104,26	Sangat Baik

Gambar 3.67
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Realisasi Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Samarinda tahun 2025 telah melampaui target nasional 4,27 meskipun bila dibandingkan dengan realisasi BBPOM dalam klaster 4, realisasi BBPOM di Samarinda mendapatkan indeks pelayanan publik terendah diantara 3 (tiga) balai lain yaitu BBPOM di Palembang, BBPOM di Manado dan BBPOM di Pekanbaru. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi untuk melakukan peningkatan pelayanan publik untuk dapat mencapai indeks pelayanan publik yang lebih optimal pada periode penilaian berikutnya..

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Selanjutnya

Pencapaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Samarinda tahun 2025 dilaksanakan terhadap enam aspek yaitu 1) Kebijakan Pelayanan, 2) Profesionalisme SDM, 3) Sarana Prasaran, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan serta 6) Inovasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Aspek Kebijakan Pelayanan
   a. Penetapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh jenis pelayanan melalui Keputusan Kepala Balai Besar POM di Samarinda Nomor HK.02.02.18A.03.25.103 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda yang ditetapkan pada 26 Maret 2025. Standar pelayanan Balai Besar POM di Samarinda telah memenuhi 14 (empat belas) komponen, jenis layanan sudah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan BPOM.
   b. Balai Besar POM di Samarinda melakukan reviu secara berkala standar pelayanan melalui kegiatan

Forum Konsultasi Pelayanan (FKP) yang melibatkan Masyarakat Pengguna Layanan, Ahli/Praktisi/Akademisi, Instansi Terkait, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Media Massa.

c. SP yang sudah ditetapkan telah dipublikasikan melalui media cetak/non elektronik (buku saku, papan pengumuman, baliho, dan infografis), media elektronik (TV layanan), media sosial (Instagram), website, SIPP Nasional, dan PPID BPOM Mobile. Balai Besar POM di Samarinda telah dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan.

d. Maklumat Pelayanan sebagai pernyataan tertulis dari pemberi layanan mengenai kewajiban dan komitmen untuk memenuhi SP, termasuk kesiapan menerima sanksi, juga telah didokumentasikan dan dapat diakses publik pada Buku, Baliho, TV, M Kios, subsite Balai Besar POM di Samarinda, Instagram, facebook, X, dan SIPPN.

e. Balai Besar POM di Samarinda telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 dan hasilnya digunakan untuk perbaikan layanan. Informasi SKM telah dipublikasikan secara luas di berbagai media seperti media cetak (papan pengumuman, baliho, buku saku), media elektronik (televisi, M Kios), media sosial (Instagram, facebook, X), website, SIPPN, dan PPID BPOM Mobile serta tindak lanjut dari hasil survei tersebut dijadikan dasar bagi kebijakan perbaikan oleh pimpinan unit pelayanan.

2. Aspek Profesionalisme SDM

a. Terdapat kebijakan jam pelayanan yang ditetapkan pada standar pelayanan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar POM di Samarinda Nomor HK.02.02.18A.03.25.103 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda. Dalam melaksanakan pelayanan, petugas telah memiliki shift sehingga tidak ada jeda pelayanan pada jam istirahat. Selain itu, pada kondisi tertentu terdapat penambahan waktu layanan di luar jam kerja, penambahan waktu layanan pada hari Sabtu dan/atau Minggu serta layanan *food security* 24 jam.

b. Telah diitetapkannya Keputusan Kepala Balai Besar POM di Samarinda Nomor HK.02.02.18A.04.25.108 Tahun 2025 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda. Unsur kode etik meliputi hak dan kewajiban, larangan KKN, larangan diskriminasi, sanksi dan penghargaan penilaian.

c. Telah dibangun mekanisme kerja untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan melalui pemberian penghargaan, kesempatan untuk mengikuti diklat, program beasiswa, olahraga rutin, program konseling, *capacity building*, quotes motivasi, RB Day, dan Ncarang Haber.

d. Pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan berprestasi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar POM di Samarinda Nomor HK.02.02.18A.01.24.4 Tahun 2024 tentang

Pemberian Reward and Punishment kepada Pelaksana dan Penerima Layanan Publik Balai Besar POM di Samarinda.

e. Penerapkan budaya layanan prima melalui aturan terkait pakaian seragam, identitas, pin, dan penerapan budaya 5S oleh petugas pelayanan serta dapat dilengkapi dengan nilai-nilai budaya pelayanan prima dengan motto "SELALU SIAP" (Semangat Melayani dengan Tulus, Smart-Inovatif-Akurat-Profesional).

3. Aspek Sarana Prasarana

a. Balai Besar POM di Samarinda telah memenuhi standar penilaian sarana dan prasarana dengan baik. Fasilitas yang tersedia mencakup area parkir yang memadai untuk kendaraan roda dua dan empat, dilengkapi dengan pemisahan antara kedua jenis kendaraan. Penempatan petugas parkir dan sistem pengawasan CCTV memastikan keamanan dan keteraturan di area parkir. Selain itu, fasilitas penitipan jaket dan helm serta pelindung berupa kanopi menambah kenyamanan bagi pengunjung. Dalam upaya meningkatkan kualitas sarana prasarana, Balai Besar POM di Samarinda berkomitmen untuk terus mempertahankan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

b. Ruang tunggu pelayanan publik Balai Besar POM di Samarinda telah dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, seperti kursi tunggu yang nyaman, pendingin udara, serta berbagai kemudahan lainnya seperti mesin antrian, televisi, bahan bacaan, akses Wi-Fi, pilihan minuman ringan, dan pengisi daya baterai alat komunikasi/charger booth.

c. Ketersediaan toilet yang layak pakai di Balai Besar POM di Samarinda juga telah memenuhi kriteria penilaian, dengan toilet yang dipisahkan antara pria dan wanita, dilengkapi dengan wastafel, toiletries, air bersih, dan monev intensitas petugas kebersihan toilet.

d. Dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan, pada Balai Besar POM di Samarinda terdapat fasilitas, antara lain kursi roda, tongkat bantu jalan, pintu masuk yang mudah diakses, step lobby/ramp, lift khusus disertai huruf braille, toilet khusus, loket khusus, ruang tunggu khusus, guiding block, parkir khusus, alat bantu tuna netra/tuna rungu/tuna wicara, arena bermain anak, dan ruang laktasi.

e. Terdapat beberapa sarana penunjang lainnya, yaitu fotocopy, kotak P3K, APAR, ruang ibadah, jalur evakuasi/titik kumpul, tempat sampah, dan CCTV.

4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

a. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Balai Besar POM di Samarinda merupakan sistem informasi pelayanan publik yang telah online/website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional serta telah meng-input layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik

nasional.

b. Subsite Balai Besar POM di Samarinda (samarinda.pom.go.id) mudah dioperasikan, mudah diakses, kompatibel, merupakan kanal digital resmi pemerintah (domain.go.id) dan navigasi yang mudah dipahami

c. Selain penyediaan informasi secara online, tersedia informasi pelayanan publik non elektronik berupa penyediaan papan pengumuman, baliho, leaflet, maupun informasi langsung pada loket pelayanan Balai Besar POM di Samarinda.

d. Subsite Balai Besar POM di Samarinda telah terhubung pada informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan berupa SP4N-LAPOR, laporan SKM, profil pelaksana layanan, FAQ, PNBP pada SIPP serta unsur pendukung lainnya seperti pengaduan WBS, pengaduan konsumen, layanan chat, e-LHKPN dan JDIH.

5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan

a. Sarana dan petugas lengkap konsultasi dan pengaduan meliputi media sosial, e-mail, surat, telepon, tatap muka, dan petugas khusus.

b. Tersedia ruang pengaduan yang terpisah dari loket pelayanan. Langkah ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan privat bagi pengunjung yang ingin menyampaikan keluhan atau masukan. Dengan adanya ruang yang terpisah, pengunjung dapat berbicara dengan lebih leluasa tanpa rasa canggung, sehingga mereka merasa lebih dihargai dan didengar.

c. Berbagai fasilitas pengaduan dan konsultasi yang disediakan oleh Balai Besar POM di Samarinda, seperti register tamu, SIPP Non Elektronik dan SIPP Elektronik, kotak pengaduan, petugas khusus serta SP4N Lapor.

6. Aspek Inovasi

a. Balai Besar POM di Samarinda telah mengembangkan inovasi pelayanan publik Si Jebol "Seksi Sertifikasi Jemput Bola". Inovasi ini ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2022 sesuai Keputusan Kepala Balai Besar POM di Samarinda Nomor HK.02.02.23A.02.22.327 dan telah ikut dalam kompetisi inovasi Kompetis Inovasi (KOIN) BPOM di tahun 2024 dan memperoleh hasil Top 24 Inovasi dan dilanjutkan dengan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan K/L, Pemda, BUMN dan BUMD tahun 2025 serta saat ini masuk dalam daftar finalis untuk kelompok replikasi.

b. Inovasi telahi didukung oleh sumber daya yang cukup untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaannya di Balai Besar POM Samarinda.

Pencapaian Indeks pelayanan publik BBPOM di Samarinda juga didukung oleh faktor-faktor antara lain:

1. Pelaksanaan SKM Mandiri BBPOM di Samarinda beserta hasil tindak lanjut rekomendasi SKM dan dipublikasikan setiap bulannya.
2. Melakukan pengelolaan konsultasi dan pengaduan BBPOM di Samarinda dengan melakukan monitoring dan evaluasi konsultasi dan pengaduan termasuk di dalamnya menambahkan analisis hambatan/kendala serta rencana aksi tindak lanjutnya.
3. Pelaksanaan implementasi inovasi Si Jebol (Seksi Sertifikasi Jemput Bola) dengan pelaporan setiap triwulan.
4. Pelaksanaan evaluasi kualitas pelayanan publik melalui evortala.pom.go.id.
5. Revisi anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan

Kendala yang dihadapi di triwulan IV dan kekurangan/kelemahan yang masih perlu perbaikan berdasarkan hasil penilaian Biro Hukor untuk indikator kinerja Indeks pelayanan publik UPT ini sebagai berikut :

- Layanan Publik khususnya di MPP dilaksanakan oleh personel dari berbagai fungsi sehingga dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kompetensi untuk dapat memberikan pelayanan publik prima kepada konsumen
- Kebijakan Pelayanan
    a. Belum seluruh dokumen Berita Acara FKP disusun dan disesuaikan secara optimal dengan ketentuan terbaru sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2024, sehingga masih diperlukan penyesuaian substansi dan format agar selaras dengan kebijakan yang berlaku.
    b. Kendala dalam menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada aspek kompetensi pelaksana adalah belum adanya pemetaan kebutuhan pelatihan yang spesifik dan terukur sesuai hasil SKM tahun berjalan, sehingga daftar pelatihan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan pelatihan sebagai bentuk tindak lanjut langsung atas rekomendasi SKM2. Sistem Informasi Pelayanan Publik
- Kendala pada sistem informasi pelayanan publik adalah belum dilakukannya analisis dan evaluasi secara komprehensif terhadap subsite Balai Besar POM di Samarinda untuk mengidentifikasi kesenjangan akses informasi bagi berbagai segmen masyarakat, serta pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik yang belum konsisten dilakukan secara harian.
- Kendala dalam aspek konsultasi dan pengaduan adalah tingkat pemanfaatan kanal pengaduan tersebut belum optimal dan sebagian masyarakat masih belum memahami mekanisme penyampaian pengaduan aplikasi tersebut dan layanan yang masuk di luar aplikasi SP4N LAPOR belum seluruhnya secara manual.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan di triwulan IV adalah melakukan peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik di BBPOM di Samarinda masih perlu terus dilakukan upaya perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian, melalui upaya sebagai berikut ::

1. Kebijakan Pelayanan
   a. Dalam pelaksanaan FKP, pada Berita Acara FKP sebaiknya menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah.
   b. Dalam rangka menindaklanjuti hasil SKM pada aspek kompetensi pelaksana di mana dilakukan peningkatan kompetensi petugas pelayanan, agar dielaborasi kembali pelatihan apa saja yang sebenarnya dibutuhkan petugas pelayanan dan selanjutnya daftar pelatihan dimutakhirkan agar selaras bahwa pelatihan dilakukan sebagai tindak lanjut dari SKM tahun berjalan.
2. Sistem Informasi Pelayanan Publik
   a. Pada subsite Balai Besar POM di Samarinda (samarinda.pom.go.id) agar dilakukan analisis/evaluasi untuk melihat adanya kesenjangan akses, sehingga diharapkan informasi yang disampaikan di subsite akan lebih beragam dan bermanfaat bagi seluruh segmen masyarakat di Kalimantan Timur, serta dilakukan pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara harian.
3. Konsultasi dan Pengaduan
   Melakukan sosialisasi aplikasi SP4N Lapor sehingga masyarakat dapat lebih memanfaatkan SP4N Lapor, atau dapat melakukan input manual.

Tabel 3.151
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Indeks Pelayanan Publik UPT	Layanan Publik khususnya di MPP dilaksanakan oleh personel dari berbagai fungsi sehingga dibutuhkan pengembangan dan peningkatan kompetensi untuk dapat memberikan	Melakukan peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik	Mengadaan pelatihan kepada petugas pelayanan publik	Desember 2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		pelayanan publik prima kepada konsumen						
2	Indeks Pelayanan Publik UPT	1. Kebijakan Pelayanan a. Belum seluruh dokumen Berita Acara FKP disusun dan disesuaikan secara optimal dengan ketentuan terbaru sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2024, sehingga masih diperlukan penyesuaian substansi dan format agar selaras dengan kebijakan yang berlaku. b. Kendala dalam menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada aspek kompetensi pelaksana adalah belum adanya pemetaan kebutuhan pelatihan yang spesifik dan terukur sesuai hasil SKM tahun berjalan, sehingga daftar pelatihan yang ada belum sepenuhnya mencerminkan pelatihan sebagai bentuk tindak lanjut langsung	1. Kebijakan Pelayanan a. Dalam pelaksanaan FKP, pada Berita Acara FKP disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah. b. Dalam rangka menindaklanjuti hasil SKM pada aspek kompetensi pelaksana dimana dilakukan peningkatan kompetensi petugas pelayanan, perlu dielaborasi kembali pelatihan apa saja yang sebenarnya dibutuhkan	1. Kebijakan Pelayanan a. Pelaksanaan FKP Melakukan penyesuaian Berita Acara FKP mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2024 b. Tindak lanjut SKM aspek kompetensi pelaksana Melakukan pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi petugas pelayanan, menyusun dan memutakhirkan daftar pelatihan serta mengaitkan pelaksanaan pelatihan secara langsung sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi SKM. 2. Sistem Informasi Pelayanan Publik Melakukan analisis dan evaluasi	TW 3-2026	Y	Infokom 7 Infokom 8	Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik belum sesuai dengan Peraturan BPOM 8 Tahun 2022 Informasi terkait layanan publik tidak diterima masyarakat secara merata

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		atas rekomendasi SKM2. Sistem Informasi Pelayanan Publik 2. Kendala pada sistem informasi pelayanan publik adalah belum dilakukannya analisis dan evaluasi secara komprehensif terhadap subsite Balai Besar POM di Samarinda untuk mengidentifikasi kesenjangan akses informasi bagi berbagai segmen masyarakat, serta pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik yang belum konsisten dilakukan secara harian. 3. Kendala dalam aspek konsultasi dan pengaduan adalah tingkat pemanfaatan kanal pengaduan tersebut belum optimal dan sebagian masyarakat masih belum memahami mekanisme penyampaian pengaduan aplikasi tersebut dan layanan yang masuk di luar aplikasi SP4N	petugas pelayanan dan selanjutnya daftar pelatihan dimutakhirkan agar selaras bahwa pelatihan dilakukan sebagai tindak lanjut dari SKM tahun berjalan. 2. Sistem Informasi Pelayanan Publik Pada subsite Balai Besar POM di Samarinda (samarinda.pom.go.id) perlu dilakukan analisis/evaluasi untuk melihat adanya kesenjangan akses, sehingga diharapkan informasi yang disampaikan di subsite akan lebih beragam dan bermanfaat bagi seluruh segmen masyarakat di Kalimantan Timur, serta	terhadap subsite Balai Besar POM di Samarinda untuk mengidentifikasi kesenjangan akses informasi bagi seluruh segmen masyarakat, disertai dengan pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik secara harian. 3. Konsultasi dan Pengaduan Melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan aplikasi SP4N LAPOR melalui berbagai kanal komunikasi, serta melakukan input layanan konsultasi dan pengaduan secara manual ke SP4N LAPOR.				

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		LAPOR belum seluruhnya secara manual.	dilakukan pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara harian. 3. Konsultasi dan Pengaduan Melakukan sosialisasi aplikasi SP4N Lapor sehingga masyarakat dapat lebih memanfaatkan SP4N Lapor, atau dapat melakukan input manual.					

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.152
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A	Audit Sarana Produksi dan Distribusi Dalam Rangka Sertifikasi				
			- Perjalanan Dinas Biasa	6	KL	6	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	45	KL	45	KL
		B	Audit Sarana Produksi dan Distribusi Dalam Rangka Sertifikasi (Relaksasi Anggaran)				
			- Perjalanan Dinas Biasa	7	KL	7	KL
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	4	KL	4	KL

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
BAH.001.052	Penerbitan keputusan/ sertifikat layanan publik	A	Sosialisasi Izin Edar Badan POM di Kabupaten Kutai Barat - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	KL	1	KL
		F	Forum Konsultasi Publik - Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1	KL	1	KL
QDB.002.054	Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	H	Pelatihan Pelayanan Publik - Pembelian perlengkapan layanan publik - Pencetakan poster - Honor Narsum Eksternal	8 4 1	PKT PKT KL	8 4 1	PKT PKT KL
QDB.003.053	Sosialisasi/ penyuluhan/ pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	D	Pelatihan Layanan Publik - Konsumsi Peserta	1	KL	1	KL

Upaya pencapaian Indeks pelayanan publik BBPOM di Samarinda ditunjang oleh kegiatan berikut :

1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik BBPOM di Samarinda.
2. Publikasi Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan dan Hasil SKM secara berkala melalui media publikasi.
3. Melakukan pengelolaan konsultasi dan pengaduan BBPOM di Samarinda dengan melakukan monitoring dan evaluasi konsultasi dan pengaduan baik layanan di Mall Pelayanan Publik maupun Unit Pelayanan Publik BBPOM di Samarinda.
4. Pelaksanaan implementasi inovasi Si Jebol dengan pelaporan setiap triwulan. Inovasi ini telah ikut dalam kompetisi inovasi Kompetis Inovasi (KOIN) BPOM di tahun 2024 dan memperoleh hasil Top 24 Inovasi dan dilanjutkan dengan mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan K/L, Pemda, BUMN dan BUMD tahun 2025 serta saat ini masuk dalam daftar finalis untuk kelompok replikasi.
5. Pelaksanaan evaluasi kualitas pelayanan publik melalui evortala.pom.go.id. Monitoring evaluasi dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPKP dan SPAK secara rutin.
6. Upaya penjadwalan MPP Kota Samarinda dan MPP Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan publik melalui pelatihan dengan materi terkait komunikasi efektif dan pelayanan publik prima.

Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda meraih apresiasi sebagai Unit Pelayanan Publik BPOM dengan kategori “Pelayanan Publik Prima” berdasarkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Selain itu juga diperoleh apresiasi sebagai “Badan Publik Informatif” dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik baik yang diselenggarakan oleh Badan POM maupun oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian Indeks Pelayanan Publik (IPP), Balai Besar POM di Samarinda terus mengembangkan berbagai inovasi layanan yang berorientasi pada kemudahan akses, kecepatan layanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat. Tiga inovasi unggulan yang secara signifikan menunjang capaian IPP adalah inovasi Si Jebol, Molen Mahakam, dan BPOM Yes.

Inovasi Si Jebol (Seksi Sertifikasi Jemput Bola) merupakan pelayanan pendampingan izin edar dengan mendekatkan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM, melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha maupun sentra produksi. Melalui pendekatan ini, proses konsultasi, pendampingan registrasi produk, serta pembinaan dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan responsif. Implementasi Si Jebol berdampak pada meningkatnya kepuasan pengguna layanan serta percepatan waktu penyelesaian layanan, yang menjadi indikator penting dalam penilaian IPP.

Selanjutnya, inovasi MOLEN Mahakam (Masyarakat Online Lapor E-Commerce Nakal) merupakan platform yang dapat digunakan masyarakat khususnya di daerah Kalimantan Timur untuk melapor E-commerce yang menjual produk obat dan makanan ilegal.. Kehadiran Molen Mahakam memperkuat aspek keterjangkauan layanan, transparansi informasi, serta partisipasi publik, yang berkontribusi positif terhadap dimensi kualitas pelayanan dalam IPP.

Adapun inovasi BPOM Yes (Yakin Esok Selesai) merupakan program kerja yang termasuk dalam program kerja unggulan BBPOM di Samarinda. BPOM YES merupakan Pelayanan pengujian sampel pihak ketiga dengan percepatan layanan pengujian sampel barang bukti NAPPZA dalam waktu 1 hari sudah terbit Hasil Pengujian.

Secara keseluruhan, ketiga inovasi tersebut berkontribusi nyata dalam mendukung capaian Indeks Pelayanan Publik melalui peningkatan aksesibilitas layanan, percepatan proses, peningkatan kualitas interaksi antara petugas dan pengguna layanan, serta penguatan sistem pengelolaan pengaduan dan informasi. Sinergi inovasi pelayanan publik ini menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong peningkatan nilai IPP BBPOM di Samarinda serta memperkuat komitmen organisasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.153
Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda	69.062.000	69.024.346	99,95	104,26	100% (Efisien)

Penggunaan sumber daya/anggaran sampai dengan tahun 2025 dengan target anggaran sebesar tercapai realisasi sebesar sebesar 99,95% dengan % capaian indikator 104,26% dengan **kriteria Efisien** sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2025 telah sepenuhnya efisien mendukung pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik.

Upaya yang dilakukan tahun 2025 dalam pencapaian tingkat efisiensi anggaran antara lain melalui kegiatan Audit Sarana Produksi dan Distribusi Dalam Rangka Sertifikasi, Sosialisasi Izin Edar Badan POM serta pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik Publik sehingga Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan BBPOM di Samarinda dapat ditetapkan dan segera dilakukan publikasi baik melalui media online maupun offline.

Upaya pencapaian tingkat efisiensi dalam indeks layanan publik BPOM juga melalui penggunaan anggaran untuk pelatihan petugas pelayanan publik untuk peningkatan kompetensi petugas terkait komunikasi efektif dan pelayanan publik prima.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pemanfaatan pengukuran indeks pelayanan public BBPOM di Samarinda yang tertuang dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan sebagai:

1. Menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan/peningkatan program pelayanan publik serta pengawasan obat dan makanan. Pemerintah mengamanatkan penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
2. Penyesuaian terhadap hasil kinerja tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkann pada Tahun 2026.
3. Konsistensi pelayanan terhadap masyarakat melalui keberadaan BBPOM di Samarinda di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2026.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan BBPOM di Samarinda telah mengelola beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian target kinerja indikator ini yang tertuang pada daftar risiko semester 2 tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

- Unsur Inovasi dalam Indikator Penilaian Indeks Pelayanan Publik tidak mencapai nilai optimal
- Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik belum sesuai dengan Peraturan BPOM 8 Tahun 2022
- Informasi terkait layanan publik tidak diterima masyarakat secara merata karena Publikasi terkait Layanan Informasi Publik belum dilakukan pada semua bentuk media informasi

Aktivitas pengendalian yang telah dilakukan oleh BBPOM di Samarinda dalam mengurangi dampak risiko yang

mungkin akan terjadi dan berdampak terhadap pencapaian target indikator kinerja persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

- Pengajuan Proposal Inovasi untuk lomba
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil FKP di tahun sebelumnya
- Melakukan publikasi layanan publik melalui aplikasi PPID BPOM Mobile

.

SK 8

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Pencapaian Sasaran Kegiatan ke 8 pada tahun 2025 diukur dengan 4 (empat) **Indikator Kinerja Utama (IKU).** Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel 3.154
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 8 Terhadap Target Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Katgeori	Notifikasi Warna
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda	88.69	88.04	99.27	Baik	
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	83.60	82.26	98.40	Baik	
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	5.00	5.00	100.00	Baik	
	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda	3.50	3.50	100.00	Baik	
Capaian Sasaran Kegiatan				**99.42**	Baik	

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 8 ini di Tahun 2025 diperoleh dari 4 indikator yaitu Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda dengan persentase capaian sebesar 99.27% dengan kategori capaian **Baik**, Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda dengan persentase capaian sebesar 98.40% dengan kategori capaian **Baik**, Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda dengan persentase capaian sebesar 100.00% dengan kategori capaian **Baik**, dan Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda dengan persentase capaian sebesar 100.00% dengan kategori capaian **Baik**. Maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Sasaran Kegiatan 8 ini di Tahun 2025 diperoleh sebesar 99.42% ydengan kategori capaian **Baik**. Masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan;
2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:

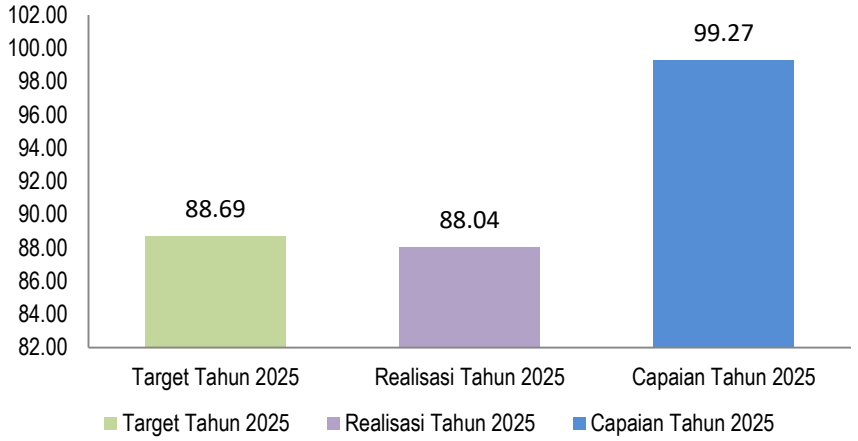
No	Komponen Pengungkit	Bobot
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	Komponen Hasil	Bobot
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 telah diperoleh hasilnya, namun baru akan dilakukan perhitungan pada akhir tahun.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.68
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025



Tabel 3.155
Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
88.69	88.04	99.27	Baik	

Berdasarkan nota dinas Inspektorat Utama Badan POM nomor B-PI.06.06.7.08.25.279 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Balai Besar POM di Samarinda, realisasi pada tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 88.04 sehingga capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 99.27%.dengan kategori **Baik**. Berikut **Rincian Hasil Evaluasi Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda**

Tabel 3.156
Rincian Hasil Evaluasi Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda

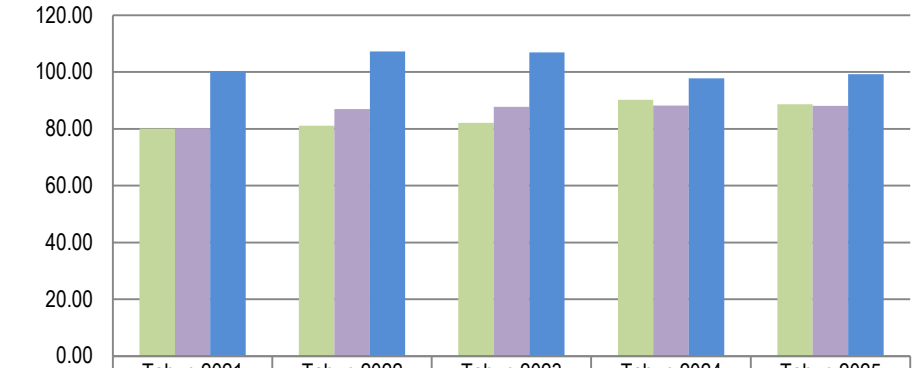
PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,28	4,00	7,28	**MS**
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	3,00	3,00	6,00	**MS**
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,48	4,25	8,73	**MS**

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,01	4,09	8,10	**MS**
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	5,44	6,88	12,32	**MS**
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,68	4,17	8,85	**MS**
TOTAL PENGUNGKIT						**51,28**	
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			19,78	
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,28	**MS**
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	**MS**
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,98	
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,98	**MS**
TOTAL HASIL						**36,76**	
NILAI PMPZI						**88,04**	

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,88 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,95 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB. Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 2,5 (syarat 2,5) sesuai yang ditetapkan KemenPANRB.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Gambar 3.69
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2021-2025



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	80.10	81.10	82.10	90.25	88.69
Realisasi	80.14	86.94	87.79	88.24	88.04
Capaian	100.05	107.20	106.93	97.77	99.27

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2021–2023 realisasi kinerja selalu melampaui target, dengan persentase capaian tertinggi terjadi pada Tahun 2022 sebesar 107,20%. Meskipun pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 terjadi penurunan capaian kinerja, Balai Besar POM di Samarinda tetap menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan Nilai Pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain dengan penguatan area perubahan yang mencakup manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta penguatan akuntabilitas kinerja.

.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.157
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
90.49	88.04	97.29	Akan Tercapai	

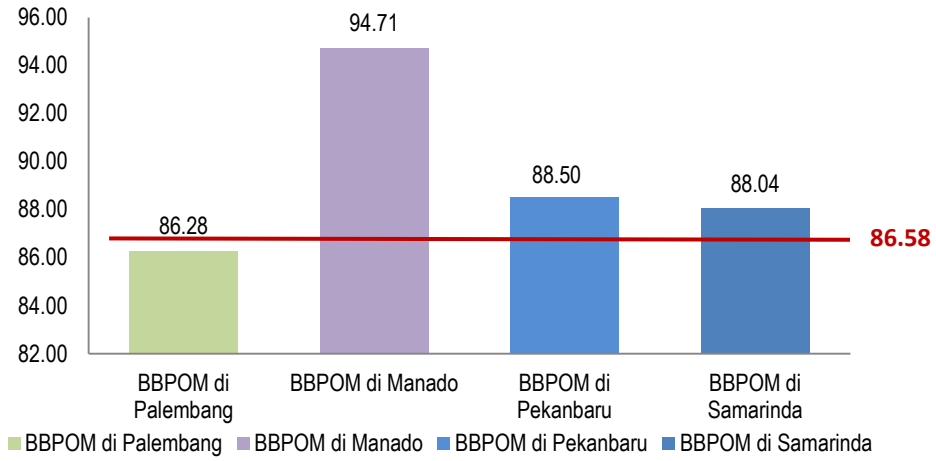
Realisasi Nilai Pembangunan Zona Integritas Balai Besar POM di Samarinda pada Tahun 2025 sebesar 88.04 belum mencapai target akhir periode Rencana Strategis sebesar 90.49 dengan persentase capaian sebesar 97.29% dan termasuk dalam kategori **Akan Tercapai**. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Samarinda akan terus melakukan peningkatan kinerja secara berkesinambungan melalui perumusan dan pelaksanaan strategi serta upaya yang efektif, efisien, dan inovatif, guna memastikan tercapainya target akhir periode Rencana Strategis pada Tahun 2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster ...) dan Target Nasional

Tabel 3.158
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
86.58	Palembang	85.90	86.28	100.44	Sangat Baik
	Manado	94.40	94.71	100.33	Sangat Baik
	Pekanbaru	88.26	88.50	100.27	Sangat Baik
	Samarinda	88.69	88.04	99.24	Baik

Gambar 3.70
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi tertinggi Nilai Pembangunan ZI adalah BBPOM di Manado dan yang terendah adalah BBPOM di Samarinda. Berdasarkan perbandingan dengan target nasional, untuk BBPOM di Manado, BBPOM di Pekanbaru dan BBPOM di Samarinda realisasi telah melampaui target nasional, hanya realisasi BBPOM di Palembang yan berada dibawah nilai target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

BBPOM di Samarinda terus melakukan *continuous improvement* di tahun 2025 dengan adanya beberapa tindakan perbaikan dan yang dijalankan atas evaluasi tahun sebelumnya pada 6 (enam) area perubahan dari rekomendasi tahun sebelumnya yang secara ringkas sebagai berikut:

1. Membuat inovasi tentang pelaporan gratifikasi,

   Pengendalian gratifikasi Internal sebagai berikut :

   a. Pelaporan terhadap penerimaan/penolakan Gratifikasi melalui : - sangintegritas.pom.go.id - bit.ly/Laporin_BBPOMSmd
   b. Public campaign anti gratifikasi di sosial media BBPOM Samarinda secara berkala
   c. Pencantuman anti gratifikasi dan kanal pengaduan di surat tugas
   d. Monitoring dan Evaluasi

2. Penanganan pengaduan masyarakat (pihak eksternal) sebagai berikut :

   a. Mengisi survei integritas melalui QR Code CERMIN BPOM atau website bit.ly/CERMIN_BBPOMSmd
   b. Melaporkan pengaduan melalui kanal pengaduan BBPOM di Samarinda
   c. Pencantuman anti gratifikasi dan kanal pengaduan di surat tugas dan surat dinas eksternal
   d. Sosialisasi kanal pengaduan masyarakat melalui KIE maupun sosial media Monitoring dan Evaluasi
   e. Layanan pengaduan masyarakat : QR Code CEK POIN, website : https://bit.ly/CekPoin_BBPOMSmd, email : beranilapor.smd@gmail.com, nomor Whatsapp : 0811-5547-575 dan kotak pengaduan

3. Menyusun dokumentasi penempatan pegawai sesuai matriks kebutuhan pegawai setiap jabatan (peta jabatan)
4. Memanfaatan program coaching mentoring pada aplikasi ppsdm.pom.go.id menu CMC untuk pemberian coaching mentoring kepada pegawai
5. Membuat pelatihan tentang Pelatihan tentang Pengembangan Aplikasi Berbasis Web untuk mengupgrade inovasi yang sudah ada seperti ALADIN dan SITUKIN yang masih berbasis Microsoft Access yang akan dilaksanakan pada tahun 2025
6. Membuat booklet yang berisi tentang daftar inovasi yang ada di BBPOM di Samarinda disertai dengan narasi latar belakang pembuatan dan dampak before-afternya

Beberapa hal yang dinilai menjadi penyebab belum tercapainya target kinerja yang secara umum juga sekaligus menjadi koreksi tindakan perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Komponen Hasil (Outcome)

   Nilai komponen hasil mengalami penurunan dari 37,09 pada Tahun 2024 menjadi 36,76 pada Tahun 2025 (turun 0,33 poin). Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh indikator "capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya". Dari 34 indikator kinerja:

   - Terdapat 6 indikator yang tidak mencapai target dan tidak lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
   - Terdapat 9 indikator yang mencapai ≥100% target, namun tidak lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

2. Analisis Komponen Pengungkit (Proses)

   Komponen pengungkit mengalami kenaikan nilai dari 51,15 pada Tahun 2024 menjadi 51,28 pada Tahun 2025 (naik 0,13 poin). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola organisasi. Namun demikian, pada Pokja Penataan Tatalaksana dan Penguatan Akuntabilitas terdapat sedikit penurunan nilai.

Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI), beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan belum seluruhnya sesuai rencana, serta terdapat rencana aksi yang belum terlaksana tanpa rencana tindak lanjut.
2. Monitoring dan evaluasi penggunaan SPBE belum mencakup seluruh teknologi informasi pelayanan publik.
3. Dokumentasi pertimbangan kompetensi dalam mutasi pegawai belum optimal.
4. Monitoring dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi belum dilaksanakan secara berkala.
5. Arahan pimpinan dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja belum terdokumentasi dengan baik.
6. Public campaign pengendalian gratifikasi belum dilaksanakan secara berkala.
7. Sosialisasi SPI kepada stakeholder belum dilakukan secara rutin.
8. Monitoring dan evaluasi benturan kepentingan belum dilaksanakan secara berkala.
9. Pelatihan pelayanan prima belum mencakup seluruh petugas layanan publik.
10. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK belum terselesaikan 100%.

Upaya-upaya perbaikan selanjutnya untuk peningkatan dan penyempurnaan kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.159
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda	1. Terjadi penurunan nilai komponen hasil tahun 2024=37,09 di tahun 2025 menjadi=36,76 komponen yang mengalami penurunan yaitu capaian kinerja lbh baik dari tahun sebelumnya, dari 34 indikator terdapat 6 indikator kinerja yang tidak mencapai target dan tidak lebih baik dari sebelumnya dan terdapat 9 indikator kinerja yang capaian tdk lbh baik dari sebelumnya meskipun capaian nya >=100% 2. Komponen pengungkit mengalami kenaikan nilai dari 51,15 di tahun 2024 menjadi 51,28 di tahun 2025, namun pada pokja penataan tatalaksana dan penguatan akuntabilitas mengalami sedikit	1. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan ZI sesuai timeline yang telah ditetapkan, melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun rencana tindak lanjut atas rencana kerja yang belum terlaksana. 2. Melaksanakan monev penggunaan SPBE pada seluruh teknologi informasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik dan pelayanan internal. 3. Mendokumentasikan pemberian pertimbangan unit kerja dalam proses mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. 5.	1. Pokja Akuntabilitas a. melakukan reviu perencanaan target kinerja output dan outcome tahun 2026 dengan memperhitungkan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya b. menyusun dokumentasi rapat perencanaan yang lebih terperinci memuat arahan pimpinan pada seluruh tahapan penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja 2. Pokja Pelayanan Publik Melaksanakan pelatihan pelayanan prima lanjutan bagi seluruh petugas layanan disertai evaluasi untuk memastikan pemenuhan kompetensi. 3. Pokja Manajemen Perubahan a. Menyusun program prioritas RB Tahun 2026 sesuai dengan rekomendasi perbaikan TPI Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 b. Melaksanakan continous	1. TW 1 2026 2. TW 4 2026 3. TW 2 2026 4. TW 4 2026 5. TW 2 2026 6. TW 2 2026 7. Desember 2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		penurunan Hasil penilaian TPI yang masih perlu berbaikan sebagai berikut : 1. Kegiatan pembangunan telah dilaksanakan, namun belum seluruhnya sesuai dengan rencana serta pada monitoring dan evaluasi terdapat rencana aksi yang belum terlaksana namun belum ada rencana tindak lanjut. 2. Monitoring dan evaluasi penggunaan SPBE belum mencakup seluruh teknologi informasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik. 3. Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi serta unit kerja memberikan pertimbangan,	Mendokumentasikan arahan pimpinan pada seluruh tahapan penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja, serta memperkuat perencanaan kinerja output dan outcome tahun 2026 dengan memperhitungkan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya 6. Melaksanakan public campaign gratifikasi secara berkala. 7. Melakukan sosialisasi SPI kepada stakeholder secara berkala. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi benturan kepentingan secara berkala. 9. Melakukan pelatihan pelayanan prima pada seluruh petugas layanan publik dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pelatihan tersebut. 10. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit BPK sesuai saran. 11. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI	improvement dalam penyusunan program Agen Perubahan Tahun 2026 4. Pokja Pengawasan a. melaksanakan public campaign gratifikasi secara berkala b. melakukan sosialisasi SPI kepada stakeholder secara berkala c. melakukan monitoring dan evaluasi benturan kepentingan secara berkala 5. Pokja Tata Laksana a. Melakukan pendataan seluruh aplikasi dan sistem informasi yang digunakan oleh unit kerja b. membuat tools untuk melakukan monev terhadap semua penggunaan SPBE pada seluruh teknologo informasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan pubilk dan pelayanan internal 6. Pokja SDM a. Mendokumentasikan pemberian pertimbangan unit kerja dalam proses mutasi pegawai antar jabatan				

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		namun belum terdokumentasi dengan baik. 4. Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja yang dilakukan secara berkala. 5. Pimpinan ikut terlibat dalam tahapan penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja, namun arahan belum terdokumentasi dengan baik. 6. Pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan dan dievaluasi, namun public campaign belum dilakukan secara berkala. 7. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait, namun sosialisasi kepada stakeholder belum dilakukan secara berkala. 8. Monitoring	sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.	dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi. b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala. 7. Penyerahan pengurusan piutang negara ke KPKNL sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK				

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		dan evaluasi benturan kepentingan belum dilaksanakan secara berkala. 9. Telah dilakukan pelatihan pelayanan prima dan help desk bagi sebagian besar petugas layanan, namun belum mencakup seluruh petugas layanan publik. 10. Terdapat tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK yang belum selesai 100%.						

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.160
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
BKB.001.051	Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AF	Pembinaan Mental dan Spiritual melalui Peningkatan Jasmani dan Rohani - Instruktur Senam	4	KL	4	KL
		AH	Honor Pengelola PNBP - Pengelola PNBP	6	KL	6	KL
BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	A	Perjalanan Konsultasi/ Koordinasi ke Pusat dan antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota - Perjalanan Dinas Biasa	2	KL	2	KL

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3	KL	3	KL
		B	Koordinasi / Konsultasi ke KPPN/ DJPB/ Stakeholder lain Terkait urusan Perkantoran				
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	94	KL	94	KL
EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	A	Pembayaran gaji dan tunjangan				
			- Belanja Gaji Pokok PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunj.Anak PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunjangan PPh PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunj Beras PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Uang Makan PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunjangan Umum PNS	1	THN	1	THN
			- Gaji Pokok PPPK	1	THN	1	THN
			- Pembulatan Gaji PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Suami/ Istri PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Anak PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Fungsional PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Beras PPPK	1	THN	1	THN
			- Uang Makan PPPK	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunjangan Umum PPPK	1	THN	1	THN
		B	Uang Lembur				
			- Uang Lembur Golongan II	1	THN	1	THN
			- Uang Lembur Golongan III	1	THN	1	THN
			- Uang Lembur Golongan IV	1	THN	1	THN
			- Uang Lembur P3K Golongan IX	1	THN	1	THN
EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A	Perawatan Gedung Kantor				
			- Pemeliharaan gedung kantor	1	THN	1	THN
			- Pemeliharaan halaman gedung kantor	1	THN	1	THN
			- Pemeliharaan gedung kantor	1	THN	1	THN
		B	Perbaikan Peralatan				
			- Pemeliharaan alat pengolah data	48	UNIT	48	UNIT
			- Pemeliharaan inventaris kantor	315	UNIT	315	UNIT
			- Pemeliharaan tabung	8	UNIT	8	UNIT

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
			pemadam api				
			- Pemeliharaan AC	78	UNIT	78	UNIT
			- Pemeliharaan Lift	1	UNIT	1	UNIT
		C	Perbaikan Peralatan Fungsional				
			- Pemeliharaan inventaris peralatan laboratorium	1	PKT	1	PKT
		D	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4				
			- Perawatan Kendaraan Roda 4	9	UNIT	9	UNIT
		E	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2				
			- Perawatan Kendaraan Roda 2	2	UNIT	2	UNIT
		F	Langganan Daya dan Jasa				
			- Pembayaran Listrik	12	BLN	12	BLN
			- Pembayaran Telepon	12	BLN	12	BLN
			- Pembayaran Air	12	BLN	12	BLN
		G	Perawatan Sarana Genset dan Pembelian Solar				
			- Pemeliharaan Genset 450 KVA				
			- Pembelian solar untuk genset 450 KVA	1	UNIT	1	UNIT
				1	PKT	1	PKT
		H	Kebersihan				
			- Pembuangan Sampah	1	KL	1	KL
		I	Uang Honor				
			- Honor Pengelola Keuangan	12	BLN	12	BLN
			- Honor Pengelola SAI	12	BLN	12	BLN
		J	Sewa Jaringan				
			- Biaya Langganan Zoom Meetin	12	BLN	12	BLN
			- Biaya Langganan Internet	12	BLN	12	BLN
		K	Administrasi Kegiatan Perkantoran				
			- Keperluan pokok/ sehari-hari perkantoran	12	BLN	12	BLN
			- Biaya/ benda pos	1	PKT	1	PKT
			- Penggandaan/ Belanja Bahan Perkantoran	1	PKT	1	PKT
			- Pencetakan	1	PKT	1	PKT
			- ATK/ Perlengkapan Komputer	12	PKT	12	PKT
			- Pembuatan Video Branding Inovasi Layanan Publik	2	PKT	2	PKT
		L	Pemeliharaan Jaringan LAN				
			- Pemeliharaan Jaringan LAN	1	PKT	1	PKT
		M	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
			- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12	BLN	12	BLN
		N	Biaya Laboran/ Satpam/ Pramubakti/ Pengemudi				
			- Biaya Laboran/ Pramubakti	10	BLN	10	BLN
			- Biaya Pramubakti	6	BLN	6	BLN
			- Uang Lembur	8	BLN	8	BLN
			- Biaya Outsourching Resepsionis/ Arsiparis/ Administrasi/ Sekretaris	12	BLN	12	BLN
		O	Tersedianya Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh				
			- Makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh	8	BLN	8	BLN
		P	Pemeliharaan IPAL/ Pemusnahan Limbah B3				
			- Pemusnahan Limbah B3	1	PKT	1	PKT
			- Biaya Pengujian Sampel Output IPAL	3	PKT	3	PKT
		R	Sewa Rumah Dinas di Samarinda				
			- Sewa rumah dinas di Samarinda	1	THN	1	THN
		T	Pembinaan Mental Spiritual melalui Peningkatan Jasmani dan Rohani/ Pengembangan Kompetensi				
			- Narasumber	1	KL	1	KL
		U	Pelatihan dan Ujian Pengadaan Barang dan Jasa				
			- Konstribusi Pelatihan dan Ujian Pengadaan Barang dan	5	OR	5	OR
		V	Kolaborasi Pengawasan Obat dan Makanan				
			- Snack	1	KL	1	KL
			- Makan	1	KL	1	KL

Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI di tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penetapan anggota tim pembangunan ZI tahun 2025 pada unit kerja berdasarkan mekanisme dan pemenuhan kriteria pemilihan tim pembangunan ZI sesuai kebijakan kepala unit serta mendokumentasikannya secara memadai

2. Menetapkan dan melaksanakan rencana kerja dan program prioritas atas pembangunan ZI secara komprehensif yang relevan dengan tujuan akhir pembangunan ZI
3. Mengisi Lembar Kerja Evaluasi ZI sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025
4. Melaksanakan Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan ZI
5. Monev Rencana Kerja Pembangunan ZI oleh auditor internal berkala setiap triwulan
6. Pengawalan keberlanjutan atas inovasi-inovasi yang telah dilakukan
7. Pembentukan Tim *Agent of Change* BBPOM di Samarinda dengan berbagai program/kegiatan meliputi:
   - **POMCast**

     Dialog interaktif antara BBPOM Samarinda dengan internal pegawai/*stakeholde*r/masyarakat tentang pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Timur secara umum yang dilakukan sebanyak 1x setahun.
   - **BBPOM di Samarinda GTM (*Goes to Masyarakat*)**

     BBPOM di Samarinda hadir diantara komunitas untuk membantu meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan terkait usaha dibidang obat dan makanan yang dilakukan sebanyak 1x setahun.
   - **Ncarang Haber**

     Inovasi yang dicanangkan untuk meningkatkan rasa kebersamaan antar pegawai BBPOM di Samarinda dengan makan bersama dilakukan sebanyak 2x setahun.
   - **Undas of the Month**

     Sebagai apresiasi terhadap pegawai yang memiliki hasil kinerja yang baik maka Tim *Agent of Change* BBPOM di Samarinda memberikan penghargaan terhadap secara berkala setiap bulan sehingga meningkatkan nilai values loyal pegawai.
   - ***Inovation cycle***

     Suatu wadah untuk memfasilitiasi inovasi dari pegawai BBPOM di Samarinda dapat terimplementasikan secara berkelanjutan.
   - **RB Days**

     RB Days merupakan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk membuka akses informasi melalui program mentoring/sharing session dimana pegawai yang berpengalaman dapat membagikan pengalaman atau pengetahuannya kepada pegawai muda/baru atau sebaliknya.

- **Kolaborasiin JJS (Jumat Jumpa Si Jebol)**

  Tim *Agent of Change* BBPOM di Samarinda berkolaborasi bersama tim inovasi Si Jebol BBPOM di Samarinda dalam mendukung UMKM Kalimantan Timur. Dibuat dalam bentuk video informasi terkait sediaan farmasi dan produk pangan yang dibutuhkan UMKM.

- **Kata-kata Hari Ini**

  Memberikan kata-kata motivasi dalam rangka meningkatkan nilai BerAKHLAK pegawai BBPOM di Samarinda yang disebarkan melalui media sosial.

- **Mini Aksi (Mini Soccer sambil Edukasi)**

  Kegiatan mini soccer bersama stakeholder yang dibalut dalam edukasi obat dan makanan melalui bincang singkat dan pamflet digital.

- **Jalan Baru**

  Memberikan apresiasi kepada pegawai BBPOM di Samarinda yang akan purna bakti ditambahkan terkait pelatihan buat pegawai BPOM

- **Etam Berbagi**

  Mengusung *core values* BerAKHLAK dengan values Harmonis dan Akuntabel, BBPOM di Samarinda ingin mewujudkan kepeduliaan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk Etam Berbagi (Kita Berbagi) dimana dapat bervupa pengumpulan dana, barang, ataupun bantuan kepada masyarakat sekitan BBPOM di Samarinda yang membutuhkan. Tim *Agent of Change* BBPOM di Samarinda sebagai PIC akan mengkoordinir, menginformasikan kepada seluruh pegawai BBPOM di Samarinda agar dapat mengumpulkan bantuan dan akan menyalurkan seluruh bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.161
Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda	3.237.925.750	3.236.256.704,10	99,95%	99,27	Tidak Efisien

Tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian Nilai Pembangunan Zona Integritas Balai Besar POM di Samarinda pada Tahun 2025 berada pada kategori Tidak Efisien. Realisasi anggaran yang dialokasikan

untuk mendukung pembangunan Zona Integritas pada Tahun 2025 mencapai 99.95%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 99.27%. Kondisi tersebut menunjukkan belum selarasnya antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran, di mana target kinerja belum sepenuhnya tercapai. Hal ini secara umum disebabkan oleh penurunan nilai pada indikator capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, serta belum selesainya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK secara menyeluruh. Selain itu, dinamika alokasi anggaran pada Tahun 2025 yang dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi turut mengakibatkan adanya penyesuaian anggaran, termasuk keterbatasan alokasi pada beberapa kegiatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan anggaran pada Tahun 2025 belum sepenuhnya efisien dalam mendukung pencapaian indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Balai Besar POM di Samarinda.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Informasi yang termuat dalam Laporan Kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan guna meningkatkan pencapaian kinerja organisasi. Hasil evaluasi capaian kinerja menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan yang diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja dibandingkan periode sebelumnya.

Memasuki periode Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, hasil penilaian capaian kinerja dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan reviu terhadap target indikator, khususnya indikator nilai pembangunan Zona Integritas (ZI), agar lebih realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Selain itu, rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil evaluasi pembangunan ZI pada BBPOM di Samarinda digunakan sebagai rujukan prioritas dalam penyempurnaan rencana kerja serta penetapan prioritas pembangunan ZI pada periode berikutnya.

Di sisi lain, dinamika alokasi anggaran Tahun 2025 yang dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi mengakibatkan adanya penyesuaian kebutuhan anggaran, termasuk alokasi yang relatif terbatas. Dalam menghadapi kondisi tersebut, BBPOM di Samarinda secara adaptif melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran secara paralel dengan pengawalan pelaksanaan kinerja dan kegiatan lain yang saling mendukung. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Laporan Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program secara lebih terarah, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda terdapat beberapa resiko yang perlu dilakukan mitigasi risiko antara lain:

1. Nilai ZI di area penguatan pengawasan turun dari tahun sebelumnya karena belum adanya inovasi pelaporan gratifikasi di lingkungan BBPOM Samarinda
2. Rendahnya Pemahaman Pegawai mengenai RB Tematik karena belum terpapar materi RB Tematik secara mendalam
3. Kurang adanya inovasi baru berbasis SPBE karena kurangnya kemampuan pegawai dalam membuat inovasi berbasis digital serta terbatasnya waktu yang tersedia untuk pengembangan inovasi

Adapun tujuan dilakukan mitigasi resiko yaitu untuk mengurangi kejadian dan atau dampak risiko dengan beberapa aktivitas diantaranya:

1. Penyampaian saluran pelaporan gratifikasi melalui surat tugas.
2. Menyelenggarakan Refreshment RB Tematik dan RB General
3. Menyelenggarakan pelatihan tentang pembuatan inovasi berbasis digital

2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar di Samarinda yang optimal salah satu indikator kinerja sasaran adalah Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan strategis, pelaksanaan dan monitoring, sehingga implementasi SAKIP merupakan salah satu implementasi area perubahan reformasi birokrasi.

Evaluasi AKIP berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM terdiri dari penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian dengan pembobotan sebagai berikut :

1. **Perencanaan Kinerja (24%) meliputi aspek**:

a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (4.8%)
b. Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) (7.2%)
c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12%)

2. Pengukuran Kinerja (24%) meliputi aspek:

a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4.8%)
b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7.2%)
c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (12%)

3. Pelaporan Kinerja (12%) meliputi aspek:

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2.4%)
b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3.6%)
c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6%)

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20%) meliputi aspek:

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4%)
b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6%)
c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (10%)

5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:

a. Kinerja yang dilaporkan (*output)* (7.5%)
b. Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (12.5%)

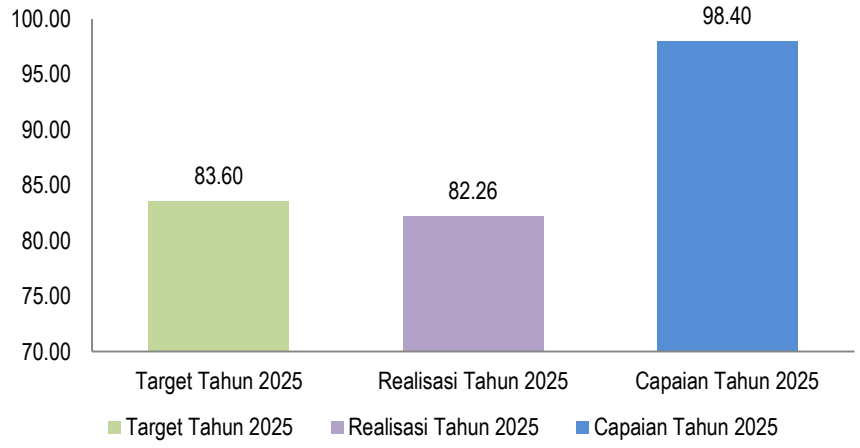
Pencapaian target indikator kinerja utama Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda diukur pada akhir tahun 2025. Nilai capaian indikator kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Utama Badan POM RI.

Predikat nilai AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.71
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025



Tabel 3.162
Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda

Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
83,60	82,26	98,40	Baik	

Berdasarkan nota dinas Inspektorat Utama Badan POM nomor PI.04.71.7.01.26.60 tanggal 27 Januari 2026 perihal Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Balai Besar POM di Samarinda, realisasi pada tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 82.26 sehingga capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar 98.40% dengan kategori **Baik**.

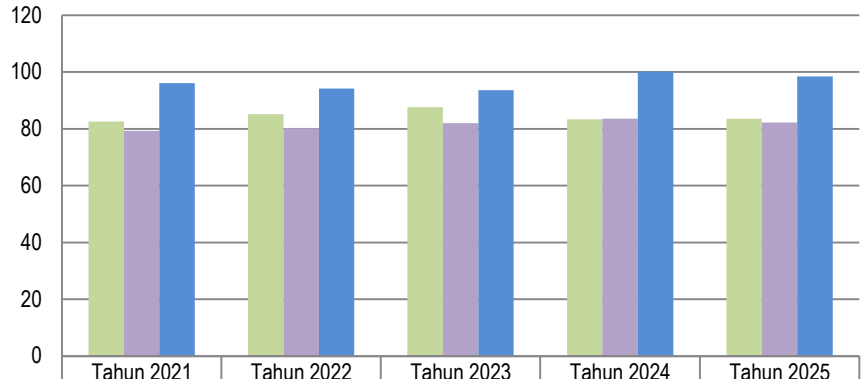
Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 dikategorikan **A (Memuaskan)** yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian hasil evaluasi masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3.163
Rincian Hasil Evaluasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	20,16	20,16
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,72	10,08
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,80	16,80
5.	Capaian Kinerja	20	16,67	15,06
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**83,51**	**82,26**
Predikat			**A**	**A**

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Gambar 3.72
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2021-2025



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	82.6	85.1	87.6	83.39	83.6
Realisasi	79.33	80.15	81.98	83.51	82.26
Capaian	96.04	94.18	93.58	100.14	98.4

Berdasarkan grafik di atas, terdapat kenaikan realisasi nilai AKIP BBPOM di Samarinda dari tahun 2021 hingga tahun 2024, hal ini menunjukkan BBPOM di Samarinda terus menerus melakukan perbaikan dalam implementasi SAKIP, walaupun di tahun 2025 terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2024 akan tetapi BBPOM di Samarinda masih dapat mempertahankan kategori **A (memusakan)** pada Nilai AKIP di tahun 2025. Jika dilihat persentase capaian nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 realisasi tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, sehingga pada tahun 2023 dilakukan reviu terhadap target tahun 2024, sesuai surat Kepala BBPOM di Samarinda Nomor PR.02.01.23A.23A4.03.23.175 tanggal 28 Maret 2023, BBPOM di Samarinda mengusulkan revisi target indikator yang termasuk didalamnya Nilai AKIP BBPOM di Samarinda tahun 2024, hal ini berdasarkan realisasi tahun 2020-2023 yang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dan atas persetujuan unit pengampu, maka target PK 2024 direvisi dari semula pada Reviu Renstra 90.10% menjadi 83.39 %. Pada tahun 2024 setelah dilakukan reviu terhadap target Nilai AKIP realisasi dapat melampaui target dengan capaian 100,14%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.164
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
84	82.26	97.93	Akan Tercapai	

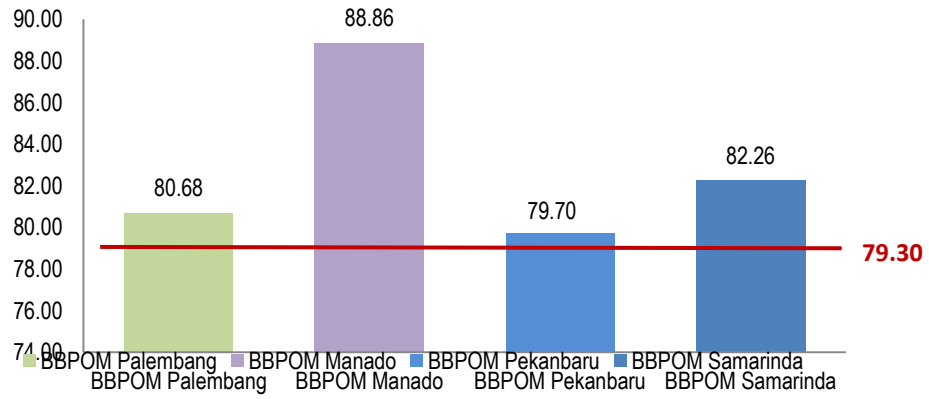
Realisasi nilai AKIP BBPOM di Samarinda pada Tahun 2025 sebesar 82.26 belum mencapai target akhir periode Rencana Strategis sebesar 84.00 dengan persentase capaian sebesar 97.93% dan termasuk dalam kategori **Akan Tercapai**. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Samarinda akan terus melakukan peningkatan kinerja secara berkesinambungan melalui perumusan dan pelaksanaan strategi serta upaya yang efektif, efisien, dan inovatif, untuk memastikan tercapainya target akhir periode Rencana Strategis pada Tahun 2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.165
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
79.30	Palembang	81.04	80.68	99.56	Baik
	Manado	82.20	88.86	108.10	Sangat Baik
	Pekanbaru	83.97	79.70	94.91	Baik
	Samarinda	83.60	82.26	98.40	Baik

Gambar 3.73
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi tertinggi Nilai AKIP adalah BBPOM di Manado dan yang terendah adalah BBPOM di Pekanbaru. Berdasarkan perbandingan dengan target nasional, **semua Nilai AKIP BBPOM Klaster 4 berada diatas nilai target nasional (79.30)**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Nilai hasil evaluasi SAKIP BBPOM di Samarinda Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,25 poin dibandingkan dengan evaluasi tahun 2024, hal ini dikarenakan menurunnya Nilai pada Komponen Capaian Kinerja output dan outcome sebanyak 1,61 poin karena adanya perubahan penilaian komponen capaian kinerja, sebelumnya yang dibandingkan adalah realisasi lebih baik dibanding tahun sebelumnya, di tahun 2025 capaian kinerja lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada komponen Pelaporan Kinerja mengalami kenaikan sebesar 0,36 poin.dan komponen lainnya tetap.

Beberapa kelemahan pada komponen penilaian, sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
   a. Seluruh dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun telah dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh stakeholder namun atas revisi dokumen perencanaan kinerja seperti revisi RAPK tahun 2025 belum diunggah pada esr.menpan.go.id;
   b. Dokumen penetapan target 2025–2029 belum dilengkapi dengan kertas kerja dan dokumentasi yang memadai seperti dasar perhitungan data/justifikasi termasuk dasar usulan target tahun 2026 sampai dengan 2029.

2. Pengukuran Kinerja

a. Manual IKU 2025–2029 telah disusun dan telah memuat seluruh indikator pada Perjanjian Kinerja namun penjelasan penanggung jawab data belum disesuaikan dengan fungsi/bidang terkait pengampu indikator di UPT;

b. Terdapat kesalahan mengambil sumber data maupun kesalahan perhitungan realisasi kinerja yang tidak sesuai dengan definisi operasional sehingga terdapat perbedaan penyajian data realisasi kinerja tahun 2025

3. Pelaporan Kinerja

Belum seluruh indikator terdapat pembahasan dan analisis efisiensi anggaran yang memadai seperti penjelasan upaya yang telah dilaksanakan ketika simpulan hasilnya efisien serta penjelasan kendala/hambatan maupun justifikasi jika simpulan hasilnya terdapat ketidakefisienan penggunaan sumber daya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Masih terdapat kelemahan yaitu ketidakselarasan pengisian kendala, rekomendasi dan rencana aksi antara pelaporan melalui Aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal Triwulan I tahun 2025, dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2025

5. Capaian Kinerja

Mengalami penurunan 1,61 poin pada komponen Kinerja Outcome yaitu capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil tersebut maka diperlukan upaya langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

a. Mengunggah dokumen revisi RAPK Tahun 2025 pada subsite esr.menpan.go.id.

b. Menyusun kertas kerja penetapan target yang dilengkapi dengan argumen/justifikasi serta perhitungan yang logis, berbasis data yang memadai atau hasil kajian/data relevan lainnya. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai dasar pendukung dalam penetapan target kinerja maupun sebagai dokumentasi hasil pembahasan dan persetujuan bersama pimpinan.

2. Pengukuran Kinerja

a. Menyempurnakan manual IKU pada Lampiran SK Kepala Balai Besar POM di Samarinda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dengan menambahkan penjelasan terkait penanggung jawab data, yang disesuaikan dengan fungsi dan bidang pengelola indikator di UPT.

b. Mengoptimalkan peran tim pengelola SAKIP UPT dalam mendukung implementasi SAKIP, khususnya

untuk memastikan bahwa sumber data telah valid dan metode perhitungan kinerja sesuai dengan Manual IKU.

3. Pelaporan Kinerja

Menyajikan informasi mengenai upaya efisiensi yang telah dilakukan maupun faktor penyebab inefisiensi dalam proses pencapaian target pada setiap sasaran, indikator kinerja, dan kegiatan, baik dalam Laporan Kinerja Interim maupun Laporan Tahunan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Memastikan adanya keselarasan antara penyajian kendala, rekomendasi, dan rencana aksi dalam SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, serta Laporan Kinerja.

5. Capaian Kinerja

Memperkuat pelaksanaan evaluasi internal secara berkala serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi tersebut, guna mendorong peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.

Tabel 3.166
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai AKIP UPT BPOM	Laporan evaluasi internal TW I dan 2 belum sesuai dengan matrik pedoman SAKIP berdasarkan hasil evaluasi pelaporan capaian kinerja s.d TW II dari Biro Perencanaan dan Keuangan	Petugas laporan Evaluasi Internal membaca dan menelaah kembali Pedoman SAKIP	melakukan perbaikan laporan evaluasi internal pada tw 3 sesuai dengan matrik pedoman SAKIP	November 2026	T	-	-
2	Nilai AKIP UPT BPOM	Nilai hasil evaluasi SAKIP BBPOM di Samarinda Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,25 poin dibandingkan dengan evaluasi tahun 2024, hal ini dikarenakan menurunnya Nilai pada Komponen Capaian Kinerja	Perlu langkah-langkah perbaikan sebagai berikut: Perencanaan Kinerja a. Mengunggah dokumen revisi RAPK Tahun 2025 pada subsite esr.menpan.go.id. b. Menyusun kertas kerja	1. Perencanaan Kinerja a. Mengunggah dokumen revisi RAPK Tahun 2025 pada subsite esr.menpan.go.id. b. Menyusun kertas kerja penetapan target yang dilengkapi dengan argumen/justifikasi serta perhitungan	1. TW 1 2026 2. TW 1 2026 3. TW 1 2026 4. TW 1 2026 5. TW 2 2026	1. T 2. Y 3. T 4. T 5. T	2. TU 15	2.Kesalahan dalam menginput data capaian indikator kinerja per periodic karena Verifikasi berjenjang terhadap penginputan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		output dan outcome sebanyak 1,61 poin karena adanya perubahan penilaian komponen capaian kinerja, sebelumnya yang dibandingkan adalah realisasi lebih baik dibanding tahun sebelumnya, di tahun 2025 capaian kinerja lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada komponen Pelaporan Kinerja mengalami kenaikan sebesar 0,36 poin.dan komponen lainnya tetap. Beberapa kelemahan pada komponen penilaian, sebagai berikut : Perencanaan Kinerja a.Seluruh dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun telah dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh stakeholder namun atas revisi dokumen perencanaan kinerja seperti revisi RAPK tahun 2025 belum diunggah pada esr.menpan.go.id; b. Dokumen	penetapan target yang dilengkapi dengan argumen/justifikasi serta perhitungan yang logis, berbasis data yang memadai atau hasil kajian/data relevan lainnya. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai dasar pendukung dalam penetapan target kinerja maupun sebagai dokumentasi hasil pembahasan dan persetujuan bersama pimpinan. Pengukuran Kinerja a. Menyempurnakan manual IKU pada Lampiran SK Kepala Balai Besar POM di Samarinda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dengan menambahkan penjelasan terkait penanggung jawab data, yang disesuaikan dengan fungsi dan bidang pengelola indikator di UPT. b. Mengoptimalkan	yang logis, berbasis data yang memadai atau hasil kajian/data relevan lainnya. 2. Pengukuran Kinerja a. Menyempurnakan manual IKU pada Lampiran SK Kepala Balai Besar POM di Samarinda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama dengan menambahkan penjelasan terkait penanggung jawab data, yang disesuaikan dengan fungsi dan bidang pengelola indikator di UPT. b. Melakukan verifikasi berjenjang untuk memastikan bahwa sumber data telah valid dan metode perhitungan kinerja sesuai dengan Manual IKU, dan mendokumentasikan dengan tertib dan lengkap seluruh dokumen perubahan data kinerja baik Laporan Evaluasi Internal revisi, Surat permohonan perubahan data kinerja pada SIMETRIS dan surat balasan dari Biro Perencanaan dan Keuangan.				data berjalan kurang optimal

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		penetapan target 2025–2029 belum dilengkapi dengan kertas kerja dan dokumentasi yang memadai seperti dasar perhitungan data/justifikasi termasuk dasar usulan target tahun 2026 s.d 2029. Pengukuran Kinerja a. Manual IKU 2025–2029 telah disusun dan telah memuat seluruh indikator pada Perjanjian Kinerja namun penjelasan penanggung jawab data belum disesuaikan dengan fungsi/bidang terkait pengampu indikator di UPT; b. Terdapat kesalahan mengambil sumber data maupun kesalahan perhitungan realisasi kinerja yang tidak sesuai dengan definisi operasional sehingga terdapat perbedaan penyajian data realisasi kinerja tahun 2025 Pelaporan Kinerja Belum seluruh indikator terdapat pembahasan dan analisis efisiensi	peran tim pengelola SAKIP UPT dalam mendukung implementasi SAKIP, khususnya untuk memastikan bahwa sumber data telah valid dan metode perhitungan kinerja sesuai dengan Manual IKU. Pelaporan Kinerja Menyajikan informasi mengenai upaya efisiensi yang telah dilakukan maupun faktor penyebab inefisiensi dalam proses pencapaian target pada setiap sasaran, indikator kinerja, dan kegiatan, baik dalam Laporan Kinerja Interim maupun Laporan Tahunan. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Memastikan adanya keselarasan antara penyajian kendala, rekomendasi, dan rencana aksi dalam SIMETRIS, Laporan Evaluasi	3. Pelaporan Kinerja Menyajikan informasi mengenai upaya efisiensi yang telah dilakukan maupun faktor penyebab inefisiensi dalam proses pencapaian target pada setiap sasaran, indikator kinerja, dan kegiatan, baik dalam Laporan Kinerja Interim maupun Laporan Tahunan. 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Melakukan verifikasi berjenjang untuk Memastikan adanya keselarasan antara penyajian kendala, rekomendasi, dan rencana aksi dalam SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, serta Laporan Kinerja. 5. Capaian Kinerja Memperkuat pelaksanaan evaluasi internal secara berkala serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi tersebut, guna mendorong peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.				

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		anggaran yang memadai seperti penjelasan upaya yang telah dilaksanakan ketika simpulan hasilnya efisien serta penjelasan kendala/hambatan maupun justifikasi jika simpulan hasilnya terdapat ketidakefisienan penggunaan sumber daya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Masih terdapat kelemahan yaitu ketidakselarasan pengisian kendala, rekomendasi dan rencana aksi antara pelaporan melalui Aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal Triwulan I tahun 2025, dan Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2025 Capaian Kinerja Mengalami penurunan 1,61 poin pada komponen Kinerja Outcome yaitu capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	Internal, serta Laporan Kinerja. Capaian Kinerja Memperkuat pelaksanaan evaluasi internal secara berkala serta memastikan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi tersebut, guna mendorong peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.					

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.167
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
BKB.001.051	Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	A	Penyusunan LAKIP dan LAPTAH				
			- Pengadaan ATK	1	PKT	1	PKT
		C	Rapat Evaluasi Nasional BPOM				
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1	KL	1	KL
		AI	Instruktur Senam	4	KL	4	KL
BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	A	Perjalanan Konsultasi/ Koordinasi ke Pusat dan antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota				
			- Perjalanan Dinas Biasa	2	KL	2	KL
			- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3	KL	3	KL
		B	Koordinasi / Konsultasi ke KPPN/ DJPB/ Stakeholder lain Terkait urusan Perkantoran				
			Perjalanan Dinas Dalam Kota	94	KL	94	KL
EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	A	Pembayaran gaji dan tunjangan				
			- Belanja Gaji Pokok PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunj.Anak PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunjangan PPh PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunj Beras PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Uang Makan PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunjangan Umum PNS	1	THN	1	THN
			- Gaji Pokok PPPK	1	THN	1	THN
			- Pembulatan Gaji PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Suami/ Istri PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Anak PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Fungsional PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Beras PPPK	1	THN	1	THN
			- Uang Makan PPPK	1	THN	1	THN
			Belanja Tunjangan Umum PPPK	1	THN	1	THN
		B	Uang Lembur				
			- Uang Lembur Golongan II	1	THN	1	THN

			- Uang Lembur Golongan III	1	THN	1	THN
			- Uang Lembur Golongan IV	1	THN	1	THN
			Uang Lembur P3K Golongan IX	1	THN	1	THN
EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	K	Administrasi Kegiatan Perkantoran				
			- Keperluan pokok/ sehari-hari perkantoran	12	BLN	12	BLN
			- Biaya/ benda pos	1	PKT	1	PKT
			- Penggandaan/ Belanja Bahan Perkantoran	1	PKT	1	PKT
			- Pencetakan	1	PKT	1	PKT
			- ATK/ Perlengkapan Komputer	12	PKT	12	PKT
			- Pembuatan Video Branding Inovasi Layanan Publik	2	PKT	2	PKT

Beberapa program/kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Nilai AKIP yaitu sebagai berikut:

Penguatan sistem akuntabilitas yang menunjang pencapaian target kinerja yang telah di lakukan oleh BBPOM di Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Balai Besar POM di Samarinda telah melaksanakan implementasi perencanaan kinerja antara lain:
   a. Menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka pendek Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen perencanaan anggaran Tahun 2025 yang mendukung kinerja dan SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
   b. Menyelaraskan indikator kinerja dan target pada dokumen SK IKU, PK dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025.
2. Dalam proses pengukuran kinerja, terdapat beberapa kriteria pada komponen pengukuran kinerja yang telah lakukan oleh Balai Besar POM di Samarinda, antara lain:
   a. Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU);
   b. Penyusunan Mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja;
   c. Pimpinan Satuan Kerja terlibat dalam pembahasan capaian kinerja;
   d. Dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja indikator;
   e. Penginputan data kinerja dan analisisnya pada Aplikasi SIMETRIS setiap bulan dan triwulan;
   f. Perubahan data kinerja telah disusun Berita Acara perubahan data realisasi kinerja;
   g. Pengukuran kinerja pegawai telah menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment.
3. Laporan Kinerja Balai Besar POM di Samarinda telah menyajikan informasi mengenai hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, antara lain:
   a. Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 dan Laporan Kinerja Interim Tahun 2025 telah disusun secara berkala, disampaikan tepat waktu dan dipublikasikan pada subsite BBPOM di Samarinda samarinda.pom.go.id;

b. Laporan Kinerja Tahun 2024 BBPOM di Samarinda telah menyajikan informasi mengenai hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, antara lain:

1) Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan realisasi kinerja unit sejenis;
2) Upaya terkait keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan hambatan terkait kegagalan dalam pencapaian kinerja;
3) Pemanfaatan informasi kinerja.

4. Balai Besar POM di Samarinda telah menyusun laporan evaluasi internal secara berkala setiap triwulanan dengan menyajikan:
   a. Berita Acara Evaluasi Internal;
   b. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan;
   c. Evaluasi atas realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK);
   d. Kertas Kerja terkait capaian program/kegiatan dan indikator kinerja;
   e. Notulen rapat.
5. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 133 Tahun 2024 tentang Penerapan Sistem Manajemn Terintegrasi (*Integrated Management System*) Badan POM dan Sehubungan dengan pengintegrasian tinjauan manajemen dalam evaluasi internal sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama nomor OT.02.03.2.11.25.681 hal Pengintegrasian Pelaksanaan Tinjauan Manajemen dalam Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi, pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan bersamaan dengan rapat evaluasi internal dan Hasil Tinjauan Manajemen (peluang peningkatan dan kebutuhan perubahan sistem manajemen) dituangkan dalam Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025, serta peluang peningkatan dan kebutuhan perubahan sistem manajemen dilakukan monev bersama-sama dengan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan pada evaluasi internal. Hal ini juga telah tertuang pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaran SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan yang terintegrasi, maka evaluasi pada triwulan IV juga merupakantinjauanmanajemen yang dilakukan secara menyeluruhu ntuk menghasilkan rekomendasi peningkatan sistem manajemen.
6. Pada Evaluasi internal triwulan IV tahun 2025 , evaluasi atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan memuat informasi Kaitan valuasi program dan kegiatan dengan pengelolaan risiko. Begitu pula pada penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025, untuk rekomendasi perbaikan kinerja ke depan dikaitkan dengan pengelolaan risiko yang ada di BBPOM di Samarinda. Perubahan ini tertuang pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaran SAKIP di Lingkungan BPOM.

Dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien yang telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, beberapa inovasi yang dimiliki BBPOM di Samarinda antara lain :

a. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi menggunakan Aplikasi pengukuran kinerja BPOM (e-performance) yang diintegrasikan dengan aplikasi perencanaan kinerja (e-planning) dalam sistem manajemen kinerja terintegrasi (Simetris). Pengumpulan data-data untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi BBPOM di Samarinda dilakukan melalui google site **MANJAKU** (inovasi pemantauan Kinerja dan Keuangan BBPOM di Samarinda) yang mengakomodir perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi internal dan pelaporan kinerja serta perencanaan anggaran, dengan adanya inovasi ini mempercepat proses pengumpulan data dan mempermudah pemantauan oleh pimpinan. Saat ini google site MANJAKU telah terintegrasi pada subsite BBPOM di Samarinda diakses melalui link berikut: https://samarinda.pom.go.id/layanan#pills-internal Username : administrator Password : admin

b. Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai tertuang pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK bulanan/triwulanan serta perubahannya yang memuat indikator, KRO, RO, Komponen, Sub Komponen, target indikator bulanan dan anggaran). **Inovasi Tag AKU** (Tangging Anggaran Indikator Kinerja Utama), inovasi yang dibuat untuk memudahkan dalam melakukan tangging anggaran dari RO sampai pada sub Komponen yang mendukung pada masing-masing indikator kinerja, baik target anggaran maupun realisasi anggaran setiap triwulan nya, https://simpan.pom.go.id/index.php/s/P9fRZJNjzy7wFnC

c. Setiap pegawai BBPOM di Samarinda telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, penilaian kinerja individu (SKP) dilakukan secara berkala setiap triwulan dan terus berupaya pengukuran kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan dan memahami keterkaitan pencapaian kinerja individu yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja unit kerja, hal ini dapat dilihat pada dokumen rekap penilaian SKP pegawai per triwulan. Dalam rangka memudahkan setiap pegawai dalam berperan turut serta dalam perencanaan kinerja serta dalam pemantauan capaian kinerja maka diciptakan suatu inovasi perencanaan kinerja. Membuat Inovasi perencanaan kinerja scan barcode MPH **""Carang Maha Scan Ha""ngomong aja, scan dah**) yg dibuat dalam bentuk pin untuk semua pegawai sehingga dapat diakses oleh seluruh pegawai kapanpun dan dimanapun, dengan scan barcode MPH tersebut dapat memudahkan ketua tim dan anggotanya dalam penyusunan perencanaan kinerja beserta targetnya dan memastikan keselarasan/kesinambungan target organisasi dengan target individu sampai ke anggota tim (cascading level jabatan), selain itu juga dapat dimanfaatkan pegawai setiap saat untuk memantau realisasi SKP terhadap target yang ditetapkan baik target periodik maupun tahunan

d. Jumat Jumpa SiJEBOL (JJS), Merupakan pengembangan dari inovasi Si JEBOL dengan lebih memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan zoom meeting tiap hari Jumat untuk dapat menjangkau lebih banyak UMKM di Kalimantan Timur.

e. SIDAK MAHAKAM, Merupakan site google untuk mempermudah tim penindakan dalam mengentri barang bukti dan mengakses dokumen administrasi lain yang diperlukan.

f. MANTAU LAB (Manajemen Data Administrasi dan Mutu Laboratorium) merupakan site google yang berfungsi untuk membantu Sistem Manajemen Mutu dalam menerapkan ISO 17025:2017.

Pencapaian yang berhasil diperoleh BBPOM di Samarinda Tahun 2025:

1. Satuan Kerja dengan IKPA dan dukungan Digitalisasi Terbaik Periode Semester 1 TA 2025 dari KPPN Samarinda
2. Satuan Kerja dengan Implementasi Digipay Satu Terbaik Periode tahun Anggaran 2025 dari KPPN Samarinda
3. Satuan kerja Terbaik penerima “Mahakam Treasury Awards” Mitra KPPN Samarinda tahun Anggaran 2025 dari DJPB Prov Kaltim.
4. Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025
5. Anugrah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkunagn BPOM tahun 2025
6. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM dengan Kategori tahun 2025
7. UPT BPOM Terbaik Pengelola Kegiatan Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2025
8. Terbaik 1 Kategori Balai Besar dengan Tindaklanjut Rekomendasi Analisis tahun 2025
9. Terbaik 3 Kategori Balai Besar dengan Penggalangan Pemangku Kepentingan tahun 2025
10. Terbaik 2 Kategori Balai Besar dengan Nilai Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.168
Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	1.702.020.000	1.700.397.032,95	99,90	98,40	Tidak Efisien

Tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda pada Tahun 2025 berada pada kategori Tidak Efisien. Realisasi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Nilai AKIP pada Tahun 2025 mencapai 99.90%, dengan capaian indikator kinerja sebesar 98.40%. Kondisi tersebut karena belum capaian kinerja tidak selaras dengan realisasi anggaran, di mana target kinerja tidak dapat dicapai yang secara umum disebabkan oleh penurunan nilai pada indikator komponen capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya dan masih terdapat kelemahan pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan

kinerja dan evaluasi akuntabilitas internal sbagaimana yang dijelaskan pada point analisa penyebab kegagalan dan penurunan kinerja. Selain itu, dinamika alokasi anggaran pada Tahun 2025 yang dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi turut mengakibatkan adanya penyesuaian anggaran, termasuk keterbatasan alokasi pada beberapa kegiatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan anggaran pada Tahun 2025 belum sepenuhnya efisien dalam mendukung pencapaian indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan untuk penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. BBPOM di Samarinda telah melakukan pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan berkesinambungan capaian kinerja selanjutnya, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja pemanfaatan informasi yang telah dilakukan adalah:

- Dalam upaya meningkatkan komponen capaian kinerja, dilakukan perbaikan perencanaan kinerja sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi kinerja pada periode sebelumnya dimana capaian kinerja beberapa indikator kinerja sudah melebih 110% kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** sehingga melakukan upaya perbaikan perencanaan dengan reviu target PK 2025. Dengan memanfaatkan Informasi laporan kinerja pada triwulan II tepatnya sampai dengan bulan Mei 2025 telah dijadikan acuan dalam reviu target PK tahun 2025. Pada kegiatan Bimtek Renstra 2025-2029 tanggal 24-26 Juni 2025 dilakukan pembahasan desk reviu target PK RAPK 2025 dengan Rorenkeu dan unit pengampu, perubahan target PK 2025 ditetapkan di bulan Agustus tahun 2025. Revisi target PK 2025 memungkinkan dilaksanakan di tahun berjalan berdasarkan adanya perubahan asumsi, karena tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Resntra 2025-2029 dan penyusunan PK 2025 masih mengacu pada Rancangan Renstra 2025-2029.
- Dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan berkesinambungan capaian kinerja selanjutnya BBPOM di Samarinda beberapa kali melakukan reviu target RAPK tahun 2025 yaitu :

  Pada Triwulan I, dilakukan reviu terhadap beberapa target RAPK yaitu:

  a. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diperkirakan realisasi sampai dengan bulan Maret akan melebihi target, hal ini dikarenakan Rekomendasi hasil pengawasan tahun 2024 yang telah selesai ditindaklanjuti oleh stakeholder di bulan Maret telah melebihi dari perkiraan sebelumnya
  b. Indikator Persentase Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Indikator persentase Jumlah desa pangan aman dan indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

pada bulan Februari tahun 2025 realisasi belum terlaksana sehingga capaian 0, hal ini dikarenakan Menyesuaikan dengan Target Pelaksanaan tahapan yang terbaru berdasarkan surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 dan kegiatan audiensi belum bisa dilaksanakan di bulan Maret karena menunggu jadwal walikota Samarinda.

c. Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan diperkirakan realisasi sampai dengan bulan Maret dibawah target, hal ini dikarenakan perhitungan sebelumnya mengacu kepada tahapan kegiatan di DO RO tahun 2025 yang tidak sesuai dengan cara perhitungan pada IKU tahun 2025.

Pada Triwulan II, dilakukan reviu terhadap beberapa target RAPK indikator antara lain:

a. Sampai dengan bulan April 2025 di awal bulan Mei tahun 2025 untuk Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan diperkirakan progres sampai dengan bulan Mei akan melebihi target, hal ini dikarenakan Pada B05-B06 (bulan Mei-Juni) dilaksanakan tahapan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan (20%) dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (25%)
b. Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan diperkirakan Progres Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sampai dengan bulan April akan melebihi target, hal ini dikarenakan Pada B05-B06 (bulan Mei-Juni) dilaksanakan tahapan kegiatan Bimtek dan penyuluhan Komunitas Pasar (25%) dan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas Pasar (20%)
c. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan bulan April 2025 untuk Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT diperkirakan realisasi sampai dengan bulan Mei dibawah target, hal ini dikarenakan terjadi pembukaan blokir anggaran dan target perkara kembali ke target semula. Target RAPK yang disusun sebelumnya berdasarkan anggaran efisiensi dengan target 2 (dua) perkara. Target kembali menjadi 5 (lima) perkara berdasarkan anggaran sebelum dilakukan langkah kebijakan efisiensi

Pada Triwulan III, juga telah dilakukan reviu terhadap beberapa target RAPK indikator bersamaan dengan reviu target PK 2025 di bulan Agustus 2025, berdasarkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan bulan Juli 2025 untuk Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT diperkirakan realisasi sampai dengan bulan Agustus melebihi target, hal ini dikarenakan target terpenuhi lebih awal sehingga sampai melampaui target di bulan September sehingga untuk indikator ini dalakukan revisi target RAPK bulan Agustus – Desember 2025.

- Informasi kinerja telah dimanfaatkan untuk penyesuaian kegiatan dan optimalisasi anggaran melalui kegiatan

dalam rangka upaya mencapai target kinerja diantaranya adalah pada Triwulan I tahun 2025, kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator mencakup pelaksanaan patroli siber, penjejakan digital (profiling siber), serta pengumpulan data kerawanan kejahatan. Kegiatan ini difokuskan pada pencegahan dan penangkalan terhadap kejahatan obat dan makanan. Upaya ini dilaksanakan melalui penggalangan pemangku kepentingan dalam kegiatan AKSI MOHAK, AWASI bersama MOLEN MAHAKAM, serta Masyarakat Online Lapor E-Commerce Nakal. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi masyarakat, terutama pelaku usaha distribusi kosmetik serta masyarakat umum pengguna kosmetik, dalam mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan. Pada Agustus 2025, Balai Besar POM di Samarinda menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis kepada distributor obat bahan alam dalam rangka perkuatan pengawasan obat bahah alam yang mengandung Bahan kimia obat. 13 November 2025 - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda menyelenggarakan Forum AWASI (Aman, Waspada, Stop Ilegal): Koordinasi Cegah Tangkal dan Perkuatan Sinergi Criminal Justice System (CJS) dalam Mengatasi Kejahatan Obat dan Makanan. Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antar instansi serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum guna menjawab tantangan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Timur.

- Optimalisasi sisa anggaran Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai SKL yang telah selesai proses pengadaannya di Semester I digunakan untuk pengadaan alat laboratorium dan alat penunjang laboratorium yang dibutuhkan untuk pemenuhan standar alat laboratorium pada SKL dan peningkatan efektivitas pengujian
- Pencapaian kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, baik kepada tim kerja maupun kepada individu. Pencapaian kinerja menjadi pertimbangan dalam penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) oleh pejabat penilai dalam penilaian SKP triwulanan Tahun 2025.
- Dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Besar POM di Samarinda untuk periode 2025-2029 yang ditetapkan di triwulan IV, pemanfaatan informasi kinerja sampai dengan triwulan II menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan dan program kerja ke depan. Evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 memberikan gambaran komprehensif terkait pencapaian target, efektivitas program, serta tantangan yang dihadapi dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda.
- Pemanfaatan laporan kinerja telah dilakukan dalam setiap monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap bulan, untuk capaian kinerja yang tidak tercapai targetnya maupun yang telah tercapai dilakukan rekomendasi tindak lanjut/ rencana aksi untuk meningkatkan capaian kinerja di periode selanjutnya.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda terdapat beberapa resiko yang perlu dilakukan mitigasi risiko antara lain:

1. Monev capaian kinerja berkala tidak dilakukan secara rutin karena Kurangnya konsistensi untuk melakukan monev
2. Laporan kinerja disusun tidak tepat waktu karena kurangnya komitmen personil yang terlibat dalam penyusunan laporan kinerja
3. Capaian indikator kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan karena Monev periodik terhadap pencapaian indikator belum berjalan optimal
4. Kesalahan dalam menginput data capaian indikator kinerja per periodic karena Verifikasi berjenjang terhadap penginputan data berjalan kurang optimal
5. Keterlambatan dan kesalahan penyampaian data capaian kinerja dari fungsi karena Kurangnya komitmen dan ketelitian dalam penyampaian data capaian kinerja
6. Penyampaian laporan kinerja dari masing-masing fungsi melebihi timline yang ditetapkan karena Kurangnya komitmen anggota tim SAKIP dalam menyusun laporan yang menjadi tanggungjawabnya.

Adapun tujuan dilakukan mitigasi resiko yaitu untuk mengurangi kejadian dan atau dampak risiko dengan beberapa aktivitas diantaranya:

1. Pengisian Identifikasi kendala, rekomendasi dan rencana aksi dalam pencapaian target kinerja
2. Penetapan penugasan anggota tim penyusun Lapkin dalam SKP anggota tim
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal setiap bulan
4. Penginputan data capaian secara periodik
5. Monev pengumpulan dan pengukuran data kinerja dari masing-masing fungsi
6. Dilakukan reminder sehingga penyusunan dan pengumpulan laporan kinerja dapat dilaksanakan tepat waktu

3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai IKPA dapat dilihat realisasinya setiap bulan pada aplikasi Omspan, sedangkan nilai EKA dilakukan penilaian pada akhir tahun dan dapat dilihat realisasi nya pada aplikasi Smart DJA.

Nilai Kinerja Anggaran dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$(Nilai\ EKA\ x\ 50\%)\ +\ (Nilai\ IKPA\ x\ 50\%)$$

Tabel 3.73
Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d 60	Kurang	2
60,01 s.d 80	Cukup	3
80,01 s.d 90	Baik	4
90,01 s.d 100	Sangat Baik	5

Berdasarkan surat dari Direktur Pelaksanaan Anggaran Kemeterian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-163/PB.2/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA TA 2025 disampaikan bahwa sehubungan dengan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dilakukan efisiensi atas anggaran belanja TA 2025 yang berdampak pada pelaksanan anggaran Kementerian Lembaga dan pada akhirnya mempengaruhi penilaian indikator kinerja pada IKPA selama tahun berjalan.
2. Kebijakan efisiensi tersebut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan belanja satker, antara lain sebagai berikut:
   a. Alokasi anggaran terutama belanja barang (52) dan belanja modal (53) diblokir namun target/volume RO pada DIPA tidak dikurangi.
   b. Satker K/L cenderung menunda pelaksanaan kegiatan hingga proses revisi efisiensi selesai
   c. Terdapat 28.035 RO (12,12%) dengan pagu RO diblokir seluruhnya dan 117.995 RO (51,02%) dengan pagu RO diblokir sebagian, sehingga Satker tidak dapat melaksanakankegiatan yang tercantum pada DIPA
   d. Terdapat 620 Satker yang seluruh alokasi DIPA nya diblokir sehingga pelaksanaan kegiatan dan belanja Sakter dimaksud belum dapat dimulai.
3. Menindaklanjuti kondisi di tersebut maka dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian IKPA secara nasional dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Indikator Penyerapan Anggaran

   Pemberian ambang batas toleransi (*threshold*) realisasi pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sebagai berikut:

Jenis Belanja	Keterangan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Belanja Pegawai (51)	Target Penyerapan Belanja Pegawai (51) sesuai PER5/PB/2024	20%	50%	75%	95%
	***Threshold* (Batas Toleransi)**	**5%**	**10%**	**10%**	**0%**
Belanja Barang (52)	Target Penyerapan Belanja Barang (52) sesuai PER5/PB/2024	15%	50%	70%	90%
	***Threshold* (Batas Toleransi)**	**5%**	**10%**	**5%**	**0%**
Belanja Modal (53)	Target Penyerapan Belanja Modal (53) sesuai PER5/PB/2024	10%	40%	70%	90%
	***Threshold* (Batas Toleransi)**	**5%**	**20%**	**10%**	**0%**

   b. Indikator Belanja Kontraktual

   1) Penyesuaian nilai dan rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkan pada Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak. Dilakukan penyesuaian nilai dan rasio sebagai berikut:

      Semula

Rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkan sampai Triwulan II	Nilai
Rasio >75,00%	100
50,01%<Rasio<=75,00%	80
25,01%<Rasio<=50,00%	60
0,01%<Rasio<=25,00%	50
Rasio = 0%	0

Menjadi

Rasio Jumlah Data Perjanjian/Kontrak yang Didaftarkan sampai Triwulan III	Nilai
Rasio >80,00%	100
55,01%<Rasio<=80,00%	80
25,01%<Rasio<=55,00%	60
Rasio<25,00%	50

2) Penyesuaian nilai yang diberikan untuk setiap penyelesaian perjanjian/kontrak Belanja Modal pada Komponen Akselerasi Belanja Modal. Dilakukan penyesuaian nilai sebagai berikut:

Semula

Komponen	TW I	TW II	TW III	TW IV
Akselerasi Belanja Modal (53)	100	90	80	70

Menjadi

Komponen	TW I	TW II	TW III	TW IV
Akselerasi Belanja Modal (53)	100	100	90	70

c. Indikator Pengelolaan UP dan TUP

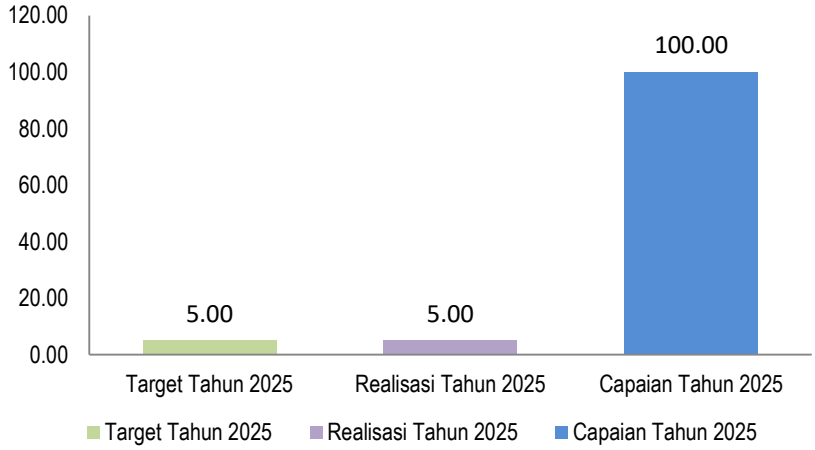
Nilai kinerja komponen UP dan TUP Tunai periode Januari, Februari, Maret, dan April 2025 sebesar 100. Perhitungan penilaian komponen UP dan TUP Tunai periode Mei 2025 dan seterusnya tetap mengacu pada formula penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran PER5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

d. Indikator Capaian Output

RO dengan seluruh alokasi RO diblokir (blokir 100%) tidak menjadi objek penilaian Indikator Capaian Output.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.74
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025



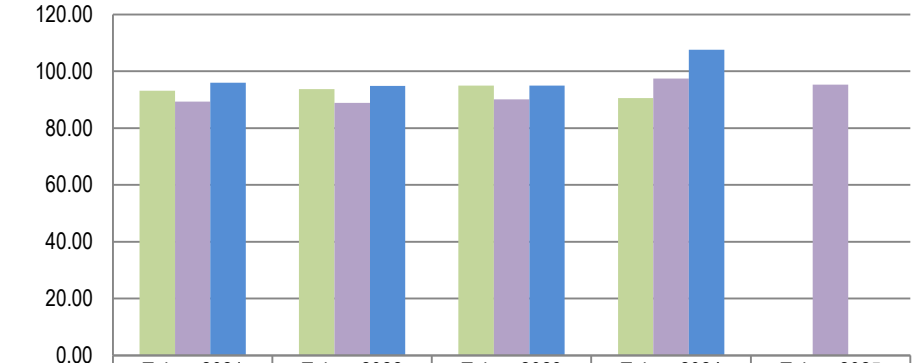
Tabel 3.169
Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
5.00	5.00	100.00	Baik	

Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 sebesar 95.31 dengan konversi nilai 5.00 capaian sebesar 100.00% dengan kategori Sangat Baik. Dengan perolehan Nilai EKA sebesar 92.88 dan Nilai IKPA sebesar 97.73 hal ini menunjukan BBPOM di Samarinda telah melakukan pengelolaan anggaran yang bersih dan akuntabel.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Gambar 3.75
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2021-2025



	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Target	93.10	93.70	94.90	90.58	
Realisasi	89.34	88.82	90.13	97.40	95.31
Capaian	95.96	94.79	94.97	107.53	

Pada tahun 2025, Nilai Kinerja Anggaran dikategorikan dalam konversi dengan rentang nilai 1-5. Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2021–2023, realisasi kinerja belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, dengan persentase capaian berada di kisaran 94–96%, namun relatif stabil dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan, di mana realisasi kinerja melampaui target dengan capaian tertinggi sebesar 107.53 dan pada pada Tahun 2025 kembali mampu mencapai target dengan realisasi 95.31 yang dikonversi menjadi nilai 5.00 dengan persentase capaian 100.00

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.170
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
5.00	5.00	100.00	Tercapai/ Melampaui	

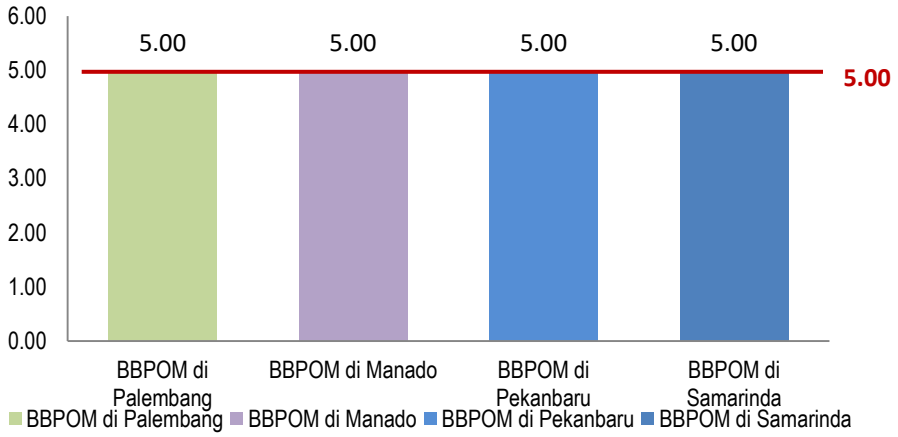
Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2025 sebesar 5.00 dan telah mencapai target akhir periode Renstra sebesar 5.00 dengan capaian 100.00% kategori Tercapai/Melampaui.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.171
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
5.00	Palembang	5.00	5.00	100.00	Baik
	Manado	5.00	5.00	100.00	Baik
	Pekanbaru	5.00	5.00	100.00	Baik
	Samarinda	5.00	5.00	100.00	Baik

Gambar 3.76
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 5) dan Target Nasional



Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh UPT berhasil mencapai target, termasuk target nasional dengan persentase capaian 100.00% kategori Sangat Baik.

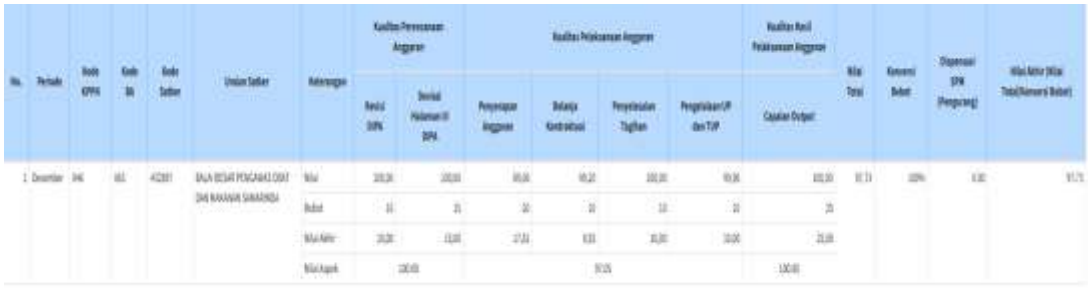
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Upaya Perbaikan/Penyempurnaan Kinerja ke Depan

BBPOM di Samarinda terus melakukan *continuous improvement* dengan tujuan pencapaian kinerja pada tahun 2025 dapat lebih baik dari tahun sebelumnya, beberapa hal yang telah dijalankan dan menunjang keberhasilan dimaksud sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu DIPA secara periodik untuk melihat keseseuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan satker.

2. Menetapkan batas revisi anggaran secara internal sehingga jumlah revisi anggaran dapat diminimalisasi.
3. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA.
4. Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum dalam Halaman III DIPA tidak melebihi 5%.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal.
6. Melakukan percepatan belanja, khususnya belanja barang dan modal yang pengadaan barang dan jasanya dalam dimulai sejak awal tahun anggaran.
7. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
8. Memantau proses penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggran.
9. Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output, khususnya untuk output teknis.
10. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan progress dan capaian, memperhatikan gap progress capaian output dengan realisasi anggaran.
11. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir oper=n period regular (5 hari kerja setelah bulan berakhir).
12. Memonitor status data pada OMSPAN dan memastikan status seluruh data telah terkonfirmasi.

Nilai Pelaksanaan tahun 2025 (IKPA)



Nilai komponen IKPA dari 7 komponen penilaian untuk 4 komponen sudah tercapai maksimal sedangkan 3 komponen belum tercapai maksimal, untuk itu perlu dilakukan peingkatan untuk ke depan nya agar selanjutnya seluruh komponen penilaian bisa tercapai maksimal.

Nilai Perencanaan tahun 2025 (EKA)



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dalam hal penilaian Efektivitas Kinerja Anggaran (EKA) di tahun 2025 dengan memastikan pencapaian Rincian Output (RO) sesuai target yang telah ditetapkan dan dapat mengimplementasikan Efisiensi SBKK dan Efisiensi SBKU. Efektivitas Capaian RO tercapai 100, Efisiensi Penggunaan SBK telah tercapai 100, Untuk Efisiensi SBK tercapai 52,5 %. Upaya efisiensi SBKK telah dilakukan pada RO Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Samarinda, kegiatan dilaksanakan dengan pengendalian anggaran secara ketat, memastikan pengeluaran sesuai dengan rencana dan pagu anggaran yang tersedia, serta menghindari penggunaan anggaran yang tidak memberikan nilai tambah secara signifikan namun hingga akhir tahun 2025 hanya bisa dilakukan efisiensi SBKK sebesar 1%, hal tersebut karena anggaran SBKK ini selain dalam rangka mendukung upaya penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi juga dimanfaatkan untuk kegiatan pemetaan kerawanan kejahatan di *cathment area* Provinsi Kalimantan Timur, untuk itu akan dilakukan strategi yang lebih baik lagi ke depannnya dalam pengelolaan efisiensi SBKK. Sedangkan Efisiensi SBKU dilakukan monitoring pada RO Layanan BMN yang digunakan secara maksimal sesuai dengan yang diperuntukan sehingga efisiensi SBK bisa mencapai maksimal sebesar 20%.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BBPOM di Samarinda tahun 2025 diperoleh sebesar 95.31 %



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Meskipun demikian masih terdapat kendala-kendala di truwlan IV sebagai berikut:

1. Pembayaran PBJ Inaproc secara LS yang diberlakukan seperti LS Kontraktual banyak terkendala dengan data suplier sehingga beberapa kali terjadi penolakan SPM
2. Indikator penyerapan anggaran dalam perhitungan IKPA berada di bawah batas toleransi yang diperkenankan di triwulan 1 s.d 3 dan nilai komponen penyerapan anggaran tidak tercapai maksimal
3. Komponen komponen akselerasi belanja modal tidak tercapai maksimal ada 4 (empat) kontrak dengan nilai Rp 50 juta s.d Rp 200 juta yang diselesaikan melewati triwulan II
4. Terdapat 3 (tiga) kali revolving GUP yang tidak mencapai nilai maksimal persen GUP disebulankan

Untuk itu diperlukan upaya perbaikan ke depan sebagai berikut :

1. Reviu metode pembayaran untuk paket PBJ inaproc di tahun selanjutnya
2. Penyusunan POA Tahun 2026 mengacu pada target penyerapan anggaran per jenis belanja per triwulan dan percepatan realisasi anggaran PBJ dan kegiatan sesuai POA
3. Percepatan pelaksanaan PBJ terutama pada belanja modal
4. Mengoptimalkan pengelolaan UP dan TUP setiap bulan

Tabel 3.172
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	1. Pembayaran PBJ Inaproc secara LS yang diberlakukan seperti LS Kontraktual banyak terkendala dengan data suplier sehingga beberapa kali terjadi penolakan SPM	1. Reviu metode pembayaran untuk paket PBJ inaproc di tahun selanjutnya	1. Mengalihkan sebagian besar pembayaran paket PBJ inaproc yang nilai nya kecil dari metode Pembayaran Langsung (LS) ke metode Uang Persediaan dan KKP	1.Januari	T	-	-
2	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	2.Indikator penyerapan anggaran dalam perhitungan IKPA berada di bawah batas toleransi yang diperkenankan di triwulan 1 s.d 3 dan nilai komponen penyerapan anggaran tidak tercapai maksimal 3. Komponen komponen akselerasi belanja modal tidak tercapai maksimal ada 4 (empat) kontrak dengan nilai Rp 50 juta s.d Rp 200 juta yang diselesaikan melewati triwulan II 4. Terdapat 3 (tiga)	2. Penyusunan POA Tahun 2026 mengacu pada target penyerapan anggaran per jenis belanja per triwulan dan percepatan realisasi anggaran PBJ dan kegiatan sesuai POA 3.Percepatan pelaksanaan PBJ terutama pada belanja modal 4.Mengoptimalkan pengelolaan UP dan TUP setiap bulan	2.Melakukan penyusunan POA Tahun 2026 secara lebih akurat mengacu pada target penyerapan anggaran per jenis belanja per triwulan 3.Melaksanakan kontrak Pra DIPA, kontrak PBJ pengadaan belanja modal alat laboratorium, belanja barang reagen, media mikro dll, pemeliharaan gedung dan	2026 2.TW I 2026 3.TW I 2026 4.TW II 2026	Y	1.Tata usaha 9 2. Tata usaha 38 3. Tata Usaha 31	1. Rendahnya realisasi anggaran dan deviasi halaman III DIPA yang lebih dari rentang 5% 2. Pelaksanaan kontrak pengadaan melebihi timeline 3. Kesalahan input item pendetailan COA kuitansi GU pada operator

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		kali revolving GUP yang tidak mencapai nilai maksimal persen GUP disebulankan		pemeriksaan kesehatan di triwulan 1 4.Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan memperhatikan %GUP yang disebulankan				komitmen

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.173
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
BKB.001.051	Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	C	Rapat Evaluasi Nasional BPOM - Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1	KL	1	KL
		AF	Pembinaan Mental dan Spiritual melalui Peningkatan Jasmani dan Rohani - Instruktur Senam	4	KL	4	KL
		AH	Honor Pengelola PNBP - Pengelola PNBP	6	KL	6	KL
		AI	Instruktur Senam	4	KL	4	KL
EBA.956.054	Penatausahaan BMN	B	Koordinasi/ Konsultasi ke KPKNL - Perjalanan Dinas Dalam Kota	2	KL	2	KL
EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	A	Pembayaran gaji dan tunjangan - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj.Anak PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS	 1 1 1 1 1 1	 THN THN THN THN THN THN	 1 1 1 1 1 1	 THN THN THN THN THN THN

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
			- Belanja Tunjangan PPh PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunj Beras PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Uang Makan PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunjangan Umum PNS	1	THN	1	THN
			- Gaji Pokok PPPK	1	THN	1	THN
			- Pembulatan Gaji PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Suami/ Istri PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Anak PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Fungsional PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Beras PPPK	1	THN	1	THN
			- Uang Makan PPPK	1	THN	1	THN
			Belanja Tunjangan Umum PPPK	1	THN	1	THN
		B	Uang Lembur				
			- Uang Lembur Golongan II	1	THN	1	THN
			- Uang Lembur Golongan III	1	THN	1	THN
			- Uang Lembur Golongan IV	1	THN	1	THN
			- Uang Lembur P3K Golongan IX	1	THN	1	THN
EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A	Perawatan Gedung Kantor				
			- Pemeliharaan gedung kantor	1	THN	1	THN
			- Pemeliharaan halaman gedung kantor	1	THN	1	THN
			- Pemeliharaan gedung kantor	1	THN	1	THN
		B	Perbaikan Peralatan				
			- Pemeliharaan alat pengolah data	48	UNIT	48	UNIT
			- Pemeliharaan inventaris kantor	315	UNIT	315	UNIT
			- Pemeliharaan tabung pemadam api	8	UNIT	8	UNIT
			- Pemeliharaan AC	78	UNIT	78	UNIT
			- Pemeliharaan Lift	1	UNIT	1	UNIT
		C	Perbaikan Peralatan Fungsional				
			- Pemeliharaan inventaris peralatan laboratorium	1	PKT	1	PKT
		D	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4				
			- Perawatan Kendaraan Roda 4	9	UNIT	9	UNIT
		E	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2				
			- Perawatan Kendaraan Roda 2	2	UNIT	2	UNIT
		F	Langganan Daya dan Jasa				
			- Pembayaran Listrik	12	BLN	12	BLN
			- Pembayaran Telepon	12	BLN	12	BLN
			- Pembayaran Air	12	BLN	12	BLN

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
		G	Perawatan Sarana Genset dan Pembelian Solar				
			- Pemeliharaan Genset 450 KVA	1	UNIT	1	UNIT
			- Pembelian solar untuk genset 450 KVA	1	PKT	1	PKT
		H	Kebersihan				
			Pembuangan Sampah	1	KL	1	KL
		I	Uang Honor				
			- Honor Pengelola Keuangan	12	BLN	12	BLN
			Honor Pengelola SAI	12	BLN	12	BLN
		J	Sewa Jaringan				
			- Biaya Langganan Zoom Meetin	12	BLN	12	BLN
			- Biaya Langganan Internet	12	BLN	12	BLN
		K	Administrasi Kegiatan Perkantoran				
			- Keperluan pokok/ sehari-hari perkantoran	12	BLN	12	BLN
			- Biaya/ benda pos	1	PKT	1	PKT
			- Penggandaan/ Belanja Bahan Perkantoran	1	PKT	1	PKT
			- Pencetakan	1	PKT	1	PKT
			- ATK/ Perlengkapan Komputer	12	PKT	12	PKT
			- Pembuatan Video Branding Inovasi Layanan Publik	2	PKT	2	PKT
		L	Pemeliharaan Jaringan LAN				
			- Pemeliharaan Jaringan LAN	1	PKT	1	PKT
		M	Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa				
			- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	12	BLN	12	BLN
		N	Biaya Laboran/ Satpam/ Pramubakti/ Pengemudi				
			- Biaya Laboran/ Pramubakti	10	BLN	10	BLN
			- Biaya Pramubakti	6	BLN	6	BLN
			- Uang Lembur	8	BLN	8	BLN
			- Biaya Outsourching Resepsionis/ Arsiparis/ Administrasi/ Sekretaris	12	BLN	12	BLN
		O	Tersedianya Makanan dan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh				
			- Makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh	8	BLN	8	BLN
		P	Pemeliharaan IPAL/ Pemusnahan Limbah B3				

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
			- Pemusnahan Limbah B3	1	PKT	1	PKT
			- Biaya Pengujian Sampel Output IPAL	3	PKT	3	PKT
		R	Sewa Rumah Dinas di Samarinda				
			- Sewa rumah dinas di Samarinda	1	THN	1	THN
		T	Pembinaan Mental Spiritual melalui Peningkatan Jasmani dan Rohani/ Pengembangan Kompetensi				
			- Narasumber	1	KL	1	KL
		U	Pelatihan dan Ujian Pengadaan Barang dan Jasa				
			- Konstribusi Pelatihan dan Ujian Pengadaan Barang dan	5	OR	5	OR
		V	Kolaborasi Pengawasan Obat dan Makanan				
			- Snack	1	KL	1	KL
			- Makan	1	KL	1	KL

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator antara lain untuk kegiatan Rapat Evaluasi Nasional Badan POM, pembinaan mental dan spiritual pegawai melalui peningkatan jasmani dan rohani, kegiatan koordinasi dan konsultasi, pembayaran belanja pegawai, pembayaran operasional kantor, pelatihan dan ujian pengadaan barang dan jasa, serta penyelenggaraan koordinasi obat dan makanan bersama lintas sektor. Selain itu juga terus dilakukan koordinasi dan konsultasi intensif dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, KPPN serta Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam rangka optimalisasi capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran.

Ketercapaian indikator kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Pemanfaatan Google Sites MANJAKU sebagai sarana pemantauan kinerja dan anggaran yang telah digunakan secara optimal
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran secara berkelanjutan melalui inovasi Ngopi CanTIK (Ngobrol Hepi Capaian Terupdate Indikator Kinerja) dan Cafe Manis (Wadah Mahawasi Pitis). Inovasi-inovasi tersebut berperan sebagai media penguatan koordinasi internal sekaligus sarana peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta anggaran.

Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda berhasil meraih 2 (dua) penghargaan dari KPPN Samarinda sebagai Satuan Kerja dengan Implementasi Digipay Satu Terbaik dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Terbaik Penerima "Mahakam Treasury Awards" Mitra KPPN Samarinda. Pencapaian tersebut mencerminkan komitmen Balai Besar POM di Samarinda dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap transformasi digital. Selain itu, penghargaan ini menjadi bukti upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan guna mendukung kinerja organisasi secara optimal.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.174
Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	3.230.694.000	3.229.026.099,45	99,95%	100,00	100% (Efisien)

Tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 berada pada kategori Efisien. Realisasi anggaran untuk mendukung pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 mencapai 99.95% dengan capaian indikator sebesar 100.00%. Hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran Tahun 2025 telah dimanfaatkan secara optimal dan efisien dalam mendukung pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran.

Dinamika alokasi anggaran Tahun 2025 yang dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi mengakibatkan adanya penyesuaian anggaran, termasuk keterbatasan alokasi pada beberapa kegiatan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, BBPOM di Samarinda melakukan langkah adaptif melalui optimalisasi penggunaan anggaran secara paralel dengan pengawalan pelaksanaan kinerja serta kegiatan pendukung lainnya.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan tetap berjalan efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas capaian kinerja yang telah ditetapkan. Upaya tersebut dilaksanakan sejak awal tahun melalui berbagai kegiatan, antara lain untuk kegiatan Rapat Evaluasi Nasional Badan POM, pembinaan mental dan spiritual pegawai melalui peningkatan jasmani dan rohani, kegiatan koordinasi dan konsultasi, pembayaran belanja pegawai, pembayaran operasional kantor, pelatihan dan ujian pengadaan barang dan jasa, serta penyelenggaraan koordinasi obat dan makanan bersama lintas sektor.

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya tidak hanya difokuskan pada aspek anggaran, tetapi juga pada pemenuhan sumber daya manusia. Pada Tahun 2025 terdapat 2 (dua) orang PNS yang memasuki masa purna bakti, yang secara bersamaan diimbangi dengan pengangkatan 5 (lima) orang PPPK. Penyesuaian komposisi SDM tersebut turut mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sehingga

secara keseluruhan berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya di BBPOM Samarinda.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Informasi dalam Laporan Kinerja dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian strategi dan kebijakan guna meningkatkan capaian kinerja organisasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi landasan penetapan langkah perbaikan yang diharapkan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-163/PB.2/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA TA 2025, dilakukan penyesuaian kebijakan penilaian IKPA secara nasional, antara lain pemberian ambang batas toleransi realisasi belanja, penyesuaian nilai dan rasio pada komponen akselerasi kontrak dan belanja modal, penetapan nilai komponen UP dan TUP Tunai periode Januari–April 2025 sebesar 100, serta pengecualian RO dengan alokasi diblokir penuh dari penilaian Indikator Capaian Output.

Di tengah dinamika alokasi anggaran Tahun 2025 akibat kebijakan efisiensi, BBPOM di Samarinda secara adaptif melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran dengan penguatan pengendalian pelaksanaan kinerja, sehingga program dan kegiatan tetap berjalan efektif dan efisien tanpa menurunkan kualitas capaian kinerja.

Dengan demikian, Laporan Kinerja berfungsi tidak hanya sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda terdapat beberapa resiko yang perlu dilakukan mitigasi risiko antara lain:

7. Rendahnya realisasi anggaran dan deviasi halaman III DIPA yang lebih dari rentang 5% dikarenakan penyusunan PoA belum optimal dan kurangnya konsitensi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai PoA
8. Deviasi Halamam III DIPA lebih dari 5% karena ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran
9. Terhambatnya pembayaran proses pembayaran barang dan jasa karena penyedia terlambat menyampaikan berkas penagihan
10. Kesalahan penentuan paket swakelola-penyedia dan tangging PDN di perencanaan RUP mengakibatkan perencanaan pengadaan PBJ PDN masih belum optimal

11. Terdapat pagu minus pada anggaran karena kurangnya monitoring dalam relalisasi anggaran sehingga realisasi melebihi pagu anggaran
12. Kesalahan penggunaan mata anggaran (MAK) yang diakibatkan kurangnya ketelitian penanggungjawab kegiatan dalam pemilihan penggunaan mata anggaran dan kurangnya ketelitian pengelola keuangan dalam verifikasi dokumen pertanggungjawaban.
13. Kesalahan penggunaan akun untuk pembelian jenis barang karena kurangnya ketelitian penanggungjawab kegiatan dan pengelola keuangan dalam pemilihan penggunaan mata anggaran untuk jenis belanja modal dan belanja barang ekstrakomptabel
14. Keterlambatan pengumpulan usulan revisi dari masing-masing fungsi karena kurangnya komitmen masing-masing fungsi dalam menyiapkan data usulan revisi POK
15. Kesalahan input item pendetailan COA kuitansi GU pada operator komitmen karena berkas pertanggungjawaban kuitansi yang sudah selesai diverifikasi rincian biayanya masih harus diinput dan dihitung secara manual
16. Pelaksanaan kontrak pengadaan melebihi timeline karena kurangnya komitmen penyedia dalam menyelesaikan perkerjaan kontrak tepat waktu
17. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang tidak sesuai ketentuan karena kurangnya ketelitian pejabat terkait dalam melakukan verifikasi kesesuaian dokumen pertanggung jawaban keuangan
18. Penyetoran pajak melebihi timeline karena Pengelola yang melakukan belanja terlambat menyetorkan kuitansi berpajak
19. Terjadi kelebihan pembayaran pertanggung jawaban keuangan karena Pejabat terkait kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen pertanggung jawaban
20. Kesalahan dalam penghitungan tunjangan kinerja/uang makan/uang lembur karena Pejabat terkait kurang cermat dalam melakukan verifikasi tunjangan kinerja/uang makan/uang lembur
21. Belum dilakukan pungut/dan setor pajak karena Pejabat terkait belum sepenuhnya memahami transaksi yang seharusnya dikenakan pajak
22. Kondisi kas di brankas lebih dari Rp 50.000.000,- karena kurangnya ketelitian Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pencatatan kas
23. Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sesuai dengan bentuk kegiatannya karena Pejabat terkait kurang cermat dalam melakukan verifikasi pertanggung jawaban perjalanan dinas
24. Personil yang sama mengendalikan proses pengelolaan transaksi keuangan dan pengelolaan BMN dikarenakan belum terdapat struktur tugas yang memisahkan fungsi kewenangan dan otorisasi pengelolaan transaksi keuangan dan pengelolaan BMN

Adapun tujuan dilakukan mitigasi resiko yaitu untuk mengurangi kejadian dan atau dampak risiko dengan beberapa aktivitas diantaranya:

7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran dan deviasi halaman III DIPA
8. Implementasi inovasi Cafe Manis secara berkala setiap triwulan
9. Mengirimkan pemberitahuan agar penyedia barang dan jasa melakukan penagihan
10. Mengumumkan Paket RUP pengadaan PBJ di web SIRUP LPSE
11. Melakukan revisi POK secara berkala
12. Telah dilakukan verifikasi berjenjang untuk berkas pertanggungjawaban keuangan
13. Melakukan reklas BMN
14. Dilakukan penyusunan SOP revisi anggaran
15. Dilakukan penyesuaian format kuitansi yang mencantumkan item sesuai POK pada bagian Rincian Biaya
16. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontrak
17. Dilakukan monitoring kuitansi GU
18. Menyusun BA Keadaan Kas jika saldo brankas lebih dari Rp50.000.000,-
19. Penetapan personil yang berbeda dalam proses pengelolaan transaksi keuangan dan pengelolaan BMN.

4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Pada UPT BPOM penerapan manajemen risiko diatur pada Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Tujuan penerapan Manajemen Risiko adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pengelolaan risiko yang terstruktur dan berkelanjutan. Dengan manajemen risiko, organisasi mampu mengidentifikasi, menetapkan, serta mengendalikan berbagai risiko yang dihadapi sehingga dampak yang mungkin timbul dapat diminimalkan. Penerapan ini juga berperan penting dalam melindungi organisasi dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Selain itu, manajemen risiko mendukung peningkatan kinerja organisasi agar lebih efektif dan terarah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian seluruh pegawai terhadap pentingnya pengelolaan risiko sebagai bagian dari budaya kerja organisasi.

Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori sesuai

tabel 3.175 Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. Penilaian maturitas penerapan manajemen risiko pada Balai Besar POM di Samarinda dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Tabel 3.175
Kategori Tingkat Maturitas

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sesuai tabel .. berikut:

Tabel 3.176
Indeks Maturitas Manajemen Risiko

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = $\frac{Skor\ Total}{16}$

Keterangan:

. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko

a. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

Pada tahun 2025, berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Balai Besar POM di Samarinda dapat dikategorikan Risk Defined, data rincian hasil penilaian pada tabel berikut:

Tabel 3.177
Penilaian Indeks Maturitas Manajemen Risiko

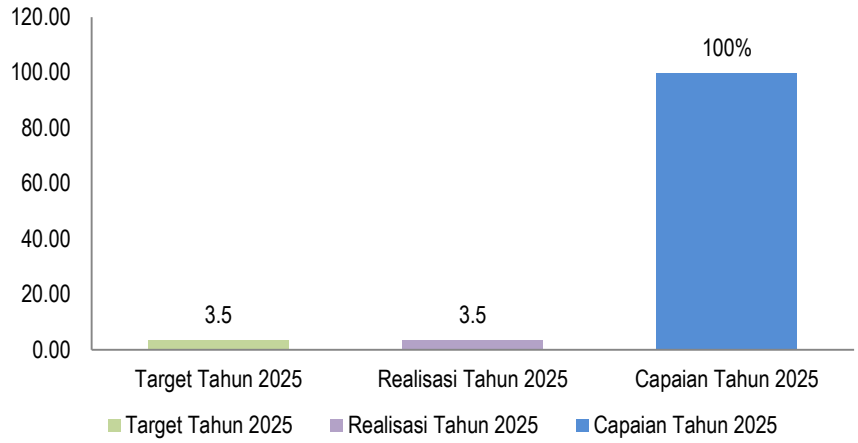
Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	55	56	1
Nilai Maturitas	3,438	3,500	0,062
Tingkat Maturitas	Risk Defined	Risk Defined	

Hingga akhir tahun 2025, Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pengendalian terhadap 165 risiko yang teridentifikasi pada 8 (delapan) sasaran kinerja utama dan 28 indikator kinerja. Identifikasi risiko tersebut dihimpun dari seluruh pegawai sebagai sumber masukan, dan telah mencakup 10 kategori risiko, yaitu risiko strategis, reputasi, hukum, sumber daya manusia, operasional, teknologi informasi, kesehatan dan keselamatan kerja, fraud, keuangan, serta aset. Selain itu, terdapat 5 risiko positif yang juga dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan. Rencana Tindakan Pengendalian (RTP) prioritas difokuskan pada 5 (lima) risiko dengan level tinggi dan sangat tinggi.

Penetapan risiko pada tahun berjalan telah mempertimbangkan capaian kinerja pada setiap indikator kinerja guna memastikan target akhir tahun dapat direalisasikan secara optimal. Dalam pelaksanaan pengendalian risiko, Balai Besar POM di Samarinda melakukan reviu atas aktivitas pengendalian secara konsisten setiap triwulan, dengan dukungan dan peran aktif auditor internal untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2025

Gambar 3.77
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025



Tabel 3.178
Capaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda
Terhadap Target Tahun 2025

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
3.50	3.50	100.00	Baik	

Realisasi Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 sebesar 3.5, dengan capaian sebesar 100.00% dengan kategori **Baik**. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, maka tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Balai Besar POM di Samarinda dapat dikategorikan ***Risk Defined,*** yang menggambarkan bahwa kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur, pimpinan telah memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan dan pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda merupakan indikator kinerja baru yang mulai ditetapkan pada tahun 2025. Hasil penilaian oleh Inspektorat Utama untuk tahun berjalan dilakukan pada akhir tahun, sehingga perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan triwulan

sebelumnya belum dapat dilakukan.

Uraian	Nilai 2022	Nilai 2023	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	48	53.5	5.5
Nilai Maturitas	3,000	3,344	0,344
Tingkat Maturitas	Risk Defined	Risk Defined	

Uraian	Nilai 2023	Nilai 2024	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	53.5	55.0	1.5
Nilai Maturitas	3,344	3,438	0,094
Tingkat Maturitas	Risk Defined	Risk Defined	

Meskipun demikian, penilaian Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda telah dilakukan oleh Inspektorat Utama sejak tahun 2022 hingga 2024. Berdasarkan hasil penilaian tersebut pada tabel di atas terlihat adanya tren peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah nilai sebesar 48 dengan nilai maturitas 3,000 dan berada pada kategori *Risk Defined*. Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 53,5 dengan nilai maturitas 3,344 (naik 0,344), dan tetap berada pada kategori *Risk Defined*. Selanjutnya pada tahun 2024, jumlah nilai kembali meningkat menjadi 55,0 atau naik 1,5 poin dari tahun sebelumnya, dengan nilai maturitas 3,438 (naik 0,094), dan masih dalam kategori *Risk Defined*. Pada tahun 2025 nilai maturitas 3,5 naik 0.062 dari penilaian tahun 2024 dan masih dalam kategori *Risk Defined*.

Secara umum, kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda menunjukkan peningkatan yang konsisten sejak tahun 2022 hingga 2025 dan tetap berada pada kategori *Risk Defined*. Ke depan, Balai Besar POM di Samarinda akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan serta memperkuat komitmen dalam penerapan manajemen risiko guna mencapai tingkat maturitas yang lebih tinggi.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Tabel 3.179
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra)

Target	Realisasi	%Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
3.7	3.5	94.59	Akan Tercapai	

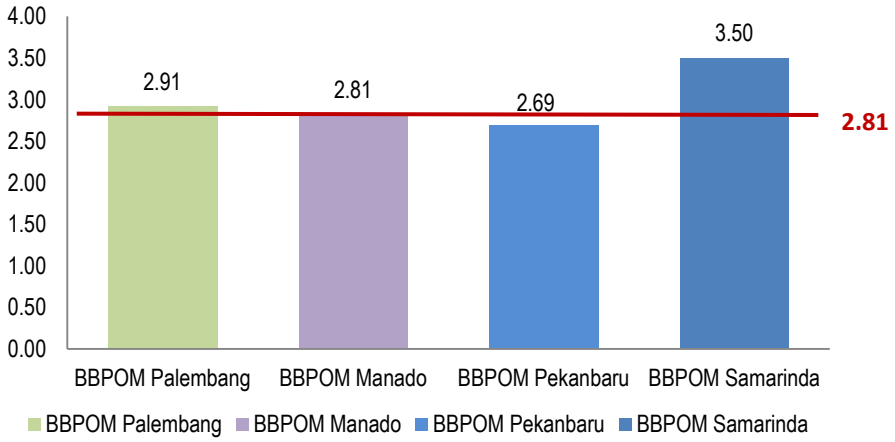
Realisasi Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda pada tahun 2025 sebesar 3,5 masih berada di bawah target akhir periode Rencana Strategis sebesar 3,7. Namun, dengan persentase capaian sebesar 94,59%, kinerja tersebut termasuk dalam kategori Akan Tercapai. Untuk memastikan pencapaian target pada akhir periode Renstra, Balai Besar POM di Samarinda akan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi serta melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan manajemen risiko. Upaya tersebut diarahkan pada penguatan pengendalian, peningkatan kualitas mitigasi risiko, serta konsistensi monitoring dan reviu, sehingga nilai maturitas manajemen risiko dapat meningkat dan mencapai level yang ditargetkan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Tabel 3.180
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional

Target Nasional	Balai Besar	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
2.81	Palembang	3	2.91	97%	Baik
	Manado	3.04	2.81	92.43%	Baik
	Pekanbaru	2.9	2.69	92.76%	Baik
	Samarinda	3.5	3.5	100%	Baik

Gambar 3.78
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain (Klaster 4) dan Target Nasional



Berdasarkan tabel dan gambar di atas, realisasi Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 pada Balai Besar POM di Samarinda dibandingkan dengan capaian Balai Besar lain dalam Klaster 4 serta target nasional sebesar 2,81 menunjukkan variasi capaian antar satuan kerja. Balai Besar POM di Samarinda mencatat realisasi sebesar 3,5 atau 100% dari target yang ditetapkan, sekaligus menjadi capaian tertinggi dalam klaster dan melampaui target nasional. Balai Besar POM di Palembang memperoleh realisasi 2,91 (97%) yang juga berada di atas target nasional. Balai Besar POM di Manado mencapai nilai 2,81 (92,43%) yang setara dengan target nasional.

Sementara itu, Balai Besar POM di Pekanbaru mencatat realisasi sebesar 2,69 (92,76%), yang masih berada di bawah target nasional 2,81, meskipun tetap termasuk dalam kategori Baik. Secara keseluruhan, capaian Balai Besar POM di Samarinda menunjukkan posisi yang paling unggul di tingkat klaster serta mencerminkan implementasi manajemen risiko yang lebih optimal dibandingkan satuan kerja lainnya dalam kelompok yang sama.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan ke Depan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko di Balai Besar POM di Samarinda tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan rencana aksi manajemen risiko yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah ditetapkan dilaksanakan sesuai jadwal serta dimonitor secara berkala untuk memastikan efektivitas pengendalian yang diterapkan.

Selain itu, keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam proses identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja. Budaya sadar risiko yang semakin menguat

mendorong unit kerja untuk lebih proaktif dalam mengelola potensi hambatan terhadap pencapaian sasaran strategis. Peran auditor internal juga sangat mendukung melalui kegiatan reviu, evaluasi, dan pemberian rekomendasi perbaikan, sehingga penerapan manajemen risiko dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Namun demikian, dalam proses kegiatan manajemen risiko menemukan kendala-kendala, antara lain :

1. Pelaksanaan Manajemen Risiko belum mempertimbangkan isu eksternal dan internal;
2. Pelaksanaan Manajemen Risiko secara umum metode identifikasi risiko masih bersifat bottom up;
3. Masih terdapat risiko inheren dengan level > 16 yang belum dilakukan penilaian efektivitas pengendalian eksisting; dan
4. Masih terdapat kesalahan dalam penentuan respon risiko untuk risiko residual dengan level > 16.

Terhadap kondisi tersebut, dilakukan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk penyempurnaan pencapaian kinerja kedepannya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penguatan proses identifikasi risiko dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal secara komprehensif;
2. Menerapkan metode identifikasi risiko secara bottom up dan top down untuk memperoleh gambaran risiko yang lebih menyeluruh;
3. Melakukan penilaian efektivitas pengendalian terhadap seluruh risiko dengan level > 16 untuk memastikan kecukupan pengendalian yang telah diterapkan;
4. Melakukan review dan penyesuaian respon risiko terhadap risiko residual dengan level > 16 agar sesuai prosedur yang ditetapkan.

Tabel 3.181
Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Pelaksanaan Manajemen Risiko: 1. Belum mempertimbangkan isu eksternal dan internal; 2. Secara umum metode identifikasi risiko masih bersifat bottom up; 3. Masih terdapat	1. Melakukan penguatan proses identifikasi risiko dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal secara komprehensif; 2.Menerapkan metode identifikasi risiko secara	1. Menyusun dan melaksanakan rapat identifikasi risiko dengan melibatkan seluruh fungsi untuk mengakomodasi isu internal dan eksternal. 2.	1. Triwulan I 2026 2. Triwulan I 2026 3. Semester I 2026 4. Triwulan I	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		risiko inheren dengan level > 16 yang belum dilakukan penilaian efektivitas pengendalian eksisting; 4. Masih terdapat kesalahan dalam penentuan respon risiko untuk risiko residual dengan level > 16.	bottom up dan top down untuk memperoleh gambaran risiko yang lebih menyeluruh; 3. Melakukan penilaian efektivitas pengendalian terhadap seluruh risiko dengan level > 16 untuk memastikan kecukupan pengendalian yang telah diterapkan; 4.Melakukan review dan penyesuaian respon risiko terhadap risiko residual dengan level > 16 agar sesuai prosedur yang ditetapkan.	Mengintegrasikan metode top down melalui arahan pimpinan dengan metode bottom up dari unit kerja dalam proses identifikasi risiko. 3. Melakukan evaluasi efektivitas pengendalian risiko secara berkala terhadap risiko dengan level > 16. 4. Menetapkan perbaikan respon risiko untuk risiko residual level > 16.	2026			

f. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.182
Program/Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
EBA.956.054	Penatausahaan BMN	B	Koordinasi/ Konsultasi ke KPKNL				
			- Perjalanan Dinas Dalam Kota	2	KL	2	KL
EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	A	Pembayaran gaji dan tunjangan				
			- Belanja Gaji Pokok PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunj.Anak PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	THN	1	THN

Kode	Kegiatan	Subkegiatan		Target Tahun 2025		Realisasi Tahun 2025	
			- Belanja Tunjangan PPh PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunj Beras PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Uang Makan PNS	1	THN	1	THN
			- Belanja Tunjangan Umum PNS	1	THN	1	THN
			- Gaji Pokok PPPK	1	THN	1	THN
			- Pembulatan Gaji PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Suami/ Istri PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Anak PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Fungsional PPPK	1	THN	1	THN
			- Tunjangan Beras PPPK	1	THN	1	THN
			- Uang Makan PPPK	1	THN	1	THN
			Belanja Tunjangan Umum PPPK	1	THN	1	THN
		B	Uang Lembur				
			- Uang Lembur Golongan II	1	THN	1	THN
			- Uang Lembur Golongan III	1	THN	1	THN
			- Uang Lembur Golongan IV	1	THN	1	THN
			- Uang Lembur P3K Golongan IX	1	THN	1	THN

Pada tahun 2025, telah dilakukan beberapa kegiatan untuk menunjang pencapaian target yang optimal sebagai berikut:

1. Mengkomunikasikan tujuan organisasi kepada seluruh pegawai secara berkala;
2. Melakukan pembahasan pencapaian sasaran kinerja yang dikaitkan dengan manajemen risiko pada rapat evaluasi kinerja dan RTM serta mengidentifikasi tindakan pengendaliannya;
3. Melaporkan sertifikasi manajemen risiko yang telah diperoleh pimpinan sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi serta dukungan terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko;
4. Melakukan evaluasi terhadap implementasi pedoman sistem penilaian risiko yang berlaku dan menyampaikan hasil evaluasi serta masukan terkait penerapan manajemen risiko tersebut kepada Inspektorat Utama melalui surat dinas Kepala Balai Besar POM di Samarinda Nomor B-PI.06.07.18A.06.25.370 tanggal 30 Mei 2025 tentang Masukan atas Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko;
5. Melaporkan risiko yang tidak dapat ditangani oleh unit kerja kepada pimpinan dan/atau unit kerja melalui fitur eskalasi risiko pada aplikasi SAPA APIP dan menyampaikan secara formal kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dan Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan serta tembusan kepada Inspektur II Badan POM melalui nota dinas Kepala Balai Besar POM di Samarinda Nomor PR.04.02.18A.12.25.200 tanggal 3 Desember 2025 tentang Kajian dan Rekomendasi terhadap Persentase Sampel Kejadian Luar Biasa yang Diuji Sesuai Standar;

6. Menetapkan tanggung jawab untuk penentuan, penilaian, dan pengelolaan risiko ke dalam uraian tugas Ketua Tim Kerja.

Pada Tahun 2025, BBPOM di Samarinda mencatatkan capaian yang membanggakan dalam pengelolaan manajemen risiko. Berdasarkan Rekapitulasi Nilai Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025, BBPOM di Samarinda termasuk dalam 5 Unit Kerja Balai dan Balai Besar POM dengan nilai tertinggi. Capaian ini menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam memperkuat implementasi manajemen risiko secara sistematis dan terintegrasi.

Nilai maturitas BBPOM di Samarinda mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 3,438 pada tahun 2024 menjadi 3,500 pada tahun 2025, dengan kenaikan sebesar 0,062. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko, termasuk tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian maturitas risiko tahun sebelumnya.

Prestasi ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar penerapan manajemen risiko, tetapi juga menggambarkan semakin kuatnya budaya sadar risiko di lingkungan BBPOM di Samarinda. Keberhasilan tersebut menjadi indikator bahwa sistem manajemen risiko telah berjalan lebih efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi serta penguatan pengawasan obat dan makanan berbasis risiko.

g. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 3.183
Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda	1.606.284.250	1.604.682.670,50	99,90	100,00	100% (Efisien)

Penggunaan sumber daya/anggaran pada indikator Indeks Manajemen Risiko BBPOM Samarinda tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa anggaran telah sepenuhnya efisien mendukung pencapaian indikator Indeks Manajemen Risiko BBPOM Samarinda dengan realisasi anggaran tercapai realisasi sebesar 99,90% yaitu dari target anggaran sebesar Rp.1.606.284.250,- tercapai realisasi sebesar Rp.1.604.682.670,50. Kriteria efisien tercapai karena realisasi anggaran sebesar 99,90% selaras dengan pencapaian target kinerja indikator sebesar 100,00%.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Samarinda merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mulai ditetapkan pada tahun 2025. Meskipun demikian, tingkat maturitas manajemen risiko telah melalui tahapan penilaian implementasi pada tahun 2022 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Melalui Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.07.7.12.24.704 tanggal 2 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Risiko Tahun 2024 pada Balai Besar POM di Samarinda, telah disampaikan hasil penilaian, kelemahan yang masih terdapat dalam pengelolaan manajemen risiko, serta rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

Rekomendasi tersebut dimanfaatkan oleh BBPOM di Samarinda sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang keberhasilan implementasi manajemen risiko. Tindak lanjut atas rekomendasi dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam pengelolaan manajemen risiko.

Pemanfaatan hasil penilaian tersebut dinilai signifikan dalam meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko serta berkontribusi terhadap peningkatan nilai Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Samarinda.

i. Mitigasi Risiko atas Ketercapaian Target Kinerja

Dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja, Balai Besar POM di Samarinda melakukan identifikasi risiko serta menetapkan langkah mitigasi terhadap risiko yang terkait dengan indikator kinerja.

1. Daftar risiko terkait indikator kinerja adalah sebagai berikut:
   a. Tidak semua indikator kinerja memiliki risiko yang teridentifikasi dalam manajemen risiko UPT.
2. Berikut aktivitas pengendalian yang telah dilakukan::
   a. Penetapan Ketua Tim sebagai pelaksana mitigasi risiko untuk memastikan tiap indikator ditelaah.

Indeks Manajemen Risiko merupakan bagian penting dalam mengawal kinerja, sehingga risiko operasional yang terkait mencakup seluruh potensi risiko yang mungkin terjadi maupun yang telah terjadi di lingkungan Balai Besar POM di Samarinda. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat indikator kinerja yang belum memiliki risiko teridentifikasi secara memadai dalam manajemen risiko balai, yang antara lain disebabkan belum adanya penetapan PIC mitigasi risiko yang secara khusus bertanggung jawab atas pengelolaan risiko pada masing-masing indikator, sehingga pengelolaan risiko dari seluruh fungsi atau bagian belum berjalan secara optimal.

Sebagai upaya mitigasi, telah dilakukan penetapan Ketua Tim sebagai pelaksana mitigasi risiko untuk memastikan setiap indikator kinerja ditelaah serta memiliki identifikasi dan pengendalian risiko yang memadai.

Melalui langkah tersebut diharapkan pengelolaan risiko dapat berjalan lebih menyeluruh dan efektif sehingga mampu mendukung ketercapaian target kinerja serta meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko di Balai Besar POM di Samarinda.

III.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Tabel 3.184
Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Sampel obat bahan alam/suplemen kesehatan dan kosmetik masuk ke laboratorium mikrobiologi pada waktu yang hampir berdekatan pada bulan Juli, padahal terdapat ketentuan internal bahwa kedua jenis komoditas tersebut tidak boleh masuk secara bersamaan karena keterbatasan alat yang ada (Cawan petri) 2. Terdapat 13 sampel kosmetik yang tidak memenuhi bobot Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu karena adanya kerusakan	1.Melakukan monitoring dan evaluasi yang optimal terkait jadwal masuk kedua komoditi tersebut untuk bulan berikutnya 2. Perbaikan HPLC Shimadzu LC 20 AD dan AAS Laboratorium kosmetik 3.Pelaksanaan Sampling di sarana JKN meliputi RS, Klinik dan Apotek (JKN) dan Mengintensifkan sampling sarana tidak berizin berkolaborasi dengan fungsi penindakan 4. Pembelian lampu	1.Melakukan penjadwalan terkait rencana masuk ke lab. mikrobiologi untuk kedua komoditi tersebut 2. Membuat surat permohonan dan melakukan perbaikan HPLC LC 20 AD dan AAS kosmetik 3.Melakukan Sampling di sarana JKN meliputi RS, Klinik dan Apotek (JKN) dan Mengintensifkan sampling sarana tidak berizin berkolaborasi dengan fungsi penindakan 4. Membuat surat permintaan dan melakukan pembelian lampu untuk melakukan pengujian	1.Selesai 2.Selesai 3.Selesai 4.Selesai			1. Y 2. Y 3. Y 4. Y	1.Pengujian 8 2.Pengujian 8 3.Pemeriksaan 10 4.Pengujian 8	1.Terjadi penumpukan sampel yang belum diuji di laboratorium 2.Terjadi penumpukan sampel yang belum diuji di laboratorium 3. Tidak terlaksananya sampling kosmetik yang sesuai dengan pedoman sampling 4. Terjadi penumpukan sampel yang

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		alat HPLC shimadzu LC 20 AD dan AAS(pengujian yg isi) 3.Sampling komoditi Obat s.d september 212 sampel dari target renlak sebesar 222; jumlah sampel yg disampling sesuai renlak per kategori sampel dan per kelas terapi adalah 203 sampel dari 222 target Renlak, hal ini disebabkan : a. Terdapat kendala dalam pemenuhan sampel di sarana JKN, dikarenakan belum adanya pengadan sediaan farmasi baru yang dilakukan DInkes Kab/Kota guna didistribusikan kesarana pelayanan kesehatan pemerintah adapun stok	untuk pengujian logam arsen	logam arsen							belum diuji di laboratorium

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		disaryanfar sebagian besar telah dilakukan sampling di TW I dan TW II. b. Terdapat kendala dalam pemenuhan sampling sarana tidak berizin 4. Lampu untuk pengujian logam Arsen rusak								
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Dari 64 sampel yang diperiksa dan diuji di bulan Agustus hanya 15 sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling. Hal ini disebabkan AAS dan LCMSMS laboratorium Pangan mengalami kerusakan ringan sehingga load untuk mengerjakan sampel tidak bisa maksimal	1a. Melakukan perbaikan AAS 1b. Melakukan perbaikan LCMSMS 2. Pengecekan kembali oleh teknisi setelah dilakukan penggantian lampu arsen dan suku cadang yg dalam proses pembelian bersamaan dengan pekerjaan kalibrasi alat AAS	1a.Membuat surat permintaan dan melakukan perbaikan AAS 2. Dilakukan pengecekan kembali oleh teknisi setelah dilakukan penggantian lampu arsen dan suku cadang yg dalam proses pembelian bersamaan dengan pekerjaan kalibrasi alat AAS	1a. Selesai 1b. Belum selesai 2.Selesai	1b. Membuat surat permintaan dan melakukan perbaikan LCMSMS	2. Maret 2026	1a. Y 1b. Y 2.Y	1.Pengujian 8 2.Pengujian 8	1.Terjadi penumpukan sampel yang belum diuji di laboratorium 2.Terjadi penumpukan sampel yang belum diuji di laboratorium

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		sesuai target 2.Telah dilakukan perbaikan alat AAS oleh teknisi namun Performa AAS masih belum bagus , kemungkinan besar karena Masa pakai lampu Arsen AAS laboratorium Pangan telah habis, telah dilakukan pembelian lampu Arsen tersebut di tw 2 tinggal menunggu barang datang								
3	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Terdapat sampel dengan Jumlah sampel KLB yang akan diujikan tidak cukup untuk melakukan pengujian parameter uji kimia yaitu sampel ice cream dengan nomor registrasi BPOM	Menyampaikan hasil telaah terhadap manual IKU KLB kepada pengampu	Membuat surat hasil telaah manual IKU KLB kepada pengampu	Selesai			Y	Pengujian 7	Sampel yang diserahkan untuk diuji tidak sesuai untuk dilakukan pengujian sampel KLB
4	Persentase keputusan/	Respon yang diterima dari pelaku usaha terhadap	1. Optimalisasi koordinasi/komunikasi	1. Meningkatkan komunikasi dengan pelaku	1.Selesai 2.Selesai			Y	Pemeriksaan 8	Terdapat pelaku usaha

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	rekomendasi yang diberikan masih kurang	dengan lintas sektor dan pelaku usaha melalui whatsapp/email untuk mendapatkan respon yang lebih tinggi 2. Membuat desk CAPA di tempat saat pemeriksaan sarana	usaha dan lintas sektor melalui whatsapp/email untuk mendapat respon yang lebih tinggi 2. Melakukan desk CAPA ditempat saat pemeriksaan sarana						yang menyampaikan tindak lanjut hasil perbaikan pemeriksaan sarana melebihi timeline yang ditetapkan
5	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Bobot kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL tidak terpenuhi pada 1 sarana karena terdapat perbedaan tindaklanjut yang diberikan antara UPT dan Ditwasprod pangan olahan. seharusnya tindaklanjut adalah rekomendasi PSK, namun yang diberikan adalah peringatan keras	Cek kembali peraturan/pedoman tindaklanjut sesuai sarana yang diperiksa	Refreshment pedoman tindaklanjut hasil pemeriksaan sarana	Selesai			T		
6	Persentase iklan sediaan	1.Terdapat perbedaan dalam menarik	1. Refreshment peraturan terkait	1. Morning season peraturan pengawasan	1.Selesai 2.a.			1. T 2. T		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	kesimpulan iklan antara petugas dan verifikator 2. a. Jumlah iklan yang dilaporkan tidak tepat waktu : obat (2), kosmetik (7), OBA (4), SK (1), PO (6) karena keterlambatan dalam melakukan verifikasi iklan oleh kepala balai (melewati bulan berjalan), sehingga jumlah iklan terkirim melebihi timeline yang ditetapkan b. Jumlah iklan kosmetik yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tidak tepat waktu sebanyak 2 sampel karena keterlambatan ketua tim dalam melakukan verifikasi iklan kosmetik (melebihi 20 hk) sehingga timeline tidak terpenuhi	pengawasan iklan kepada petugas 2. a. monev renlak iklan bulanan 2.b. monev pelaporan iklan melalui SIPT 3.a. Monitoring dan evaluasi secara rutin 3.b. morning season dengan petugas terkait pengawasan iklan	iklan untuk petugas pengawas iklan 2. a melakukan monitoring secara rutin terhadap renlak iklan yang telah dibuat 2.b. memverifikasi pelaporan iklan melalui SIPT sebelum akhir bulan 3. Morning season dengan petugas agar menggunakan data sireka dan asrot untuk mengevaluasi iklan	Selesai 2.b. Selesai 3.Selesai			3.T		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		3. Iklan Sk = 1 iklan tdk memenuhi bobot % Akurasi pengambilan keputusan di bulan September, hal ini dikarenakan petugas kurang teliti dalam mengkonfirmasi data ke sireka dan asrot. klaim yang tercantum pada iklan tidak sesuai dengan data asrot.								
7	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	1. Petugas kurang komitmen dalam melakukan pengawasan penandaan rokok, sehingga pengawasan tidak berjalan sesuai dengan renlak yang ditentukan 2. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap renlak pengawasan penandaan rokok	1. Meningkatkan komitmen petugas untuk melaksanakan pengawasan sesuai renlak 2. Monev secara berkala	1. Mengingatkan petugas terhadap komitmen pengawasan penandaan rokok sesuai renlak yang ditentukan, dan memenuhi kekurangan pengawasan di bulan-bulan sebelumnya 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	1.Selesai 2.Selesai			1. Y 2. Y	1.Pemeriksaan 38 2.Pemeriksaan 38	1.Target pengawasan label produk tembakau tidak tercapai 2.Target pengawasan label produk tembakau tidak tercapai

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		sehingga hasil pengawasan kurang terarah								
8	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Verifikasi metode dan peningkatan kompotensi pengujian laboratorium yang merupakan bagian dari penilai SKL tidak maksimal dilakukan sesuai perencanaan di tw 3 karena lebih memprioritaskan pengujian sampel rutin dengan timeline15 Hari Kerja	Verifikasi metode dilakukan bersamaan dengan melakukan pengujian sampel rutin dengan pustaka yang sama	Melakukan verifikasi Metode bersamaan dengan melakukan pengujian sampel rutin	Selesai			Y	Pengujian 4	Verifikasi metode yang sudah dijadwalkan tidak dikerjakan sesuai target.
9	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kegiatan KIE terkait PUG dengan peserta kelompok rentan/ disabilitas belum dilaksanakan	Melaksanakan KIE terkait PUG dengan peserta kelompok rentan/ disabilitas	Kegiatan KIE terkait PUG dengan peserta kelompok rentan/ disabilitas	Selesai			T		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
10	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1.Kader sekolah belum siap untuk mengumpulkan seluruh data dukung yang dibutuhkan dalam rangka sertifikasi sekolah 2. Sebagian besar sekolah belum selesai menyiapkan data dukung pemenuhan dalam rangka sertifikasi sekolah	1.Dilakukan pertemuan secara daring untuk membahas kendala sekolah dalam penyusunan data dukung sertifikasi 2. Dibuat pembagian tugas dalam tim untuk mendampingi sekolah dalam pemenuhan data dukung sertifikasi	1.Dilakukan supervisi dalam rangka penyusunan data dukung sertifikasi 2. Verifikasi data dukung dalam rangka sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1.Selesai 2.Selesai			1.Y 2.Y	1.Infokom 1 2.Infokom 10	1.Kader yang ditunjuk tidak berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan 2. Tahapan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan target perencanaan
11	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	1. Anggaran Pendampingan UMKM yang dipotong 60 % mempengaruhi penjaringan dan pendampingan UMKM yang akan didampingi pengurusan Izin Edar BPOM 2. Kecenderungan penurunan jumlah UMKM yang proaktif mengajukan	Memaksimalkan Sosialisasi Izin Edar dan Tahapan Pendampingan UMKM ke pelaku usaha di wilayah Kalimantan Timur melalui kolaborasi dengan fungsi lain yang bisa membantu penganggaran kegiatan tersebut.	Menyelenggarakan kegiatan Semarak Kemerdekaan UMKM	Selesai			T		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		pendampingan Izin Edar ke layanan Si Jebol								
12	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Alat khusus (Kamera Sony Super Zoom, Kamera Nikon, SPUKTA Drone, Teropong Night Vision Luna Optic, Borescop Camera Teslong, dll) yang digunakan untuk penunjang dalam mencari/mendapatkan informasi kejahatan obat dan makanan mengalami penurunan fungsi dikarenakan pada body dan lensa alat khusus tersebut berjamur yang diakibatkan oleh ruangan yang lembab.	Alat khusus tersebut perlu disimpan pada alat yang dapat mengendalikan suhu dan kelembaban agar dapat menjaga alat khusus dari berjamur yang dapat menurunkan fungsinya.	Melakukan pengadaan alat dry box sebanyak 2 unit yang digunakan untuk menyimpan alat khusus dengan suhu yang tidak lembab agar terhindar dari jamur dan penurunan fungsi.	Selesai			Y	Penindakan 11	Potensi terjadinya kehilangan Alat khusus (Alsus) Intelijen
13	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	1. Mulai diberlakukan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-8/PB/2025	1. Berkonsultasi terkait cara pembayaran yang baru ke KPPN setempat 2. a. Percepatan realisasi anggaran PBJ dan	1. Melakukan konsultasi terkait cara pembayaran yang baru untuk paket PBJ e-katalog versi 6 ke KPPN setempat	1.Selesai 2.Selesai 3.Selesai			Y	1.Tata usaha 38 2. Tata usaha 9 3. Tata Usaha	1. Pelaksanaan kontrak pengadaan melebihi timeline

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAGIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KATALOG ELEKTRONIK ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA untuk paket PBJ e-katalog versi6 per tanggal 16 September 2025, dimana untuk pembayaran LS diberlakukan mekanisme LS kontraktual (perubahan mekanisme pembayaran) sehingga terdapat beberapa paket pbj yang belum dilakukan pendaftaran kontrak 2. Indikator penyerapan anggaran dalam perhitungan IKPA masih	kegiatan 2.b. Penyusunan POA TW IV 3. Mengoptimalkan pengelolaan UP dan TUP setiap bulan	2. a. Mempercepat pelaksanaan PBJ dan kegiatan serta mempercepat proses pembayaran jika pekerjaan telah selesai dilakukan 2.b Melakukan penyusunan update POA TW IV secara lebih akurat 3. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan memperhatikan %GUP yang disebulankan					31	2. Rendahnya realisasi anggaran dan deviasi halaman III DIPA yang lebih dari rentang 5% 3. Kesalahan input item pendetailan COA kuitansi GU pada operator komitmen

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		berada di atas batas toleransi yang diperkenankan 3. Persentase GUP disebulankan masih kurang dari 100%								

III.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

BBPOM di Samarinda telah melakukan pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan berkesinambungan capaian kinerja selanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

A. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, dilakukan reviu terhadap beberapa target RAPK indikator sebagai berikut :

1. Pada saat monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan bulan Februari 2025 di awal bulan Maret tahun 2025 untuk Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diperkirakan realisasi sampai dengan bulan Maret akan melebihi target, hal ini dikarenakan Rekomendasi hasil pengawasan tahun 2024 yang telah selesai ditindaklanjuti oleh stakeholder di bulan Maret telah melebihi dari perkiraan sebelumnya sehingga perlu dilakukan revisi target RAPK bulan Maret - November 2025.

   Berdasarkan penjelasan diatas, maka target RAPK bulan Maret sampai dengan November 2025 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder perlu dilakukan revisi sbb:

Indikator Kinerja	Realisasi	Target Semula									
	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	19,00	35,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,60

Usulan Revisi Target										Justifikasi
B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
38,00	40,00	45,00	50,00	55,00	65,00	70,00	75,00	80,60	80,60	Rekomendasi hasil pengawasan tahun 2024 yang telah selesai ditindaklanjuti oleh stakeholder di bulan Maret telah melebihi dari perkiraan sebelumnya sehingga perlu dilakukan revisi target RAPK bulan Maret - November 2025

2. Persentase Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan pada bulan Februari tahun 2025 realisasi belum terlaksana sehingga capaian 0, hal ini dikarenakan Menyesuaikan dengan Target Pelaksanaan tahapan yang terbaru berdasarkan surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 dan kegiatan audiensi belum bisa dilaksanakan di bulan Maret karena menunggu jadwal walikota Samarinda. Berdasarkan hal tersebut, maka target RAPK bulan Maret sampai dengan November 2024 Persentase Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan perlu dilakukan revisi sbb:

Indikator Kinerja	Realisasi	Target Semula									
	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0,00	10,00	20,00	40,00	60,00	60,00	75,00	80,00	85,00	100,00	10,00

Usulan Revisi Target										Justifikasi
B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
10,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00	90,00	10,00	Menyesuaikan dengan Target Pelaksanaan tahapan yang terbaru berdasarkan surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 dan kegiatan audiensi belum bisa dilaksanakan di bulan Maret karena menunggu jadwal walikota Samarinda

3. Progres persentase Jumlah desa pangan aman pada bulan Februari tahun 2025 realisasi masih 0, berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan diperkirakan realisasi sampai dengan bulan Maret akan melebihi target, hal ini dikarenakan Menyesuaikan dengan Target Pelaksanaan tahapan yang terbaru berdasarkan surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025. Berdasarkan hal tersebut, maka target RAPK bulan Maret sampai dengan November 2025 Jumlah desa pangan aman perlu dilakukan revisi sbb:

Indikator Kinerja	Realisasi	Target Semula									
	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012
Jumlah desa pangan aman	0,00	2,50	25,00	45,00	50,00	55,00	70,00	80,00	85,00	95,00	4,00

Usulan Revisi Target										Justifikasi
B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
5,00	25,00	40,00	50,00	55,00	60,00	70,00	85,00	100,00	4,00	Menyesuaikan dengan Target Pelaksanaan tahapan yang terbaru berdasarkan surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025

4. Progres Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada bulan Februari tahun 2025 realisasi masih 0, berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan diperkirakan realisasi sampai dengan bulan Maret akan melebihi target, hal ini dikarenakan Menyesuaikan dengan Target Pelaksanaan tahapan yang terbaru berdasarkan surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025. Berdasarkan hal tersebut, maka target RAPK bulan Maret sampai dengan November 2025 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas perlu dilakukan revisi sbb:

Indikator Kinerja	Realisasi	Target Semula									
	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0,00	5,00	25,00	25,00	50,00	50,00	70,00	70,00	90,00	100,00	1,00

Usulan Revisi Target										Justifikasi
B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
5,00	25,00	25,00	50,00	70,00	70,00	90,00	90,00	100,00	1,00	Menyesuaikan dengan Target Pelaksanaan tahapan yang terbaru berdasarkan surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025

5. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan bulan Februari 2025 di awal bulan Maret tahun 2025 untuk Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan diperkirakan realisasi sampai dengan bulan Maret dibawah target, hal ini dikarenakan perhitungan sebelumnya mengacu kepada tahapan kegiatan di DO RO tahun 2025 yang tidak sesuai dengan cara perhitungan pada IKU tahun 2025 sehingga perlu dilakukan revisi target RAPK bulan Maret - November 2025.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka target RAPK bulan Maret sampai dengan November 2025 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan perlu dilakukan revisi sbb:

Indikator Kinerja	Real isasi	Target Semula									
	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	13,33	34,50	40,00	46,50	50,25	53,00	55,50	59,00	61,50	72,50	80,00

Usulan Revisi Target										Justifikasi
B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B010	B011	B012	
31,00	45,25	49,50	54,00	58,25	64,25	70,25	76,25	78,00	80,00	perhitungan sebelumnya mengacu kepada tahapan kegiatan di DO RO tahun 2025 yang tidak sesuai dengan cara perhitungan pada IKU tahun 2025

6. Sampai dengan bulan April 2025 di awal bulan Mei tahun 2025 untuk Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan diperkirakan progres sampai dengan bulan Mei

akan melebihi target, hal ini dikarenakan Pada B05-B06 (bulan Mei-Juni) dilaksanakan tahapan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan (20%) dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (25%) sehingga perlu dilakukan revisi target RAPK bulan Mei - November 2025

Berdasarkan penjelasan diatas, maka target RAPK bulan Mei sampai dengan November 2025 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan perlu dilakukan revisi sbb:

Indikator Kinerja	Realisasi	Target Semula							
	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	85,00	90,00	10,00

Target Menjadi								Justifikasi
B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
60,00	70,00	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00	10,00	Pada B05-B06 (bulan Mei-Juni) dilaksanakan tahapan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan (20%) dan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (25%) sehingga target RAPK B05-B011 perlu dilakukan revisi

7. Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan diperkirakan Progres Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sampai dengan bulan April akan melebihi target, hal ini dikarenakan Pada B05-B06 (bulan Mei-Juni) dilaksanakan tahapan kegiatan Bimtek dan penyuluhan Komunitas Pasar (25%) dan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas Pasar (20%) sehingga target RAPK B05-B011 perlu dilakukan revisi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka target RAPK bulan

Mei sampai dengan November 2025 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas perlu dilakukan revisi sbb:

Indikator Kinerja	Realisasi	Target Semula							
	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25,00	25,00	50,00	70,00	70,00	90,00	90,00	100,00	1,00

Target Menjadi								Justifikasi
B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
60,00	70,00	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1,00	Pada B05-B06 (bulan Mei-Juni) dilaksanakan tahapan kegiatan Bimtek dan penyuluhan Komunitas Pasar (25%) dan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas Pasar (20%) sehingga target RAPK B05-B011 perlu dilakukan revisi

8. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan bulan April 2025 untuk Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT diperkirakan realisasi sampai dengan bulan Mei dibawah target, hal ini dikarenakan terjadi pembukaan blokir anggaran dan target perkara kembali ke target semula. Target RAPK yang disusun sebelumnya berdasarkan anggaran efisiensi dengan target 2 (dua) perkara. Target kembali menjadi 5 (lima) perkara berdasarkan anggaran sebelum dilakukan langkah kebijakan efisiensi sehingga perlu dilakukan revisi target RAPK bulan Mei - November 2025.

   Berdasarkan penjelasan diatas, maka target RAPK bulan Mei sampai dengan November 2025 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT perlu dilakukan revisi sbb:

Indikator Kinerja	Realisasi	Target Semula							
	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	17,00	42,50	50,00	57,50	57,50	57,50	77,50	92,50	92,50

Target Menjadi								Justifikasi
B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
29,00	53,00	59,00	68,00	74,00	80,00	91,00	92,50	Perlu dilakukan reviu target RAPK B05-B11 karena terjadi pembukaan blokir anggaran dan target perkara kembali ke target semula. Target RAPK yang disusun sebelumnya berdasarkan anggaran efisiensi dengan target 2 (dua) perkara. Target kembali menjadi 5 (lima) perkara berdasarkan anggaran sebelum dilakukan langkah kebijakan efisiensi

9. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan bulan Juli 2025 untuk Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT diperkirakan realisasi sampai dengan bulan Agustus melebihi target, hal ini dikarenakan target terpenuhi lebih awal sehingga sampai melampaui target di bulan September, sehingga perlu dilakukan revisi target RAPK bulan Agustus - November 2025. Berdasarkan penjelasan diatas, maka target RAPK bulan Agustus sampai dengan November 2025 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT perlu dilakukan revisi sbb:

Indikator Kinerja	Realisasi	Semula				
	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77,00	68,00	74,00	80,00	91,00	92,50

Menjadi					Justifikasi
B08	B09	B10	B11	B12	
80,00	80,00	83,00	91,00	92,50	Target terpenuhi lebih awal melampaui target di bulan September

10. Reviu target PK 2025 berdasarkan realisasi capaian kinerja triwulan II tepatnya bulan Mei 2025, dimana capaian beberapa indikator kinerja telah melebihi 110 % kategori Tidak dapat disimpulkan. Pada kegiatan Bimtek Renstra 2025-2029 tanggal 24-26 Juni 2025 dilakukan pembahasan desk reviu target PK RAPK 2025 dengan Rorenkeu dan unit pengampu, perubahan target PK 2025 ditetapkan di bulan Agustus tahun 2025. Revisi target PK 2025 ini memungkinkan dilaksanakan di tahun berjalan berdasarkan adanya perubahan asumsi, karena tahun 2025 merupakan tahun pertama pada periode Resntra 2025-2029 dan penyusunan PK 2025 masih mengacu pada Rancangan Renstra 2025-2029. Berikut indikator kinerja yang mengalami perubahan target PK :
    - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
    - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
    - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
    - Persentase keputusan /rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
    - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
    - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
    - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
    - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
    - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
    - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
    - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

B. Informasi kinerja telah dimanfaatkan untuk penyesuaian kegiatan dan optimalisasi anggaran melalui kegiatan dalam rangka upaya mencapai target kinerja diantaranya adalah:

1. Pada Triwulan I tahun 2025, kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator mencakup pelaksanaan patroli siber, penjejakan digital (profiling siber), serta pengumpulan data kerawanan kejahatan. Kegiatan ini difokuskan pada pencegahan dan penangkalan terhadap kejahatan obat dan makanan. Upaya ini dilaksanakan melalui penggalangan pemangku kepentingan dalam kegiatan AKSI MOHAK, AWASI bersama MOLEN MAHAKAM, serta Masyarakat Online Lapor E-Commerce Nakal. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi masyarakat, terutama pelaku usaha distribusi kosmetik serta masyarakat umum pengguna kosmetik, dalam mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan.

   Selasa (19/03/2025), Balai Besar POM di Samarinda melakukan kegiatan Aksi Mohak (AWASI bersama Molen Mahakam) via Zoom Meeting dengan peserta sebanyak 19 Pelaku Usaha dan Masyarakat di wilayah Kalimantan Timur. Dalam kegiatan tersebut dibahas hal yang sangat penting yaitu mengenai dampak, cara mengenali dan bagaimana agar aman dari produk ilegal. Adapun materi hang disampaikan dalam kegiatan yaitu terkait jastip (jasa titipan) dan tentang pengenalan Molen (Masyarakat Online Lapor E-Commerce Nakal) Mahakam yang merupakan Inovasi dari Balai Besar POM di Samarinda termasuk cara pelaporannya.



2. Pencanangan Rencana Aksi AOC Tahun 2025



Pembentukan Tim *Agent of Change* BBPOM di Samarinda dengan berbagai program/kegiatan meliputi:

- **POMCast**

  Dialog interaktif antara BBPOM Samarinda dengan internal pegawai/*stakeholder*/masyarakat tentang pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Timur secara umum yang dilakukan sebanyak 1x setahun.

- **BBPOM di Samarinda GTM (*Goes to Masyarakat*)**

  BBPOM di Samarinda hadir diantara komunitas untuk membantu meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan terkait usaha dibidang obat dan makanan yang dilakukan sebanyak 1x setahun.

- **Ncarang Haber**

  Inovasi yang dicanangkan untuk meningkatkan rasa kebersamaan antar pegawai BBPOM di Samarinda dengan makan bersama dilakukan sebanyak 2x setahun.

- **Undas of the Month**

  Sebagai apresiasi terhadap pegawai yang memiliki hasil kinerja yang baik maka Tim *Agent of Change* BBPOM di Samarinda memberikan penghargaan terhadap secara berkala setiap bulan sehingga meningkatkan nilai values loyal pegawai.

- ***Inovation cycle***

  Suatu wadah untuk memfasilitiasi inovasi dari pegawai BBPOM di Samarinda dapat terimplementasikan secara berkelanjutan.

- **RB Days**

  RB Days merupakan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk membuka akses informasi melalui program mentoring/sharing session dimana pegawai yang berpengalaman dapat

membagikan pengalaman atau pengetahuannya kepada pegawai muda/baru atau sebaliknya.

- **Kolaborasiin JJS (Jumat Jumpa Si Jebol)**

  Tim *Agent of Change* BBPOM di Samarinda berkolaborasi bersama tim inovasi Si Jebol BBPOM di Samarinda dalam mendukung UMKM Kalimantan Timur. Dibuat dalam bentuk video informasi terkait sediaan farmasi dan produk pangan yang dibutuhkan UMKM.

- **Kata-kata Hari Ini**

  Memberikan kata-kata motivasi dalam rangka meningkatkan nilai BerAKHLAK pegawai BBPOM di Samarinda yang disebarkan melalui media sosial.

- **Mini Aksi (Mini Soccer sambil Edukasi)**

  Kegiatan mini soccer bersama stakeholder yang dibalut dalam edukasi obat dan makanan melalui bincang singkat dan pamflet digital.

- **Jalan Baru**

  Memberikan apresiasi kepada pegawai BBPOM di Samarinda yang akan purna bakti ditambahkan terkait pelatihan buat pegawai BPOM

- **Etam Berbagi**

  Mengusung *core values* BerAKHLAK dengan values Harmonis dan Akuntabel, BBPOM di Samarinda ingin mewujudkan kepeduliaan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk Etam Berbagi (Kita Berbagi) dimana dapat bervupa pengumpulan dana, barang, ataupun bantuan kepada masyarakat sekitan BBPOM di Samarinda yang membutuhkan. Tim *Agent of Change* BBPOM di Samarinda sebagai PIC akan mengkoordinir, menginformasikan kepada seluruh pegawai BBPOM di Samarinda agar dapat mengumpulkan bantuan dan akan menyalurkan seluruh bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Balai Besar POM di Samarinda melakukan audiensi bersama Wakil Walikota Samarinda, Bapak Saefuddin Zuhri, bertempat di Balai Kota Samarinda pada tanggal 11 April 2025. Audiensi ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam rangka pelaksanaan tiga program nasional dari Badan POM di wilayah Kota Samarinda.

   Rombongan BBPOM Samarinda dipimpin oleh Kepala Balai, **Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc.**, didampingi oleh **Drs. Mohd. Faizal, Apt.** – Ketua Tim Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas, **Siti Chalimatus Sakdiyah, S.Si., Apt.** – Ketua Tim Desa Pangan Aman dan SAPA Sekola, Dan **Diah Agustiani Syarifah, S.Farm., Apt.** – Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda. Dalam pertemuan tersebut dibahas pelaksanaan tiga program strategis nasional, yaitu: **Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Desa Pangan Aman, Program Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman (SAPA Sekolah).**

   Ketiga program ini merupakan wujud komitmen Badan POM dalam mendorong peningkatan

keamanan pangan secara menyeluruh di tingkat komunitas, pedesaan, dan sekolah-sekolah. Disampaikan oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri , bahwa program-program seperti ini harus disambut dengan kesiapan seluruh instansi, khususnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan. Ini bukan hanya soal teknis, tapi panggilan kemanusiaan. Jangan pernah bosan berkolaborasi, karena ini adalah tugas kita bersama demi masyarakat. Audiensi ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang diharapkan menjadi mitra aktif dalam implementasi program. Sinergi antara BBPOM Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda diharapkan dapat memperkuat upaya bersama dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih pangan yang aman, bermutu, dan sehat.



4. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di halaman kantor Kejari Kutai Kartanegara, Selasa (10/6/2025). Pemusnahan dilakukan dengan menggunakan mobil incenerator milik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda, sebagai bentuk kolaborasi dalam penegakan hukum. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika, senjata tajam dan senjata api, alat elektronik, serta barang-barang lain yang terkait dengan tindak pidana. Beberapa jenis barang bukti seperti narkotika dan alat hisapnya dimusnahkan langsung menggunakan incenerator, sementara barang bukti lain seperti pakaian dan perlengkapan terkait turut dimusnahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Acara pemusnahan barang bukti ini turut dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk perwakilan dari Polres Kutai Kartanegara, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kutai Kartanegara, Kodim Kutai Kartanegara, Dinas Kesehatan

Kutai Kartanegara serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara berharap masyarakat dapat melihat langsung keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana secara profesional dan bertanggung jawab, sekaligus menjadi pengingat akan bahaya tindak kejahatan yang dapat merugikan banyak pihak.



5. Selasa (17/06/2025), Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni, S.T., M.M melakukan kunjungan kerja ke BBPOM di Samarinda. Tujuan kunjungan ini dalam rangka pengawasan pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, khususnya Pengendalian Konsumsi Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Dalam kegiatan ini dilakukan diskusi terkait peran pengawasan BPOM terhadap kandungan MBDK, penindakan terhadap produk MBDK yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, upaya edukasi publik yang telah dilakukan kepada masyarakat terkait kandungan MBDK serta koordinasi apa saja yang telah dilakukan BBPOM di Samarinda dengan stakeholder terkait dalam pengawasan MBDK. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat disusun langkah-langkan pengendalian yang lebih baik terkait konsumsi MBDK terutama untuk kalangan anak-anak dan remaja.



6. Mari bersama kita wujudkan pelaku usaha yang taat regulasi dan konsumen yang cerdas dalam memilih produk. Sebagai bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat dari peredaran produk kosmetik ilegal dan berbahaya, Balai Besar POM di Samarinda kembali hadir di tengah masyarakat Kota Bontang melalui edukasi dan pengawasan sinergis bersama. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 19 Juni 2025 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang dan Kepala Balai Besar POM di Samarinda, serta melibatkan Instansi Terkait, Mahasiswa, Pelaku Usaha Kosmetik & Salon, Perwakilan PKK Kelurahan Kota Bontang.



7. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda secara resmi membuka kegiatan "September Ceria: UMKM Berdaya, Produk Kaltim Mendunia", Senin (22/9/2025) di Gedung G Universitas Muhammadiyah Kaltim (UMKT), Samarinda. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan UMKM, khususnya di bidang pangan olahan beku (frozen food), agar mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional.

   Kepala BBPOM Samarinda, Sem Lapik, menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM sebagai ujung tombak ekonomi lokal. Menurutnya, pelaku usaha di Kaltim memiliki potensi besar untuk "go global" dengan dukungan pembinaan, peningkatan kualitas produk, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan tema 'UMKM Berdaya, Produk Kaltim Mendunia' bukan sekadar slogan. Ini adalah ajakan dan komitmen bersama agar produk-produk lokal kita mampu bersaing, berkembang, dan dikenal lebih luas, baik melalui digitalisasi, peningkatan kualitas, maupun kolaborasi lintas sektor,". BBPOM di Samarinda juga mengajak pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dalam setiap produk yang dihasilkan.



8. Dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat bahan alam, khususnya yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), Pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2025, Balai Besar POM di Samarinda menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis kepada distributor obat bahan alam dalam rangka perkuatan pengawasan obat bahah alam yang mengandung Bahan kimia obat. Acara ini dilaksanakan di aula Balai Besar POM di Samarinda dan dihadiri oleh distributor dan pelaku usaha obat bahan alam (Depot jamu) yang berada di Samarinda dan Kab. Kutai Kartanegara. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari IAI Provinsi Kaltim, Dewan Jamu Nasional Prov. Kaltim, Universitas Mulawarman, Gabungan Pengusaha Farmasi Prov. Kaltim, serta perwakilan media massa prov.

Kaltim. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bapak Drs. Sem Lapik., Apt., M.Sc selaku Kepala Balai Besar POM di samarinda, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya pengawasan bersama antara pemerintah dan pelaku usaha guna menjamin keamanan, mutu, dan manfaat obat bahan alam yang beredar di masyarakat dan sebagai upaya memutus *supply* dan *demand* obat bahan alam/suplemen kesehatan illegal dan/atau mengandung bahan kimia obat.



Bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen para distributor serta pelaku usaha obat bahan alam dalam menjalankan usahanya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, organisasi profesi, akademisi, dan media massa menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif terhadap peredaran obat bahan alam, khususnya yang berisiko mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) serta ilegal. Melalui kegiatan ini, Balai Besar POM di Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengawasan yang berbasis edukasi dan kolaborasi demi perlindungan kesehatan masyarakat. Pada kesempatan ini juga dilakukan minum jamu bersama dengan tagline JAWARA Minum Jamu, sebagai bagian dari Gerakan Nasional Minum Jamu Warisan Nusantara untuk mengkampanyekan dan melestarikan konsumsi jamu sebagai budaya dan gaya hidup sehat masyarakat Indonesia.



9. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keamanan obat dan makanan, Pada tanggal 17 September 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertajuk **"BPOM *Goes to School*"** di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kegiatan ini mengusung tema: **"Sehat Bersama, Sehat Setara: Obat dan Makanan Aman untuk Semua."**
   Bertempat di Aula SLBN Tenggarong, acara ini disambut hangat oleh Kepala SLBN Tenggarong, **Erni Sulistyaningsih**, yang secara resmi membuka kegiatan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada BBPOM di Samarinda atas kepeduliannya dalam memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kepada para siswa dan siswi berkebutuhan khusus.



Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh dua narasumber dari BBPOM di

Samarinda. **Mohd. Faizal** menyampaikan materi bertajuk *"Cerdas Memilih Obat dan Makanan"*, yang mengajak para peserta untuk lebih teliti dan bijak dalam mengonsumsi produk kesehatan. Selanjutnya, **Tri Nurhayatiningsih** membawakan materi mengenai *"Pangan Aman untuk Tumbuh Kembang Optimal"*, yang menekankan pentingnya konsumsi makanan yang aman dan bergizi terutama untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan.

Para siswa tampak antusias mengikuti kegiatan. Mereka tidak hanya menyimak materi dengan seksama, tetapi juga aktif menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para narasumber. Interaksi dua arah ini menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan inklusif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta, baik siswa maupun guru, memperoleh pengetahuan dan kesadaran yang lebih baik dalam memilih obat dan makanan yang aman, serta mampu menjadi konsumen yang cerdas dan mandiri.

BBPOM di Samarinda berkomitmen untuk terus menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui program edukatif seperti ini, guna mewujudkan perlindungan konsumen yang merata dan berkeadilan.



10. Pelatihan Petugas Penjamah Makanan Dapur SPPG di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan serentak pada hari Minggu 28 September 2025 di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kertanegera, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Kutai Barat. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 38 SPPG dengan 1701 peserta/petugas Pejamah Makanan, terdiri dari Kota Samarinda sebanyak 18 SPPG dengan 900 Peserta, Kota Bontang sebanyak 5 SPPG dengan 250 Peserta, Kabupaten Kutai Kertanegra 10 SPPG dengan 301 Peserta, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 3 SPPG dengan 150 Peserta, dan Kabupaten Kutai Barat sebanyak 2 SPPG dengan 100 Peserta.



Sebagai bentuk dukunganterhadap program pemerintah, Balai Besar POM di Samarinda menugaskan 16 orang narasumber yang memberikan materi terkait ***Pentingnya Penjaminan Keamanan Pangan dan Kebijakan Keamanan Pangan Siap Saji***, materi ***Penerapan Keamanan Pangan,selama Penerimaan, Persiapan, dan Pengolahan Bahan Pangan,*** dan materi terkait ***Penanganan Insiden Keamanan Pangan dan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Di SPPG***.



Selain narasumber dari BBPOM di Samarinda, materi Pelatihan juga diberikan dari BPJS, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Setiap sesi pemaparan materi diakhiri dengan diskusi/tanya jawab antara peserta dan pemateri. Peserta pelatihan sangat antusias dan mengikuti pelatihan penuh semangat hingga akhir pelatihan.



Dengan mengikuti Pelatihan Penjamah Makanan Dapur SPPG ini diharapkan dapat meningkatkan Kompetensi Petugas SPPG dan dapat meningkatkan kesadaran Pentingnya Keamanan Pangan Siap Saji guna mendukung program Makanan Bergizi Gratis di wilayahnya masing-masing.

11. Badan POM melalui Balai Besar POM di Samarinda bersama Balai POM di Balikpapan terus berkomitmen mendukung program strategis pemerintah Makanan Bergizi Gratis melalui peran aktif dalam sebagai Instruktur dalam **Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3**, Pada tanggal 1- 2 Juli 2025 yang disenggarakan di Dikjur Kolat XII Balikpapan, dengan materi : HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) , ING (Informasi Nilai Gizi) Traceability danKLB (Kejadian Luar Biasa) Keracunan Pangan.

    Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat sehat melalui Program MBG. Peran SPPI tidak hanya memberikan makanan tepat waktu, tetapi juga memberi pengetahuan kepada masyarakat agar bisa memilih pangan yang aman dan bergizi, serta mampu malakukan pemberdayaan masyarakat dan menggerakkan perekonomian setempat.

    Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta. Mereka terlibat aktif dalam diskusi, simulasi, serta praktik menghitung kecukupan gizi, pengendalian titik kritis pencegahan bahaya pangan, dan penelusuran keracunan pangan. Badan POM berharap kehadiran SPPI dapat memperkuat pengawasan partisipatif di masyarakat, sekaligus menyukseskan Program MBG demi menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan produktif.



12. Pencapaian kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, baik kepada tim kerja maupun kepada individu. Pencapaian kinerja menjadi pertimbangan dalam penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) oleh pejabat penilai dalam penilaian SKP periode triwulan III tahun 2025. Penyerahan *Reward* & *Punishment* Tim Kerja (**Sang Penakluk Target** dan **Pionir Batas Bawah**) serta *Reward* Personal (**Undas of the month**) Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 26 September 2025 di Aula BBPOM di Samarinda.



Berikut penerima *reward* & *punishment* :

Reward Tim kerja **Sang Penakluk Target** :

- TW 1 2025 = Tim Kerja IKU Presentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

- TW II 2025 = Tim Kerja IKU Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT
- TW III 2025 = Tim Kerja IKU Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisikoo yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- TW IV 2025 = Tim Kerja IKU Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Punisment Tim kerja **Pionir Batas Bawah**

- TW 1 2025 = Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT

Reward Personal (**Undas of the month**)

1. Tania Pratiwi Madinda Putru sebagai Undas of the Month Februari 2025
2. Diah Agustiani Syarifah sebagai Undas of the Month Maret 2025
3. Nurul Faatiha Rahmauli sebagai Undas of the Month April 2025
4. Nurina Prapurandina sebagai Undas of the Month Mei 2025
5. Lusty Grace Toding sebagai Undas of the Month Juni 2025
6. Asbi Nurhadi sebagai Undas of the Month Juli 2025
7. Sophia Bakti sebagai Undas of the Month Agustus 2025
8. Maysadara sebagai Undas of the Month September 2025
9. Genta Nila Hadi sebagai Undas of the Month Oktober 2025
10. Ratih Wulandari sebagai Undas of the Month November 2025
11. Marheni Juwitaningsih Undas of the Month Desember 2025



13. Tanggal 13 November 2025 - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda menyelenggarakan Forum AWASI (Aman, Waspada, Stop Ilegal): Koordinasi Cegah Tangkal dan Perkuatan Sinergi Criminal Justice System (CJS) dalam Mengatasi Kejahatan Obat dan Makanan. Kegiatan ini digelar sebagai langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antar instansi serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum guna menjawab tantangan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Timur. Forum ini menghadirkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, antara lain Direktorat Cegah Tangkal Badan POM RI, Pengamat dan Praktisi Pengawasan Obat dan Makanan, unsur Criminal Justice System (CJS) yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Rumah Tahanan, serta stakeholder terkait seperti Bea Cukai, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

    Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pengawasan dan penindakan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin kompleks, baik melalui jalur distribusi konvensional maupun digital. Pemaparan materi dipimpin langsung oleh Kepala Balai Besar POM di Samarinda, Agung Kurniawan, yang menegaskan urgensi sinergi lintas sektor dalam menanggulangi tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Dalam paparannya, beliau menekankan bahwa tantangan di lapangan tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan integrasi dan kolaborasi langkah operasional antar lembaga penegak hukum dan stake holder baik dalam cegah tangkal kejahatan obat dan makanan maupun pada pro justitia perkara.

    Narasumber pertama, Irwan, Direktur Cegah Tangkal Badan POM RI, menyampaikan Strategi Nasional Cegah Tangkal yang berfokus pada urgensi pencegahan, pemetaan kerawanan, analisis kejahatan, penggalangan stakeholder, serta optimalisasi pengawasan hulu rantai pasok. Beliau juga

menekankan bahwa kegiatan pencegahan dan penangkalan tidak meniadakan penyidikan, tapi saling menguatkan.

Narasumber kedua, Hans G. Kakerissa, Pengamat dan Praktisi Pengawasan Obat dan Makanan, membahas Strategi Penguatan Koordinasi CJS, termasuk percepatan koordinasi dan monitoring kerja sama antar instansi. Beliau menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga komitmen moral untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan akibat peredaran obat dan makanan ilegal. Dengan strategi terpadu dan sinergi yang kuat, penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Narasumber ketiga, Supardi, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, memaparkan Strategi Penuntutan dalam Penanganan Tindak Pidana Obat dan Makanan, termasuk paradigma baru KUHP yang lebih restoratif, serta tantangan pembuktian dan akses alat bukti. Beliau menekankan bahwa sebagai penyidik jangan hanya menjadi corong undang-undang yang menggunakan diskresinya namun juga harus menggunakan empati dan nurani dalam penegakan hukum.

Melalui sesi tanggapan dan diskusi, peserta forum menyampaikan sejumlah masukan strategis, di antaranya:

* Dukungan KSOP dalam kolaborasi perkuatan pencegahanpemasukan produk obat dan makanan ilegal melalui pelabuhan;

* Penguatan teknis pembuktian perkara dari Kepolisian dan Kejaksaan; serta

* Dukungan Rutan dalam penahanan pelaku kejahatan obat dan makanan.

Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan langkah antara lembaga penegak hukum dan unsur pengawasan. Melalui dialog terbuka, pertukaran pengalaman, serta penyusunan langkah tindak lanjut, kegiatan ini memberikan fondasi penting bagi peningkatan kualitas penanganan perkara Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Timur.

BBPOM di Samarinda menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil forum melalui koordinasi yang lebih intensif, penguatan kolaborasi operasional di lapangan, serta pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku tindak pidana Obat dan Makanan. Upaya berkelanjutan ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan masyarakat dan menekan ruang gerak peredaran produk ilegal yang membahayakan kesehatan dan keselamatan publik.





C. Optimalisasi sisa anggaran Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan laboratorium yang telah selesai proses pengadaannya di Semester I digunakan untuk pengadaan alat laboratorium dan alat penunjang laboratorium yang dibutuhkan untuk pemenuhan standar alat laboratorium pada SKL dan peningkatan efektivitas pengujian. Alat laboratorium tersebut antara lain Microwave Digestion, timbangan analitik, Hotplate, sentrifuge dan vortex shaker.

D. Dalam rangka penyusunan rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Balai Besar POM di Samarinda untuk periode 2025-2029 yang akan ditetapkan, pemanfaatan informasi kinerja menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan dan program kerja ke depan. Evaluasi kinerja tahun 2025 memberikan gambaran komprehensif terkait pencapaian target, efektivitas program, serta

tantangan yang dihadapi dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda.

E. Pemanfaatan laporan kinerja telah dilakukan dalam setiap monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap bulan, untuk capaian kinerja yang tidak tercapai targetnya maupun yang telah tercapai dilakukan rekomendasi tindak lanjut/ rencana aksi untuk meningkatkan capaian kinerja di periode selanjutnya

F. Pencapaian kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, baik kepada tim kerja maupun kepada individu. Pencapaian kinerja menjadi pertimbangan dalam penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) oleh pejabat penilai dalam penilaian SKP Tahun 2025.

III.4 Realisasi Anggaran

Penganggaran yang diamanatkan dalam perjanjian kinerja ini dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar POM di Samarinda Nomor : SP DIPA-063.01.2.432897/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 32.324.748.000,-.

Sehubungan dengan surat Dirjen Anggaran Nomor : S-211/AG/2024 tanggal 11 September 2024, Hal : Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 Hasil Kesepakatan Rapat Pada Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN TA 2025, serta Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025. Serta sehubungan dengan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.02.2.12.24.925 tanggal 9 Desember 2024 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Dalam Rangka Efisiensi Perjalanan Dinas Dan Non Quick Win Tahun 2025 bahwa telah dilakukan pemblokiran anggaran secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu pada DIPA awal Balai Besar POM di Samarinda sebesar Rp 1.860.576.000,-. Sehingga rincian alokasi anggaran per jenis belanja Balai Besar POM di Samarinda pada DIPA awal adalah sebagai berikut :

Tabel 3.185
Alokasi Anggaran per Jenis Belanja
BBPOM di Samarinda Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu
Belanja Pegawai	7.008.798.000
Belanja Barang	13.968.685.000
Belanja Modal	11.347.265.000
Total Pagu	**32.324.748.000**
Total Blokir belanja barang	**1.860.576.000**
Total Pagu yang dapat digunakan	**30.464.172.000**

Pada Triwulan I tahun 2025 dilakukan 2 (dua) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut::

a. Revisi ke-1 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 dengan besaran blokir sebesar Rp 21.573.573.000,-. Namun dilakukan penyesuaian besaran blokir berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 dengan besaran blokir menjadi Rp 9.516.745.000,-.
b. Revisi ke-2 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145

tanggal 10 Maret 2025 perihal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Dilakukan optimalisasi anggaran belanja modal untuk pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN sebesar Rp 151.880.000,- dan pergeseran anggaran antar KRO 3165.QIA serta 3165.PDD dalam rangka memenuhi kebutuhan reagen sampel pihak ketiga dan kebutuhan pembelian suku cadang alat HPLC yang harus segera diganti sebesar Rp 83.114.000,-.

c. Revisi ke-3 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 perihal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 sebesar Rp 4.904.967.000,-. Namun revisi DIPA baru disetujui dan disahkan pada tanggal 9 April 2024.

Kemudian pada Triwulan II tahun 2025 dilakukan 1 (satu) kali revisi DIPA pada tanggal 12 Juni 2025 dalam rangka pergeseran aanggaran belanja 53 ke 52 dalam KRO 3165.RAB untuk pengadaan suku cadang dan glassware/ bahan penunjang/ reagen/ baku pembanding. Revisi ini disetujui dan disahkan pada tanggal 13 Juni 2025.

Pada Triwulan III tahun 2025 dilakukan 3 (tiga) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

a. Revisi ke-1 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 perihal Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025, dilakukan revisi pengurangan anggaran pada belanja pegawai BBPOM di Samarinda sebesar Rp 612.241.000,-dan penambahan anggaran pada belanja operasional untuk keperluan perkantoran CASN sebesar Rp 2.913.000,-. Revisi disetujui dan disahkan pada tanggal 7 Juli 2025.
b. Revisi ke-2 diajukan pada tanggal 14 Agustus 2025 dalam rangka pergeseran anggaran belanja barang ke belanja pegawai dalam KRO 6384.EBA untuk pemenuhan belanja pegawai dan pergeseran anggaran belanja modal ke belanja barang dalam KRO 3165.RAB untuk pengadaan suku cadang yang termasuk pada paket pengadaan alat laboratorium. Revisi disetujui dan disahkan pada tanggal 21 Agustus 2025.
c. Revisi ke-3 diajukan pada tanggal 24 September 2025 dalam rangka pergeseran anggaran belanja modal ke belanja barang dalam KRO 3165.RAB untuk pengadaan printer nilai di bawah 1 juta yang termasuk pada paket pengadaan alat laboratorium. Revisi disetujui dan disahkan pada tanggal 29 September 2025.

Pada Triwulan IV tahun 2025 dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-24/M/SDK/KW/10/2025 tentang Persetujuan Permohonan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran (Blokir) Badan POM TA 2025 tanggal 21 Oktober 2025 dan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.10.25.634 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Pelaksanaan Revisi Pembukaan Blokir Anggaran

TA 2025, dilakukan 1 (satu) kali revisi DIPA dalam rangka pembukaan blokir pada Rincian Output 3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT. Revisi ini disetujui dan disahkan pada tanggal 11 November 2025.

Sehingga pagu BBPOM di Samarinda TA. 2025 tahun 2025 menjadi Rp 30.667.300.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.186
Alokasi Anggaran per Jenis Belanja
BBPOM di Samarinda Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu
Belanja Pegawai	6.424.457.000
Belanja Barang	15.207.002.000
Belanja Modal	9.035.841.000
Total Pagu	**30.667.300.000**
Total Blokir belanja barang	**4.336.580.000**
Total Blokir belanja modal	**244.400.000**
Total Pagu yang dapat digunakan	**26.086.320.000**

Capaian realisasi anggaran s.d Tahun 2025 berdasarkan rincian output Balai Besar POM di Samarinda tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.187
Realisasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output s.d Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Progress	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f	g	h=(g/fx100)
1	3165.AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14.00	14.00	100.00	33,982,000	33,981,004	100.00
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	245.00	409.00	100.00	61,596,000	61,589,846	99.99
3	3165.BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	474.00	756.00	100.00	62,675,000	62,647,106	99.96
4	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.00	1.00	100.00	51,762,000	51,751,080	99.98

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Progress	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f	g	h=(g/fx100)
5	3165.BMB.001 Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23.00	30.00	100.00	9,550,000	9,540,000	99.90
6	3165.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1.00	1.00	100.00	2,997,687,000	2,997,468,919	99.99
9	3165.QCD.U37 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM SAMARINDA	5.00	5.00	100.00	806,925,000	798,848,421	99.00
10	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10.00	10.00	100.00	21,075,000	21,073,000	99.99
11	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	4.00	4.00	100.00	79,560,000	79,528,155	99.96
12	3165.QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1.00	1.00	100.00	24,380,000	24,356,100	99.90
13	3165.QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45.00	45.00	100.00	9,000,000	8,868,630	98.54
14	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	16.00	16.00	100.00	19,202,000	19,200,700	99.99
15	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	439.00	441.00	100.00	611,404,000	611,246,065	99.97
16	3165.QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	948.00	949.00	100.00	756,456,000	755,697,602	99.90

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Progress	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f	g	h=(g/fx100)
17	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	37.00	37.00	100.00	67,938,000	67,919,300	99.97
18	3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1.00	1.00	100.00	680,000	680,000	100.00
19	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	677.00	687.00	100.00	844,421,000	844,325,671	99.99
20	3165.RAB.001 Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1.00	1.00	100.00	9,902,865,000	9,901,818,210	99.99
21	6384.EBA.956 Layanan BMN	1.00	1.00	100.00	340,000	340,000	100.00
22	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	1.00	100.00	9,724,822,000	9,718,271,427	99.93
TOTAL					**26,086,320,000**	**26,069,151,236**	**99.93**

Capaian realisasi anggaran s.d Tahun 2025 berdasarkan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Samarinda tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.188
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Kegiatan s.d Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Serapan Anggaran
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	15,189,771,000.00	15,187,344,397.00	99.98
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	680,000.00	680,000.00	100.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	189,774,000.00	189,709,861.00	99.97
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	19,202,000.00	19,200,700,00	99.99
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	806,925,000.00	798,848,421.00	99.00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	33,982,000.00	33,981,004.00	100.00
7	Layanan Publik UPT yang Prima	69,062,000.00	69,024,346.00	99.95

8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	9,776,924,000.00	9,770,362,507.00	99.93
	TOTAL	**26,086,320,000.00**	**26,069,151,236.00**	**99.93**

Mapping program/Kegiatan Rincian Output yang mendukung terhadap capaian Indikator Kinerja Balai Besar POM di Samarinda tahun 2025 dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel 3.189
Mapping Program/Kegiatan RO terhadap Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator	Rincian Output (RO)
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	3165.QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT 3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	3165.QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen

		Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 3165.RAB.001 Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	3165.BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE 3165.BMB.001 Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	3165.QDB.001 Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
19	Jumlah desa pangan aman	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3165.QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3165.QCD.U37 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM SAMARINDA
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	3165.AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan 3165.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi

		6384.EBA.994 Layanan Perkantoran
26	Nilai AKIP UPT BPOM	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan 3165.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi 6384.EBA.994 Layanan Perkantoran
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan 3165.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi 6384.EBA.956 Layanan BMN 6384.EBA.994 Layanan Perkantoran
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan 3165.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia 3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi 6384.EBA.956 Layanan BMN 6384.EBA.994 Layanan Perkantoran

Pengelolaan anggaran BBPOM di Samarinda senantiasa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya-upaya yang telah dilakukan BBPOM di Samarinda dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran sebagai langkah-langkah strategi dalam menghadapi adanya efisiensi anggaran antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan akurasi penyusunan rencana kegiatan dengan cara :
    a. Menyusun skala prioritas kegiatan sesuai kebijakan efisiensi belanja,
    b. Melakukan reviu kegiatan/KRO/RO/akun belanja yang bersifat non prioritas dan tidak efisien untuk dialihkan pada kegiatan yang lebih strategis dan berdampak langsung ke masyarakat dan pertumbuhan ekonomi
    c. Menyusun kembali perencanaan kebutuhan dana yang akan direalisasikan di dalam Halaman III

DIPA secara akurat (update halaman III DIPA) sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan berpedoman pada target penyerapan anggaran dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

2. Melakukan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), meliputi:
   a. Menetapkan PPK dan Pejabat Pengadaan di awal tahun 2025
   b. Menyesuaikan rencana umum pengadaan sesuai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual dengan memperhatikan kebijakan efisiensi belanja.
   c. Menetapkan kebijakan internal BPOM terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk kebijakan pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
3. Meningkatkan Kualitas Reviu Anggaran dan Melakukan Optimalisasi Revisi Anggaran, dengan Melakukan reviu DIPA untuk melihat kesesuaian alokasi program/kegiatan/output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker yang prioritas dengan memperhatikan kebijakan efisiensi belanja
4. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/ kegiatan/ proyek dengan Melakukan penyesuaian besaran Uang Persediaan (UP) Tunai/KKP berdasarkan alokasi DIPA hasil efisiensi anggaran

Pengukuran efisiensi adalah dengan membandingkan indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\%\ \boldsymbol{Capaian\ Output}}{\%\ \boldsymbol{Rencana\ Capaian\ Input}} IE \frac{\mathbf{100\%}}{\mathbf{100\%}} = \mathbf{1}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur Tingkat Efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 3.190
***Range* Tingkat Efisiensi**

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap per Sasaran Kegiatan dan per Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.191
Tingkat efisiensi anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Sasaran Kegiatan	Capaian Anggaran	IE	TE	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104.78	99.98	1.05	0.05	Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100.00	100.00	1.00	0.00	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100.49	99.97	1.01	0.01	Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100.00	99.99	1.00	0.00	Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	108.11	99.00	1.09	0.09	Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	110.00	100.00	1.10	0.10	Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	104.26	99.95	1.04	0.04	Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	110.00	99.93	1.10	0.10	Efisien

Tabel 3.192
Tingkat Efisiensi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Anggaran	IE	TE	Kategori
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisikoo yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	108.97	99.89	1.09	0.09	Efisien
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	102.58	98.54	1.04	0.04	Efisien
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104.26	99.97	1.04	0.04	Efisien
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	97.14	99.97	0.97	-0.03	Tidak Efisien
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103.62	99.97	1.04	0.04	Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	101.35	100.00	1.01	0.01	Efisien
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	105.26	99.97	1.05	0.05	Efisien
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	114.74	99.97	1.15	0.15	Efisien
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	102.06	99.99	1.02	0.02	Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109.89	99.99	1.10	0.10	Efisien
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	108.34	100.00	1.08	0.08	Efisien
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	120.10	99.97	1.20	0.20	Efisien
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	105.65	99.99	1.06	0.06	Efisien
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	102.54	99.99	1.03	0.03	Efisien
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100.00	99.97	1.00	0.00	Efisien
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	1.00	0.00	Efisien
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	101.95	99.95	1.02	0.02	Efisien
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100.00	99.99	1.00	0.00	Efisien
19	Jumlah desa pangan aman	100.00	99.97	1.00	0.00	Efisien
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	99.99	1.00	0.00	Efisien

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	Capaian Anggaran	IE	TE	Kategori
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100.00	99.99	1.00	0.00	Efisien
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	108.11	99.00	1.09	0.09	Efisien
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	110.00	100.00	1.10	0.10	Efisien
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	104.26	99.95	1.04	0.04	Efisien
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	99.27	99.95	0.99	-0.01	Tidak Efisien
26	Nilai AKIP UPT BPOM	98.40	99.90	0.98	-0.02	Tidak Efisien
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	100.00	99.95	1.00	0.00	Efisien
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	100.00	99.90	1.00	0.00	Efisien
TOTAL		**103.87**	**99,93**	**1.04**	**0.04**	**Efisien**

Pada tahun 2025 BBPOM di Samarinda melaksanakan 28 (dua puluh delapan) Indikator kinerja untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) sasaran Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi anggaran per Sasaran Kegiatan tahun 2025, diperoleh hasil perhitungan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dalam kategori **efisien**.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi anggaran per Indikator Kinerja tahun 2025, diperoleh hasil perhitungan 3 (tiga) Indikator Kinerja **tidak efisien** dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja **efisien**.

Pada tahun 2025, dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya, Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan antara lain :

1. **Peningkatan Kualitas Anggaran** meliputi:
   a. Menyusun skala prioritas kegiatan sesuai dengan kebijakan efisiensi belanja
   b. Menyusun kembali perencanaan kebutuhan dana yang akan direalisasikan di dalam Halaman III DIPA secara akurat sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan berpedoman pada target penyerapan anggaran dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran
2. **Melakukan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa** dengan segera melakukan pendaftaran atau perubahan/ adendum data kontrak ke KPPN paling lama 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
3. **Melakukan akselerasi pelaksanaan program/ kegiatan** dengan mengoptimalkan penggunaan KKP untuk percepatan penyerapan anggaran serta melakukan pertanggungjawaban dan pembayaran tagihan KKP secara tepat waktu.
4. **Peningkatan Kualitas Belanja Melalui Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja (*Value For Money*)** meliputi:

a. Menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan
b. Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengutamakan pencapaian output dan tidak hanya merealisasikan anggaran
d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan
e. Mengurangi secara signifikan belanja konsumsi rapat, ATK**,** dan pencetakan (*paperless*)
f. Efisiensi belanja daya dan jasa serta belanja pemeliharaan

5. **Optimalisasi Peningkatan Kompetensi SDM secara daring,** dalam rangka pengembangan kompetensi, BBPOM di Samarinda memanfaatkan teknologi informasi melalui IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*) BPOM sebagai platform pembelajaran online terintegrasi sebagai salah satu media pembelajaran mandiri sehingga mendukung pegawai belajar kapanpun dan dimanapun dengan data hasil pembelajaran tercatat sebagai capaian pembelajaran, selain itu juga melakukan diseminasi hasil pelatihan melalui kegiatan RB-Day ataupun Bintang Pagi via zoom meeting.
6. **Pemanfaatan Teknologi Informasi,** Teknologi dan Informasi terkini mengamanatkan kepada individu maupun organisasi untuk dapat berkembang lebih baik lagi dan beradaptasi dengan situasi terkini, salah satunya dengan mengalihkan sistem layanan perkantoran dari yang bersifat manual menjadi layanan perkantoran berbasis teknologi informasi. Pemanfaaatan teknologi ini bertujuan untuk memangkas waktu bekerja serta efisiensi dokumentasi. Aplikasi yang telah dilakukan BBPOM di Samarinda untuk kemudahan tersebut baik aplikasi layanan publik , maupun aplikasi untuk manajemen kinerja dan SDM yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Samarinda.
7. **Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Melalui Zoom Meeting,** sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan BBPOM di Samarinda, pertemuan/ pelaksanaan kegiatan seperti pendampingan UMKM si-JEBOL, sertifkasi, kegiatan regionalisasi area Kalimantan, kegiatan internal seperti Doa Bersama setiap hari, RB-Day, Bintang Pagi maupun diseminasi dalam rangka peningkatan kinerja dilakukan secara berkala melalui zoom meeting.

Analisa pemanfaatan sumber daya anggaran terhadap tingkat efisiensi per sasaran kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut :

- Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15,187,344,397,- atau 99.98%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk sampel KLB dan PIRT), pemeriksaaan sarana produksi dan sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*, pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan, pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik, pengawasan pemenuhan target pengendalian AMR, pemenuhan

Lab Pengujian sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dan pengawasan Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Dari 15 (lima belas) indikator, terdapat 1 (satu) indikator tidak efisien yaitu : indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran kegiatan ke-1 ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.05 karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran antara lain melalui pemanfaatan anggaran secara optimal untuk kegiatan sampling, pemeriksaan, dan pengujian sampel Obat dan Makanan, termasuk pengadaan sampel, reagensia, media, operasional laboratorium, pemeliharaan peralatan, penyediaan suku cadang, serta kebutuhan pengujian lainnya guna menunjang kelancaran proses pengujian. Selain itu, efisiensi juga dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, seperti penggunaan WhatsApp Group, serta koordinasi langsung yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengawasan sarana distribusi rutin, baik di dalam kota maupun luar kota.

- Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp 680,000.00,- atau 100.00%. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran kegiatan ke-2 ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.00 karena capaian *outcome* yang dihasilkan setara dengan anggaran yang dikeluarkan. Anggaran tersebut digunakan untuk pemeriksaan 1 sarana produksi fortifikasi di Samarinda. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian tingkat efisiens adalah melaksanakan pemeriksaan saranaproduksi fortifikasi sesuai dengan target renlak yang telah disusun, dan pemeriksaan sarana telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana produksi pangan olahan serta regulasi lainnya yang berlaku.
- Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan realisasi anggaran sebesar Rp 189,709,861,- atau 99.97%. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat, Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) aman, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Dari hasil perhitungan, seluruh indicator dinyatakan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran kegiatan ke-3 ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.01 karena capaian outcome yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Realisasi anggaran tercapai dikarenakan pelaksanaan KIE tatap muka/langsung berupa sosialisasi/penyuluhan/CFD/Pameran yang melibatkan interaksi secara langsung tatap muka dengan masyarakat antara lain KIE dengan menggunakan mobil keliling, KIE Stunting ke kecamatan yang menjadi lokus stunting, KIE dalam rangka kunjungan belajar, KIE menyasar ke kelompok rentan serta KIE yang dilaksanakan berkolaborasi dengan stakeholder. Anggaran digunakan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi awal, preadvokasi, dan audiensi, serta advokasi lintas sektor, sosialisasi kemananan pangan, baik secara luring maupun daring serta dilakukan bimtek kader kemanan pangan. Upaya efisiensi dilakukan melalui percepatan peningkatan realisasi anggaran pada

setiap tahapan program sehingga tercapai keseimbangan antara realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja. Upaya tersebut didukung dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan pada setiap tahapan program guna memastikan seluruh target dapat diselesaikan sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan.

- Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan realisasi anggaran sebesar Rp 19,200,700,- atau 99.99%. Anggaran ini dipergunakan untuk pemeriksaan sarana produksi dalam rangka pendampingan UMKM, FGD SIJEBOL (Sertifikasi Jemput Bola), Bimbingan Teknis SIJEBOL dan Workshop Registrasi Pangan Olahan untuk Fasilitator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kelima adalah **efisien** dengan nilai TE 0.00 karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran antara lain melalui pendampingan intensif yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terutama fasilitas Zoom Meeting melalui Program JJS (Jumat Jumpa SI Jebol) untuk pendampingan pelaku usaha dalam menyelesaikan kendala dalam pendaftaran maupun pembuatan dokumen administratif.
- Sasaran Kegiatan 5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan realisasi anggaran sebesar Rp 798,848,421,- atau 99.00%. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan operasi intelijen, operasi penindakan, pemberkasan, gelar perkara, bantuan hukum dan pelaksanaan wasmalitrik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran kegiatan ke-7 ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.09 karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran antara lain melalui digitalisasi pengawasan partisipatif melalui integrasi AWASI (Aman, WAspada, Stop Ilegal) dengan inovasi MOLEN MAHAKAM sebagai early warning system.
- Sasaran Kegiatan 6 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan realisasi anggaran sebesar Rp 33,981,004,- atau 100.00%. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan UPT. Kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran kegiatan ke-6 ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.10 karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran antara lain melalui inovasi MOLEN MAHAKAM sebagai *early warning system*. Kanal pelaporan daring ini memungkinkan

pengumpulan informasi awal, analisis berbasis risiko, dan penentuan prioritas tindak lanjut yang lebih cepat dan tepat sasaran.

- Sasaran Kegiatan 7 Layanan Publik UPT yang Prima, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 69,024,326,- atau 99.95%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pelayanan publik Balai Besar POM di Samarinda. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran kegiatan ke-7 ini adalah **efisien** dengan nilai TE 0.04 karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian tingkat efisiensi anggaran antara lain melalui kegiatan Audit Sarana Produksi dan Distribusi Dalam Rangka Sertifikasi, Sosialisasi Izin Edar Badan POM serta pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik Publik sehingga Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan BBPOM di Samarinda dapat ditetapkan dan segera dilakukan publikasi baik melalui media online maupun offline. Upaya pencapaian tingkat efisiensi dalam indeks layanan publik BPOM juga melalui penggunaan anggaran untuk pelatihan petugas pelayanan publik untuk peningkatan kompetensi petugas terkait komunikasi efektif dan pelayanan publik prima serta pemanfaatan teknologi informasi.
- Sasaran Kegiatan 8 Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 9,770,362,507,- atau 99.93%. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, serta pertemuan koordinasi/konsultasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran kegiatan ke-8 ini adalah **tidak efisien** dengan nilai TE -0.01 karena capaian *outcome* yang dihasilkan lebih rendah dari anggaran yang dikeluarkan..Hal ini secara umum disebabkan oleh penurunan nilai pada indikator capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya,. Selain itu, dinamika alokasi anggaran pada Tahun 2025 yang dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi turut mengakibatkan adanya penyesuaian anggaran, termasuk keterbatasan alokasi pada beberapa kegiatan.

Ketidakefisienan penggunaan sumber daya tidak bisa sepenuhnya hanya diukur dari sisi penggunaan anggaran dan tidak sepenuhnya menjadi kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan yang sudah dijalankan tidak efektif, adanya efisiensi disepanjang Triwulan 1 Tahun 2025 mengharuskan BBPOM di Samarinda senantiasa adaptif terhadap kebijakan pemerintah, upaya-upaya pemanfaatan sumber daya lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan seperti mengoptimalkan penggunaan *platform* digital dan media sosial menunjang berbagai layanan informasi, seperti pengaduan masyarakat, penyebaran edukasi, serta publikasi kinerja yang relatif tidak membutuhkan anggaran besar, adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah mendorong BBPOM di Samarinda melakukan langkah strategis dengan memindahkan lokus intervensi ke Kabupaten yang lebih dekat dan tidak membutuhkan anggaran yang besar serta simplikasi tahapan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan secara bersamaan namun tidak mengurangi esensi dan target intervensi, selanjutnya juga mengoptimalkan kapasitas SDM dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia untuk diarahkan kepada kegiatan untuk pengawasan dan dukungan manajemen.

Dari analisa pemanfaatan sumber daya anggaran terhadap tingkat efisiensi per sasaran kegiatan mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis dapat disimpulkan telah efektif, kegiatan-kegiatan telah berdampak langsung pada pencapaian sasaran.

Dalam laporan kinerja ini, perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, yang membandingkan antara capaian realisasi anggaran dengan capaian output kegiatan. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 dan Lampiran 7 laporan kinerja ini.

BAB IV
PENUTUP

- *Kesimpulan; dan*
- *Saran.*

IV.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Hasil Evaluasi Kinerja ini sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memeperbaiki kinerja di masa mendatang.

KINERJA ORGANISASI

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025 sebesar 103.09%, masuk dalam kategori Istimewa. BBPOM di Samarinda memiliki 8 sasaran kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja. Pencapaian sasaran kegiatan Tahun 2025 dari 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dengan hasil 16 (Enam belas) indikator kinerja yang ditetapkan dengan kriteria “Sangat Baik”, 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan dengan kriteria “Baik”, 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda dengan rata-rata capaian sebesar 104,63%.
2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan capaian 100%.
3. Meningkatnya efektivitas KIE di wilayah kerja BBPOM di Samarinda dengan rata-rata capaian 100,49%.
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan capaian sebesar 100,00%.
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Samarinda dengan capaian sebesar 108,11%.
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif diwilayah kerja BBPOM di Samarinda dengan capaian sebesar 110,00%.
7. Layanan Publik BBPOM di Samarinda yang Prima, capaian sebesar 104,26%.
8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal, capaian sebesar 99,42%.

Realisasi capaian 28 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

a. 16 (Enam belas) Indikator bernotifikasi warna biru dengan kriteria Sangat Baik (dengan capaian 100% < x ≤ 110%) terdiri dari :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan realisasi 98,89% atau tercapai 108,97% dari target 90,75%.
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO realisasi 26,67% atau tercapai 102,58% dari target 26,00%.
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 94,88% atau tercapai 104,26% dari target 91,00%.
4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 94,29% atau tercapai 103,62% dari target 91.00%.
5. Persentase keputusan /rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder realisasi 81,69% atau tercapai 101,35% dari target 80,60%.
6. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 100,00% atau tercapai 105,26% dari target 95,00%.
7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 98,74% atau tercapai 102,06% dari target 96,75%.
8. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 100,00% atau tercapai 109,89% dari target 91,00 %.
9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan realisasi 98,51% atau tercapai 108,34% dari target 90,93 %.
10. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar realisasi 82,40% atau tercapai 103,00% dari target 80,00%.
11. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja BBPOM di Samarinda realisasi 105,65% atau tercapai 105,65% dari target 100,00%.
12. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Samarinda sesuai Standar Kemampuan Laboratorium realisasi 72,70 atau tercapai 102,54% dari target 70,90.
13. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda realisasi 90,15 atau tercapai 101,95% dari target 88,43.
14. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT realisasi 100,00% atau tercapai 108,11% dari target 92,50%.
15. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar realisasi 99,00% atau tercapai 110,00% dari target 90,00%.
16. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Samarinda realisasi 4,90 atau tercapai 104,26% dari target 4,70.

b. 11 (sebelas) Indikator bernotifikasi warna hijau dengan kriteria Baik (dengan capaian 90% < x ≤ 100%) terdiri dari :

1. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar realisasi 97,14% atau tercapai 97,14% dari target 100%.
2. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman realisasi 14,29% atau tercapai 100,00% dari target 14,29%.
3. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 100,00% atau tercapai 100,00% dari target 100,00%.
4. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan realisasi 10,00 atau tercapai 100,00% dari target 10,00.
5. Jumlah desa pangan aman realisasi 4,00 atau tercapai 100,00% dari target 4,00.
6. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas realisasi 1,00 atau tercapai 100,00% dari target 1,00.
7. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan realisasi 15,96% atau tercapai 100,00% dari target 15,96%.
8. Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Samarinda realisasi 88,04 atau tercapai 99,27% dari target 88,69.
9. Nilai AKIP BBPOM di Samarinda realisasi 82,26 atau tercapai 98,40% dari target 83,60
10. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Samarinda realisasi 5,00 atau tercapai 100,00% dari target 5,00.
11. Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Samarinda realisasi 3,50 atau tercapai 100,00% dari target 3,50.

c. 1 (satu) Indikator bernotifikasi warna abu abu dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan (dengan capaian > 110%) yaitu :

1. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan realisasi 97,53% atau tercapai 114,74% dari target 85,00%.

Persentase capaian indikator kinerja BBPOM di Samarinda Tahun 2025 berkisar antara 97,14% sampai dengan 114,74%. Persentase capaian terendah pada Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar sebesar 97,14% dengan kriteria Baik hal ini dikarenakan adanya sampel KLB yang berupa sampel pangan olahan dengan registrasi BPOM yang terkendala kecukupan jumlah sampel untuk melakukan pengujian parameter uji lengkap sesuai standar, untuk itu telah dilakukan penyampaian hasil telaah terhadap manual IKU KLB kepada pengampu terkait Definisi Operasional parameter uji lengkap sesuai prioritas sampling. Sedangkan persentase capaian indikator yang tertinggi pada indikator kinerja

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 114,74% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan. Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan upaya reviu target pada bulan Agustus 2025, sesuai Surat Sekretaris Utama No. PR.07.2.08.25.451 Tanggal 14 Agustus 2026 prihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025. Berdasarkan hal tersebut Balai Besar POM di Samarinda mengusulkan menaikan target Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dari 80% menjadi 85% dan mendapat persetujuan oleh pengampu dan juga Rorenkeu, namun demikian persentase capaian di akhir tahun masih melebihi target. Balai Besar POM di Samarinda akan mengupayakan agar kedepannya seluruh capaian indikator kinerja dapat lebih optimal lagi.

KINERJA ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai Sasaran Kegiatan serta membiayai kegiatan lainnya, pada DIPA awal TA. 2025 Balai Besar POM di Samarinda memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 32.324.748.000,-.

Sehubungan dengan surat Dirjen Anggaran Nomor : S-211/AG/2024 tanggal 11 September 2024, Hal : Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025 Hasil Kesepakatan Rapat Pada Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN TA 2025, serta Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2025. Serta sehubungan dengan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.02.2.12.24.925 tanggal 9 Desember 2024 perihal Penyampaian Data Pemblokiran Dalam Rangka Efisiensi Perjalanan Dinas Dan Non Quick Win Tahun 2025 bahwa telah dilakukan **pemblokiran anggaran** secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu pada DIPA awal Balai Besar POM di Samarinda sebesar Rp 1.860.576.000,-. Sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 30.464.172.000,-.

Pada Triwulan I tahun 2025 dilakukan 2 (dua) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut :

a. Revisi ke-1 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Anggaran Melalui Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 dengan besaran blokir sebesar Rp 21.573.573.000,-. Namun dilakukan penyesuaian besaran blokir berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 perihal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 dengan besaran blokir menjadi Rp 9.516.745.000,-.
b. Revisi ke-2 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 perihal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025. Dilakukan

optimalisasi anggaran belanja modal untuk pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN sebesar Rp 151.880.000,- dan pergeseran anggaran antar KRO 3165.QIA serta 3165.PDD dalam rangka memenuhi kebutuhan reagen sampel pihak ketiga dan kebutuhan pembelian suku cadang alat HPLC yang harus segera diganti sebesar Rp 83.114.000,-.

c. Revisi ke-3 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 perihal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 sebesar Rp 4.904.967.000,-. Namun revisi DIPA baru disetujui dan disahkan pada tanggal 9 April 2024.

Kemudian pada Triwulan II tahun 2025 dilakukan 1 (satu) kali revisi DIPA pada tanggal 12 Juni 2025 dalam rangka pergeseran aanggaran belanja 53 ke 52 dalam KRO 3165.RAB untuk pengadaan suku cadang dan glassware/ bahan penunjang/ reagen/ baku pembanding. Revisi ini disetujui dan disahkan pada tanggal 13 Juni 2025.

Pada Triwulan III tahun 2025 dilakukan 3 (tiga) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

a. Revisi ke-1 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 perihal Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025, dilakukan revisi pengurangan anggaran pada belanja pegawai BBPOM di Samarinda sebesar Rp 612.241.000,-dan penambahan anggaran pada belanja operasional untuk keperluan perkantoran CASN sebesar Rp 2.913.000,-. Revisi disetujui dan disahkan pada tanggal 7 Juli 2025.
b. Revisi ke-2 diajukan pada tanggal 14 Agustus 2025 dalam rangka pergeseran anggaran belanja barang ke belanja pegawai dalam KRO 6384.EBA untuk pemenuhan belanja pegawai dan pergeseran anggaran belanja modal ke belanja barang dalam KRO 3165.RAB untuk pengadaan suku cadang yang termasuk pada paket pengadaan alat laboratorium. Revisi disetujui dan disahkan pada tanggal 21 Agustus 2025.
c. Revisi ke-3 diajukan pada tanggal 24 September 2025 dalam rangka pergeseran anggaran belanja modal ke belanja barang dalam KRO 3165.RAB untuk pengadaan printer nilai di bawah 1 juta yang termasuk pada paket pengadaan alat laboratorium. Revisi disetujui dan disahkan pada tanggal 29 September 2025.

Pada Triwulan IV tahun 2025 dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-24/M/SDK/KW/10/2025 tentang Persetujuan Permohonan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi Anggaran (Blokir) Badan POM TA 2025 tanggal 21 Oktober 2025 dan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.10.25.634 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Pelaksanaan Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025, dilakukan 1 (satu) kali revisi DIPA dalam rangka pembukaan blokir pada Rincian Output 3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT. Revisi ini disetujui dan disahkan pada tanggal 11 November 2025. Sehingga pagu BBPOM di Samarinda TA. 2025 tahun 2025 menjadi Rp 30.667.300.000,- .

Setelah beberapa kali dilakukan revisi DIPA hingga pada akhir tahun 2025 pagu anggaran BBPOM di Samarinda sebesar Rp 26.086.320.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 26,069,151,236,- sehingga realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar 99.93%.

Pada tahun 2025 BBPOM di Samarinda melaksanakan 28 (dua puluh delapan) Indikator kinerja untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) Sasaran Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi anggaran per Sasaran Kegiatan tahun 2025, diperoleh hasil perhitungan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dalam kategori efisien dan 1 (satu) Sasaran Kegiatan tidak efisien. Sedangkan berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi anggaran per Indikator Kinerja tahun 2025, diperoleh hasil perhitungan 3 (tiga) Indikator Kinerja tidak efisien dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja efisien.

Dalam laporan kinerja ini, perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, yang membandingkan antara capaian realisasi anggaran dengan capaian output kegiatan. Berdasarkan data tersebut secara garis besar dapat disimpulkan bahwa BBPOM di Samarinda sudah menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

IV.2 SARAN

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian kinerja selanjutnya, beberapa diantaranya masih relevan sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan terus menerus dan memelihara sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pengujian laboratorium
2. Melakukan perbaikan terus menerus pada prosedur /alur pengawasan produk dari sampling sampai tahap pelaporan hasil pengawasan produk
3. Mengadakan kegiatan KIE tema yang spesifik.
4. Pendampingan proses sertifikasi dan pendaftaran produk oleh petugas fasilitator di BBPOM di Samarinda melalui Program JJS melalui Zoom Meeting.
5. Pendampingan pembuatan dokumen secara intensif oleh fasilitator untuk mempercepat dokumen mutu dan SOP UMKM yang sudah siap ruang produksinya secara onsite maupun online (Program JJS).
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja dan anggaran dan memanfaatkan informasi kinerja untuk perbaikan kedepannya
7. Optimalisasi koordinasi/komunikasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha melalui whatsapp/email untuk mendapatkan respon yang lebih tinggi terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

8. Optimalisasi monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penandaan produk tembakau.
9. Memaksimalkan Sosialisasi Izin Edar dan Tahapan Pendampingan UMKM ke pelaku usaha di wilayah Kalimantan Timur .

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta rupiah)					Unit Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM A : Program Pengawasan Obat dan Makanan														
Kegiatan I : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									19,915.9	27,829.7	30,871.0	33,979.7	37,226.2	
	SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**												Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	90.75	91.75	92.75	93.75	94.75						
	IKSK 1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Provinsi Kalimantan Timur	26	27	28	29	30						
	IKSK 1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	91	92	93	94	95						
	IKSK 1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Provinsi Kalimantan Timur	100	100	100	100	100						
	IKSK 1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	91	92	93	94	95						
	IKSK 1.6	Persentase keputusan /rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Provinsi Kalimantan Timur	80.60	80.80	81.00	81.20	81.50						
	IKSK 1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	95	96	97	98	99						
	IKSK 1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	85	87	89	92	95						
	IKSK 1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	96.75	97.5	98.25	99	99.5						
	IKSK 1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	91	92	93	94	95						
	IKSK 1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	90.93	92.13	93.73	95.33	96.8						

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta rupiah)					Unit Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM A : Program Pengawasan Obat dan Makanan														
Kegiatan I : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									19,915.9	27,829.7	30,871.0	33,979.7	37,226.2	
	SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**												Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 1.12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Provinsi Kalimantan Timur	80	81	82	83	84						
	IKSK 1.13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Provinsi Kalimantan Timur	100	100	100	100	100						
	IKSK 1.14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Provinsi Kalimantan Timur	70.9	72.7	74.7	76.7	78.7						
	IKSK 1.15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Provinsi Kalimantan Timur	14.29	28.57	42.86	57.14	71.43						
	IKSK 1.16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	-	81	82	83	84						
	OUTPUT													
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			45	45	45	45	45						
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			439	439	449	459	469						
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			948	956	1006	1059	1114						
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			37	45	48	51	57						
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			677	710	752	807	859						
	RO 6 : Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM			-	204	204	216	216						
	RO 7 : Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia			0	0	0	0	0						
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1						
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1						

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta rupiah)					Unit Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM A : Program Pengawasan Obat dan Makanan														
Kegiatan I : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									19,915.9	27,829.7	30,871.0	33,979.7	37,226.2	
	SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**												Balai Besar POM di Samarinda
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			0	396	396	396	396						
	SK 2	**Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**												Balai Besar POM di
	IKSK 2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Provinsi Kalimantan Timur	100	100	100	100	100						
	OUTPUT													
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			1	1	1	1	1						
	SK 3	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**												Balai Besar POM di
	IKSK 3.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Provinsi Kalimantan Timur	88.43	89.32	90.2	91.09	91.97						
	IKSK 3.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Provinsi Kalimantan Timur	10	15	18	22	23						
	IKSK 3.3	Jumlah desa pangan aman	Provinsi Kalimantan Timur	4	6	7	7	7						
	IKSK 3.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Provinsi Kalimantan Timur	1	1	1	2	2						
	OUTPUT													
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			474	1000	1100	1210	1331						
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			23	12	13	14	15						
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			10	15	18	22	23						
	RO 4: Desa Pangan Aman			4	6	7	7	7						
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	1	1	2	2						

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta rupiah)					Unit Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM A : Program Pengawasan Obat dan Makanan														
Kegiatan I : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									19,915.9	27,829.7	30,871.0	33,979.7	37,226.2	
	SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**												Balai Besar POM di Samarinda
	SK 4	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**												Balai Besar POM di
	IKSK 4.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Provinsi Kalimantan Timur	15.96	34.04	53.19	74.47	96.81						
	OUTPUT													
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			16	18	19	20	21						
	SK 5	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**												Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 5.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Provinsi Kalimantan Timur	92.5	94	96	97	98						
	OUTPUT													
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			5	5	5	5	5						
	SK 6	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**												Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 6.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Provinsi Kalimantan Timur	90	91	92	93	94						
	OUTPUT													
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15						
	SK 7	**Layanan Publik UPT yang prima**												Balai Besar POM di
	IKSK 7.1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Provinsi Kalimantan Timur	4.7	4.75	4.8	4.85	4.9						
	OUTPUT													
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			237	366	366	370	384						
	SK 8	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**												Balai Besar POM di

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (*Outcome*)/Sasaran Kegiatan (*Output*)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta rupiah)					Unit Organisasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM A : Program Pengawasan Obat dan Makanan														
Kegiatan I : Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									19,915.9	27,829.7	30,871.0	33,979.7	37,226.2	
	SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**												Balai Besar POM di Samarinda
	IKSK 8.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Provinsi Kalimantan Timur	88.69	89.14	89.59	90.04	90.49						
	IKSK 8.2	Nilai AKIP UPT BPOM	Provinsi Kalimantan Timur	83.6	83.7	83.8	83.9	84						
	IKSK 8.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Provinsi Kalimantan Timur	5	5	5	5	5						
	IKSK 8.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Provinsi Kalimantan Timur	3.5	3.55	3.6	3.65	3.7						
	OUTPUT													
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1						
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1	1	1	1	1						
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			16	47	45	43	41						
PROGRAM B : Program Dukungan Manajemen														
Kegiatan II : Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									12,408.8	12,409.4	13,650.4	15,015.4	16,517.0	
	RO 4 : Layanan BMN			1	1	1	1	1						
	RO 5 : Layanan Perkantoran			1	1	1	1	1						

Lampiran 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	%
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26.00	%
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	90.00	%
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00	%
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100.00	%
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	%
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	%
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100.00	%

Lampiran 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	%
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Besar POM di Samarinda sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	58.90	
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	97.50	
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10.00	Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	4.00	Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	Pasar
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau Izin Penerapan CPPOB Pangan Olahan	81.50	%
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai Besar POM di Samarinda	95.71	%

Lampiran 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh Balai Besar POM di Samarinda	14.00	%
10	Layanan Publik Balai Besar POM di Samarinda yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Samarinda	4.70	
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Balai Besar POM di Samarinda yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Samarinda	90.25	
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	83.51	
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Samarinda	90.58	
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Samarinda	3.70	

Lampiran 3
PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	%
		Persentase keputusan /rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	80.60	%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	%

Lampiran 3
PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.93	%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	%
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.9	
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29	%

Lampiran 3
PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.43	
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10.00	Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	4.00	Desa
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	Pasar
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.96	%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5	%

Lampiran 3
PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	%
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.69	
		Nilai AKIP UPT BPOM	83.60	
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.50	

Lampiran 5
PENGUKURAN KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025		REALISASI TAHUN 2025		% CAPAIAN	NORMALISASI % CAPAIAN	% NILAI PENCAPAIAN SASARAN	NORMALISASI % NILAI PENCAPAIAN SASARAN
1	2	3	4		5		6	7	7	9
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	%	98.89	%	108.97	108.97	104.63	104.31
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	%	26.67	%	102.58	102.58		
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	%	94.88	%	104.26	104.26		
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	%	97.14	%	97.14	97.14		
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	%	94.29	%	103.62	103.62		
		Persentase keputusan /rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	80.60	%	81.69	%	101.35	101.35		
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	%	100.00	%	105.26	105.26		
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	%	97.53	%	114.74	110.00		
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	%	98.74	%	102.06	102.06		
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	%	100.00	%	109.89	109.89		

Lampiran 5
PENGUKURAN KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025		REALISASI TAHUN 2025		% CAPAIAN	NORMALISASI % CAPAIAN	% NILAI PENCAPAIAN SASARAN	NORMALISASI % NILAI PENCAPAIAN SASARAN
1	2	3	4		5		6	7	7	9
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.93	%	98.51	%	108.34	108.34		
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	%	82.4	%	103.00	103.00		
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	%	105.65	%	105.65	105.65		
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.90		72.7		102.54	102.54		
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29	%	14.29	%	100.00	100.00		
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	%	100.00	%	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.43		90.15		101.95	101.95	100.49	100.49
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10.00	Sekolah	10.00	Sekolah	100.00	100.00		
		Jumlah desa pangan aman	4.00	Desa	4.00	Desa	100.00	100.00		
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	Pasar	1.00	Pasar	100.00	100.00		

Lampiran 5
PENGUKURAN KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025		REALISASI TAHUN 2025		% CAPAIAN	NORMALISASI % CAPAIAN	% NILAI PENCAPAIAN SASARAN	NORMALISASI % NILAI PENCAPAIAN SASARAN
1	2	3	4		5		6	7	7	9
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	15.96	%	15.96	%	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.50	%	100.00	%	108.11	108.11	108.11	108.11
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	%	99.00	%	110.00	110.00	110.00	110.00
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70		4.90		104.26	104.26	104.26	104.26
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.69		88.04		99.27	99.27	99.42	99.42
		Nilai AKIP UPT BPOM	83.60		82.26		98.40	98.40		
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00		5.00		100.00	100.00		
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.50		3.5		100.00	100.00		
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								103.09		
Predikat Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								ISTIMEWA		

Lampiran 6
PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75	98.89	108.97	601,229,000.00	600,580,721.50	99.89	**1.09**	**0.09**	**Efisien**
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	26.67	102.58	9,000,000.00	8,868,630.00	98.54	**1.04**	**0.04**	**Efisien**
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	94.88	104.26	149,908,600.00	149,869,023.65	99.97	**1.04**	**0.04**	**Efisien**
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	97.14	97.14	146,326,600.00	146,288,274.15	99.97	**0.97**	**-0.03**	**Tidak Efisien**
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	94.29	103.62	149,908,600.00	149,869,023.65	99.97	**1.04**	**0.04**	**Efisien**
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	80.60	81.69	101.35	17,561,000.00	17,560,300.00	100.00	**1.01**	**0.01**	**Efisien**
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.00	100.00	105.26	33,969,000.00	33,959,650.00	99.97	**1.05**	**0.05**	**Efisien**
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	97.53	114.74	33,969,000.00	33,959,650.00	99.97	**1.15**	**0.15**	**Efisien**
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	98.74	102.06	371,390,400.00	371,347,518.80	99.99	**1.02**	**0.02**	**Efisien**
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	91.00	100	109.89	318,905,400.00	318,862,518.80	99.99	**1.10**	**0.10**	**Efisien**
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90.93	98.51	108.34	85,706,600.00	85,703,039.40	100.00	**1.08**	**0.08**	**Efisien**

Lampiran 6
PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian
		T	R	%	T	R	%			
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	82.4	103.00	125,716,000.00	125,679,660.50	99.97	1.03	0.03	Efisien
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	105.65	105.65	69,791,200.00	69,783,763.40	99.99	1.06	0.06	Efisien
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.90	72.7	102.54	12,948,996,600.00	12,947,655,818.40	99.99	1.03	0.03	Efisien
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14.29	14.29	100.00	127,393,000.00	127,356,804.75	99.97	1.00	0.00	Efisien
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	100.00	100.00	680,000.00	680,000.00	100.00	1.00	0.00	Efisien
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88.43	90.15	101.95	72,225,000.00	72,187,106.00	99.95	1.02	0.02	Efisien
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10.00	10.00	100.00	21,075,000.00	21,073,000.00	99.99	1.00	0.00	Efisien
19	Jumlah desa pangan aman	4.00	4.00	100.00	72,556,000.00	72,533,655.00	99.97	1.00	0.00	Efisien
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	1.00	100.00	23,918,000.00	23,916,100.00	99.99	1.00	0.00	Efisien
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	15.96	15.96	100.00	19,202,000.00	19,200,700.00	99.99	1.00	0.00	Efisien
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.50	100.00	108.11	806,925,000.00	798,848,421.00	99.00	1.09	0.09	Efisien
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan	90.00	99.00	110.00	33,982,000.00	33,981,004.00	100.00	1.10	0.10	Efisien

Lampiran 6
PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian
		T	R	%	T	R	%			
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.90	104.26	69,062,000.00	69,024,346.00	99.95	**1.04**	**0.04**	**Efisien**
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88.69	88.04	99.27	3,237,925,750.00	3,236,256,704.10	99.95	**0.99**	**-0.01**	**Tidak Efisien**
26	Nilai AKIP UPT BPOM	83.60	82.26	98.40	1,702,020,000.00	1,700,397,032.95	99.90	**0.98**	**-0.02**	**Tidak Efisien**
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	100.00	3,230,694,000.00	3,229,026,099.45	99.95	**1.00**	**0.00**	**Efisien**
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.50	3.50	100.00	1,606,284,250.00	1,604,682,670.50	99.90	**1.00**	**0.00**	**Efisien**
TOTAL				**103.26**	**26,086,320,000.00**	**26,069,151,236.00**	**99.93**	**1.03**	**0.03**	**Efisien**

Lampiran 7
PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Sasaran Kegiatan	Capaian Anggaran	IE	TE	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104.78	99.98	**1.05**	**0.05**	**Efisien**
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100.00	100.00	**1.00**	**0.00**	**Efisien**
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100.49	99.97	**1.01**	**0.01**	**Efisien**
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100.00	99.99	**1.00**	**0.00**	**Efisien**
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	108.11	99.00	**1.09**	**0.09**	**Efisien**
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	110.00	100.00	**1.10**	**0.10**	**Efisien**
7	Layanan Publik UPT yang prima	104.26	99.95	**1.04**	**0.04**	**Efisien**
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99.42	99.93	**0.99**	**-0.01**	**Tidak Efisien**

Lampiran 8

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	15,189,771,000.00	15,187,344,397.00
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	680,000.00	680,000.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	189,774,000.00	189,709,861.00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	19,202,000.00	19,200,700.00
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	806,925,000.00	798,848,421.00
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	33,982,000.00	33,981,004.00
7	Layanan Publik UPT yang Prima	69,062,000.00	69,024,346.00
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	9,776,924,000.00	9,770,362,507.00
Total		**26,086,320,000.00**	**26,069,151,236.00**

Lampiran 9
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN BESERTA CAPAIANNYA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	3165.AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100.00	33,982,000	33,981,004	100.00
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	245	409	100.00	61,596,000	61,589,846	99.99
3	3165.BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	474	756	100.00	62,675,000	62,647,106	99.96
4	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100.00	51,762,000	51,751,080	99.98
5	3165.BMB.001 Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23	30	100.00	9,550,000	9,540,000	99.90
6	3165.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0.00	0	0	0.00
7	3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	16	0	0.00	0	0	0.00

Lampiran 9

REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN BESERTA CAPAIANNYA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA

TAHUN 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
8	3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	100.00	2,997,687,000	2,997,468,919	99.99
9	3165.QCD.U37 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM SAMARINDA	5	5	100.00	806,925,000	798,848,421	99.00
10	3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10	10	100.00	21,075,000	21,073,000	99.99
11	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	4	4	100.00	79,560,000	79,528,155	99.96
12	3165.QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis	1	1	100.00	24,380,000	24,356,100	99.90
13	3165.QDC.001 Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100.00	9,000,000	8868630	98.54
14	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	16	16	100.00	19,202,000	19,200,700	99.99
15	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	439	441	100.00	611,404,000	611,246,065	99.97

Lampiran 9
REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN BESERTA CAPAIANNYA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2025

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
16	3165.QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	948	949	100.00	756,456,000	755,697,602	99.90
17	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	37	37	100.00	67,938,000	67,919,300	99.97
18	3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	1	100.00	680,000	680,000	100.00
19	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	677	687	100.00	844,421,000	844,325,671	99.99
20	3165.RAB.001 Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	100.00	9,902,865,000	9,901,818,210	99.99
21	6384.EBA.956 Layanan BMN	1	1	100.00	340,000	340,000	100.00
22	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	100.00	9,724,822,000	9,718,271,427	99.93

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
	Balai Besar POM di Samarinda	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Balai Besar POM di Samarinda	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari		86.25	73.82	96.84	98.00	84.15	88.20		
	Balai Besar POM di Samarinda	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret		86.25	64.73	94.19	93.59	82.12	83.66		
	Balai Besar POM di Samarinda	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April		86.25	76.83	96.44	94.40	96.09	90.94		
	Balai Besar POM di Samarinda	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei		86.25	86.00	96.59	95.76	95.40	93.44		
	Balai Besar POM di Samarinda	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni		86.25	98.93	97.57	97.61	99.53	98.41		
	Balai Besar POM di Samarinda	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli		86.25	99.69	98.53	96.12	97.39	97.93		
	Balai Besar POM di Samarinda	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus		90.75	96.99	99.09	97.44	96.35	97.47		
	Balai Besar POM di Samarinda	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September		90.75	96.94	99.09	98.42	96.91	97.84		
	Balai Besar POM di Samarinda	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober		90.75	95.25	99.14	98.22	97.44	97.51		
	Balai Besar POM di Samarinda	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November		90.75	97.09	99.72	98.90	98.49	98.55		
	Balai Besar POM di Samarinda	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember		90.75	98.63	99.73	98.90	98.28	98.89		

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)
	Balai Besar POM di San	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOI	Januari			0.00	#DIV/0!
	Balai Besar POM di San	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOI	Februari			0.00	#DIV/0!
	Balai Besar POM di San	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOI	Maret			0.00	#DIV/0!
	Balai Besar POM di San	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOI	April		2.00	45.00	4.44
	Balai Besar POM di San	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOI	Mei		4.00	45.00	8.89
	Balai Besar POM di San	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOI	Juni		6.00	45.00	13.33
	Balai Besar POM di San	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOI	Juli		6.00	45.00	13.33
	Balai Besar POM di San	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOI	Agustus		6.00	45.00	13.33
	Balai Besar POM di San	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOI	September		7.00	45.00	15.56
	Balai Besar POM di San	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOI	Oktober		9.00	45.00	20.00
	Balai Besar POM di San	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOI	November		12.00	45.00	26.67
	Balai Besar POM di San	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOI	Desember	26.00	12.00	45.00	26.67

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
	Balai Besar POM di Samarinda	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	9.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	90.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	33.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	11.11	100.00	91.11		
	Balai Besar POM di Samarinda	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	95.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	38.46	100.00	93.85		
	Balai Besar POM di Samarinda	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	140.00	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	15.63	100.00	91.56		
	Balai Besar POM di Samarinda	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	195.00	85.00	100.00	100.00	100.00	98.98	4.63	100.00	90.36		
	Balai Besar POM di Samarinda	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	252.00	85.00	82.78	100.00	100.00	100.00	3.16	100.00	86.87		
	Balai Besar POM di Samarinda	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	312.00	91.00	86.88	100.00	100.00	100.00	10.75	100.00	88.45		
	Balai Besar POM di Samarinda	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	370.00	91.00	85.64	100.00	100.00	100.00	47.49	100.00	91.88		
	Balai Besar POM di Samarinda	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	399.00	91.00	90.45	100.00	100.00	100.00	45.52	100.00	92.64		
	Balai Besar POM di Samarinda	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	403.00	91.00	92.49	100.00	100.00	100.00	52.52	100.00	93.75		
	Balai Besar POM di Samarinda	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	404.00	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00	48.77	100.00	94.88		

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

FORM PENILAIAN MANDIRI PENGUJIAN PRODUK PANGAN DUGAAN KLB KERACUNAN PANGAN

BALAI BESAR POM DI SAMARINDA

PERIODE	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan) Cara Perhitungan A : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM Cara Perhitungan B: Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%				Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP Cara Perhitungan C : Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%				REALISASI NILAI AKHIR (m=d+h+l)	TARGET INDIKATOR (n)	CAPAIAN (o= rata-rata m)	CAPAIAN KUMULATIF
	Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c=(a/b *100%))	Nilai (d= c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g=(c/d *100))	Nilai (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k=(i/j *100%))	Nilai (l = k*35%)				
Januari																	
Februari	Air Minum Arco UT	3	3	100%	30%	3	3	100%	35%	0	0	100%	35%	100%	100%	**100%**	**100%**
	Air Bahan Baku Arco MTZ	3	3	100%	30%	3	3	100%	35%	0	0	100%	35%	100%			
Maret																	
April																	
Mei																	
Juni	Nasi	2	2	100%	30%	0	0	100%	35%	0	0	100%	35%	100%	100%	100%	**100%**
	Mie goreng	2	2	100%	30%	0	0	100%	35%	1	1	100%	35%	100%			
	Telur Rebus	4	4	100%	30%	0	0	100%	35%	2	2	100%	35%	100%			
Juli																	
Agustus																	
September	Ice Cream Joyday	7	7	100%	30%	1	10	10%	4%	0	0	100%	35%	69%	100%	96%	96%
	nasi kuning, mie, ayam, sambel	4	4	100%	30%	0	0	100%	35%	2	2	100%	35%	100%			
	nasi putih, ayam, mie, sambel	4	4	100%	30%	0	0	100%	35%	2	2	100%	35%	100%			
Oktober	Soto	5	5	100%	30%	0	0	100%	35%	5	5	100%	35%	100%	100%	97.14%	97.14%
	Donat	5	5	100%	30%	0	0	100%	35%	1	1	100%	35%	100%			
	Nasi Putih Sayur Sop Rollade Daging Tahu Goreng	4	4	100%	30%	0	0	100%	35%	3	3	100%	35%	100%			
November																	
Desember																	

Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
	Balai Besar POM di Samarinda	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Target efisiensi sebanyak 25 sampel dari target awal 35 sampel. Sampel disampling akhir januari, diuji di bulan februari	
	Balai Besar POM di Samarinda	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	85.00	0.86	100.00	100.00	71.43	0.00	100.00	67.31		
	Balai Besar POM di Samarinda	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85.00	0.86	100.00	100.00	71.43	68.57	100.00	74.17		
	Balai Besar POM di Samarinda	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	85.00	85.71	100.00	100.00	71.43	71.43	100.00	91.43		
	Balai Besar POM di Samarinda	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	85.00	100.00	100.00	100.00	71.43	71.43	100.00	94.29		
	Balai Besar POM di Samarinda	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	85.00	100.00	100.00	100.00	71.43	71.43	100.00	94.29		
	Balai Besar POM di Samarinda	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	85.00	100.00	100.00	100.00	71.43	71.43	100.00	94.29		
	Balai Besar POM di Samarinda	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	91.00	100.00	100.00	100.00	71.43	71.43	100.00	94.29		
	Balai Besar POM di Samarinda	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	91.00	100.00	100.00	100.00	71.43	71.43	100.00	94.29		
	Balai Besar POM di Samarinda	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	91.00	100.00	100.00	100.00	71.43	71.43	100.00	94.29		
	Balai Besar POM di Samarinda	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	91.00	100.00	100.00	100.00	71.43	71.43	100.00	94.29		
	Balai Besar POM di Samarinda	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	91.00	100.00	100.00	100.00	71.43	71.43	100.00	94.29		

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
	Balai Besar POM di Samarinda	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari		45.45	#DIV/0!	45.45		
	Balai Besar POM di Samarinda	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	30.00	57.69	#REF!	57.69		
	Balai Besar POM di Samarinda	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	38.00	49.04	#DIV/0!	49.04		
	Balai Besar POM di Samarinda	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	40.00	49.44	33.33	41.39		
	Balai Besar POM di Samarinda	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	45.00	50.46	66.67	58.56		
	Balai Besar POM di Samarinda	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni	50.00	52.00	66.67	59.33		
	Balai Besar POM di Samarinda	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juli	55.00	47.81	100.00	73.91		
	Balai Besar POM di Samarinda	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Agustus	80.60	56.90	100.00	78.45		
	Balai Besar POM di Samarinda	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	September	80.60	65.58	100.00	82.79		
	Balai Besar POM di Samarinda	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Oktober	80.60	68.83	100.00	84.42		
	Balai Besar POM di Samarinda	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	November	80.60	62.24	100.00	81.12		
	Balai Besar POM di Samarinda	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Desember	80.60	63.38	100.00	81.69		

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	93.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	93.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	93.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	100.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	93.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	93.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	93.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	95.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	95.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	95.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	95.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	95.00	#DIV/0!	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00		

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
	Balai Besar POM di Samarinda	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	80.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Balai Besar POM di Samarinda	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	80.00	1.00	2.00	50.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	83.33		
	Balai Besar POM di Samarinda	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	80.00	4.00	5.00	80.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	93.33		
	Balai Besar POM di Samarinda	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	80.00	5.00	6.00	83.33	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	94.44		
	Balai Besar POM di Samarinda	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	80.00	5.00	6.00	83.33	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	94.44		
	Balai Besar POM di Samarinda	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	80.00	6.00	7.00	85.71	7.00	7.00	100.00	7.00	7.00	100.00	95.24		
	Balai Besar POM di Samarinda	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	80.00	9.00	10.00	90.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	96.67		
	Balai Besar POM di Samarinda	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	85.00	10.00	11.00	90.91	10.00	11.00	90.91	11.00	11.00	100.00	93.94		
	Balai Besar POM di Samarinda	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	85.00	14.00	15.00	93.33	14.00	15.00	93.33	15.00	15.00	100.00	95.56		
	Balai Besar POM di Samarinda	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	85.00	17.00	18.00	94.44	17.00	18.00	94.44	18.00	18.00	100.00	96.30		
	Balai Besar POM di Samarinda	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	85.00	22.00	23.00	95.65	22.00	23.00	95.65	23.00	23.00	100.00	97.10		
	Balai Besar POM di Samarinda	8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	85.00	26.00	27.00	96.30	26.00	27.00	96.30	27.00	27.00	100.00	97.53		

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	97.00	93.75	100.00	100.00	#DIV/0!	97.92
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	97.00	97.37	95.83	100.00	100.00	98.30
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	97.00	98.81	95.83	93.18	100.00	96.96
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	97.00	98.18	95.83	93.18	99.17	96.59
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	97.00	96.00	95.00	94.23	97.86	95.77
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	97.00	96.94	96.88	96.05	98.24	97.03
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	97.00	97.62	97.32	96.25	98.39	97.39
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	96.75	98.01	97.58	97.12	98.86	97.89
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	96.75	98.28	97.92	97.50	99.09	98.20
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	96.75	98.48	98.75	97.73	99.18	98.53
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	96.75	98.65	98.75	97.92	99.28	98.65
	Balai Besar POM di Samarinda	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	96.75	98.94	98.75	97.97	99.32	98.74

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
	Balai Besar POM di Samarinda	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	80	7	7	20.00	7	7	70.00	7	7	10.00	100.00
	Balai Besar POM di Samarinda	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	80	21	21	20.00	21	21	70.00	21	21	10.00	100.00
	Balai Besar POM di Samarinda	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	80	52	52	20.00	52	52	70.00	50	52	9.62	99.62
	Balai Besar POM di Samarinda	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	80	58	58	20.00	58	58	70.00	56	58	9.66	99.66
	Balai Besar POM di Samarinda	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Mei	80	72	72	20.00	72	72	70.00	69	72	9.58	99.58
	Balai Besar POM di Samarinda	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juni	80	79	79	20.00	79	79	70.00	76	79	9.62	99.62
	Balai Besar POM di Samarinda	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juli	80	86	86	20.00	86	86	70.00	86	86	10.00	100.00
	Balai Besar POM di Samarinda	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Agustus	91	87	87	20.00	87	87	70.00	87	87	10.00	100.00
	Balai Besar POM di Samarinda	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	September	91	88	88	20.00	88	88	70.00	88	88	10.00	100.00
	Balai Besar POM di Samarinda	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Oktober	91	88	88	20.00	88	88	70.00	88	88	10.00	100.00
	Balai Besar POM di Samarinda	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	November	91	88	88	20.00	88	88	70.00	88	88	10.00	100.00
	Balai Besar POM di Samarinda	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Desember	91	88	83	20.00	88	88	70.00	88	88	10.00	100.00

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
23A	Balai Besar POM di Samarinda	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	85.53	#DIV/0!	#N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
23A	Balai Besar POM di Samarinda	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	85.53	100.00	97.92	98.33	100.00	97.40	98.73
23A	Balai Besar POM di Samarinda	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	85.53	100.00	98.25	96.97	100.00	96.44	98.33
23A	Balai Besar POM di Samarinda	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	85.53	100.00	95.70	97.50	100.00	94.93	97.63
23A	Balai Besar POM di Samarinda	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	85.53	82.86	98.05	98.08	100.00	95.44	94.89
23A	Balai Besar POM di Samarinda	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	85.53	100.00	99.08	98.36	100.00	98.41	99.17
23A	Balai Besar POM di Samarinda	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli	85.53	100.00	97.22	98.51	100.00	98.46	98.84
23A	Balai Besar POM di Samarinda	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus	90.93	96.88	98.18	96.40	98.92	97.34	97.54
23A	Balai Besar POM di Samarinda	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September	90.93	100.00	98.84	97.22	98.04	97.85	98.39
23A	Balai Besar POM di Samarinda	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober	90.93	100.00	98.92	97.69	98.20	98.12	98.59
23A	Balai Besar POM di Samarinda	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November	90.93	93.55	98.19	97.39	97.37	98.72	97.04
23A	Balai Besar POM di Samarinda	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember	90.93	100.00	99.02	97.22	97.62	98.67	98.51

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
	BBPOM di Samarinda	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Januari		-	-	-		
	BBPOM di Samarinda	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Februari		-	-	-		
	BBPOM di Samarinda	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Maret		-	-	-		
	BBPOM di Samarinda	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	April		-	-	-		
	BBPOM di Samarinda	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Mei		-	-	-		
	BBPOM di Samarinda	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Juni		-	-	-		
	BBPOM di Samarinda	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Juli		-	-	-		
	BBPOM di Samarinda	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Agustus	80.00	68.38	56.62	62.50	renlak dan monev belum tersedia	membuat renlak dan melakukan monev secara berkala
	BBPOM di Samarinda	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	September	80.00	85.62	75.16	80.39	renlak belum berjalan dengan baik	monev berkala
	BBPOM di Samarinda	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Oktober	80.00	100.00	95.29	97.65	tidak ada kendala	monev berkala
	BBPOM di Samarinda	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	November	80.00	99.47	90.91	95.19		
	BBPOM di Samarinda	29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Desember	80.00	100.00	92.16	96.08		

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Bimtek (B) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Advokasi (C) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Publikasi (D) (Bobot 25%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	April	-	-	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	September	-	-	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	November	-	-	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR	Desember		122.59	100.00	100.00	100.00	105.65	-	-

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN
STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Kerja : Balai Besar POM di Samarinda
Triwulan/Tahun : 4/2025
Tanggal Penilaian : 23 Desember 2025
Nama Tim Penilai : 1. Nurul Hidayati, S.Si., M.Si
2. Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Hasil Penilaian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	79.1	72.7	70.9	102.5
2.	Standar Peralatan	82.3			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	70.0			
4.	Standar Metode Terverifikasi	26.6			

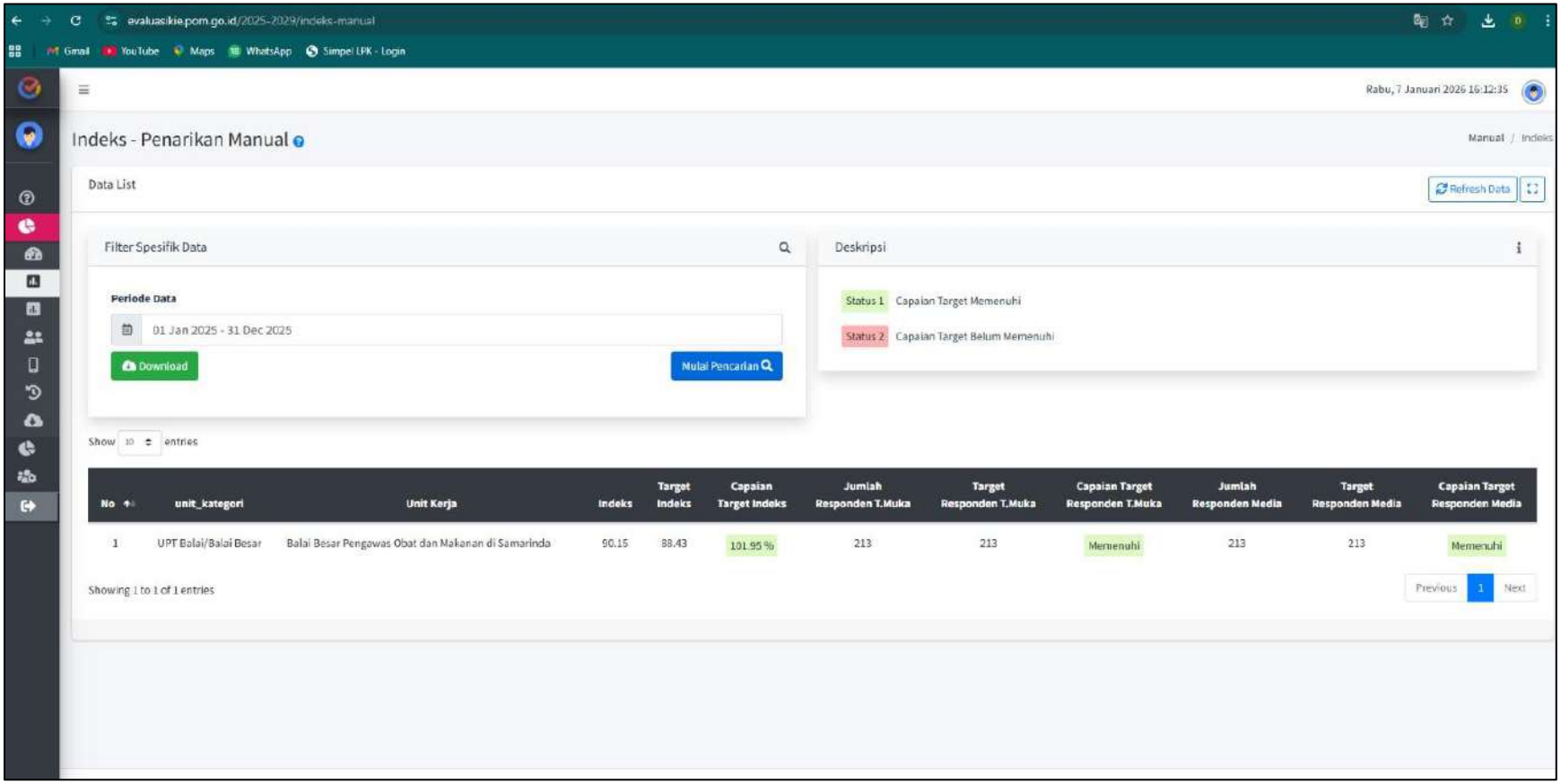
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Januari	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Februari	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Maret	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	April	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Mei	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Juni	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Juli	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Agustus	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	September	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Oktober	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	November	-	-	-	-	-	-
	BBPOM di Samarinda	30	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota	Desember	14.29	1.00	7.00	14.29		

Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif	Kendala	RTL
	Balai Besar POM di Samarinda	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0	0	0	#DIV/0!		Sarana Produksi Fortifikasi hanya ada 1 saja (Garam) di Provinsi Kaltim
	Balai Besar POM di Samarinda	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	0	0	0	#DIV/0!		
	Balai Besar POM di Samarinda	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	0	0	0	#DIV/0!		
	Balai Besar POM di Samarinda	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	0	0	0	#DIV/0!		
	Balai Besar POM di Samarinda	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	100	0	0	#DIV/0!	perubahan Perencanaan digeser di bulan Juni 2025	
	Balai Besar POM di Samarinda	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	100	1	1	100.00	Tidak ada kendala	
	Balai Besar POM di Samarinda	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	100	1	1	100.00	Tidak ada kendala	
	Balai Besar POM di Samarinda	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	100	1	1	100.00	Tidak ada kendala	
	Balai Besar POM di Samarinda	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	100	1	1	100.00	Tidak ada kendala	
	Balai Besar POM di Samarinda	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	100	1	1	100.00	Tidak ada kendala	
	Balai Besar POM di Samarinda	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	100	1	1	100.00	Tidak ada kendala	
	Balai Besar POM di Samarinda	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	100	1	1	100.00	Tidak ada kendala	

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT



Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah (25%)	Sosialisasi Keamanan Pangan (20%)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (25%)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (25%)	Pengawalan (5%)	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kendala	RTL
1000	Balai Besar POM di Samarinda	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April	25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Mei	60	25.00	15.00	20.00	0.00	0.00	60.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juni	70	25.00	20.00	25.00	0.00	0.00	70.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juli	95	25.00	20.00	25.00	5.00	0.00	75.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Agustus	95	25.00	20.00	25.00	5.00	0.00	75.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	September	95	25.00	20.00	25.00	25.00	0.00	95.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Oktober	100	25.00	20.00	25.00	25.00	0.00	95.00	10		
1000	Balai Besar POM di Samarinda	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	November	100	25.00	20.00	25.00	25.00	5.00	100.00	10	Tidak ada kendala	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Desember	10	25.00	20.00	25.00	25.00	5.00	100.00	10		

Jumlah desa pangan aman

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi (25%)	Pelatihan kader (25%)	Bimtek komunitas (20%)	Monev (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL
1000	Balai Besar POM di Samarinda	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0	5.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	16	Jumlah Desa Pangan Aman	April	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0	25.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	40.00	25.00	20.00	0.00	0.00	0	45.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	50.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0	50.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	55.00	25.00	25.00	5.00	0.00	0	55.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	60.00	25.00	25.00	20.00	0.00	0	70.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	16	Jumlah Desa Pangan Aman	September	70.00	25.00	25.00	20.00	0.00	0	70.00			
1000	Balai Besar POM di Samarinda	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	85.00	25.00	25.00	20.00	20.00	0	90.00	4	Tidak ada kendala	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	16	Jumlah Desa Pangan Aman	November	100.00	25.00	25.00	20.00	20.00	10	100.00		Tidak ada kendala	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	4.00	25.00	25.00	20.00	20.00	10	100.00	4		

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 2025

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar (25%)	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar (25%)	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar (20%)	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL
100	Balai Besar POM di Samarinda	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	0						0.00			
100	Balai Besar POM di Samarinda	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	0						0.00			
100	Balai Besar POM di Samarinda	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
100	Balai Besar POM di Samarinda	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00			
100	Balai Besar POM di Samarinda	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	60	25.00	20.00	15.00	0.00	0.00	60.00			
100	Balai Besar POM di Samarinda	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	70	25.00	25.00	20.00	0.00	0.00	70.00			
100	Balai Besar POM di Samarinda	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	70	25.00	25.00	20.00	0.00	0.00	70.00			
100	Balai Besar POM di Samarinda	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	90	25.00	25.00	20.00	20.00	0.00	90.00			
100	Balai Besar POM di Samarinda	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	90	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00			
100	Balai Besar POM di Samarinda	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Oktober	90	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00			
100	Balai Besar POM di Samarinda	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	November	90	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00			
100	Balai Besar POM di Samarinda	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Desember	1	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00	1.00		

Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan_atau IP-CPPOB

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	3.25	0.00	0.00	30.00	1.88	16	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	11.25	60.00	10.00	30.00	6.25	16	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	31	540.00	30.00	110.00	42.50	16	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	April	45.25	605.00	36.67	130.00	48.23	16	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Mei	49.5	665.00	43.34	150.00	53.65	16	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juni	54	735.00	50.01	170.00	59.69	16	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juli	58.25	780.00	56.68	210.00	65.42	16	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Agustus	64.25	785.00	63.35	230.00	67.40	16	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	September	70.25	785.00	80.00	260.00	70.31	16	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Oktober	76.25	1070.00	80.00	270.00	88.75	16	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	November	78	1175.00	80.00	270.00	95.31	16	
1000	Balai Besar POM di Samarinda	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	**Desember**	15.96	12.00	1.00	2.00	15.96	94.00	Diisi jumlah target UMKM selama 5 tahun

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
	Balai Besar POM di Samarinda	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Januari	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Februari	5	0	1	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	5	0	1	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	April	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.85	0	0	0	17.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mei	5	0	3	0	0.45	0	0	0	0	0	0	1	0	1	29.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	5	0	0	0	0	3	0	1.65	0	0	0	1	0	1	53.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juli	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.85	3	0	3	77.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Agustus	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	80.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	September	5	0	1	0	0.15	0	0	0	0	0	0	4	0	4	83.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Oktober	5	0	0	0	0	1	0	0.55	0	0	0	4	0	4	91.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	November	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	100.00		
	Balai Besar POM di Samarinda	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Desember	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	100.00		

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

B. Kertas Kerja Perhitungan

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber Bobot 50%	Nilai Kualitas Analisis Bobot 25%	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Bobot 25%	
1	BBPOM Banda Aceh	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
2	BBPOM Bandar Lampung	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
3	BBPOM Bandung	100	96	66,67	50,00	24,00	16,67	**90,67**
4	BBPOM Banjarbaru	91,67	92	100,00	45,84	23,00	25,00	**93,84**
5	BBPOM Denpasar	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
6	BBPOM Gorontalo	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
7	BBPOM Jakarta	91,67	100	91,67	45,84	25,00	22,92	**93,75**
8	BBPOM Jayapura	95,83	100	44,44	47,92	25,00	11,11	**84,03**
9	BBPOM Kupang	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
10	BBPOM Makassar	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
11	BBPOM Manado	95,83	100	88,89	47,92	25,00	22,22	**95,14**
12	BBPOM Mataram	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
13	BBPOM Medan	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
14	BBPOM Padang	100	80	100,00	50,00	20,00	25,00	**95,00**
15	BBPOM Palangka Raya	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
16	BBPOM Palembang	100	76	100,00	50,00	19,00	25,00	**94,00**
17	BBPOM Pekanbaru	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	BBPOM Samarinda	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indeks Pelayanan Publik UPT

BERITA ACARA
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR POM DI SAMARINDA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

Pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami Tim Penilai Kinerja UPP BPOM, berdasarkan hasil penilaian menyatakan sebagai berikut:

A. Indeks Pelayanan Publik : 4.9/A (Pelayanan Prima)

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pelayanan	1.a.Ak	kedepan agar format laporan FKP menyesuaikan https://bit.ly/TempalteLaporanFKPBPOM
		6.a.B	untuk perbaikan kedepan, dalam rangka menindaklanjuti aspek U6 (kompetensi pelaksana) dimana dilakukan Peningkatan Kompetensi petugas, agar dielaborasi kembali pelatihan apa saja yang sebenarnya dibutuhkan personel perempuan-laki-laki, tua/muda dsb, dan selanjutnya spreadsheet daftar pelatihan diupdate sesuai waktu terkini, agar selaras bahwa pelatihan dilakukan sebagai tindak lanjut dari SKM tahun berjalan
2	Profesionalisme SDM	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
3	Sarana Prasarana	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	24.d.T	Untuk perbaikan kedepan, pada semester 2 ini agar dilakukan analisis/evaluasi untuk melihat adanya kesenjangan akses, sehingga kedepan diharapkan informasi yang disampaikan di subsite akan lebih kaya lagi dan bermanfaat bagi seluruh segmen masyarakat di Kalimantan Timur, serta lebih sering dilakukan pengunggahan di subsite, sehingga harapannya tahun depan sejak januari pun di setiap hari kerja ada informasi yang update.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
5	Konsultasi dan Pengaduan	28.e.Ak	Kedepan, agar dapat lebih melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat lebih memanfaatkan SP4N Lapor untuk pengaduan
6	Inovasi	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	

Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	Komponen Pengungkit		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,28	4,00	7,28	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	3,00	3,00	6,00	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,48	4,25	8,73	MS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

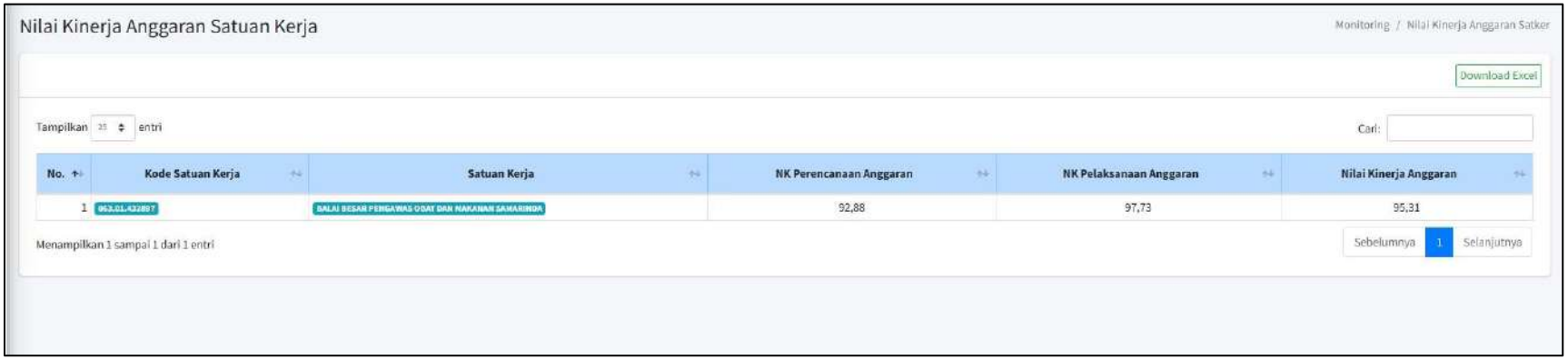
PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,01	4,09	8,10	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	5,44	6,88	12,32	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,68	4,17	8,85	MS
TOTAL PENGUNGKIT						51,28	
B.	Komponen Hasil		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			19,78	
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,28	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			2,50	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,98	
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,98	MS
TOTAL HASIL						36,76	
NILAI PMPZI						88,04	

Nilai AKIP UPT BPOM

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16	0,00
2.	Pengukuran Kinerja	24	20,16	20,16	0,00
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,72	10,08	+0,36
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,80	16,80	0,00
5.	Capaian Kinerja	20	16,67	15,06	-1,61
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**83,51**	**82,26**	**-1,25**
Predikat			**A**	**A**	**Tetap**

Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM



Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2025

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	**55,00**	**56,00**	**1,00**
Nilai Maturitas	**3,438**	**3,500**	**0,062**
Tingkat Maturitas	*Risk Defined*	*Risk Defined*	


JL. LET. JEND.SOEPRAPTO NO.3 SAMARINDA